

**NELAYAN PULAU KECIL
DAN
KAPITALISME**

deepublish / publisher

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggunaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

NELAYAN PULAU KECIL DAN KAPITALISME

Dr. Andi Adri Arief, S.Pi., M.Si.

 **deepublish**
glorify and develop the intellectual of human's life

NELAYAN PULAU KECIL DAN KAPITALISME

Andi Adri Arief

Desain Cover :
Rulie Gunadi

Sumber :
www.shutterstock.com

Tata Letak :
Titis Yuliyanti

Proofreader :
Avinda Yuda Wati

Ukuran :
x, 216 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :
No ISBN

Cetakan Pertama :
Bulan 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2020 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: cs@deepublish.co.id

Kata Pengantar Penerbit

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya, maka buku yang berjudul *Nelayan Pulau Kecil dan Kapitalisme* ini dapat diterbitkan. Sebagai penerbit yang sejak semula lebih mengutamakan perannya untuk mencerdaskan dan memuliakan umat manusia, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, Penerbit Deepublish selalu memberi ruang bagi siapapun untuk secara kreatif dan dengan inovasi menuliskan dan menyampaikan gagasan dan nilai-nilai untuk ikut membantu upaya tersebut.

Melalui buku ini, Dr. Andi Adri Arief, S.Pi., M.Si. bermaksud memberi kontribusi analisis yang menjadikan pulau-pulau kecil sebagai kajian spesifik yang membedakan karya-karya sebelumnya. Buku ini dibagi menjadi 6 bab yang mencakup beberapa pokok bahasan, seperti sembilan pulau, motorisasi dan formasi sosialartikulasi modernisasi dalam formasi sosial masyarakat, konteks nilai, etos lokal dan formasi sosial, serta refleksi teori.

Terima kasih dan penghargaan terbesar bagi penulis yang telah memberikan perhatian, kepercayaan, dan kontribusi demi kesempurnaan buku ini. Semoga buku ini dapat memperkaya khazanah dan memberi manfaat bagi para pembaca.

Hormat Kami,

Penerbit Deepublish

Pengantar Penulis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., karena rahmat dan hidayah-Nya, buku ini dapat saya persembahkan kepada pembaca yang budiman. Gagasan utama yang melatarbelakangi diangkatnya permasalahan ini adalah dijadikannya matra laut sebagai pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia, namun kondisi realistis yang terjadi bahwa sampai saat ini tingkat kesejahteraan nelayan khususnya nelayan *grassroot (common people)* masih berada pada tingkat yang subsistensi. Modernisasi perikanan sebagai salah satu strategi pembangunan yang sejatinya untuk kepentingan nelayan tradisional justru faktanya malah sebaliknya dalam dinamikaformasi sosialnelayan.

Substansi persoalan dalam buku ini berfokus pada dialektika nelayan lokal terhadap penetrasi pola kapitalisme melalui dinamika perubahan sosial komunitas nelayan pulau kecil. Penetrasi kapital (modal dan teknologi) dianalisis sebagai stimulan dalam mengonstruksi formasi sosial dalam masyarakat, sedangkan koeksistensi antar cara produksi yang dipengaruhi kontekstual tingkat lokal dianalisis sebagai artikulasi modernisasi dalam konteks perkembangan formasi sosial baru. Nilai budaya dan etos kerja lokal dianalisis sebagai determinan dari berlangsungnya keseluruhan dinamika. Redefinisi kapitalis dalam komunitas merupakan upaya saya menyuguhkan hasil pendekatan yang membuka ruang untuk direflesi dan diskusikan dalam perspektif Schumpeterian (jalur *revisionism*) tentang perombakan dominasi

kapitalisme serta kajian kasuistik yang berteori dalam mendorong reaksi baru nelayan lokal dalam peleburannya pada pola-pola kapitalisme sebagai sebuah keniscayaan.

Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga terkasih: Ibunda Hj. Siti Naderah dan Ayahanda H. Andi Arief Pallampa, B.A. (alm); istri, Dr. Hj. Harnita Agusanty, S.Pi., M.Si, dan anak-anak saya, Andi Calista Beby Riadni Pallampa, Andi Muhammad Daffa Komuna Pallampa, atas segala spirit, kasih sayang, pengertian dan bantuan yang memungkinkan saya dapat menjalani dengan baik proses kreatif sebagai seorang akademisi dan pengabdian terhadap komunitas nelayan pulau kecil.

Tentu saja buku ini tidak menyimpan sebuah kesempurnaan yang sesungguhnya tentang hakikat sebuah karya akademis. Kritik dan saran secara konstruktif sangat terbuka saya nantikan untuk menyempurnakan gagasan-gagasan yang telah saya persembahkan ke ranah publik, sehingga dapat menjadi konsep yang berharga sebagai bahan untuk menulis buku-buku referensi berikutnya tentang komunitas nelayan atau masyarakat pesisir dan pulau kecil. Semoga buku ini bermanfaat bagi kalangan akademisi, praktisi sosial, *advocator* rakyat, dan para penentu kebijakan pembangunan sosial ekonomi masyarakat di kawasan pesisir dan pulau kecil. Akhirnya, segala puji bagi Allah Swt., Tuhan Yang Mahakuasa saya ucapkan terima kasih.

Makassar, Agustus 2021

Andi Adri Arief

Daftar Isi

Kata Pengantar Penerbit.....	v
Pengantar Penulis	vi
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang.....	1
Konteks Kajian	5
Kerangka Konseptual.....	6
Kerangka Analisis.....	10
Sistematika Buku Ini.....	11
BAB II SEMILAN PULAU	13
Lautan yang Ditumbuhi Daratan.....	13
Pulau Kambuno dalam Realitas	18
Lingkungan Sosiokultur Komunitas	20
BAB III MODERNISASI PERIKANAN DAN DINAMIKA	
 FORMASI SOSIAL.....	38
Kekuatan Awal Modernisasi Perikanan.....	38
Perubahan Formasi Sosial dalam Periodisasi	47
BAB IV ARTIKULASI MODERNISASI DALAM	
 FORMASI SOSIAL MASYARAKAT	131
Periode 1970–1980: Geliat Kapitalisme terhadap	
Tradisi Lama	132
Periode 1980-1990: Garis Batas dalam Formasi Sosial.....	141

Periode 1990–Sekarang: Peleburan Nelayan dalam Pola Kapitalisme.....	149
BAB V KONTEKS NILAI, ETOS LOKAL DAN FORMASI SOSIAL BARU	156
Naluri Meniru pada Makna Lama	157
Pasrah dan Menurut pada Perubahan.....	167
BAB VI REDEFINISI KAPITALISME DALAM KOMUNITAS.....	175
Narasi Kecil Membongkar Dominasi Kapitalisme dalam Perspektif Schumpeterian	175
Mendorong Reaksi Baru Nelayan Lokal terhadap Kapitalisme.....	179
EPILOG	185
Daftar Pustaka.....	188
Indeks	204
Biodata Penulis	214

deepublish / publisher

x

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Modernisasi perikanan melalui revolusi biru yang berkembang sejak tahun 1970-an merupakan konsekuensi logis dari paradigma modernisasi di mana pembangunan dianggap sebagai upaya untuk mengubah masyarakat tradisional menuju modern. Karena asumsi dari paradigma ini dalam melihat masyarakat tradisional adalah merupakan masyarakat yang masih terbelakang dalam pengetahuan, teknologi maupun pola pikir maka kegiatan untuk memajukan kehidupan mereka ke arah yang lebih baik (modern) diperlukan adanya upaya intervensi dari pihak luar seperti negara ataupun pihak lain untuk melakukan akselerasi perubahan masyarakat dari masyarakat yang bercirikan tradisional menjadi masyarakat modern (Rostow, 1973; Bendix, 1985; Schoorl, 1991; Sanderson, 1993).

Studi tentang relevansi yang menunjukkan adanya pengaruh modernisasi terhadap perubahan struktur sosialmasyarakat telah banyak dipublikasikan. Namun studi-studi tersebut, kebanyakan masih bertumpu pada kasus masyarakat pertanian padi-sawah atau pesisir pantai, seperti yang dilakukan Hayami dan Kikuchi (1987), Frans Huskens (1998), Collier et al. (1996), Satria (2001), Agusanty (2002), Salman (2006) dan lainnya. Dari berbagai studi itu, belum ada yang berfokus pada masyarakat

pulau-pulau kecil sebagai entitas yang juga mengalami modernisasi di dalam kegiatan produksinya.

Buku ini bermaksud memberi kontribusi analisis yang menjadikan pulau-pulau kecil sebagai kajian spesifik yang membedakan karya-karya sebelumnya. Implikasi modernisasi perikanan dalam kehidupan masyarakat nelayan dapat digambarkan baik secara makro maupun mikro. Secara makro, sebelum program modernisasi diluncurkan nelayan belum terlalu terstratifikasi, karena pola produksinya masih bersifat homogen. Dasar stratifikasi masih sebatas penguasaan alat produksi berupa alat penangkapan dan perahu. Masyarakat nelayan hanya terdiri dua lapisan, yakni; lapisan yang menguasai alat produksi berupa perahu dan alat tangkap tradisional (*punggaha*) dan *sahi* (lapisan yang tidak menguasai alat produksi dan bekerja pada *punggaha*)¹. Sistem produksi bersifat subsisten dan pola hubungan yang egaliter. Setelah program modernisasi perikanan digulirkan, terjadi perubahan pada struktur sosialmasyarakat. Profesi-profesi (*vocations*) baru muncul akibat tumbuhnya industri pengolahan perikanan (*cold stroge*), industri pengasinan, industri perbengkelan perahu, pasar perikanan (tempat pelelangan ikan). Kelembagaan kerja usaha penangkapan juga terspesialisasikan. Perubahan sistem produksi dari subsisten menjadi tata produksi yang bersifat komersial maupun kapitalis ikut terstrukturisasikan dalam kegiatan produksi sebagai penyesuaian meningkatnya teknologi yang dipergunakan.

Pada analisis mikro, modernisasi perikanan menciptakan konfigurasi cara produksi (*mode of production*) dalam formasi sosial (*social formation*) masyarakat, berupa hadirnya dua atau lebih cara produksi secara bersamaan dan salah satu cara produksi mendominasi cara lainnya

¹ Istilah ini menurut dialek orang-orang Bugis Sinjai, namun istilah *punggaha* dijumpai pula dalam berbagai bahasa dan dialek pada suku-suku yang ada di Sulawesi Selatan misalnya, *pongawa* (Bugis), *punggawa* (Mandar), *punggaha* atau *pungkaha* (Selayar dan daerah-daerah perbatasan antara Makassar dengan Bugis dan sebagainya). Demikian pula dengan istilah *sahi* yang hampir pada umumnya menyebutnya dengan istilah *sawi* (Sallatang, 1983). Tentunya memiliki karakteristik tersendiri dalam dinamika formasi sosial yang terjadi dalam cara berproduksi (*mode of production*) dan hubungan produksi (*relations of production*) akibat modernisasi perikanan yang berlangsung.

(Budiman, 1995). Konsep pokok cara produksi atau cara berproduksi (*mode of production*) merupakan kekuatan produksi dari gabungan alat produksi (*means of production*) dan hubungan-hubungan produksi (*relation of production*). Menurut Khan (1975), cara produksi akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi lingkup sosial yang lebih besar, bervariasi mengikuti *a particular set of historical conditions*; maka bervariasi mengikuti interaksi dengan cara produksi lain yang peredarannya lebih dominan. Formasi sosial yang terbentuk mengalami suatu artikulasi cara produksi dalam arti terjadinya koeksistensi ciri kapitalisme dan prakapitalisme yang dipengaruhi oleh suatu konteks budaya berdasarkan karakteristik daerah atau wilayah (Taylor, 1979). Atas dasar proposisi ini, maka asumsi yang terbangun bahwa kondisi nelayan pulau-pulau kecil yang jauh pengaruhnya dari daratan

Sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*), Indonesia memiliki jumlah pulau sebanyak 17.508 buah dan mempunyai garis pantai terpanjang di dunia (setelah Canada), yaitu 95.181 km. Namun penduduknya hanya akrab (mengenal) dengan lima pulau besar saja (Pulau Sumatra, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Pulau Papua) sementara ribuan pulau kecil lainnya tidak lagi menjadi perhatian untuk diketahui atau sekadar diingat akan keberadaannya. Penamaan pulau-pulau kecil sebagai “pulau terluar” (bukan terdepan) juga semakin menambah deretan ironis yang terjadi akan kesan terlupakan dan termarginalkan dari berbagai dimensi (sosial, ekonomi dan budaya), padahal kawasan pulau-pulau kecil memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan Indonesia di masa kini dan yang akan datang. Kawasan ini secara ekologi menyediakan sumber daya alam yang sangat produktif seperti terumbu karang, padang lamun (*seagrass*), hutan *mangrove*, perikanan dan kawasan konservasi. Pulau-pulau kecil juga memberikan jasa lingkungan (*non ekstraktif*) yang besar karena keindahan alam yang dimilikinya sehingga dapat menggerakkan industri pariwisata bahari.

Salah satu wilayah yang menjadikan sektor perikanan dan kelautan sebagai sektor andalan dalam pertumbuhan ekonominya adalah Sulawesi

Selatan yang terdiri dari empat suku bangsa yaitu: Suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Terdapat 354.007 jiwa merupakan nelayan dan 121.895 jiwa adalah petani ikan. Dengan panjang garis pantai 2.500 km. Pulau-pulau kecil sebanyak 313 buah, 126 pulau di antaranya adalah pulau yang berpenghuni dan 187 pulau yang tidak berpenghuni. Terdiri dari Pulau-pulau Sangkarang (Spermonde), Taka Bonerate dan Pulau Sembilan di Pantai Timur (Dinas Perikanan dan Kelautan SULSEL, 2019).

Modernisasi perikanan (revolusi biru) di Sulawesi Selatan telah berlangsung sejak akhir tahun 1970-an melalui pemberian kredit untuk modernisasi penangkapan ikan dan pembuatan perahu, diiringi dengan pembenahan manajerial. Berbagai kemajuan telah dicapai melalui perkembangan investasi, teknologi, dan manajemen tersebut, terutama dari sisi produksi (Salman, 2006). Produksi perikanan dikatakan meningkat tajam dari tahun ke tahun (Data Statistik Perikanan Tahun 1965, 1975 dan 1985), perubahan yang dicapai setelah modernisasi alat tangkap digulirkan, kapasitas perahu tangkap ditingkatkan, lembaga ekonomi nelayan dimodernkan, dan kredit kegiatan produksi disalurkan.

Hanya saja, simbol masyarakat nelayan yang “terpinggirkan, miskin, terisolasi, kumuh, kurang berpendidikan” masih menjadi atribut bagi komunitasnya. Terlebih-lebih di wilayah pulau-pulau kecil, kemiskinan terlihat jelas, khususnya pada kelompok *sahi* atau pekerja. Fenomena kesenjangan antara kelompok pekerja dan kelompok pemodal akibat perbedaan tingkat pendapatan dan kepemilikan materi-harta benda. Kesenjangan sekaligus memperkuat dimensi ketergantungan kelompok pekerja terhadap kelompok pemodal. Kondisi ini memperlihatkan modernisasi perikanan atau *blue revolution* yang telah berlangsung, belum sepenuhnya menunjukkan keberpihakan (menguntungkan) khususnya kepada nelayan kelas *grassroot*. Malah ironisnya, modernisasi perikanan dalam perkembangannya telah menjadi sebuah persoalan baru yang harus dihadapi. Suyanto (1993) menyebutkan kehidupan nelayan menjadi terbelah, 69,2% nelayan yang memiliki modal cukup, dengan kehadiran teknologi perikanan membuat kondisi ekonominya bertambah baik dan hanya 5,1 persen yang mengaku kondisi ekonominya bertambah buruk.

Sedangkan bagi nelayan tradisional yang tidak mampu membeli alat tangkap modern hanya 18 persen yang menyebutkan kondisi ekonominya membaik dan mencapai 57,4 persen yang menyatakan kondisinya justru semakin buruk. Margin yang jatuh ke tangan nelayan dan petani ikan hanya sekitar 5 hingga 10 persen saja. Selebihnya, jatuh ke pihak lain yakni, para tengkulak tingkat desa, pedagang tingkat lokal, dan pedagang tingkat regional (Iskandar dan Matsuda (1998). Lampe dan Salman (1993), Arief (2002), Agusanty (2004), menyimpulkan disparitas pendapatan *punggawa* dan *sawi* mencapai perbandingan 10-13: 1. Nelayan pulau-pulau kecil semakin menjadi sasaran yang empuk untuk dieksploitasi oleh pengusaha supra lokal melalui mekanisme pemberian pinjaman modal dan pembelian hasil produksi (Arief, 2007).

Apa sebenarnya yang terjadi pada masyarakat nelayan pulau-pulau kecil dengan modernisasi, menjadi fenomena yang dikaji dalam buku ini. Karena, modernisasi yang secara ideologis seharusnya untuk menyejahterakan nelayan tradisional justru realitanya anomali. Karena itu, buku ini hendak mengisi wacana baru dalam sosiologi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memfokuskan menelaah nelayan pulau kecil dan kapitalisme melalui perspektif teori artikulasi dan formasi sosial nelayan kepulauan yang telah berlangsung.

Konteks Kajian

Sebagai sumber perubahan sosial pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, modernisasi perikanan dapat saja simetris atau asimetris dengan kehidupan sosial ekonomi dan budaya. Di Sulawesi Selatan masyarakat nelayan dalam struktur sosialnya telah memiliki ciri tersendiri dalam tata produksi, seperti pengetahuan lokal (*indigeneous knowledge*), teknologi tradisional (*traditional technology*), dan hubungan-hubungan produksi (*relation of production*) melalui relasi kekerabatan dan patronase. Dengan demikian, modernisasi yang berlangsung pada *mode of production* (teknologi, modal dan hubungan-hubungan sosial) diasumsikan akan terartikulasikan oleh tatanan lokal yang gambarannya terlihat dari ciri dan perkembangan formasi sosial baru yang terbentuk.

Buku ini memiliki kepentingan akademis dalam mengembangkan perspektif teori dalam wacana sosiologi pesisir dan kepulauan. Khususnya, menelaah masyarakat nelayan yang tengah berada dalam dinamika formasi sosial, yang dicirikan beragamnya usaha perikanan masyarakat, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Perspektif Neo-Marxis menegaskan bahwa koeksistensi cara produksi sederhana-tradisional maupun kapitalis-modern menjadikan struktur sosial lebih kompleks sehingga dapat memunculkan konflik-konflik baru dalam hubungan produksi.

Pertanyaan yang kemudian muncul dan terjawab dalam pemaparan dari bab ke bab adalah: Bagaimana proses modernisasi perikanan mengonstruksi formasi sosial pada masyarakat nelayan pulau-pulau kecil? Bagaimana artikulasi modernisasi dalam formasi sosial yang tercipta? Serta sejauh mana peranan nilai budaya lokal terhadap formasi sosial baru pada masyarakat nelayan pulau-pulau kecil? serta bagaimana meredefinisi kapitalisme dalam komunitas. Empat rincian masalah ini adalah masalah utama (*main problem*) yang teruraikan dalam buku ini.

Kerangka Konseptual

Perspektif modernisasi menggunakan dua pendekatan pokok, yaitu pendekatan struktural (makro) dan pendekatan sosial-psikologis (mikro) (Portes, 1976). Pandangan struktural, modernisasi dianggap sebagai perubahan sosial, politik dan ekonomi melalui evolusi. Interpretasinya melihat masyarakat sebagai sebuah totalitas, yang selalu beradaptasi, tumbuh dan berkembang. Pandangan sosial-psikologis, faktor pendorong perubahan sosial (modernisasi) adalah bukan karakteristik masyarakat pada tingkat makro, tetapi karakteristik individu pada tingkat mikro (McClelland, 1966). Interpretasi pendekatan ini fokus kepada faktor-faktor nilai dan norma yang berlaku atau dianut oleh masyarakat tradisional dan modern dengan asumsi perubahan sosial pada tingkat makro (masyarakat) ditentukan oleh perubahan pada tingkat individu (mikro), seperti perubahan cara berpikir dan bersikap, norma dan sistem nilai yang berkembang pada masyarakat.

Konsep modernisasi pada masyarakat nelayan di Indonesia, terarahkan kepada pendekatan struktural. Introduksi teknologi dan modal, di asumsikan nelayan akan beradaptasi menjadi nelayan modern. Landasan filosofi teori modernisasi melihat ketertinggalan (kemiskinan) Dunia Ketiga akibat belum masuknya kapitalisasi, untuk itu penetrasi teknologi dan modal perlu diadakan. Transformasi yang terjadi menyebabkan masyarakat Dunia Ketiga dengan sendirinya beradaptasi dan berubah dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern (Rostow, 1973; Schoorl, 1991).

Terjadinya perubahan formasi sosial akibat modernisasi dalam cara produksi (*mode of production*). Dicitrakan oleh adanya dualisme cara produksi yaitu, cara produksi tradisional (non-kapitalis) dan cara produksi modern (kapitalis). Cara produksi atau cara “orang memproduksi”, ditemukan adanya dua faktor kunci yang mendasari segala proses di dalamnya. *Pertama* “kekuatan produksi” (*force of production*) meliputi orang yang bekerja, alat-alat produksi yang dipergunakan, bahan-bahan baku, serta sumber alam yang dipergunakan dalam proses produksi. Intinya adalah “*productive force*” mencakup hubungan manusia dengan alam (*man’s relation to nature*). *Kedua* “hubungan produksi” (*relation of production*) berupa hubungan kerja sama atau pembagian kerja antara manusia yang terlibat dalam proses produksi, yakni struktur pengorganisasian sosial produksi, seperti hubungan antara pemilik modal dan pekerja yang bukan saja dibangun atas dasar kekuatan produksi maupun struktur kelas yang tercipta dalam masyarakat, melainkan juga oleh tuntutan efisiensi produksi, bahkan ragam benturan kepentingan antara pekerja dan pemilik modal (Worsley, 1988; Russel, 1989; Suseno, 1999; Ramly, 2004).

Konsepsi formasi sosial ini mengalami suatu “artikulasi cara produksi” (*articulation of modes of production*), yaitu suatu proses strukturasi dalam konteks budaya tertentu di mana sekurangnya dua cara produksi yang berbeda, kapitalis dan non-kapitalis, hadir berdampingan dalam suatu pola “saling-kait” (*interrelation*). Artikulasi oleh tatanan lokal

(tradisional) terhadap tatanan baru (kapitalisasi) menjadikan ciri pembeda formasi sosial baru yang terbentuk (Wright, 1982).

Kajian (McClelland, 1966), mengenai pendekatan-sosial-psikologis terhadap perubahan sosial atau modernisasi, lebih fokus kepada cara berpikir, bersikap, norma dan sistem nilai yang dianut sebagai sesuatu yang dapat dijadikan motivasi (*nAch*). Ini mengisyaratkan bahwa nilai budaya lokal dapat dilihat memiliki peran atau fungsi untuk dapat mendorong atau menghambat perkembangan modernisasi, demikian juga etos kerja lokal sebagai spirit untuk berusaha dapat memiliki daya lecut yang kuat atau lemah dalam formasi sosial.

Hanya saja perkembangan modernisasi perikanan di Indonesia, daya adaptasi dari nelayan tradisional baik secara struktural (makro) maupun secara sosial-psikologis (mikro) berubah menjadi nelayan modern malah justru anomali. Modernisasi yang seharusnya menyejahterakan mereka, justru malah memarginalkan bahkan mematikan usaha nelayan tradisional dalam konfigurasi formasi sosial baru yang terbentuk. Fakta sosialnya, setelah masuknya modernisasi (kapitalisasi) ketergantungan akibat kemiskinan serta kesenjangan dalam struktur kelas yang tercipta malah semakin diperankan oleh nelayan tradisional dan nelayan *sahi* (Mubyarto, 1984; Suyanto, 1993; Elfiandri, 2002; Iwan, Arief, A.A, 2002; Kusnadi, 2003). Dari kalangan Neo-Marx dan kelompok teori “Dependensi” (Baran, 1957; Dos Santos, 1971 dan lain-lain), telah menjelaskan, bahwa penggantian sistem hubungan paternalistik (sebagai suatu sistem masyarakat feodal atau semifeodal) dengan sistem kapitalistik; kebebasan individu, kepentingan diri (*selfishness*) dan rasionalitas pasar (Rand, 1970) merupakan langkah utama transformasi masyarakat ke arah kemajuan dan peradaban yang tinggi seperti yang dialami di Eropa Barat. Tetapi yang terjadi pada penerapan nilai-nilai kapitalis dalam tata hubungan sosial dalam masyarakat feodal atau semi feodal, justru telah memperhebat proses eksploitasi terhadap golongan lemah yaitu massa rakyat. Proses eksploitasi yang dilakukan oleh cara produksi feodalisme dalam rangka sistem paternalistik terhadap rakyat tidak “sekejam” proses eksploitasi

yang dilakukan oleh pemilik-pemilik modal dalam rangka sistem kapitalistis.

Dengan acuan teori dan kajian fenomologis yang demikian, masyarakat nelayan di Sulawesi Selatan diasumsikan juga mengalami hal yang demikian, khususnya nelayan pulau-pulau kecil yang diliputi oleh berbagai keterbatasan seperti; keterbatasan sosial (orbitasi dan kondisi geografis yang jauh dari pengaruh daratan) sehingga dalam keterisolasiannya pulau-pulau kecil senantiasa hanya dijadikan “objek” atau dalam posisi ter subordinasi oleh daratan (kota); keterbatasan daya dukung lingkungan (infrastruktur dan transportasi) mempunyai konsekuensi terhadap terbatasnya “skala ekonomi” dari kegiatan yang akan dikembangkan dan produk yang dihasilkan (Clark, 1996); serta keterbatasan-keterbatasan dalam jarak sosial seperti pendidikan, permodalan, politik dan sebagainya, yang berdampak pada pola-pola dan praktik-praktik cara produksi yang dikelola melalui bentuk-bentuk relasi dan jaringan ekonomi bersifat “internal”. Kondisi inilah menyebabkan masyarakat nelayan pulau-pulau kecil memiliki ciri tersendiri dalam hal cara berproduksi; hanya mengandalkan keterampilan atau pengetahuan lokalnya (*local knowledge*), permodalan dalam relasi kekerabatan, teknologi tradisional dan etos kerja yang berbasis unsur lokal serta organisasi dan hubungan produksi yang bersifat patron-klien. Modernisasi yang berlangsung, tentunya terartikulasikan oleh ciri tersebut, sehingga perkembangan kapitalisme berbeda dengan yang pernah terjadi pada masyarakat Barat (Taylor, 1979; Meillassoux dan Rey dalam Salman, 2002). Perbedaan pada koeksistensi antara ciri tata produksi kapitalisme yang dimunculkan oleh modernisasi yang menekankan sistem individualisme dan peran kapital (modal), sementara tata produksi sederhana atau nonindustrial mengandalkan sistem berusaha secara bersama (kekerabatan) di mana kerja harus dilandasi oleh berbagai macam motif; sosial, keagamaan, dan etis. Setiap aktivitas ekonomi, apapun bentuk dan jenisnya, ia senantiasa dikuasai atau berada di dalam “konteks tradisi” (Boeke, 1983).

Lecutan etos kerja pada tingkat aktor, juga turut mempengaruhi artikulasi modernisasi, Ini erat kaitannya dengan “sistem nilai budaya dan sikap” sebagai “faktor-faktor mental” yang mempengaruhi pemikiran dan tindakan nelayan dalam kehidupan keseharian maupun dalam hal membuat keputusan-keputusan penting lainnya. Berfungsi sebagai konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup dalam alam pikirannya mengenai apa yang dianggap penting dan berharga, sekaligus juga apa yang dianggap remeh dan tak berharga. Sehingga, bekerja ataupun aktivitas ekonomi lainnya sedapat mungkin bernilai tinggi di mata masyarakat (penghargaan sosial).² Kelangsungan proses-proses sosial ini atau bagaimana artikulasi yang terjadi dalam dinamika formasi sosial yang berlangsung menjadi kajian analisis dalam buku ini.

Kerangka Analisis

Buku ini “tumbuh” selama rentang waktu yang panjang berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan pada pulau-pulau kecil dari tahun 2006, 2002, 2008, 2015, 2020 dan 2021. Penelitian didesain dengan pendekatan kualitatif (*qualitative dominant*) dengan basis studi kasus yang dianggap tepat untuk mempelajari mendalam tentang dinamika atau keadaan kehidupan sekarang dengan latar belakangnya, dari interaksi dengan lingkungan suatu unit sosial (individu, kelembagaan, komunitas

² Konteks tersebut erat kaitannya dengan relevansi nilai siri” dalam budaya Bugis bahwa: (1) *Siri*” dalam sistem budaya merupakan: pranata pertahanan harga diri, kesucilaan dan hukum serta agama, sebagai salah satu nilai utama yang mempengaruhi dan mewarnai alam pikiran, perasaan dan kemauan manusia. Sebagai konsep budaya, ia berposisi regulator dalam mendinamisasi fungsi-fungsi struktur dalam kebudayaan; (2) *Siri*” dalam sistem sosial: berfungsi mendinamisasi keseimbangan hubungan individu dan masyarakat untuk menjaga kekerabatan dan silsilah; dan (3) *Siri*” dalam sistem kepribadian adalah sebagai perwujudan konkret di dalam akal budi manusia yang menjunjung tinggi kejujuran, keseimbangan untuk menjaga harkat dan martabat manusia (Seminar Masalah *Siri*” di Makassar tahun1997). Oleh karena itu meskipun *siri* menjadi salah satu dari enam nilai utama kebudayaan Bugis yakni kejujuran (*alempureng*), kecendikiaan (*amaccang*), kepatuhan (*asitinajang*), keteguhan (*agettengang*), keusahaan (*reso*) dan *siri* (malu dan harga diri) itu sendiri, tetapi dalam perannya *siri* nampak lebih kompleks yaitu sebagai spirit (semangat) dan *justifikasi* yang mewarnai aktivitas kelima nilai kebudayaan tersebut.

dan masyarakat) yang bersifat holistik dengan tujuan “Deskripsi kental” dalam memahami konteks atau situasi.

Data lapangan dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dari sejumlah informan yang dipilih dengan teknik *efek snowball* terutama yang berposisi sebagai *punggaha bonto* (pemilik modal/usaha), *punggaha kecil* atau *juragan lopi* (pemimpin operasi produksi), *sahi* (pekerja) dan nelayan mandiri. Informan yang ditentukan sendiri, seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh pemuda dan sebagainya. Prinsip triangulasi dipraktikkan dan *teknik life history* digunakan untuk mendukung pengungkapan sejarah. Data diolah secara induktif melalui tahapan; reduksi data, penyajian, penarikan kesimpulan secara bertahap dan penulisan laporan.

Kasus yang dikaji dalam buku ini adalah masyarakat pulau-pulau kecil dengan menjadikan Pulau Kambuno sebagai unit kasus yang berada di kawasan Pulau Sembilan. Dasar pertimbangan lokasi adalah; Pulau Kambuno mayoritas penduduknya menggantungkan hidupnya sebagai nelayan, ditemukan bentuk-bentuk formasi sosial dalam cara berproduksi (*mode of production*) serta masih dijumpainya pengetahuan tradisional dalam kegiatan kenelayanan.

Sistematika Buku Ini

Pemaparannya berusaha memperluas dan menajamkan tafsir-tafsir pemikiran dan mengembangkan tema-tema yang dianggap penting bahkan esensial untuk bertahannya sosiologi selaku sebuah disiplin dan mode penelitian. Setelah Bab Pendahuluan, tema gambaran strategis pulau-pulau kecil dideskripsikan mulai dari profil Pulau Sembilan dari aspek geografis dan ekologi sebagai sebuah kawasan, Pulau Kambuno sebagai unit kasus serta lingkungan sosiokulturnya. Bab berikutnya, mendeskripsikan awal berkembangnya motorisasi dalam komunitas yang kemudian berimplikasi terhadap perubahan formasi sosial yang diuraikan secara periodisasi dengan mengusung isu-isu sentral dari masing-masing periode. Dua Bab selanjutnya memperbincangkan artikulasi modernisasi dari hasil pemaknaan oleh unsur lokal yang diawali oleh koeksistensi antar cara

produksi. Sebelum bab penutup, uraian redefinisi kapitalis dalam komunitas merupakan upaya saya menyuguhkan hasil pendekatan yang membuka ruang untuk direfleksi dan diskusikan melalui narasi kecil perspektif Schumpeterian (jalur *revisionism*) tentang membongkar dominasi kapitalisme serta kajian kasuistik yang berteori dalam mendorong reaksi baru nelayan lokal terhadap kapitalisme []

BAB II

SEMBILAN PULAU

Lautan yang Ditumbuhi Daratan

Pulau-pulau kecil didefinisikan berdasarkan dua kriteria utama yaitu luas pulau dan jumlah penduduk yang menghuninya.

Definisi pulau-pulau kecil yang dianut secara nasional sesuai dengan Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41/2000 Jo Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan No. 67/2002 adalah pulau yang berukuran kurang atau sama dengan 10.000 km², dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan

200.000 jiwa. Kemudian direvisi dalam UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² beserta kesatuan ekosistemnya. Beberapa karakteristik lain pulau-pulau kecil sebagai pendarasan bahwa secara ekologis terpisah dari pulau induknya (*mainland island*), memiliki batas fisik yang jelas dan terpencil dari habitat pulau induk, sehingga bersifat insular; mempunyai sejumlah besar jenis endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi; tidak mampu mempengaruhi hidroklimat; memiliki daerah tangkapan air (*catchment area*) relatif kecil sehingga sebagian besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke laut serta dari segi sosial, ekonomi dan budaya bersifat khas dibandingkan dengan pulau induknya.

Gugusan Pulau Sembilan terletak di Teluk Bone pada posisi $5^{\circ} 01', -5^{\circ} 15' 30''$ LS dan $120^{\circ} 19' - 120^{\circ} 31' 00''$ BT dengan jarak sekitar 12 km di sebelah kanan Balanglimpa, Kabupaten Sinjai di Pulau Sulawesi sebagai pulau induk (*mainland*). Terdiri dari 9 (sembilan) pulau kecil; Pulau Kambuno, Pulau Burungloe, Pulau Katindoang, Pulau Kodingareng, Pulau Batanglampe, Pulau Liang-liang, Pulau Kanalo I, Pulau Kanalo II dan Pulau Larea-rea. Perairan di pulau-pulau ini secara umum dapat dikatakan didominasi oleh karang, pasir dan lumpur.

Secara administratif Kecamatan Pulau Sembilan terdiri 4 (empat) desa, yaitu; Desa Pulau Buhung Pitue meliputi Pulau Burungloe; Desa Pulau Harapan meliputi Pulau Kambuno dan Pulau Liang-liang; Desa Pulau Padaelo meliputi Pulau Kodingareng dan Pulau Batang Lampe, serta; Desa Persatuan yang meliputi empat pulau yaitu, Pulau Kanalo I, Pulau Kanalo II, Pulau Katindoang serta Pulau Larea-rea (tidak berpenghuni). Pusat pemerintahan berada di Pulau Kambuno. Pulau Liang-liang merupakan pulau yang terluas ($0,92 \text{ km}^2$) dari kedelapan pulau lainnya dengan luas pemukiman $0,07 \text{ km}^2$, sementara Pulau Larea-rea menempati luas pulau yang tersempit dengan luas $0,015 \text{ km}^2$ (tidak berpenghuni) Desa Pulau Harapan yang meliputi Pulau Kambuno dan Pulau Liang-liang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 3014 jiwa, kemudian berturut-turut disusul oleh Desa Pulau Bihung Pitue, Desa Pulau Persatuan dan terakhir Desa Pulau Padaelo dengan jumlah penduduk 1115 jiwa.

Gugusan Pulau-pulau tersusun oleh batuan vulkanik dasar laut yang terangkat ke atas permukaan laut. Bentang alamnya secara garis besar dapat dibagi atas 3 satuan geomorfologi, yakni perbukitan, dataran, pantai dan laut. Dataran berupa perbukitan berada pada ketinggian 1–135 meter di atas permukaan laut. Puncak bukit tertinggi terletak di Pulau Burungloe. Di beberapa tempat, perbukitan yang berbatasan langsung dengan laut membentuk tebing (*cliff*). Tebing yang mengarah ke timur dan selatan umumnya telah mengalami pengikisan dan membentuk ceruk (*notch*). Morfologi ini menandakan bahwa pada musim Timur terjadi aksi ombak yang cukup besar. Dataran yang berupa perbukitan dengan lereng yang

terjal dikonversi oleh masyarakat menjadi pemukiman atau kebun sehingga aliran sedimen dapat berakibat terhambatnya pertumbuhan karang.

Pantai di gugusan Pulau Sembilan umumnya berupa dataran pasang surut yang landai berupa hamparan pasir. Sangat landai dan dangkal sehingga dalam keadaan air surut dapat muncul ke permukaan. Hamparan pasir menyebar sampai jauh ke luar pantai, bahkan dapat saling bersambungan antara satu pulau dengan pulau tetangganya, seperti Pulau Kambuno dan Pulau Liang-liang, hamparan pasirnya dapat diseberangi dengan berjalan kaki pada saat air surut. Hanya saja, Bentuk yang landai dengan hamparan pasir yang luas, agak menyulitkan lalulintas kapal/perahu nelayan, terutama pada saat air surut.

Arus permukaan kecenderungannya ke arah barat laut–utara. Tipe pasang surut semidiurnal menunjukkan bahwa dalam satu hari terjadi dua kali air pasang dan dua kali air surut dengan tinggi yang hampir sama dan pasang surut yang terjadi secara berurutan secara teratur. Periode pasang surut rata-rata adalah 12 jam 24 menit. Arus yang besar mendukung terjadinya suplai nutrisi ke dalam perairan, mendukung dijadikan sebagai areal budidaya. Kisaran kecepatan arus permukaan 0.068–0.142 m/det. Nilai kecerahan air sebagai parameter daya tembus cahaya mencapai nilai yang cukup besar, yakni; 100 % pada kisaran kedalaman 2-53 m. Nilai kecerahan yang lebih besar dari 10 m menunjukkan bahwa perairan dapat dimanfaatkan untuk lokasi ekowisata ataupun untuk usaha budidaya laut (*mariculture*). Salinitas air berkisar 30-31 ‰ (PSTK Unhas, 2000; Rasyid, 2001).

Gugusannya terletak di Teluk Bone, berhadapan langsung dengan laut bebas sehingga sangat potensial untuk pengembangan perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Beberapa ekosistem menjadi penunjang potensi sumber daya perairan. Jenis lamun yang mendominasi adalah *Halodule uninervis*, *Syringodium isoetifolium* dan *Cymodocea serrulata*. Sementara jenis makroalgae yang dominan antara lain *Padina australis*, *Dictyota bartayresii* dan *Halimeda macroloba* (PSTK Unhas, 2000).

Kawasan Pulau-pulau ini, mempunyai banyak dan jenis sebaran *takka* yang merupakan lumbung stok ikan bagi nelayan sekitar. Hanya saja, *takka-takka* tersebut juga rentang akan kerusakan akibat aktivitas pengeboman dan pembiusan oleh nelayan. Dipastikan Sekitar 75% terumbu karang di sekitar pulau ini telah rusak akibat maraknya pengeboman dan pembiusan ikan (Tabel-1).

Tabel-1: Jenis Karang dan Ikan Karang Tangkapan Nelayan

Jenis Karang	Jenis Ikan Karang	Daerah Rawan Bom & Bius
Karang Katampa, Karang Batu Kalapi, Karang Bunga, Karang Tinggi, Karang Kikirang, Karang Keriting	Sunu (sejenis kerapu), Kerapu, Langkoe (Napoleon), Laccukang (kakatua), Katamba (Lencam), Ekor Kuning	Daerah tangkapan sebelah timur Pulau Kambuno; Takka Bunging Tellue, Takka Loange, Takka Tenggoe, Takka Pangampi, dan Takka Limpoge

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2006; P3K DKP, 2005.

Pengetahuan tentang lokasi penangkapan dan letak rumah ikan (*takka*), serta ikan-ikan yang memiliki nilai ekonomis penting baik di pasar lokal maupun ekspor terpahami oleh nelayan sekitar. Seperti nelayan pancing ikan karang Pulau Liang-liang³, mempunyai pengetahuan beberapa lokasi penangkapan dengan letak rumah-rumah ikan sunu di *takka-takka*, seperti: *takka malambere selatan, pasi' loangnge utara dan selatan, takka pangami ujung timur* dan sebagainya.

³ Seorang nelayan pancing ikan karang Pulau Liang-liang, menuturkan bahwa hampir semua *punggaha lopi* (pemimpin operasi penangkapan) di Pulau Liang-liang memiliki pengetahuan mengenai letak rumah-rumah ikan karang. Pengetahuan ini diperoleh dari hasil akumulasi keterangan-keterangan berdasarkan pengalaman yang mendasari lahirnya pengetahuan lokal (*local knowledge*) dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, kerusakan *takka-takka* tersebut sama halnya dengan hilangnya mata pencaharian mereka, sehingga keberadaan *takka-takka* itu harus betul-betul dijaga dari usaha kegiatan pemboman atau pembiusan. Kondisi inilah yang sering menimbulkan konflik antara nelayan pancing dengan nelayan pembius/pembom di Pulau Sembilan.

Maraknya kegiatan penangkapan ikan yang merusak (bom dan zat kimia; bius) hampir pada umumnya terjadi di pulau-pulau kecil di Sulawesi Selatan (Arief, 2019), termasuk kondisi di kawasan Pulau Sembilan saat ini sangat mengkhawatirkan. Diperkirakan sekitar 24 perahu yang rutin turun melaut dan setiap harinya ditemukan serpihan karang dari hasil ledakan bom, ditambah lagi dengan kegiatan pembiusan yang menyebabkan karang di sekitar tempat itu menjadi putih. Umumnya 1 kg bom bisa menghancurkan kedalaman sekitar 30 meter (Arief, 2009). Kawasan Pulau Sembilan memiliki potensi yang cukup besar mengenai komoditas jenis ikan karang (Tabel-2). Hanya saja, lagi-lagi pengeksploitasian dengan jalan destruktif akan mengancam kelestarian yang selanjutnya berakibat kepunahan spesies dari ikan-ikan karang.

Tabel-2: Sebaran Jenis Famili Ikan Karang dan Persentase Famili yang Dominan di Kawasan Pulau Sembilan

No	Lokasi/Pulau	Jumlah Famili Ikan Karang	Jenis Famili yang Dominan (%)
1	Batang Lampe	16	<i>Caesionidae</i> (18.8)
2	Kodingare	6	<i>Caesionidae</i> (46.67)
2	Kambuno	12	<i>Caesionidae</i> (55.56)
3	Gosong Bungingtellue	13	<i>Acanthuridae</i> (27.3)
4	Gosong Pasilloang	11	<i>Lutjanidae</i> (28)
5	Gosong Hellopute	12	<i>Caesionidae</i> (25)
6	Gosong Karang-karang	12	<i>Caesionidae</i> (21.1)
7	Gosong Anataninting	12	<i>Acanthuridae</i> (24.9)
8	Gosong Topama	8	<i>Chaetodontidae</i> (34.3)
9	Gosong Lekko"pasilloang	12	<i>Acanthuridae</i> (36.1)
10	Gosong Tacera	9	<i>Siganidae</i> (39.6)
11	Gosong Malambiri	11	<i>Chaetodontidae</i> (38.2)
12	Gosong Katuaka	10	<i>Chaetodontidae</i> (33.3)

Sumber: PSTK Unhas, 2000.

Pulau Kambuno dalam Realitas

Pulau Kambuno sebagai unit kasus berbatasan dengan Desa Pulau Padaelo sebelah utara; sebelah selatan berbatasan Desa Pulau Bihung Pitue; sebelah timur dan sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone. mempunyai luas 0,17 km² dengan ketinggian tanah dari permukaan laut sebesar 1 m. Wilayah pemukiman secara keseluruhan mempunyai luas sekitar 0,21 km², keadaan topografinya adalah 75% daratan dan 25% berbukit. Memiliki iklim tropis, sehingga turun hujan sepanjang tahun dengan curah hujan 200/300 mm/thn. Kondisi geografi wilayahnya dipengaruhi oleh arus angin yang berasal dari daratan Asia dan Laut pasifik yang banyak mengandung uap air dan angin bertiup dari daratan Australia yang mengandung sedikit uap air. Ada dua musim yaitu, musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau terjadi pada bulan Oktober hingga Januari, sedang musim hujan terjadi pada bulan Juni hingga September dan musim peralihan pada bulan Februari hingga Mei. Nelayan mengetahui tiga pola musim, yang menentukan waktu-waktu intensif dan sepihnya aktivitas mereka, yaitu *wettu bare* (musim barat), *wettu timo* (musim timur) dan *wettu salai* (musim pancaroba). Bulan Juli hingga Desember berlangsung musim barat dengan hujan lebat, angin/badai besar dan arus kuat dari arah barat ke timur, kurang memungkinkan aktivitas nelayan dan pelayaran rakyat. Musim timur berlangsung antara bulan Desember hingga Juni, ditandai dengan angin dan arus agak lemah dari timur ke barat memberi peluang besar bagi nelayan dan pelayaran rakyat beroperasi secara intensif. Musim peralihan berlangsung selama kurang lebih 3 bulan (bulan Mei–bulan Juli) membawa angin dengan guncangan ombak kurang menentu. Di beberapa perairan terbuka di Indonesia Bagian Timur, termasuk Sulawesi Selatan, kecuali sebagian kecil Teluk Bone, sulit di masuki selama musim peralihan.

Jumlah penduduk pulau pada tahun 2018, sebanyak 2521 jiwa, terdiri atas penduduk pria 1238 jiwa dan penduduk wanita sebanyak 1283 jiwa. Sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan memiliki pendidikan yang sangat rendah. Hampir separuh di antaranya masih buta huruf atau hanya mampu mengenyam atau menyelesaikan pendidikan sebatas sekolah

dasar saja. Demikian halnya dengan mereka yang gagal (menggagalkan) penyelesaian pendidikannya (*drop out*) atau putus sekolah di tiap tingkatan sekolah juga cukup besar jumlahnya, terutama di tingkat SD. Kebanyakan putus sekolah terjadi karena kehendak para orang tua murid, mereka berpandangan pendidikan sudah dianggap cukup jika mampu menulis, membaca (huruf latin) serta berhitung. Kebanyakan putus sekolah pada kelas IV (empat) atau V (lima) SD, karena pada saat itu pada umumnya murid-murid telah tahu menulis dan membaca huruf latin serta dapat menghitung angka-angka sederhana dan selanjutnya mereka bekerja membantu aktivitas orang tuanya.

Kondisi pemukiman menyebar di empat sudut pulau. Pola *layout*-nya tipe menyebar dan memusat, mengikuti topografi atau kontur pulau. Rumah tempat tinggal didirikan pada posisi di atas hamparan tanah datar, sedangkan perumahan perbukitan kadangkala mencari posisi strategis dengan bangunan rumah batu dan semi permanen. Tercatat jumlah perumahan kurang lebih 385 buah, dengan kondisi yang cukup bervariasi antara rumah panggung, rumah kayu yang beralas tanah, rumah semi permanen dan rumah tembok. Atap rumah terdiri dari atap seng dan atap dari daun rumbia dan berbentuk rumah bawah. Rumah-rumah yang bentuknya rumah bawah dikalangan *punggaha*, umumnya rumah batu (permanen), sedang rumah bawah dikalangan nelayan *sahi* dari bambu.

Konstruksi bangunan ini juga menjadi salah satu ciri khas yang membedakan antara rumah-rumah *punggaha* atau golongan masyarakat ekonomi menengah ke atas dan rumah-rumah *sahi* atau nelayan *grassroot* lainnya.

Terdapat dua dermaga penyeberangan. Jalanannya berupa jalan setapak yang sebagian besar telah disemen beton dan selebihnya berupa jalan tanah. Jalan tanah tersebut lebarnya kurang lebih 1 meter, yang sekaligus sebagai jalan desa dan jalan dusun. Transportasi darat tidak terlalu penting di pulau ini, umumnya untuk bepergian antar dusun dilakukan dengan berjalan kaki, kecuali interaksi antar pulau mereka menggunakan perahu *bise*, *katinting* atau perahu *jolloro*. Sarana transportasi ke dan dari Desa Pulau Harapan menggunakan sarana

angkutan laut berupa kapal motor yang beroperasi dengan jadwal tertentu tiap harinya (berangkat dari Pulau Kambuno ke TPI Lappa sekitar pukul 06.30 WITA dan kembali sekitar pukul 13.00 WITA), kecuali untuk perahu motor tempel/*katinting* dan jonson (*speed boat*) pengoperasiannya dapat terjadi setiap saat dengan sistem sewa carteran di TPI Lappa. Untuk keperluan administrasi desa dan kecamatan, bangunannya terdapat di pulau ini yang menyebabkan Pulau Kambuno lebih ramai dibanding ketujuh pulau lainnya di wilayah administrasi kecamatan Pulau Sembilan.

Lampu penerangan bagi penduduk sebagian besar menggunakan lampu penerangan dari tenaga listrik generator milik pemerintah dengan jadwal pemakaian mulai dari jam 18.00 sampai dengan jam 06.00 WITA setiap harinya. Fasilitas perbankan cabang belum tersedia. Kebutuhan akan modal usaha masih mengandalkan praktik peminjaman dengan pola-pola lama (lembaga non-formal) dengan tingkat suku bunga yang cukup tinggi. Suplai bahan bakar solar dari daerah Lappa yang membutuhkan biaya ekstra dalam pengadaannya. Sarana perdagangan berupa kios-kios kecil yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat. Meskipun terdapat pasar, namun sebagian besar transaksi jual beli, seperti kebutuhan rumah tangga maupun hasil bumi dilakukan di luar pulau (daratan Sinjai). Kebutuhan rumah tangga, seperti beras, minyak tanah, bensin, solar, dan sebagainya didatangkan dari luar pulau.

Mata pencaharian pokok penduduk Pulau Kambuno adalah nelayan atau usaha yang bergerak di bidang perikanan seperti budidaya rumput laut. Hasil tangkapan nelayan Pulau Kambuno, tidak hanya dipasarkan di ibu kota kabupaten, tetapi juga diangkut ke Makassar yang berjarak kira-kira 220 kilometer (sekitar 4-5 jam perjalanan). Bahkan ikan-ikan jenis tertentu hasil tangkapan nelayan seperti kakap, kerapu, tuna, atau lobster diekspor ke Negara Jepang, Hongkong, Singapura dan sebagainya oleh pedagang-pedagang pengumpul di Makassar.

Lingkungan Sosiokultur Komunitas

Konstruksi teoretis tentang asal-usul terbentuknya komunitas di Sulawesi Selatan umumnya berhipotesis bahwa komunitas tersebut pada

awalnya hanyalah sekumpulan rumah panggung yang terikat satu sama lain oleh pertalian darah dan kesamaan tempat tinggal. Kumpulan ini berciri seperti kaum yang diistilahkan sebagai *anang* (Abidin, 1976). Selanjutnya mereka dikelompokkan secara khusus karena dikenal melalui sifat lokalnya yang sangat menonjol demikian juga dengan kemampuan adaptasinya terhadap lingkungan. Ini juga tercerikan pada karakteristik masyarakat pesisir secara keseluruhan (*costal society*). Komunitas masyarakat pesisir di Sulawesi Selatan terbagi atas dua kategori yaitu, *tu'pabiring* dan *tu'rijenne*⁴. *Tu'pabiring* adalah komunitas yang hidup di tepi pantai atau pesisir, sementara *tu'rijenne* adalah komunitas pengembara laut yang hidupnya berpindah-berpindah dari satu tempat ke tempat lain, atau dari perairan ke perairan lain yang di kenal dengan nama orang Bajou (Lapian, 1987). Awalnya di pulau ini, hanya dihuni oleh suku Bajo⁵ yang dikenal akrab dan hidup di sepanjang pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam perkembangannya, gelombang migrasi suku Bugis yang berasimilasi maupun berakulturasi telah tampil menjadi suku dominan yang dilihat dari penggunaan bahasa sehari-hari (bahasa Bugis) dan pranata-pranata sosial⁶ yang sarat dengan nuansa kebudayaan masyarakat Bugis.

Bukti yang mendukung bahwa pulau ini awal mulanya dihuni oleh orang Bajou adalah nama pulau yang dulunya dikenal sebagai “Pulau Sama” sebelum diganti menjadi “Pulau Kambuno”. Dalam pandangan

⁴ *Tu'pabiring* dan *tu'rijenne* adalah penggunaan istilah dalam bahasa Makassar, *tu'pabiring* di artikan sebagai *tu, to* adalah orang dan *pabiring* adalah tepi pantai atau pesisir. Sementara *tu'rijenne* memiliki arti; *tu, to* adalah orang dan *jenne* adalah air.

⁵ Konon dahulu kala, nenek moyang Suku Bajo adalah orang-orang Filipina dan Vietnam, telah mengembara dari satu teluk ke perairan lain, dari satu selat ke samudra lain, dan nanti di abad 21, atau akhir abad 20, bangsa nomad ini baru mengenal tempat tinggal tetap. Itu pun hanya di seputaran perairan, yang kira-kira dua hingga 10 mil dari pesisir (Sultan, 2005). Tahir, *et al.* (1978) menyebutkan bahwa Suku Bajo yang tersebar di kawasan nusantara sekarang ini adalah Suku Samal yang berasal dari Filipina Selatan sebagai penduduk asli (*idegenous*) yang berbahasa Samal dan memeluk agama Islam. Suku ini merupakan kelompok-kelompok pengembara laut dengan kebiasaan memilih teluk yang diapit dua tanjung untuk beristirahat (bermukim) oleh karena bebas dari ombak besar (Abu Hamid, 1986).

⁶ Pranata sosial...pengetahuan cara-cara berperilaku yang terstandarisasi, sebagai suatu mekanisme di mana sebuah struktur sosial, jaringan hubungan sosial memelihara eksistensi dan keberlangsungan dirinya (Brown, 1959).

kosmologi Bajou dipercaya bahwa dunia ini dihuni oleh dua macam jenis manusia yaitu orang *sama* dan orang *bagai*. Disebut sebagai orang *sama* karena komunitas manusianya mendiami alam yang sama (laut), mereka hidup di atas sarana yang sama (perahu) dengan cara hidup tradisi dan nilai-nilai yang sama. Sementara orang *bagai* adalah komunitas manusia yang hidup di darat telah *berbagai-bagai* (berbaga) antara satu dengan lainnya. Dari kosmologi ini maka orang pesisir yang dikategorikan dengan komunitas masyarakat *tu'pabiring* digolongkan sebagai orang *bagai*, karena sekalipun ia mencari penghidupan di laut ia tetap tinggal di daratan. Sementara *tu'rijenne* adalah orang *sama* yang dalam perkembangannya kian hari kian kehilangan tempat untuk hidup secara khas, dan mulai memiliki hidup permanen di satu kawasan tertentu yang terpencil seperti di muara-muara sungai, termasuk di pulau-pulau kecil.

Pergantian nama “Pulau Sama” menjadi “Pulau Kambuno” juga diduga pengaruh migrasi orang Bugis. Kata *Kambuno* sendiri diangkat dari cerita rakyat tentang kisah seorang pejuang kemerdekaan yang dieksekusi oleh Belanda di pulau ini, sehingga di beri nama *Kambuno* dari kata *camp* (bahasa inggris; tempat) dan *buno* (bahasa bugis; bunuh). Gelombang migrasi ke Pulau Sembilan, kuat kaitannya dengan kekacauan keamanan di Sulawesi Selatan pasca kemerdekaan. Dimulai dari peristiwa korban 40.000 jiwa oleh Westerling (1945–1949), kemudian pemberontakan Andi Azis dalam memperjuangkan Negara Indonesia Timur (1950–1951), lalu disusul dengan pemberontakan DI/TII oleh Kahar Muzakkar (1952–1958). Keadaan-keadaan inilah yang memaksa masyarakat mencari tempat-tempat yang aman dalam menghindari konflik termasuk melakukan migrasi ke pulau-pulau kecil. Satu hal yang menarik bahwa Pulau Kambuno sejak masa pemerintahan Belanda sampai saat ini senantiasa selalu menjadi pusat dan dianggap sebagai induk dari ke delapan pulau lainnya.

Struktur sosial⁷ di pulau ini, telah terwujud menjadi suatu kelompok masyarakat berdasarkan kesatuan tempat dan kesamaan tujuan, yang

⁷ Struktur sosial adalah sekumpulan “aturan” yang membuat suatu masyarakat menjadi

mengombinasikan dua struktur dominan yakni, struktur masyarakat komunal dan struktur berdasarkan produksi. Struktur masyarakat komunal menggambarkan pola hubungan sosial berdasarkan ikatan ketetanggaan, kekerabatan, dan kepercayaan/keagamaan. Sementara struktur berdasarkan produksi memolakan hubungan sosial dalam sistem produksi khususnya menyangkut dengan mata pencaharian sebagai aktivitas kehidupannya.

Struktur masyarakat komunalnya melibatkan dua golongan sosial utama, yakni tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh terpelajar dan orang kaya) dan orang biasa (*common people*). Pola hubungan sosial ketetanggaan tergambar melalui kerja sama-kerja sama dalam rangka hubungan komunal yang terwujud dalam berbagai bentuk tindakan kolektif, seperti kegiatan tolong-menolong dengan memberikan tenaganya baik diminta maupun tidak kepada tetangga yang melakukan kegiatan hajatan, sunatan, resepsi perkawinan dan sebagainya. Untuk kegiatan tolong-menolong dalam rangka kepentingan bersama, tampak pada kegiatan kerja bakti, menyiapkan acara-acara keagamaan seperti Maulid, Isra Mikraj dan kegiatan-kegiatan tradisi lainnya. Integrasi sosial sebagai masyarakat komunal terjaga dan dipelihara melalui berbagai aktivitas yang telah melembaga, khususnya aktivitas yang berhubungan dengan tradisi Islam setempat, seperti *barasanji*, *tahlilan*, *mammaulid* dan aktivitas yang berhubungan dengan upacara siklus hidup seperti kelahiran (*haqiqa*), potong rambut, khitanan/sunatan (*massunna*) dan kematian (*tahlilan*).

Satu rumah tangga di pulau ini, biasanya terdiri atas beberapa orang yang diam bersama dan hidup bersama dari satu anggaran belanja (seperiuk), mereka itu biasanya terdiri atas kepala rumah tangga dan anggota lainnya adalah istri dan anak-anak yang dilahirkan. Selain itu, juga adakalanya ditambah dengan keluarga atau kerabat dekat lain baik dari pihak suami maupun dari pihak istri, bisa saja mertua, mungkin pula ipar

“teratur”. Aturan-aturan ini berisi pola-pola hak dan kewajiban para pelaku dalam suatu interaksi yang terwujud dari rangkaian hubungan-hubungan sosial yang relatif stabil dalam suatu jangka waktu tertentu. Pengertian hak dan kewajiban para pelaku dikaitkan dengan masing-masing status, dan peran para pelaku yang bersangkutan sesuai dengan situasi-situasi sosial di mana interaksi sosial itu terwujud (Straus, 1963; Suparlan, 1982).

bahkan juga menantu. Suami bersama istri dan anak-anaknya, khususnya anak yang masih kecil atau belum kawin untuk kehidupan sehari-hari masih dalam tanggungan ayah dan ibu atau kedua orang tuanya yang merupakan keluarga batih atau keluarga inti (*nuclear family*).

Pola sistem kekerabatannya adalah sistem *bilateral* atau *parental*, yaitu mengakui kedua garis keturunan orang tua (bapak dan ibu). Hubungan kekerabatan ada yang dekat dan ada yang jauh. Kalangan orang-orang mereka yang terhisab sebagai kerabat dekat adalah satu sampai dengan tiga derajat vertikal dan horizontal (*sapposiseng ciceng*, *sappokedua*, *sappoketellu*), sementara selebihnya adalah kerabat jauh atau apa yang mereka sebutkan dengan istilah *wija* (turunan) atau *seajing mabela* (kerabat jauh). Secara konkrit dan menonjol hubungan kekerabatannya dilihat dalam peristiwa perkawinan dan upacara-upacara adat. Sebagai sebuah fenomena adat, perkawinan oleh masyarakat di pulau ini memahaminya sebagai media pembentukan dan mempertahankan eksistensi keluarga yang tergambar dalam konsekuensi tentang keharusan cara-cara perkawinan dalam kelompok. Perkawinan bagi masyarakat, merupakan realisasi dari suatu kompleks yang memadukan sejumlah unsur budaya yang meliputi unsur sosial, unsur ekonomi, sistem pengetahuan, kepercayaan, seni, teknologi dan unsur kekerabatan itu sendiri. Perkawinan juga dipahami sebagai sebuah aplikasi dari sistem adat yang dianggap memiliki makna yang sangat mendasar karena berbagai hal penting dalam kehidupan manusia ikut ditentukan dalam peristiwa tersebut. Nilai kehormatan dan harga diri, martabat pribadi dan keluarga, bahkan klasifikasi golongan dari kelompok ikut terakomodasi di dalam penyelenggaraan perkawinan yang ditunjukkan melalui penampakan simbol yang diawasi oleh sistem norma adat.

Dalam kebudayaan masyarakat Bugis, pelapisan sosial secara lahiriah diwujudkan dalam lambang-lambang dan gelar. Simbol-simbol pada rumah atau *bola* seperti hubungan (*timpa" laja"*) bersusun tiga atau lebih, jumlah anak tangga, bentuk-bentuk rumah dan lain-lain, menunjukkan anggota masyarakat yang mendiami rumah itu tergolong dalam lapisan tertentu dalam masyarakat (Mattulada, 1970). Pelapisan

sosial yang masih kuat tergambar dalam komunitas dengan gelaran: *Anakarung*, *Petta*, *Karaeng*, *Andi*, *Puang*, *Opu*, *Datu* yaitu lapisan kaum kerabat bangsawan; kemudian, *To'maradeka*, ialah lapisan orang kebanyakan; serta, *Ata* atau lapisan orang budak, ialah orang yang ditangkap dalam peperangan atau orang yang tidak mau membayar pajak atau melanggar adat. Namun untuk konteks *Ata* yang pada masa lalu digolongkan sebagai orang yang dimerdekakan dan dipekerjakan oleh golongan bangsawan, untuk saat ini golongan *Ata* sudah tidak dijumpai lagi dan tergantikan sebagai kelompok klien (pengikut) dalam kegiatan produksi (mata pencaharian) yang diistilahkan sebagai *sahi* atau *sawi*. Dengan sistem pelapisan tersebut, maka hubungan perkawinan dalam masyarakat juga diatur sedemikian rupa untuk mempertahankan pelapisan yang disandang. Mencari pasangan dalam kalangan sendiri menjadi hubungan perkawinan yang ideal dalam masyarakat, seperti; *assialang marola* (perkawinan antara sepupu derajat kesatu, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu); *assialanna meme'ng* (perkawinan antara sepupu derajat kedua baik dari pihak bapak maupun ibu); *ripaddeppe mabelae'* (perkawinan antara sepupu derajat ketiga dari kedua orang tua). Dengan demikian, umumnya perkawinan yang berlaku pada masyarakat nelayan pulau ini adalah sistem endogami, dalam arti perkawinan dilakukan dalam rumpun keluarga. Namun, tidak berarti tidak terjadi perkawinan di luar rumpun keluarga, perkawinan di luar suku atau orang yang sama sekali tidak seketurunan (eksogami). Hanya saja, realitasnya sistem endogami masih dominan dan terus dipertahankan sampai saat ini.

Pola hubungan kekerabatan (endogami), juga banyak terpraktikkan dalam aktivitas kegiatan usaha produksi masyarakat, misalnya ketika ada pemilik/pemimpin kelompok produksi (*punggaha*) yang akan merekrut tenaga kerja maka ia terlebih dahulu mencari keluarga dari pihak ayah (patrilineal) dan ibunya (matrilineal) sehingga tidak jarang di jumpai dalam satu unit usaha penangkapan ikan hampir semua anggotanya adalah satu rumpun keluarga (baik keturunan dari keluarga bapak atau keluarga ibu dari *punggaha* sebagai pemilik usaha).

Pranata agama dan kepercayaan. Pada umumnya masyarakat di pulau ini mayoritas beragama Islam. Hanya ada sarana peribadatan masjid dan musala. Ketaatan mereka memeluk agama Islam dapat dilihat dari jumlah jemaah yang memadati ruangan masjid pada saat hari Jumat, salat lima waktu setiap hari, dan upacara-upacara keagamaan seperti Maulid Nabi Muhammad saw., Isra Mikraj yang dipusatkan di masjid. Hingga sekarang upacara adat tradisional dan upacara adat keagamaan masih saja dilakukan, seperti penghormatan terhadap leluhur yang dilakukan di kuburan (*mabbaca kobburu*) dan di pinggir laut dengan membacakan mantra-mantra berdasarkan tradisi budayanya dan doa-doa keselamatan berdasarkan ajaran Al-Qur'an.

Pada setiap pembelian peralatan baru dalam kegiatan produksi, seperti perahu, alat tangkap dan sebagainya kesemuanya harus diselamati melalui upacara-upacara *barasanji* yang biasanya dipimpin oleh seorang imam yang di panggil dengan istilah "*Guru Baca*". Di berbagai hal pada tingkah laku sehari-hari, sering menampakkan perilaku-perilaku yang bersumber dari kepercayaan animisme, dinamisme atau sinkretisme. Misalnya, pada umumnya *juragan lopi* sebagai pemimpin kegiatan produksi, mempercayai tentang adanya kekuatan-kekuatan roh yang terdapat pada pantai dan laut, batu, pohon-pohon besar yang lamanya berkisar puluhan tahun. Ada kecenderungan bagi mereka bahwa ketiga unsur tersebut adalah suatu benda hidup yang sakral. Maka muncullah pemujaan-pemujaan dalam kegiatan ekonomi dengan harapan kekuatan-kekuatan gaib penuh mistri yang terdapat di darat dan laut tetap stabil dan memberikan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perjuangan hidupnya⁸. Sinkretisasi antara kepercayaan lama yang bersifat

⁸ Pemitos-sakralan terhadap ketiga unsur alam tersebut, dalam kenyataannya telah melahirkan kearifan ekologi yang dilihat dari cara berpikir (*the way of thinking*) yang memandang manusia bersama dengan alam fisik berada dalam „satu sistem“ sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan internal dan bersifat persuasif. Penyimpangan-penyimpangan atau hal-hal yang mengganggu harmonisasi hubungan mikrokosmos terhadap makrokosmos dilakukan pemulihan melalui berbagai upacara ritual, oleh karena itu yang banyak dijumpai adalah tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kepercayaan, khususnya mitos, kultus, dan ritus serta fetis dan magis (Sallatang, 1984).

imanensi dengan kepercayaan dari agama-agama profetik, khususnya Islam yang bersifat transendensi, tetap melembaga di dalam masyarakat.

Kekuatan nilai kepercayaan, diwujudkan pada sikap pandangan dan cara berfikir dalam berinteraksi dengan alam sekitarnya yang teraktualisasikan dalam proses pemanfaatan sumber daya laut. Hubungan yang nampak antara nelayan dengan alam fisik pada awalnya (masa lalu) menunjukkan “hubungan penyesuaian atau hubungan persuasif”. Namun, sejak periode akhir tahun 1970-an atau awal tahun 1980-an hingga kini tampaknya kepercayaan-kepercayaan tersebut lambat laun mulai tererosi. Selain pengaruh agama Islam yang telah dianut dengan baik, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi membawa perubahan-perubahan pada nilai kepercayaan yang cenderung semakin menipis. Adakalanya dikalangan nelayan, seseorang atau kelompok melakukan pemujaan-pemujaan secara diam-diam dan bahkan sudah ada yang malu untuk melakukan hal seperti termaksud di atas. Namun demikian, tidak berarti nilai-nilai dasar atau keyakinan dasar dari kepercayaan nelayan terhadap kekuatan gaib yang terdapat di alam ini telah berubah, hanya saja telah banyak mengalami penyesuaian-penyesuaian seiring dengan perkembangan. Mengapa demikian? Menurut Sallatang (1994) manusia memandang diri dan lingkungannya berkaitan dengan sikap pandangan dan cara berpikinya (*the way of thinking*). Ada dua cara berpikir manusia dalam memandang lingkungannya, yaitu: (1) cara berpikir objektif (*objectivating way of thinking*), di mana hubungan manusia dengan alam fisik adalah hubungan eksternal yang bersifat eksploratif dan eksploitatif. Cara berpikir seperti ini, manusia sebagai sistem mempunyai paham bahwa alam fisik sebagai lingkungan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk keperluan atau kepentingan manusia, sehingga tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kepercayaan tradisi dan nilai yang bersumber dari *local knowledge* tidak lagi mendapat tempat (terakomodir). Sifat hubungan inilah mendorong terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan (*science*) dan teknologi modern (*modern technology*) dengan segala akibat-akibatnya yang timbulkan kemudian. (2) Cara berpikir partisipatif (*participating way of thinking*), di mana hubungan manusia dengan alam fisik adalah

hubungan internal dan bersifat persuasif sehingga keperluan hubungan komunikasi dengan alam fisik dipergunakan simbol-simbol alam dan tingkah laku. Karena alam metafisik sebagai lingkungan yang hendak dimanfaatkan tidak empirik, maka ilmu pengetahuan modern (*science*) sangat sukar bahkan tidak dapat beroperasi mencari dan menemukan keterangan di dalamnya, sehingga yang banyak dijumpai adalah tindakan yang berkaitan erat dengan kepercayaan, khususnya mitos, kultus dan ritus serta fetis dan magis.

Dapat disimpulkan bahwa timbulnya kecenderungan untuk tetap mempertahankan atau terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya (tradisi), pada prinsipnya disebabkan oleh pengaruh lingkungan, sebagaimana konsep dasar dari masalah pokok yang dihadapi manusia secara universal yakni persoalan mengenai sifat dasar manusia (*human nature*), hubungan manusia dengan alam, titik masa yang menjadi perhatian kehidupan manusia, dan hubungan antar manusia dengan sesamanya.

Struktur berdasarkan produksi dicirikan dalam bentuk kelompok-kelompok sosial (*social groups*), yang dominan ialah “kelompok nelayan” sebagai kelompok kerja. Di Sulawesi Selatan (Suku Bugis, Makassar dan Mandar), pemimpin kelompok ini disebut “*ponggawa, punggawa* ataupun *punggaha*”, sedang warga lainnya yang merupakan pengikut dalam kelompok, disebut “*sahi* atau *sawi*”. Eksistensi dari kelompok ini dikenal dengan sebutan kelompok “*punggawa-sawi*” (Sallatang, 1983) dan dalam tulisan selanjutnya disebut kelompok “*punggaha-sahi*” (istilah berdasarkan dialek masyarakat nelayan di Pulau Kambuno). Istilah (gelar) *punggawa* atau *punggaha* secara terminologi merupakan gabungan dari dua suku kata, yaitu dari kata *pawang* (bahasa Indonesia) berarti pelindung (dukong yang melindungi) dan kata *gawe* (bahasa Jawa) berarti kerja. *Punggawa* atau *punggaha* dapat diartikan sebagai pelindung kerja, yaitu orang yang berperan melindungi para *sawi* atau *sahi* (pekerja) dari berbagai kesukaran, baik berupa gangguan supernatural sebagai himbauan perbaikan atau penyempurnaan prosedural, khususnya di masa lampau, maupun kesukaran yang dihadapi kini dan kemudian dalam pengelolaan modern (investasi usaha melalui *intensif capital*), misalnya kekurangan kapital, teknologi dan

fasilitas materiel lain yang diperlukan (Arief, 2015). Sebagai “kelompok kerja” pada umumnya menamakan dirinya sesuai dengan nama alat yang dipergunakan seperti; kelompok *pa'gae*, *pa'nambe*, *pa'taripang*, *pa'karamba*, *pa'lambere* dan sebagainya.

Dalam satu kelompok terdiri dari peranan-peranan yang dimainkan oleh orang-orang atau anggota-anggota sebagai pelaku-pelaku⁹. Antara peranan-peranan satu sama lain saling membutuhkan, saling bergantung atau saling menentukan. Hubungan peranan yang satu dengan peranan yang lain mewujudkan interaksi antara anggota-anggota dalam kelompok. Interaksi-interaksi diatur oleh norma-norma yang berkaitan satu sama lain dan secara keseluruhan membentuk satu kesatuan. Dengan demikian, hubungan kerja antara *punggaha* dengan *sahi* telah membentuk sistem sosial nelayan, yang melibatkan warga masyarakat dan kelompok-kelompoknya. Pembagian menurut lapangan pekerjaan dan peranan masing-masing anggota kelompok, merupakan dasar pembentukan struktur berdasarkan produksi dalam kelompok sosial. Sedang dasar pembentukan struktur termaksud, tidak diketahui dengan pasti kapan terwujudnya. Akan tetapi, diperkirakan kelompok sosial ini sudah ada sejak dahulu dan melembaga sampai sekarang, di mana hal itu merupakan hasil interaksi dalam masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dan teratur, sehingga dengan sendirinya memberikan hak-hak dan kewajiban tertentu dalam interaksinya baik secara horizontal maupun secara vertikal. Dengan struktur yang demikian ini, *punggaha* mempunyai kedudukan terpancang dalam kelompok maupun dalam masyarakat, karena peranannya.

Pembagian peranan dalam kelompok “*punggaha-sahi*” diklasifikasikan sebagai berikut. *Punggaha* mempunyai peranan: (1) memimpin dan mengorganisasikan kelompok dalam kegiatan produksi, (2) menyediakan modal, (3) menyediakan alat tangkap (*fishing gear*),

⁹ Rumusan umum mengenai kelompok sosial menurut Sherif (1956) adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri dari atas dua atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur, sehingga di antara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, struktur dan norma-norma tertentu, yang khas bagi kesatuan sosial tersebut. Sementara Sallatang (2007) menyebutkan bahwa dasar pengelompokan banyak ditentukan oleh faktor geonologis, teritorial maupun religius.

termasuk (4) menyediakan kapal tangkap atau perahu. Sebagai bagian dari peranan pemimpin dan mengorganisasikan kelompok yang dilakukan oleh *punggaha* ialah: perekrutan anggota kelompok, pembagian hasil, pemberian pinjaman kepada para *sahi* dalam bentuk uang atau bahan sebagai biaya hidup (*cost of living*), termasuk keluarganya yang mereka tinggalkan selama mereka berada di laut.

Dalam perkembangannya *punggaha* pada kelompok kerja terbagi atas dua orang yaitu: (1) *punggaha darat* yang biasa juga digelar sebagai *punggaha bonto* (*bonto* dalam bahasa Bugis bermakna “bukit”), dan (2) *punggaha kecil* atau *juragan lopi*. *Punggaha bonto* adalah pemimpin tertinggi kelompok dan memimpin langsung berbagai kegiatan di darat khususnya kegiatan pemasaran. Sedang *punggaha kecil* atau *juragan lopi*, berperan memimpin operasional penangkapan ikan dan atau pengumpulan biota laut. Keberadaan *juragan lopi*, sebenarnya adalah juga *sahi* yang diberi tugas dan kepercayaan oleh *punggaha bonto* karena dianggap berpengalaman, dinilai jujur, bertanggung jawab dan ada hubungan kekeluargaan.

Sementara fungsi dari kelompok kerja ini, sedikitnya dapat teridentifikasi empat fungsi pokok yaitu; (1) fungsi pembuka lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakatnya. Dapat diasumsikan bahwa satu-satunya lembaga tradisional yang masih bertahan sampai saat ini yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan adalah kelembagaan *punggaha-sahi*. (2) Fungsi pendidikan dan keterampilan, khususnya berkaitan dengan peristiwa putus sekolah. Lembaga ini telah menjalankan fungsi latensi atau pemeliharaan pola (*patterns of maintenance*) melalui proses belajar berdasarkan pengalaman (*experience based learning process*) yang diturunkan dari generasi ke generasi. Diawali dengan membudayakan pekerjaan di laut dengan sekadar mengikutsertakan anak-anak mereka sampai pada menjadikannya sebagai bagian (anggota) dari kelompok kerja yang kepadanya diharapkan memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan pekerjaan tersebut baik penggunaan teknologi alat (*hardware*) maupun pelaksanaan teknologi cara (*software*). (3) Fungsi perkreditan, banyak terperagakan dalam kebutuhan hidup sehari-hari dan

juga menyangkut kegiatan pelaksanaan berbagai macam upacara adat khususnya peristiwa perkawinan dan sebagainya. (4) Kepastian atau jaminan sosial (*social security*), merupakan gambaran sebuah hubungan sosial yang dimotivasi oleh adanya keinginan saling membantu dari kedua belah pihak, saling melindungi dalam kesukaran hidup yang dihadapi.

Hubungan kerja antara *punggaha* dan *sahi*, diatur oleh nilai kejujuran, rajin bekerja dan sopan santun yang dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku. Ada sebuah ungkapan yang masih tetap dipertahankan bagi masyarakat dalam membina hubungan produksi maupun sosialnya yaitu; “...*naiya tau malempue’ manguru mana’i tau sugie*”. Artinya, orang yang jujur sewarisan dengan orang kaya. Makna yang terkandung adalah sebuah penegasan bahwa orang jujur tidak sulit untuk memperoleh kepercayaan karena kejujurannya. Ini menjadi landasan yang paling kokoh dan harus dipegang teguh oleh kedua belah pihak dalam menjaga eksistensi dan interaksi mereka dalam kelompok kerja. Bila terjadi pelanggaran maka akibatnya adalah cemoohan yang diterima dari masyarakat, baik yang berperan sebagai *punggaha* maupun sebagai *sahi*. Keengganan untuk bekerja sama misalnya pada seorang *punggaha* atau enggan mempekerjakan seorang *sahi* merupakan celaan besar dan dipandang sebagai pelanggaran atau hinaan dalam masyarakat. Ketentuan sosial ini mereka harus jaga sebaik-baiknya melalui pengendalian sosial (*social control*).

Masih dalam hubungan produksi. Ada peranan yang tak kalah pentingnya dalam kegiatan produksi yang dijalankan oleh orang di luar komunitas (*supra lokal*), dan diberi gelar sebagai “bos” oleh masyarakat. “Bos” dalam peranannya, lebih kepada penyandang dana bagi *punggaha bonto*, dengan konsekuensi bahwa hasil produksi yang diperoleh kelompok kerja *punggaha bonto*, dipasarkan kepadanya, khususnya untuk kelompok kerja *pa’taripang* (penyelam teripang) dan *pa’karamba* (ikan hidup). Para “bos” ini umumnya berdomisili di Sinjai dan Makassar di mana di antaranya banyak diperankan oleh warga keturunan (Cina) dengan mempraktikkan pola-pola yang kapitalistik melalui mekanisme *money-*

commodity-money (M-C-M)¹⁰. Terlepas kedudukan “bos” di luar komunitas masyarakat, hubungan fungsional antara *punggaha bonto* juga bersifat hubungan mempribadi berdasarkan kepercayaan (*trust*), sehingga keberadaan “bos” dalam sistem produksi sedapat mungkin dirahasiakan *punggaha bonto* kepada anggota kelompoknya¹¹. Kondisi ini menyebabkan kedudukan “bos” nampak samar-samar dan tidak termasuk dalam struktur organisasi kerja, meskipun peranannya sangat menentukan.

Selanjutnya, mekanisme aturan pembagian hasil dalam kelompok kerja (*working group*), secara umum dikenal adanya lima bagian-bagian hasil, yaitu: (1) bagian hasil kepemimpinan atau *kepunggahaan*, orang yang memimpin dan mengorganisasikan kelompok; (2) bagian hasil menyediakan perahu; (3) bagian hasil menyediakan alat tangkap; (4) bagian hasil menyediakan mesin atau motor pada perahu, (5) bagian hasil untuk menjalankan kegiatan produksi. Empat bagian hasil diperoleh atau diterima oleh *punggaha* yang menggambarkan adanya 4 (empat) peranan atau perangkat peranan yang dimainkan oleh *punggaha*. Selanjutnya 1 (satu) peranan yang tersisa di dalam kelompok yaitu melaksanakan kegiatan operasional di laut diperankan oleh para *sahi* yang jumlahnya tergantung dari jenis alat tangkap yang digunakan. Dengan demikian, ada 5 (lima) peranan atau perangkat peranan yang ada dalam kelompok nelayan *punggaha-sahi*. 4 (empat) peranan dimainkan oleh *punggaha* dan 1 (satu) peranan dimainkan oleh *sahi*. Selain itu, di antara para *sahi* biasanya satu atau dua orang di antara mereka mendapat tambahan peranan yaitu *sahi* yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu misalnya *sahi*

¹⁰ Menurut Heilbroner (1971), bahwa kapital adalah faktor yang menggerakkan suatu proses transformasi berlanjut atas kapital sebagai uang menjadi kapital sebagai komoditas, diikuti oleh suatu transformasi dari kapital sebagai komoditas menjadi kapital sebagai uang yang bertambah (akumulasi).

¹¹ Eksistensi *kepunggahaan* (konteks kekinian) dalam satu kelompok dilihat dari seberapa besar modal yang dimiliki oleh *punggaha* yang dapat menjadi jaminan sosial (*social security*) bagi para *sahinya*. Oleh karena itu peminjaman modal kepada “bos” sedapat mungkin dirahasiakan kepada anggota kelompok untuk menjaga integritas atau kelangsungan usaha serta kepercayaan para *sahi* dan *juragan* (*punggaha lopi*). Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Blau dan Moore (1972) bahwa setiap kelompok sosial mewujudkan suatu jaringan hubungan sosial yang rumit dan kompleks.

yang menangani bagian mesin atau *sahi* yang melakukan penyelaman pada waktu pengoperasian alat tangkap, dan juga *sahi* yang membersihkan mesin dan alat tangkap lainnya setibanya di darat. Bilamana hal itu dianggap perlu, maka tambahan peranan diberikan kepada *sahi* yang memiliki kemampuan di dalam hal pemeliharaan alat-alat produksi yang diistilahkan sebagai bonus dari *punggaha*.

Pada perkembangan selanjutnya (diferensiasi fungsi baik secara horizontal maupun vertikal) pada lapisan atas kelompok, terdapat 4 (empat) peranan yang dimainkan oleh dua orang *punggaha* yaitu seorang *punggaha bonto* sebagai pemimpin tertinggi kelompok (pemilik) dan seorang *punggaha kecil* atau *juragan lopi* sebagai pembantunya (manajer). Sementara pada lapisan bawah kelompok dalam hal ini *sahi*, tetap hanya satu peranan yang dimainkan oleh banyak orang yang sudah terpesialisasikan. Dapat disimpulkan bahwa pada lapisan atas kelompok, cenderung memainkan peranan yang lebih besar atau jauh lebih besar, sementara pada lapisan bawah hanya memainkan peranan yang lebih kecil atau jauh lebih kecil. Karena secara sosiologis peranan merupakan sumber pendapatan, maka pendapatan orang-orang yang menduduki lapisan atas, adalah lebih besar atau jauh lebih besar dari pada pendapatan orang-orang yang menduduki lapisan bawah kelompok dan lapisan bawah sosial pada umumnya.

Dalam hal pelapisan sosial (*social stratification*) di pulau ini, awal mulanya pada umumnya dikatakan hampir sama dengan *setting* kebudayaan masyarakat Bugis-Makassar yang terdiri dari tiga lapisan yakni; *Anak Karaeng*, *Tomaradeka*, dan *Ata* (Mattulada, 1975). Seiring dengan perkembangan zaman nilai-nilai yang dihargai dalam pelapisan masyarakat pun mengalami perubahan. Hingga akhir tahun 1980-an, kebangsawanan masih menjadi salah satu poin penting dalam menilai posisi seseorang dalam masyarakat sebagaimana pendasaran pada masa lalu. Namun memasuki era tahun 1990-an, masyarakat lebih rasional dan logis dalam memandang kedudukan seseorang, tidak lagi melihat keturunan (kebangsawanan) sebagai sesuatu yang lebih utama, tetapi tingkat pendidikan, kesalehan beragama atau kepemilikan atas faktor-

faktor produksi (ekonomi) justru tampil lebih dominan. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya penghargaan sosial terhadap kepemilikan harta kekayaan di pulau ini justru semakin mendapat tempat dalam struktur sosial masyarakat. Biasanya orang-orang yang dianggap paling terpendang dalam masyarakat tidak hanya menguasai satu kriteria penghargaan, namun memenuhi beberapa kriteria (akumulasi) yang dianggap dominan dalam masyarakat.

Dalam melihat stratifikasi sosial masyarakat dalam konteks keragaman pekerjaan pasca modernisasi di pulau ini, metode reputasional merupakan metode pendekatan yang dipergunakan dengan jalan para subjek penelitian diminta menilai suatu status pekerjaan dan menempatkan pada suatu skala tertentu. Justifikasi konsep ini mengikuti pendekatan yang pernah dilakukan Warner (1949) dalam Zanden (1990), Satria (2001) (Tabel-3).

Tabel-3: Stratifikasi Sosial Masyarakat Pulau Kambuno

LAPISAN	JENIS PEKERJAAN
Atas-Atas ($5,5 < 6$)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Pemilik usaha keramba (<i>punggaha bonto</i>) 3. Pemilik kapal penangkap ikan (<i>punggaha bonto</i>) 4. Dokter
Atas-Bawah ($5 < 5,5$)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedagang pengumpul 2. Punggaha kecil (<i>juragan lopi</i>) 3. Pemilik kapal penumpang 4. Pemilik usaha budidaya rumput laut 5. Pemilik Tokoh 6. Imam desa
Menengah-Atas ($4 < 5$)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik perahu 2. Polisi 3. ABRI 4. Guru SMP 5. Guru SD 6. Pegawai Kantor kecamatan 7. Pegawai kantor desa 8. Pegawai PUSKESMAS 9. Pegawai PLN

LAPISAN	JENIS PEKERJAAN
	10. Pengurus ORMAS 11. Pemilik bengkel perahu
Menengah-Bawah (3 < 4)	1. Karyawan swasta 2. Juru kemudi kapal penumpang 3. Penyelam 4. Tukang kayu 5. Tukang jahit 6. Petani rumput laut 7. Nelayan pancing 8. Pemilik kios 9. Pemilik warung
Bawah-Atas (2 < 3)	1. Pengurus karamba 2. Penjual ikan di pasar
Bawah-Bawah (1 < 2)	1. <i>Sahi</i> (buruh) 2. ABK kapal penumpang 3. Tukang gerobak

Sumber: Data Primer dari Hasil Survei Masyarakat Pulau Kambuno, 2006.

Lapisan elite atau atas masyarakat di Pulau Kambuno, terdiri dari tiga dimensi, yakni ketokohan, ekonomi (*property*) dan sosial, namun yang dominan adalah dimensi ekonomi. Kepala *desa* menempati lapisan atas karena ketokohan sebagai kepala *desa* bukan karena faktor kekuasaan, ini terbukti ABRI, POLISI ditempatkan pada lapisan menengah-atas. Pemilik keramba dan pemilik kapal, menempati lapisan atas karena kepemilikannya atas alat produksi. Sementara dokter menjadi bagian lapisan atas karena dianggap sangat berjasa dalam kelangsungan kehidupan sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan. Begitu pula yang terjadi pada lapisan atas-bawah di mana sebagian diisi oleh kalangan yang memiliki alat produksi sehingga semakin mengukuhkan bahwa dimensi kepemilikan menjadi ukuran penting dalam menentukan pelapisan sosial.

Sementara yang menempati lapisan menengah-atas adalah pekerjaan yang menyangkut pelayanan publik dan pemilik alat produksi skala kecil, seperti tenaga pendidik, para medis, pegawai kecamatan/desa, pemilik perahu, pemilik bengkel dan sebagainya. Untuk lapisan menengah-bawah, diisi oleh tenaga kerja terampil dan juga pemilik usaha skala rumah

tangga, seperti juru kemudi kapal penumpang, tukang kayu, tukang jahit, petani rumput laut, pemilik kios dan pemilik warung. Pada lapisan bawah, baik bawah-bawah maupun bawah-atas terdiri dari pekerjaan yang benar-benar hanya membutuhkan keterampilan yang rendah dan hanya mengandalkan tenaga fisik. Buruh (*sahi*) di semua sektor, pengurus keramba maupun tukang gerobak tergolong pada lapisan ini.

Kesimpulannya bahwa model stratifikasi pada masyarakat Pulau Kambun dalam konteks kekinian masih lebih cenderung pada model Weberian yang bersifat multidimensi (ketokohan, ekonomi (*property*) dan sosial) dibanding dengan model Marxis yang hanya satu dimensi, yakni kepemilikan (*property*). Kesimpulan yang sama juga pernah dilakukan dalam studi Sujatmiko (1996) bahwa stratifikasi yang dibayangkan oleh masyarakat Jakarta lebih cenderung pada model Weberian (multidimensi) dibanding *one dimension* model Marxis (*property*).

Konstruksi sosial berdasarkan relasi gender. Umumnya wanita di Pulau Kambuno diberi kedudukan sebagai simbol kehormatan bagi kaum lelaki. Ia diberi fungsi utama untuk menata rumah tangga yang harus dijaga kehormatannya dan ditanggung nafkahnya. Terkadang masih dirasakan kurang wajar jika wanita ikut serta melaksanakan beberapa pekerjaan, khususnya pekerjaan yang berat atau yang membutuhkan pengerahan tenaga fisik ataupun suatu pekerjaan yang karena sifatnya, lebih banyak berlangsung di luar lingkaran rumah dan pekarangan, atau lokasinya jauh dari rumah kediaman. Dalam perkembangannya, aktivitas ekonomi dan aktivitas domestik¹² yang dijalani wanita mulai tercirikan seiring dengan semakin terbukanya kesempatan dan kesadaran bagi lelaki (sebagai kepala rumah tangga) akan peluang-peluang yang dimiliki wanita dalam menambah/meningkatkan ekonomi keluarga, meskipun batas-batas ruang lingkup wilayah kerja masih tetap dibatasi hanya di daerah pulau saja. Peranan aktivitas ekonomi wanita pesisir dan pulau-pulau kecil

¹² Aktivitas domestik mencakup aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam bidang-bidang pekerjaan yang hanya dibatasi pada lingkup unit keluarga, sedangkan aktivitas publik mencakup aktivitas-aktivitas di bidang ekonomi dan politik yang mengambil tempat atau memiliki dampak melampaui batas-batas unit keluarga (Sanday, 1974).

sangat nampak dalam usaha budidaya rumput laut (Astanty dan Arief, 2014). Hampir pada umumnya tenaga kerja yang terlibat dalam mempersiapkan bibit rumput laut dan mengikatnya pada tali bentangan yang dihargai Rp1500-, (per bentangan) dilakukan oleh tenaga kerja wanita dan anak-anak. Dengan dikerjakan secara berkelompok di bawah kolong rumah atau di bawah pohon pekarangan rumah, kegiatan mengikat bibit rumput laut pada tali bentangan dilakukan wanita-wanita nelayan bersama dengan anak-anaknya dalam suasana penuh keakraban. Isu gender pada wanita di Pulau Kambuno telah memperlihatkan dua pola peranan, yaitu; Pola peranan yang menggabungkan aktivitas sepenuhnya untuk menangani pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan pemeliharaan kebutuhan hidup seluruh anggota keluarga, dan; Pola peranan yang memiliki dua fungsi, yaitu menangani pekerjaan rumah tangga (domestik) dan pekerjaan mencari nafkah untuk rumah tangganya (publik).

BAB III

MODERNISASI PERIKANAN DAN DINAMIKA FORMASI SOSIAL

Kekuatan Awal Modernisasi Perikanan

Mata pencaharian sebagai nelayan banyak tergantung pada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi terkandung arti: pertama, perkembangan teknologi sebagai perbaikan atas alat yang terdahulu, di dalam lingkungan alam yang tetap; kedua, sebagai jawaban kepada berubahnya lingkungan alam. Pengertian ini digunakan sebagai titik tolak dalam usaha mengungkapkan perkembangan teknologi nelayan setempat yang berimplikasi terhadap lahirnya cara produksi (*mode of production*) baru dalam masyarakat.

Jika pengetahuan adalah keterangan, maka penggunaan keterangan-keterangan yang ada pada pengetahuan dan ilmu pengetahuan dalam mengadaptasi sumber daya alam disebut teknologi, ia berfungsi sebagai penyambung tangan manusia dan diciptakan untuk lebih memudahkan kehidupan. Jauh sebelum adanya ilmu (*science*) atau apa yang seringkali disebut ilmu pengetahuan modern, telah ada teknologi di dalam masyarakat. Ia dilahirkan oleh pengetahuan asli (*local knowledge*) dari masa ke masa dan diwariskan dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Khususnya perangkat lunak (*software*) yang merupakan cara-cara sebagai suatu yang bersifat nonmateriel yang selanjutnya terwujud ke dalam perangkat keras (*hardware*) berupa alat-alat sebagai suatu yang

bersifat materiel dan merupakan fasilitas. Betapapun sederhana atau bersahajanya suatu teknologi, baik yang dilahirkan oleh pengetahuan asli (*local knowledge*) maupun oleh ilmu (*science*), pada waktu (masa) kelahirannya merupakan teknologi modern. Dalam perjalanannya, berangsur-angsur menjadi teknologi tradisional dan lebih lanjut dapat menjadi teknologi kuno, sejauh telah ada yang baru atau lebih baru dan lebih baik untuk menggantikannya. Oleh karena itu antara teknologi tradisional dan teknologi modern bukan sesuatu yang harus dipertentangkan tetapi sejauh mana ia dapat diperakarkan atau saling melengkapi antara yang tradisional dan modern sebagai sesuatu yang tumbuh dan bersumber dari masyarakat itu sendiri.

Ada dua jenis teknologi menurut sumbernya yang telah dikembangkan oleh masyarakat nelayan Sulawesi Selatan sampai dewasa ini. *Pertama* adalah dilahirkan oleh pengetahuan asli (*local knowledge*) dengan penggunaan keterangan yang bersifat partisipatif, asosiatif, analogik, dan orientatif dan seringkali berkaitan erat dengan kepercayaan lama yang bersifat imanensi, yang umumnya bersumber dari dalam. *Kedua*, dilahirkan oleh ilmu pengetahuan atau dengan penggunaan keterangan-keterangan ilmiah yang kebanyakan bersumber dari luar, masuk ke dalam masyarakat melalui kontak dengan dunia luar. Teknologi yang disebutkan pertama, relatif lebih terikat oleh nilai-nilai sosial dari pada yang disebutkan ke dua, dan pada umumnya merupakan teknologi yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan seringkali disebut teknologi tradisional. Sedang teknologi yang disebutkan kedua atau teknologi baru merupakan teknologi modern yang prinsip kerjanya lebih efektif dan efisien yang dapat meningkatkan produksi dalam *mode of production*.

Kedaaan cara berproduksi masyarakat nelayan di Pulau Kambuno sebelum masuknya modernisasi perikanan, dicirikan oleh penggunaan teknologi alat yang masih sangat terbatas dan sederhana dan bersumber dari pengetahuan lokal (*local knowledge*). Perahu tangkap yang dipergunakan masih mengandalkan tenaga angin, sehingga area tangkap (*fishing ground*) hanya sebatas pada laut dangkal di sekitar pulau. Alat tangkap pada saat itu didominasi oleh alat tangkap yang sifatnya sangat

pasif (menunggu) dengan mengandalkan kondisi alam dan “nasib baik”, Penggunaan alat tangkap tersebut berupa; pancing, bubu, jala, sero, panah dan *ladung*¹³. Dalam perkembangannya, di antara dominasi alat tangkap yang disebutkan, ada pula sebagian kecil nelayan yang sudah mulai menggunakan alat tangkap yang sifatnya aktif dengan kemampuan menghalau maupun untuk menarik ikan seperti; *pukat jepang* (pukat *muro-ami*), *ulambi* maupun *panambe*. Bagaimana proses kemunculan alat tangkap aktif ini? Untuk Alat tangkap *ulambi*, diperoleh keterangan bahwa alat tangkap yang digeluti atau pernah digelutinya adalah warisan yang ditinggalkan oleh pendahulu mereka, sehingga proses kemunculan alat-alat tersebut tidak dapat diungkap lebih banyak. Sementara alat tangkap *pukat jepang* (pukat *muro-ami*)¹⁴ diyakini oleh masyarakat adalah peninggalan pasukan Jepang sehingga diberi nama *pukat jepang*. Namun untuk alat tangkap *panambe*, memiliki informasi yang berbeda dengan dua informasi sebelumnya. Seorang *punggaha bonto* sekaligus tokoh nelayan di Pulau Kambuno menuturkan:

“...penggunaan alat tangkap *panambe* seingat saya, yang mula-mula menemukan adalah nelayan Kambuno sendiri yaitu Pak Pake almarhum, sekitar tahun 1975. Lokasi penangkapannya di daerah sekitar sini saja. Banyak orang mencontoh bahkan ada juga yang

¹³ *Ladung*, merupakan alat bantu yang dipergunakan oleh *pasellung taripang* (penyelam teripang), yang terbuat dari kimah atau kerang raksasa (*Tridacna gigas*) dengan berat 5-7 kg yang berfungsi sebagai pemberat dalam melakukan penyelaman. Konstruksi *ladung* adalah: Kimah diikat dengan *tulu gemme* (tali ijuk) dengan panjang 10-15 depa (± 20 m) lalu di tambahkan dengan menancapkan besi runcing yang berfungsi untuk mengait teripang.

¹⁴ Pukat *muro-ami* merupakan jaring khusus yang dipergunakan untuk menangkap ikan karang, seperti ekor kuning, pisang-pisangan dan sebagainya. Jaring ini diperkenalkan di Indonesia oleh orang Jepang dari Okinawa, sebelum perang dunia kedua. Jaring ini dioperasikan dengan mengandalkan tenaga kerja yang banyak yaitu sekitar 40 orang, terutama berfungsi sebagai penggiring ikan agar masuk ke dalam kantung jaring. Pada tahun 1933, *Instituut voor de Zeevisserij* mencobanya di Kepulauan Seribu. Pada tahun 1960-an *muro-ami* berkembang pesat dan beroperasi selain di Kepulauan Seribu tetapi juga di Perairan Bangka, Belitung, Selat Karimata dan juga di kawasan timur Indonesia. Perbedaan pukat *muro-ami* yang dipakai oleh nelayan Kepulauan Seribu dengan nelayan di Kepulauan Spermonde Makassar terletak pada ukuran jaring yang lebih kecil (Soewito, *et al.*, 2000)

memesan langsung alat ini ke Pak Pake untuk di dibuatkan. Alat ini dulu banyak diminati oleh nelayan karena tidak terlalu jauh orang pergi menangkap, cocoknya alat ini memang untuk daerah-daerah dangkal apalagi dulu kita masih pakai sompe (layar)...”

Penelusuran proses kemunculan alat tangkap sebagai salah satu kekuatan produksi, dapat dihubungkan dengan karakteristik rumusan “*modern man*” oleh Inkeles dan Smith (1974) tentang adanya perilaku masyarakat untuk melakukan inovasi atau adopsi teknologi, melepaskan diri dari ketergantungan alam sehingga dapat menguasai sumber daya alam untuk kesejahteraan, berorientasi ke depan, tidak berorientasi ke masa lalu, serta, yakin atas pentingnya peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyejahterakan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa kemunculan alat tangkap *panambe* merupakan *invention* (menemukan sendiri) teknologi oleh individu inovatif yang kemudian menyebar dalam komunitas. Kombinasi yang terjadi antara pola adopsi (*adoption*) dengan pola menemukan sendiri (*invention*) teknologi oleh masyarakat, menandai perkembangan dalam aktivitas kenelayan di pulau ini melalui dua pilihan alat tangkap, yaitu alat tangkap pasif yang sifatnya “menunggu” dan alat tangkap aktif yang sifatnya menghalau dan menjaring dengan kemampuan tangkap yang lebih produktif. Ini relevan dengan penekanan Rogers (1962) dan Summer (1983) bahwa peranan individu inovatif sangat besar dalam terjadinya perubahan sosial dalam satu komunitas. Sementara Mosher (1966) menyebutnya sebagai “manusia pelopor” orang yang memperbaharui (*innovators*) di dalam tiap-tiap masyarakat.

Jenis Perahu yang digunakan, jenis; *lepa-lepa* (sampan), perahu layar (*soppe layara*), dan *jarangka* (bercadik dua). Alat tangkap dioperasikan baik secara individu maupun berkelompok dengan tipe hubungan yang bersifat egaliter. Sistem usaha yang ada masih bercorak subsisten dan bertumpu pada penggabungan tenaga kerja keluarga (*human capital*). Pengertian subsisten mengandung arti bahwa nelayan menjual hasil produksinya tetapi hasil penjualan tersebut digunakan hanya untuk keperluan konsumsi dan bukan untuk keperluan investasi dengan mekanisme pertukaran pasar C-M-C (*Comodity-Money-Comodity*).

Dari aspek pembangunan (pra-modernisasi sebelum tahun 1970-an), intervensi pemerintah untuk sub-sektor perikanan juga belum sampai ke tingkat desa, khususnya pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan usaha perikanan nelayan. Realitas ini tidak hanya berlaku di Pulau Kambuno dan dataran Sinjai sebagai pulau induk (*mainland*), tetapi juga berlaku pada hampir seluruh komunitas nelayan di Sulawesi Selatan. Tercatat bahwa pada masa itu, jumlah rumah tangga nelayan di Sulawesi Selatan sangat banyak, tetapi dengan jenis perahu dan alat tangkap sederhana, serta unit usahanya bersifat individual, menyebabkan volume tangkapannya juga terbatas. Namun, perubahan lambat laun mulai terjadi ketika adopsi teknologi mulai dipergunakan khususnya motorisasi pada perahu tangkap (tahun 1970-an). Pada tahun 1965, jumlah rumah tangga nelayan/usaha perikanan di Sulawesi Selatan mencapai 162.985 unit, dengan volume produksi 88.000 ton, nilai produksi Rp2,2 miliar, jumlah alat tangkap 60.630 unit dan jumlah perahu 32.433 buah (tidak bermesin). Pada tahun 1970, dikatakan babak baru dalam usaha perikanan rakyat di Sulawesi Selatan, karena pada tahun itu, penggunaan mesin (*out board engine*) pada perahu tangkap mulai dilakukan. Lima tahun kemudian pada tahun 1975, perkembangan volume dan nilai produksi seiring dengan penggunaan teknologi baru (motorisasi) sangat signifikan. Jumlah rumah tangga nelayan/usaha perikanan mencapai 174.100 unit, volume produksi 100.340 ton, nilai produksi Rp10 miliar, jumlah alat tangkap 97.000 unit, perahu tanpa motor 40.950 buah, dan perahu motor tempel 653 buah, serta kapal motor 16 buah (Salman, 2006). Hanya saja, pada fase ini masih tetap memperlihatkan bahwa proporsi rumah tangga sebagai unit usaha masih sangat dominan (produksi subsisten) dibanding usaha perikanan dalam arti sejumlah rumah tangga nelayan berkumpul sebagai satu unit usaha (produksi komersialis maupun kapitalis).

Bagaimana dengan Pulau Kambuno? Modernisasi perikanan pada pertengahan tahun 1970-an, merupakan awal dari perubahan sosial pada masyarakat nelayan, karena pada masa itu motorisasi pada perahu merupakan salah satu penemuan baru dalam bidang teknologi perikanan yang diadopsi pula oleh nelayan dan secara tidak langsung juga merupakan

modernisasi dalam kehidupan masyarakat di pulau ini. Sentuhan teknologi modern (penggunaan motorisasi dalam kegiatan produksi) pada mulanya dilakukan atas prakarsa sendiri (individu inovatif) oleh nelayan di Pulau Kambuno¹⁵ seiring dengan perkembangan motorisasi nelayan pada daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan seperti, Kota Madya Pare-Pare, Makassar, Jeneponto, Bulukumba, Bone dan sebagainya. Penggunaan teknologi ini memberi manfaat yang besar kepada masyarakat nelayan, khususnya di Kabupaten Sinjai sebagai pulau induk (*mainland*), penggunaan mesin tempel (*out board engine*) selain dipergunakan dalam kegiatan produksi, ada pula di antaranya memakai sebagai angkutan penumpang antar desa (sarana transportasi) dari daerah Lappa ke wilayah Pulau Sembilan.

Proses pengenalan secara umum mengenai motorisasi di Pulau Kambuno pada pertengahan tahun 1970-an, diawali dari hasil interaksi mereka dengan nelayan lain luar pulau, khususnya nelayan-nelayan daerah Lappa dan Makassar. Keberadaan pedagang perantara (*middleman*) turut pula memberi andil akan informasi dan pemberian modal pinjaman pengadaan teknologi penangkapan yang telah dipraktikkan nelayan-nelayan lain di Sulawesi Selatan dan Pulau Jawa. Peranan para pedagang (tengkulak atau bos) sebagai *middleman* dalam mewujudkan kebijakan modernisasi perikanan, khususnya informasi dalam adopsi teknologi dan modal usaha kerja dalam menggerakkan roda perekonomian di desa-desa nelayan juga tidak sedikit pengaruhnya.

Motorisasi yang dipahami sebagai babak baru dalam kehidupan kenelayanan di Sulawesi Selatan, sebenarnya dimulai di Indonesia sejak tahun 1960, di mana motorisasi pertama kali diterapkan di Sampit, Banjarmasin dan Palembang. Tiga tahun kemudian (tahun 1963) baru

¹⁵ Hasil wawancara dengan HG (67 thn); HJ (72 thn), mengutarakan bahwa penggunaan mesin perahu pertama di Pulau Kambuno sekitar tahun 1977 yang diusahakan sendiri oleh nelayan di pulau ini. Untuk usaha penangkapan yang digeluti (HJ), penggunaan mesin perahu dengan alat tangkap *gae* dilakukan pada tahun 1982 yang didapatkan dari seorang *punggaha* di daerah Paotere Makassar. Dengan menjual pukat *muro-ami* yang dipergunakan pada waktu itu serta perhiasan emas yang dimiliki istrinya, HJ membeli dan mengadopsi teknologi tersebut (mesin dengan alat tangkap *gae*) dengan harga Rp1.750.000. (wawancara: 20 Juli 2006).

diperkenalkan di Sulawesi Selatan dengan eksperimen memasang pada pada perahu jenis *lambo* dan *phinisi* di wilayah perairan Pare-Pare (*Regional Adaptive Technology Center*, 1974). Dalam tulisan Sudharto, (1982) disebutkan bahwa selang masuknya teknologi motorisasi di Sulawesi Selatan adalah sekitar tahun 1963, yang kemudian dipergunakan dalam perahu nelayan (*in board engine*) sekitar tahun 1969/1970. Begitu juga selang waktu masuknya teknologi yang sama di wilayah lain Sulawesi Selatan khususnya di pulau-pulau kecil di perkirakan pada pertengahan tahun 1970-an. Motorisasi pertama kali di Kambuno sekitar tahun 1977.

Dalam analisis kebijakan, bantuan pemerintah melalui motorisasi dalam usaha penangkapan nelayan secara formal dimulai pada tahun 1974 dengan dikeluarkan model “KIK” (Kredit Investasi Kecil) dan “KMKP” (Kredit Modal Kerja Permanen) (Sudharto, 1982). Setahun kemudian, tahun 1975 secara umum baru terdapat sekitar 653 rumah tangga perikanan (RTP) di Sulawesi Selatan yang menggunakan motor tempel, dan 16 RTP yang menggunakan kapal motor (Lewangka, *et al.*, 1977). Di antara RTP yang menggunakan motor tempel yang ada di Sulawesi Selatan, 41 buah di antaranya terdapat di Kelurahan Lappa. Sedangkan dua kapal motor yang terdapat di Kabupaten Sinjai semuanya terdapat di Kelurahan Lappa. Sementara untuk masyarakat Pulau Kambuno dengan orbitasi wilayah yang jauh dari daratan, belum sama sekali tersentuh dengan kebijakan pemerintah tersebut baik yang berupa KIK (Kredit Investasi Kecil) maupun KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen).

Awal mula motorisasi di Pulau Kambuno pada tahun 1977, secara tidak langsung merupakan pengaruh dari perkembangan perikanan di Kelurahan Lappa, yaitu suatu kelurahan di Kecamatan Sinjai Utara yang dulunya juga bergabung dengan wilayah Pulau Sembilan sebelum menjadi kecamatan tersendiri tahun 2002. Kelurahan Lappa, terletak pada daratan rendah di sekitar aliran sungai Tangka, memanjang ke selatan mengikuti garis pantai. Muara sungai Tangka yang terletak di ujung sebelah barat Kampung Lappa'E. Sejak dahulu daerah ini telah ramai menjadi jalur lalu lintas perahu-perahu nelayan.

Berkembangnya motorisasi di daerah Lappa (*out board engine*) maupun *in board engine* dalam usaha penangkapan ikan yang diiringi pula dengan pembangunan infrastruktur, seperti TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang mulai berfungsi pada bulan Agustus tahun 1977 (kantor TPI Lappa, 1989), pabrik es tahun 1979, dan gardu bahan bakar (solar), sedikit banyaknya turut pula mempengaruhi perkembangan motorisasi pada nelayan Kambuno yang berimplikasi terhadap lahirnya cara produksi baru (*mode of production*) berupa penggunaan perahu motor yang berbeda dengan cara produksi lama atau sebelumnya dengan perahu tradisional yang menggunakan layar atau *sompe*.

Formasi sosial terdefiniskan kembali, berupa munculnya dua atau lebih cara produksi dalam satu masyarakat. Jika dilihat dari aspek teknologi, maka cara produksi baru (modern) yang dimaksudkan adalah penggunaan perahu/kapal motor, sementara cara produksi lama (tradisional) berupa perahu layar. Dalam pandangan Neo-Marxis dikatakan bahwa perkembangan kekuatan produksi akan mempengaruhi hubungan produksi yang ada, meskipun sifat kaitannya tidak absolut maupun permanen.

Dari aspek implikasi teknologi, penggunaan motorisasi dalam kegiatan produksi telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada nelayan di pulau ini seperti: kemampuan untuk beroperasi menangkap ikan ke wilayah perairan yang sebelumnya sulit dijangkau; kemampuan untuk tetap berada di lautan dalam waktu yang lebih lama; hasil tangkapan ikan bisa dalam jumlah besar, dan; frekuensi penangkapan yang lebih tinggi akibat ketergantungan akan musim sudah dapat diminimalkan. Meskipun demikian, penggunaan pengetahuan lokal (*local knowledge*) mengenai waktu dan musim penangkapan tetap saja dijadikan pedoman aktivitas kenelayanan di pulau ini. Ini pernah diteliti Hamka (1994). Arief (2007), Arief (2021). Penjelasannya sebagai berikut; periode waktu, di mana pada waktu malam hari sangat gelap karena sama sekali tidak ada cahaya bulan mereka istilahkan sebagai waktu *kalelleng* (gelap gulita), yang mulai berlangsung dari hari pertama terbitnya bulan *Qamaria* sampai dengan hari ke 12 (dua belas) terbit, kemudian diselingi oleh cahaya bulan. Periode

kelelleng muncul kembali pada hari ke 10 (sepuluh) sampai dengan hari ke 27 (dua puluh tujuh) terbit, pada waktu ini dipahami sinar bulan dianggap tidak mengganggu populasi ikan untuk menampakkan diri dan bergerombol, sehingga merupakan waktu yang tepat dalam melakukan aktivitas penangkapan atau diistilahkan sebagai *turona*. Sedang periode waktu “*sala turo*” (masa paceklik) atau waktu *caraketeng* (terang bulan), terjadi 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) hari dalam sebulan.

Selain keadaan waktu yang diuraikan di atas, pengetahuan mengenai *wettu bare* (musim barat) dan *wettu timo* (musim timur) juga menjadi pedoman dalam aktivitas kenelayanan. Pada bulan Juli–Desember dipahami sebagai waktu berlangsungnya *wettu bare* (musim barat) dengan hujan lebat, angin/badai besar dan arus kuat dari arah barat ke timur, yang kurang memungkinkan aktivitas nelayan. Sedang *wettu timo* (musim timur) berlangsung antara bulan Desember–Juni yang ditandai dengan angin dan arus agak lemah dari timur ke barat dan memberikan peluang besar bagi nelayan beroperasi secara intensif. Pengetahuan dari musim barat ke timur ada musim peralihan (*pancaroba*) berlangsung selama kurang lebih 3 bulan (bulan Mei–Juli) yang membawa angin dengan guncangan ombak kurang menentu tak henti-hentinya.

Tabel-4: Musim-Musim Produksi Ikan pada Perairan Teluk Bone

Kuartal/Bulan	Keadaan Musim	Estimasi Keadaan Produksi
A. Kuartal I	Kemarau, cahaya matahari bersinar sepanjang hari	Turona I
Oktober, Nopember, Desember, Januari.		Produksi ikan tinggi, lebih 100 ton
B. Kuartal II	Masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan, langit berawan	Turona II
Februari, Maret, April, Mei.		Produksi ikan sedang, sekitar 80 – 90 ton.
C. Kuartal III	Musim hujan, curah hujan tinggi dan angin kencang	Turona III
Juni, Juli, Agustus, September		Produksi ikan rendah, kurang dari 50 ton.

Sumber: Hamka, 1994; Data Primer Setelah Diolah, 2006.

Perubahan Formasi Sosial dalam Periodisasi

Periode 1970–1980: Apa yang Berubah dalam Formasi Sosial

Cara Produksi Lama. Kekuatan Produksi (*force of production*) meliputi orang yang bekerja, alat-alat produksi yang dipergunakan, bahan-bahan baku, serta sumber alam yang dipergunakan dalam proses produksi. Bahwa sampai dengan pertengahan tahun 1970-an, nelayan di pulau ini masih menggunakan alat tangkap sederhana seperti; pancing (*meng*), jala, bubu, sero serta *ladung* yang merupakan alat bantu dalam pencarian biota laut. Perahu yang digunakan adalah jenis sampan (*lepa-lepa*), perahu *jarangka* serta *soppe layar*. Wilayah tangkapnya daerah sekitar pulau, wilayah pemasarannya hanya di sekitar wilayah pemukiman atau pulau-pulau terdekat, dan motif produksinya sekadar memenuhi subsistensi (C-M-C). Sistem usaha yang kebanyakan dikelola secara individu melibatkan keluarga inti yang juga sekaligus unit konsumsi utama, maka dengan sendirinya tenaga kerja utama yang terlibat juga adalah anggota keluarga inti (*nuclear family*).

Cara pengoperasian alat tangkap tradisional yang dipergunakan nelayan Kambuno pra-modernisasi sebagai berikut:

- Pancing (*line fishing*). Teknologi ini sudah lama dikenal oleh nelayan dengan istilah *meng*. Konstruksi alatnya; terdiri dari mata pancing, tali pancing atau tasi, pelampung, pemberat (timah), dan umpan. Alat ini dioperasikan oleh nelayan pada waktu sore menjelang malam. Proses pengoperasiannya dimulai dengan kegiatan mencari umpan berupa ikan-ikan kecil, di daerah yang airnya dangkal dengan menggunakan alat pancing khusus yang disebut pancing *rinta*. Jenis ikan yang biasa dijadikan umpan adalah jenis ikan dengan ukuran kecil yang ditaburkan ke dalam air untuk memancing kerumunan ikan besar yang kemudian dipancing dengan menggunakan pancing *tabere*. Jenis ikan yang ditangkap adalah jenis ikan dengan ukuran sedang sampai besar, seperti; *sunu*, *katamba*, *bawal merah*, *bawal putih* dan sebagainya (bahasa lokal).
- Bubu (*trap*). Bubu adalah alat penangkap ikan yang dipasang secara tetap di dalam air untuk jangka waktu tertentu yang memudahkan

ikan masuk dan mempersulit keluarnya. Alat ini dibuat dari bahan alami, seperti bambu, kayu atau buatan lainnya seperti jaring, dan termasuk teknologi penangkapan yang bersifat perangkap dan pasif. Konstruksi alat; bubu dibuat dari rautan bambu dengan panjang kurang lebih 70 cm sampai 120 cm, yang diuntai sedemikian rupa sehingga membentuk lingkaran dengan menggunakan bahan pengikat yang terbuat dari rotan atau bambu. Pada dua ujungnya dibiarkan terbuka, bagian belakang ditutup dengan menggunakan tempurung kelapa. Pada bagian dalamnya di kedua ujungnya diberi perangkap yang juga terbuat dari rautan bambu yang lebih kecil sebagai penghalau atau perangkap sehingga ikan yang telanjur masuk tidak dapat keluar lagi. Pengoperasian; alat diletakkan pada dasar laut yang dangkal berlawanan dengan arus air laut, dan dapat diangkat pada sewaktu-waktu. Jarak waktu pengangkatan tidak ditentukan secara pasti, melainkan hanya mengikuti dari perasaan nelayan yang bersangkutan. Jenis ikan yang sering terperangkap; *belanak*, *dolo-dolo* (bahasa lokal) dan ikan jenis lainnya.

- Jala lempar (*cast net*). Jala lempar termasuk alat tangkap yang sangat sederhana. Bisa dibuat sendiri dengan menjurai. Konstruksi alat; bahan terdiri dari nilon multifilamen tetapi bisa juga dari monofilamen, diameter alat tangkap ini bermacam-macam, biasanya 3-5 cm. Pada bagian kaki jaring biasanya diberi pemberat yang terbuat dari timah. Dioperasikan melalui penggunaan tenaga manusia, apabila ada gerombolan ikan atau diduga ada gerombolan ikan yang terdapat pada suatu perairan, maka alat ini dilemparkan dengan mulut jaring yang terbuka. Ikan target penangkapan; seperti ikan *belanak*, *julung-julung*, *udang* dan lain-lain.
- Sero. Merupakan alat tangkap dengan prinsip perangkap yang disusun oleh struktur dinding/pembatas untuk menuntun ikan masuk kedalam. Konstruksi: Sero tersusun dari pagar-pagar (bambu atau kayu) yang disusun menetap, membentuk ruang tempat ikan masuk dan mengarah kebagian dalam struktur tersebut sehingga ikan tidak bisa meloloskan diri. Biasanya dipasang memanjang tegak lurus

dengan pantai, dengan ujung yang satu di pantai dan ujung yang lain mengarah ke bagian luar. Dengan struktur demikian, ikan yang masuk dari mulut sero akan terarah menuju bagian-bagian ruang (kompartemen) dan sulit untuk keluar. Pengoperasian: Dipasang menetap ke arah vertikal dari pantai menuju perairan luar dengan cara menancapkan kayu/bambu sebagai dinding penghalang sekaligus pengarah ikan. Pengambilan ikan yang terperangkap dapat dilakukan sewaktu-waktu. Ikan target penangkapan: cucut, cumi-cumi, gulamah, ikan pedang, kerapu, sotong, dan udang jarak.

- Ladung. Alat ini merupakan alat bantu yang dipergunakan dalam melakukan penyelaman untuk mencari biota laut khususnya teripang. Konstruksi alat; *ladung* terbuat dari kimah atau kerang raksasa (*Tridacna gigas*) dengan berat 5-7 kg berfungsi sebagai pemberat dalam melakukan penyelaman, kemudian diikat dengan *tulu gemme* (tali ijuk) dengan panjang 10–15 depa (\pm 20 m) yang berfungsi untuk menarik kembali ke atas perahu. Pada bagian kima ditancapkan besi runcing yang berfungsi untuk tujuan menusuk/mengaitkan teripang yang diperoleh. Pengoperasian alat; penggunaan *ladung* dilakukan secara berkelompok 2-4 orang, di mana di antaranya ada yang bertugas sebagai penyelam dan lainnya bertugas sebagai penarik tali. Dengan memakai alat *ladung* yang berfungsi sebagai pemberat sekaligus untuk mengaitkan/menancapkan teripang, maka penyelam menarik tali pengikat sebagai kode/tanda kepada yang bertugas di atas perahu untuk menarik tali *ladung*.

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi penangkapan oleh nelayan di Pulau Kambuno merupakan penggunaan keterangan-keterangan yang ada pada pengetahuan lokal (*local knowledge*) yang diwariskan dari generasi ke generasi. Khususnya perangkat lunak (*software*) yang merupakan cara-cara sebagai suatu yang bersifat nonmateriel yang selanjutnya terwujud ke dalam perangkat keras (*hardware*) berupa alat-alat sebagai suatu yang bersifat materiel dan merupakan fasilitas yang

berfungsi untuk lebih memudahkan dalam mengadaptasi sumber daya alam melalui hasil pemanfaatan pengetahuan yang dimilikinya.

Hubungan produksi (*relation of production*). Hubungan produksi meliputi hubungan kerja sama atau pembagian kerja antara manusia yang terlibat dalam proses produksi, yakni struktur pengorganisasian sosial produksi, seperti hubungan antara pemilik modal/usaha dan pekerja. Sebelum masuknya motorisasi, ketika alat tangkap yang disebutkan di atas masih dominan, penangkapan atau aktivitas kenelayanan adalah sistem individu yang berbasis rumah tangga. Dalam satu kelompok kerja, mereka terdiri dari satu rumpun keluarga batih yang tinggal dalam satu rumah. Bapak (orang tua) sebagai kepala keluarga di rumah sekaligus bertindak sebagai pemimpin (*punggaha*) di dalam aktivitas penangkapan. Kedudukan bapak (orang tua) sebagai pemimpin dalam rumah tangga ditransfer menjadi *punggaha* dalam dunia kerja, demikian pula dengan anak yang ikut membantu dalam mencari nafkah, mereka menempati kedudukannya sebagai pekerja (*sahi*) yang harus tunduk kepada aturan *punggaha* yang tak lain orang tuanya sendiri. Penstrukturisasian hubungan produksi dalam kelompok kerja yang demikian ini, tidak menunjukkan arti kelompok *punggaha-sahi* yang sesungguhnya, karena unit produksi adalah keluarga inti, dan tenaga kerja utama adalah anggota keluarga itu sendiri, maka batas sosial hubungan produksi dalam kegiatan penangkapan adalah satuan keluarga inti yang merupakan “lingkungan domestik terkecil”. Hubungan produksi bersifat egaliter, dalam arti tidak mengenal struktur hierarkis “majikan-buruh” atau “*punggaha-sahi*”. Hubungan produksi lebih bersifat sebuah kewajiban moral di mana anak membantu orang tua, begitu pula sebaliknya tugas orang tua untuk mengikutsertakan, mengajarkan, melatih serta mendidik anak-anaknya dalam aktivitas kenelayanan, sebagai fungsi latensi atau pemeliharaan pola (*patterns of maintenance*) dalam aktivitas kehidupan selanjutnya untuk dapat bertahan hidup (*survive*) dan berkembang (*develop*) (Parsons, 1951). Pembagian kerja justru terlihat antara pria dan wanita. Pembagian kerja pria-wanita merupakan kecenderungan saling melengkapi dalam pembagian kerja rumah tangga sebagai unit produksi (Braverman, 1974). Ketika para suami

pulang melaut maka tugas istrilah yang mengumpulkan dan menjualnya. Pembagian kerja pria-wanita memaksakan ketergantungan timbal balik, jenis kelamin tertentu harus melakukan pekerjaan tertentu, yang berarti jenis kelamin lain dilarang melakukannya (Straus, 1971). Tidak ada gejala eksploitasi surplus dalam hubungan produksi yang terjadi. Surplus produksi diserap oleh keluarga inti (*nuclear family*).

Dari seluru uraian terangkum; (1) kegiatan produksi nelayan pada fase ini (sebelum pertengahan tahun 1970-an) merupakan kombinasi tertentu dari kegiatan produksi primer, bersahaja, dan berteknologi rendah yang diusahakan melalui penggunaan total kekuatan kerja domestik dari rumah tangga yang menjadi unit produksi dan konsumsi primer. Pembagian kerja berjalan berdasarkan landasan fungsional dan kewajiban moral, karena sarana-sarana produksi dimiliki oleh unit domestik itu sendiri dan didistribusikan di antara anggota-anggotanya seperti peran-peran ekonominya yang dibutuhkan. (2) Karena ciri usahanya adalah usaha individu yang terikat pada rumah tangga di mana hubungan produksi terbatas dalam keluarga inti dan hubungan antara pekerja bersifat egaliter, maka sistem usaha yang dilakukan masyarakat pada masa itu bercorak produksi subsisten (*subsistence production*) yang mengandung pengertian bahwa hasil produksinya dijual dan digunakan hanya untuk keperluan konsumsi dan bukan untuk keperluan investasi. (3) Merujuk konsep pemikiran Kahn (1974) tentang cara produksi subsisten dengan media yang berbeda (pertanian dan perikanan) hampir serupa atau dapat dikatakan serupa melalui penafsiran objek kerja dan instrumen kerja dengan mengandalkan bahan mentah yang dihasilkan oleh alam dengan teknologi sederhana serta pelibatan sepenuhnya tenaga kerja yang terikat pada rumah tangga, perbedaan yang nampak hanya pada sistem hubungan produksi melalui penyewaan/penyakapan yang menyumbang kepada reproduksi pemilik usaha yang sudah tertampilkan di Padang Lawas dengan orientasi subsisten. Sementara cara produksi subsisten di Pulau Kambuno pada fase ini sistem penyewaan/penyicilan alat produksi belum terkontekskan. (4) Pada fase ini formasi sosialcara produksi subsisten merupakan cara produksi yang dominan dalam masyarakat.

Cara Produksi Baru. Pada pertengahan tahun 1970-an atau sekitar tahun 1977, nelayan Kambuno mengadopsi teknologi mesin sebagai kekuatan produksi yang menyebabkan munculnya cara produksi (*mode of production*) baru dalam formasi sosial masyarakat. Aspek dari kekuatan produksi diawali dari munculnya cara produksi baru berupa penggunaan motorisasi pada perahu. Perahu motor yang dikembangkan, merupakan modifikasi dari jenis perahu *soppe layara* atau *jukung*. Nelayan menyebutnya sebagai *soppe motor layara*. *Soppe motor layara* (*out board engine*) adalah perahu yang lebih besar dengan daya muat yang lebih banyak. Perahu tersebut berukuran lebar 2 meter dan panjang kurang lebih 10 m. Menggunakan mesin bermerek Yanmar, Yandong, Ratna, dan Dompet dengan kekuatan 8-10 HP (*horse power*). Bentuk dengan ukuran demikian dinilai efektif dipakai dalam kegiatan penangkapan ikan sebab lebih cepat bergerak dan kurang memunculkan riak air (gelombang). Penggunaan istilah *soppe motor layara*, karena kecenderungan melakukan penggabungan teknologi lama dengan teknologi baru. Motorisasi pada perahu tidak secara total meninggalkan penggunaan *layara* atau layar yang telah dipergunakan sebelumnya untuk tindakan preventif dan ekonomis. Jika arah angin sesuai dengan tujuan, mesin dimatikan dan layar dipasang. Untuk alat tangkap yang dipergunakan, awalnya tidak mengalami perubahan yang berarti. Penggunaan alat tangkap *pukat jepang*, *ulambi* maupun *panambe* yang dulunya dipergunakan sebelum masuknya motorisasi masih tetap dipergunakan oleh nelayan. Modernisasi perikanan yang terjadi pada periode ini hanya kepada penggunaan mesin untuk menggerakkan perahu/kapal motor saja tanpa diikuti oleh introduksi maupun inovasi alat tangkap baru yang lebih efisien dan efektif dari penggunaan alat tangkap sebelumnya.

Jenis, konstruksi serta cara pengoperasian alat tangkap yang dipergunakan oleh nelayan Kambuno seiring dengan penggunaan perahu/kapal motor, adalah sebagai berikut:

- Pukat jepang atau pukat *muro ami*. Alat ini berupa jaring kantong yang pada operasi penangkapannya dibantu oleh beberapa orang (perenang) sebagai penggiring agar ikan memasuki jaring.

Konstruksi alat; jaring yang digunakan adalah mirip dengan *gill net*, memiliki tali selambar yang panjang di kedua sisinya yang berfungsi untuk menarik (melingkari gerombolan ikan) dan juga mengangkat hasil tangkapan. Pengoperasian alat; setelah lingkaran jaring melingkupi gerombolan ikan (*fish-schooling*) maka ikan dikejutkan dengan suara atau kepankan air sehingga terjatuh atau terpuntal pada jaring. Jaring kemudian ditarik/diangkat ke perahu. Ikan Target Penangkapan; Ikan-ikan pelagis kecil dan ikan demersal (tinumbu, buah-buahan, ekor kuning dan sebagainya)

- *Panambe* (Pukat Pantai). Prinsip penangkapan alat ini berdasarkan prinsip mengelilingi gerombolan ikan dengan jaring yang menggunakan *mesh-size* tertentu (biasanya cukup kecil) sehingga ikan tidak tersangkut atau *entangled* dan terperangkap oleh cakupan jaring. Konstruksi alat; pukat pantai merupakan suatu jaring dengan ketinggian umumnya 5 sampai dengan 10 meter. Pada bagian atas jaring dilengkapi dengan tali pelampung (*float line*) dan di bagian bawahnya dengan tali pemberat (*sinker line*) untuk mencapai kestabilan bukaan jaring di air. Pada bagian ujung pukat ikan masing-masing dilengkapi dengan tali penarik (*rope*) yang panjang. Pengoperasian alat tangkap; Pukat di-*setting* ke arah laut, biasanya dibawa dengan menggunakan bantuan perahu kecil, salah satu ujung pukat yang dihubungkan dengan tali penarik dipasang tegak lurus menuju pantai. Kemudian pukat dipasang secara paralel sepanjang pantai (sejajar dengan pantai), dan ujung pukat yang lain ditarik kembali ke arah pantai. Setelah terpasang sempurna, dan dalam waktu yang dirasakan cukup maka pukat ditarik ke arah pantai melalui ujung-ujung tali penariknya. Pukat pantai biasanya dioperasikan oleh banyak orang (nelayan) karena memerlukan tenaga yang cukup saat penarikan jaring. Ikan target tangkapan menjadi semakin terkurung antara pukat dengan pantai dan akhirnya tertangkap. Pada beberapa kasus, pengoperasian pukat pantai menggunakan lampu sebagai alat bantu untuk mengumpulkan ikan.

Ikan Target Penangkapan; *lure*, *rambing* dan *bete-bete* (dalam bahasa lokal).

Pengalaman-pengalaman dalam produksi. Sebagai penganut agama Islam yang taat serta penerapan pengetahuan-pengetahuan yang bersumber dari kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi berupa *baca na gaukang* (mantra dan ritual), maka nelayan-nelayan di pulau ini sangat percaya kepada kekuasaan Tuhan Allah dan takdirnya melalui bentuk-bentuk upacara sebagai simbolisasi dari permohonan kepada Sang Pencipta akan keselamatan dan rezeki. Sedikit-banyaknya hasil yang diperoleh senantiasa dikembalikan kepada takdir dan penyesuaian dirinya (tingkah laku) dengan alam fisik. Rintangan ombak besar, dalamnya laut yang diselami, dihadapi dengan keyakinan adanya suatu kekuatan yang lebih menentukan, yaitu Tuhan melalui pendelegasian yang dilakukannya untuk menjaga tempat-tempat tertentu, Itu semuanya harus dihormati melalui *baca na gaukang* (mantra dan ritual). Kesesuaian, keserasian atau harmonisasi baik di dalam kelompok dan antar kelompok juga dengan alam fisik, harus diutamakan. Bahkan harmonisasi dengan alam fisik seringkali dimanifestasikan secara magis, sebagai upaya memobilisasikan dan memanipulasikan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam alam metafisik sehingga magis seolah-olah menyerupai atau mengarah-arrah seperti sifatnya teknologi alat.

Dari uraian itu dapat disarikan bahwa penetrasi kapital (modal dan teknologi) menyebabkan terjadinya perubahan proses produksi dalam hal teknologi penggerak perahu (motorisasi). Ini memperlihatkan bahwa kaidah-kaidah sosialmodern pada gilirannya akan dihasilkan sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan, sejauh telah menjadi kebutuhannya. Namun demikian, campuran kegiatan produksi yang berdasarkan *indigeneous knowledge* sebagai bagian dari mode produksi pada masa lalu tetap menjadi kombinasi dari unsur-unsur cara produksi yang dikembangkan tersebut.

Hubungan produksi (*relations of production*). Perubahan hubungan produksi ditandai oleh usaha produksi (pra-motorisasi) yang awalnya didominasi oleh usaha individu dan terikat pada rumah tangga, menjadi

usaha kelompok yang terpisah dari rumah tangga. Sifatnya masih mengandalkan hubungan kekerabatan, karena yang terlibat dalam kelompok kerja (*working group*) hanya keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga luar (*extended family*) berdasarkan sistem *bilateral* maupun *parental*. Konsekuensi yang lahir dalam perubahan ini adalah, ketika sebuah pekerjaan dilakukan dengan berkelompok maka dengan sendirinya pembagian kerja mulai tercipta meskipun dalam bentuk sederhana, dan dengan sendirinya pula tenaga kerja yang terlibat akan memperoleh imbalan kerja.

Gambaran konkret hubungan produksi dari cara produksi baru pada fase ini, melalui *life history* yang dipadukan dengan perspektif teori dengan menampilkan aktor (sebagai uraian kasus) menceritakan kembali pengalaman hidupnya, kemudian disarikan dan hanya mengambil bagian-bagian tertentu yang memiliki keterkaitan dengan hubungan-hubungan produksi seperti; hubungan kerja sama atau pembagian kerja antara manusia yang terlibat dalam proses produksi, struktur pengorganisasian dan lain-lain sebagainya.

Kelompok kerja *Patopoi* (aktor) beranggotakan (*sahi*) sekitar 10–20 orang. Ia tidak pernah membatasi jumlah *sahi* yang akan ikut bergabung padanya, asalkan masih ada hubungan kekerabatan. Prinsipnya, bahwa “...*rezeki itu datang dan ditentukan oleh Allah, dan manusia wajib berbagi dengan sesamanya, dan yang pertama-tama harus diperhatikan adalah anggota keluarga...*”. Tidak adanya pembatasan dari segi jumlah serta terbukanya bagi *extended family* yang ingin menjadi *sahi* (pekerja), menunjukkan bahwa perhitungan terhadap nilai efektifitas dan efisiensi khususnya perbandingan jumlah tangkapan dan pembagian hasil belum diberlakukan. Pertimbangan ikatan komunal (kekerabatan) masih kuat, sebagai etika subsistensi komunitas lokal, di mana pertimbangan-pertimbangan sosial masih ditempatkan sebagai pertimbangan yang utama dalam aktivitas keseharian masyarakat dibanding pertimbangan individu dan ekonomi (kalkulatif) (Scot, 1981). Weber (1978) menyebutnya sebagai tindakan tradisional (*traditional rationality*) di mana individu bertindak berdasarkan kebiasaan yang muncul sebagai praktik yang telah mapan dan menghormati otoritas yang ada.

Mesin atau motor pertama kali dipakai oleh kelompok kerja *Patoppoi* adalah motor *Huller* yang berbahan bakar bensin dengan kekuatan 8 HP (*horse power*). Motor *Huller* dibeli pada tahun 1977, dan dipasang secara menempel pada perahu (*out board engine*) buatan tahun 1970. Pembelian mesin dan pemasangan/penempelan pada perahu semuanya dilakukan di daerah Lappa Sinjai. Penggunaan motor (mesin) dipelajarinya pula di daerah Lappa bersama dengan adiknya *Ambo*. Setiap kali akan melakukan operasi penangkapan ikan, maka dua minggu sebelum pemberangkatan, melalui *Ambo* yang di anggap cakap sekaligus dijadikan sebagai orang kepercayaan, menghubungi *sahi* yang pernah ikut operasi penangkapan sebelumnya. *Sahi-sahi* yang dinilai berkelakuan tidak baik seperti; sering konflik antar sesama *sahi*, tidak jujur dalam kelompok, seringkali minta panjar yang melampaui batas dari biasanya, seringkali mendesak-desak untuk segera dilakukan pembagian hasil, seringkali lalai, kurang disiplin, atau kurang terampil tidak dihubungi lagi. Namun demikian, jika *sahi-sahi* yang dimaksudkan tadi tetap datang, maka *Patoppoi* sebagai pemilik usaha tetap mengikutkannya atas dasar pertimbangan ikatan kekerabatan; “*igatona pale situlong ko'tennia pada idi*” (*siapa lagi yang bisa saling membantu kalau bukan sesama kita; keluarga*).

Gejala “*semi-hierarki*” dalam kelompok kerja mulai nampak dalam hubungan produksi. Struktur hubungan produksi dilabeli “*semi-hierarki*”, karena sudah ada dua status yang nampak berbeda yaitu pemilik sekaligus pengelola usaha sebagai majikan/atasan atau *punggaha* (*the have*) dan anggota kerabat sebagai buruh/bawahan atau *sahi* (*have not*). Peranan *Ambo* sebagai orang kepercayaan, seperti menghubungi *sahi*, turut menilai kinerja *sahi*, melakukan perawatan fasilitas produksi (perahu, alat tangkap dan mesin), merupakan cikal bakal dari peranan *punggaha kecil* atau *juragan lopi* dalam perkembangannya. Oleh karena itu, proses kemunculan sebagai *juragan lopi*, sebenarnya diawali dari *sahi* biasa dari lingkungan kerabat dekat yang sebelumnya banyak mewakili peranan-peranan *punggaha* dalam kelancaran kegiatan produksi khususnya berhubungan dengan *sahi*.

Pada pelaksanaan kegiatan produksi, segala bentuk biaya operasional (*working capital*), seperti bahan bakar, beras, rokok, es, garam dan kebutuhan-kebutuhan lainnya disiapkan oleh *Patoppoi* dan dicatat sebagai ongkos (biaya) produksi yang menjadi tanggungan bersama nantinya dengan anggota kelompok. Sebagai *punggaha* ia juga berkewajiban memberikan panjar kepada para *sahi*, agar memudahkan dalam pelaksanaan tugas kelompok dan juga sekaligus membantu kehidupan keluarga *sahi* sehari-harinya. *Komariah* istri *Patoppoi*, juga turut melakoni peranan sebagai *punggaha* (pemimpin) bagi istri-istri *sahi*, khususnya pada saat kegiatan penangkapan ikan dilakukan yang memakan waktu cukup lama. Tidak jarang istri-istri *sahi* meminta bantuan keuangan kepadanya, sepeeninggal suami-suami mereka.

Kepemimpinan *Patoppoi*, terpraktikkan tidak hanya dalam kegiatan produksi tetapi juga dalam kehidupan sosialnya. Scott (1985) menegaskan bahwa aspek moral senantiasa mendominasi kehidupan masyarakat di pedesaan, keputusan-keputusan yang diambil oleh masyarakat petani/nelayan lebih kepada pertimbangan pengakuan sosial yang sangat erat mengalahkan hubungan-hubungan lainnya yang bersifat rasional. Karena itu, kebutuhan akan kebanggaan sosial dinilai lebih menonjol dibandingkan kepentingan ekonomi. Dengan kata lain, motif moral dan tindakan sosial menjadi dasar paling tepat untuk mengarahkan keputusan-keputusan yang mereka ambil. Soal-soal yang berkaitan dengan masalah ekonomi dianggap merupakan persoalan sekunder, yang tidak lebih diutamakan. Cara berpikir sebagai promotor tindakan masyarakat di dunia sederhana mengutamakan kelompok bersifat primer bahkan organis, jaring hubungan di dalam kelompok kerja senang menggunakan pola hubungan kerabat. Di dalam kelompok yang demikian ini, orang yang terlibat mengutamakan kesamaan-kesamaan dalam banyak segi, bahkan cenderung mengutamakan keserbasamaan (*homogeneity*) di dalam kebersamaan (*togetherness*).

Apa yang dilakukan oleh *Patoppoi*, adalah sebuah manifestasi dari *value oriented rationality* (tindakan rasionalitas yang berorientasi terhadap nilai), di mana pekerjaan ditempatkan oleh aktor tidak hanya sebatas untuk

kepentingan ekonomi saja tetapi juga, pekerjaan ditempatkan sebagai “sarana pengabdian” terhadap kewajiban-kewajiban moral, sosial dan keagamaan dalam struktur sosial masyarakat (Weber, 1978).

Dalam struktur organisasi kerja, *Patoppoi* sebagai *punggaha* berperan sebagai pemilik juga sekaligus memimpin operasi penangkapan. Ini menjelaskan bahwa *punggaha* pada awalnya tidak hanya sebatas pemilik sarana produksi saja berupa perahu dan alat tangkap, tetapi juga sekaligus sebagai pemimpin operasi penangkapan. Istilah *punggaha kecil* atau *juragan lopi* yang bertugas memimpin operasi penangkapan ikan dalam strukturisasi kelompok kerja (diferensiasi vertikal) belum dikenal dalam cara produksi baru pada fase ini.

Operasi penangkapan yang dilakukan memakan waktu 15 sampai 20 hari satu kali siklus penangkapan ikan (trek), dengan beberapa kali trip. Menjadi kewajiban pemimpin kelompok, untuk melimpahkan pengetahuan yang dimiliki kepada *sahi-sahinya* seperti; pengetahuan untuk menghindarkan atau melindungi diri dari gangguan-gangguan alam dan untuk memperoleh hasil yang besar melalui kecakapan atau keterampilan mengoperasikan alat sehubungan dengan pelaksanaan tugas kelompok. Pengetahuan itu sendiri terdiri dari; pengetahuan yang berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan yang bersumber dari generasi terdahulu mereka dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman-pengalaman yang diperolehnya sebagai seorang nelayan. Kedua pengetahuan inilah yang sedapat mungkin diturunkan dalam kelompok kerja (*working group*) yang menjadi pengalaman dan keterampilan nelayan selanjutnya. Salah satu pengetahuan (*local knowledge*) berupa *baca* (mantra) yang berkaitan dengan kepercayaan dan bersumber dari generasi sebelumnya yang senantiasa tetap dipraktikkan oleh *Patoppoi* adalah sewaktu akan menggiring ikan masuk ke dalam jaring dengan mengucapkan kalimat matra sebagai berikut:

“... *addepungengkko; Nurung suroko, Muhammad terimako; Alla Taala makkudalle riko; Kumpayakung A*” (berkumpulan; Nurung yang menyuruhmu, Muhammad yang menerimamu; Allah Taala yang memberimu rezeki; jadilah A”)

Norma-norma kelompok yang diberlakukan dalam mewujudkan keteraturan-keteraturan anggota kelompok, terutama pada operasional penangkapan ikan, sangat banyak dan memiliki kekuatan sanksi yang berbeda-beda. Dalam rentang waktu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan misalnya, tidak seorang pun warga kelompok yang diperbolehkan bergunjing atau membicarakan urusan-urusan individual yang ada di darat, bahkan menyebutkan nama-nama hewan yang ada di darat menjadi pantangan untuk disebutkan seperti *tedong* (kerbau), *asu* (anjing) dan sebagainya, dengan melanggar aturan atau pantangan yang dimaksud, diyakini akan mendatangkan kesialan bagi kelompok kerja, seperti kurangnya hasil tangkapan, munculnya hantu laut dan sebagainya. Untuk sahi-sahi yang melanggar aturan, tidak diikutkan lagi dalam kegiatan penangkapan berikut. Dalam kelancaran tugas kelompok, telah terjadi penambahan tugas kepada beberapa *sahi* yang dianggap mampu menjalankan tugas-tugas tersebut. Ada di antara *sahi* yang diberi tugas sebagai juru mudi (*pallopi*), juru masak (*pannasu*), juru mesin (*pabbas*), juru selam (*pakkaca*), serta *sahi* yang bertugas untuk membantu kelancaran operasi penangkapan atau menimba air yang masuk dalam perahu. Namun secara eksplisit, *Patoppoi* tidak menstrukturisasikan sebagai tugas permanen, karena peran itu sewaktu-waktu bisa berganti tergantung dari penilaian yang dilakukan selama operasi penangkapan berlangsung, kecuali tugas sebagai *pallopi* yang lebih banyak diperankan oleh *Ambo*. Gambaran Durkheim (1964) tentang perubahan ke arah spesialisasi belum signifikan. Kriteria yang menjadi pertimbangan dalam memberi tugas tambahan kepada *sahinya* terletak pada kesungguhan dan keseriusan dalam setiap kali kegiatan operasi penangkapan dilakukan. Makna lain yang tersirat mengapa tidak ditetapkan secara permanen tugas-tugas tambahan seiring dengan penggunaan motorisasi, yaitu; (1) dengan penggunaan motorisasi, pekerjaan kelompok pun semakin kompleks, oleh karena itu *Patoppoi* dalam menjalankan usahanya sedapat mungkin tidak tergantung pada keterampilan satu atau dua orang saja yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, strateginya adalah memberi kesempatan yang sama kepada *sahi* yang lain untuk mempelajarinya (2) motivasi yang

diberikan kepada anggota kelompok untuk dapat memiliki keterampilan yang sama bertujuan untuk lebih mengefektifkan pekerjaan kelompok, karena tiap anggota kelompok bukan saja mengetahui tugasnya masing-masing tetapi juga benar-benar menguasai dan melakukannya dengan cermat meskipun tanpa disuruh atau diperintahkan lagi, bukan saja mahir melakukan tugasnya tetapi juga dapat melakukan tugas-tugas lainnya dalam kelompok. Nampak Solidaritas mekanik dan solidaritas organik tercipta, baik antar sesama *sahi* melaksanakan pekerjaan kelompok dalam dimensi solidaritas mekanik secara horizontal, begitu juga dalam dimensi vertikal organik antara *punggaha* dengan *sahi* yang saling membutuhkan (Durheim, 1964).

Penggunaan motorisasi dalam kegiatan penangkapan pada fase ini, menyebabkan pembagian kerja sederhana mulai tercipta. Kedudukan *sahi* dalam organisasi produksi mulai tersrukturisasi meskipun sifatnya temporer atau semi-permanen. Keterampilan *sahi* tidak lagi dapat di generalisasi sama, karena telah memperlihatkan adanya pendelegasian kerja berdasarkan kecakapan yang dimiliki. Dengan demikian maka struktur hubungan yang “*semi-hierarkis*” semakin tercipta. Namun, perubahan ini belum dikatakan ideal dalam spesialisasi pekerjaan karena pembagian kerja belum dipermanenkan dan sifatnya hanya pendelegasian oleh *punggaha*. Menurut Braverman (1974) dalam spesialisasi pekerjaan, terjalin hubungan permanen antara divisi pekerja dengan sarana produksi.

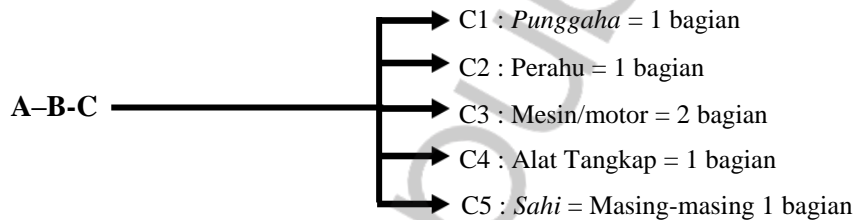
Pemakaian mesin pada kegiatan produksi (perahu motor-layar), membawa *punggaha* menjadi lebih besar peranannya sebagai penyedia modal tetap (*fixed capital*). Demikian juga pekerjaan *Ambo* sebagai *pallopi* semakin kompleks, kalau dulunya hanya memelihara dan membenahi layar serta kemudi, juga mulai memelihara mesin/motor yang menjadi pekerjaan relatif baru baginya. Pemakaian mesin/motor sebagai tenaga penggerak perahu, berdampak pula kepada pekerjaan *sahi* yang menjadi lebih ringan dari pada sebelumnya seperti pekerjaan mendayung, menaikkan layar yang telah kurang dilakukan. Sampai pada konteks ini, terlihat tiga peranan yang nampak dalam kelompok kerja yaitu, (1) peranan penyediaan motor perahu (*fixed capital*), (2) peranan penyediaan modal kerja (*working*

capital), di mana kedua peranan ini, pertama dan kedua diperankan oleh *punggaha* sebagai pemilik usaha, dan (3) peranan pengelolaan modal (kegiatan produksi) yang diperankan oleh *sahi* sebagai anggota kelompok.

Setiap kali musim tangkap berakhir dan penjualan sudah dilakukan, *Patoppo*, sebagai *punggaha* (pemilik/pengelola) melakukan “pembagian hasil” (*sharing production*). Karena peranan merupakan sumber pendapatan, maka aturan pembagian hasil pun mengalami perubahan seiring munculnya peranan-peranan baru dalam kelompok kerja. Dalam pembagian hasil (*sharing production*) peranan penyedia motor memperoleh dua bagian hasil, sedang yang lainnya tetap sebagaimana biasanya. Penggarisan yang di bagi adalah “hasil bersih” (*netto*). Hasil bersih (*netto*) yang dimaksud adalah; “hasil kotor” (*bruto*) dikurangi dengan; ongkos (*working capital*) dan biaya perbaikan dan pemeliharaan perahu yang jumlahnya relatif, tergantung dari kondisinya setelah terpakai dalam kegiatan produksi. Pola bagi hasil yang diterapkan *Patoppoi* adalah pola bagi hasil terhadap semua komponen produksi dengan prinsip “alat yang diperorangkan” atau dipandang seolah-olah *sahi* (anggota kelompok) sehingga yang nampak dalam istilah-istilah bagi-hasil adalah, bagiannya mesin/motor, bagiannya alat tangkap, bagiannya perahu dan sebagainya. Mekanisme pembagiannya adalah; satu bagian untuk perahu, satu bagian untuk alat tangkap, dua bagian untuk motor, satu bagian untuk *kepunggahaan* sebagai pemilik usaha (penyedia alat produksi), serta masing-masing satu bagian untuk keanggotaan termasuk *punggaha* sebagai pemimpin produksi¹⁶. Makna yang tersirat dalam personifikasi peran alat-alat produksi tersebut, merupakan manifestasi dari ideologi egalitarian sebagai karakteristik integritas komunitas yang tetap dipertahankan dan

¹⁶ Meskipun Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan (UUBHP) Nomor 16 tahun 1964 yang ditetapkan tanggal 23 September 1964 sebagai aturan formal yang mengatur penerapan bagi hasil untuk usaha perikanan tangkap dan usaha perikanan tambak, namun realitanya nelayan tetap mempraktikkan sistem bagi hasil berdasarkan aturan lokal adat kenelayanan setempat. Menurut Soepomo (1977) hukum adat merupakan bagian dari adat istiadat, sehingga merupakan kristalisasi dari kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana. Meskipun demikian bahwa walaupun hukum adat merupakan hukum hidup, tetapi tidak selalu hukum adat merupakan hukum yang adil atau sebanding.

sedapat mungkin menghindari kesan praktik kapitalisme yang eksploitatif, meskipun pada prinsipnya, pola-pola kapitalisme telah terdefiniskan dalam wujud lokal karena bagian-bagian yang dimaksud terkonsentrasikan pada satu orang, yaitu *punggaha* sebagai pemilik alat produksi. Skema bagi hasil dalam kelompok kerja milik *Patoppoi* adalah sebagai berikut:



Ket:

A = produksi kotor

B = produksi bersih

C = pembagian bersih

C1,C2,C3,C4 dan C5 = bagian untuk *punggaha* dan seterusnya

Skema di atas menunjukkan bahwa ada 6 (enam) bagian hasil. Ke enam bagian ini diperoleh oleh *Patoppoi* sebagai *punggaha* dan sebagai anggota kelompok kerja. Lima bagian di antaranya, diperoleh dalam peranannya sebagai *punggaha*, penyedia modal dan penyedia komponen fasilitas produksi (perahu, alat tangkap dan motor/mesin). Sementara untuk 1 (satu) sisa bagian lainnya diperoleh sebagai pemimpin operasional penangkapan dalam kelompok kerja.

Fase inilah, awal mula sebuah struktur produksi yang tercirikan eksploitatif melalui sistem bagi hasil (*sharing production*). Telah terjadi perubahan bagian hasil yang diperoleh *punggaha* sebagai pemilik sekaligus pengelola usaha produksi. Pada cara produksi lama, bagian untuk peranan *kepunggahaan* sebagai pemilik sarana produksi tidak mendapat bagian hasil tersendiri. Implikasinya bahwa semakin banyak anggota *sahi* dalam satu kelompok kerja yang ikut terlibat, maka akan semakin sedikit

pula porsi bagian hasil yang diterima oleh masing-masing *sahi*, karena telah bertambahnya peranan baru dalam kelompok kerja seiring dengan dipergunakannya motorisasi sebagai kekuatan produksi.

Transformasi cara produksi yang dilakukan (dari penggunaan layar menjadi motor/mesin perahu) mengharuskan pemilik usaha melakukan investasi modal yang besar untuk pengadaan alat produksi dalam kegiatan produksi. Dengan itu, juga ikut berdampak pada berkurangnya pekerjaan yang dilakukan oleh *sahi* seperti mendayung, menaikkan layar dan sebagainya. Pengurangan porsi bagian hasil bagi *sahi* dan dilimpahkan kepada mesin yang ikut membantu dalam kegiatan produksi dianggap wajar dalam kelompok kerja. Tambahan peranan yang telah dilakoni oleh para *sahi* dengan penggunaan cara produksi baru ini (motorisasi), seperti juru mudi, juru mesin, juru selam dan sebagainya, juga ikut diperhitungkan untuk diberi tambahan hasil bagian dari bagian yang semestinya diterima. Hanya saja, jumlahnya relatif, tergantung dari kerelaannya *punggaha* yang diistilahkan sebagai “bonus”, seperti memberikan satu bagian dari dua bagian yang diperoleh mesin kepada *pallopi* (cikal bakal *juragan lopi*) dan sebagainya. Penerapan istilah „bonus” dilakukan tidak hanya kepada tugas-tugas tambahan tersebut tetapi menurutnya juga diberikan setiap kali operasi penangkapan yang dianggap berhasil.

Dapat disimpulkan bahwa aturan dasar dalam kelompok kerja (*working group*) yang telah diterima, diperlakukan dan dipertahankan sejak dahulu, bahwa setiap orang yang terlibat dalam kegiatan produksi pada kelompok kerja, kepadanya masing-masing memperoleh satu bagian hasil, termasuk bagian dari pemilik usaha produksi yang dipersamakan dengan anggota kelompok telah mengalami perubahan, akibat cara berpikir difusitas yang secara kontaminatif menempatkan orang yang terlibat dalam kegiatan produksi adalah pengikut (buruh) dari pemilik usaha. Diadopsinya teknologi modern (motorisasi) telah memperjelas batas kepemilikan pribadi (*the have*) dengan anggota kelompok kerja sebagai pengikut (*have not*). Struktur hubungan “*semi-hierarkis*” seperti ini, sudah terjadi gejala eksploitasi surplus oleh pemilik/pengelola usaha (*punggaha*) dalam sistem bagi hasil (*sharing production*), namun dipandang masih

tidak setegas eksploitasi surplus (sistem upah) oleh majikan dalam produksi kapitalis (Marx, 1965) karena masih adanya pertimbangan-pertimbangan tradisi.

Integritas yang terjaga dalam kelompok *Patoppoi*, dilihat dari adanya hubungan kepentingan yang diperkuat oleh hubungan kekerabatan. Kuat-lemahnya Integritas kelompok dapat teramati dari besar-kecilnya semangat solidaritas melalui pertukaran sosial (resiprositas) kalangan anggota kelompok itu sendiri. *Sentimen community*¹⁷ yang terwujud dalam *sentimen group* dipraktikkan dengan baik oleh *Patoppoi* sebagai *punggaha* dalam membina hubungan-hubungan sosial dengan *sahinya*, seperti ketika ada yang berhasrat menikah, ada istri *sahi* yang akan melahirkan atau anaknya sakit, atau ketika biaya hidup sehari-harinya tidak tercukupi, maka sebagai *punggaha* ia harus turun tangan memberi bantuan material sehingga keluarga *sahi* terhindar dari krisis. Sampai standar tertentu, ia menganggapnya sebagai bantuan semata, tetapi jika dianggap melewati standar, bantuan tersebut diperhitungkannya sebagai utang *sahi* yang harus dibayar bila penangkapan berhasil. Menurut Salman (2006) bahwa *punggaha* cukup berhasil memerankan remunerasi dan manipulasi normatif kepada *sahi-sahi-nya* dalam menjaga eksistensi kelompok kerjanya. Rentetan dari peristiwa-peristiwa ini, dianalisis sebagai salah satu faktor mengapa ketergantungan *sahi* terhadap *punggaha* sangat tinggi. Secara sederhana terjelaskan; karena pada umumnya ekonomi *sahi* berada di wilayah rawan subsistensi, maka posisi berutang terus dialami oleh *sahi*, sehingga porsi bagian hasil yang seharusnya diterima dalam kelompok kerja, hanya selalu diperuntukkan untuk membayar utang sebelumnya kepada *punggaha*, untuk keberlanjutan hidup selanjutnya, satu-satunya

¹⁷ Munculnya *sentimen community* akibat adanya *social relationship* yang terbangun karena ikatan kultural, sehingga memunculkan karakter-karakter seperti: (1) sepeasaan, yakni individu berusaha untuk mengidentifikasi dirinya sebanyak mungkin dalam kelompok, (2) sepenanggungan, yakni individu sadar akan peranannya dalam kelompok dan keadaan masyarakat sendiri sangat memungkinkan peranannya dalam kelompok dijalankan, (3) saling butuh, yakni individu yang tergantung dalam masyarakat setempat merasakan dirinya tergantung pada komunitasnya, kelompoknya yang meliputi kebutuhan fisik, materi maupun psikologis (Rober M Mac Iver dan Charles H. Page, 1975).

harapan yang dianggap dapat mengatasi persoalan adalah dengan jalan meminjam kembali kepada *punggaha*. Meskipun beberapa pandangan yang menyatakan bahwa sistem bagi-hasil (*sharing production*) pasca modernisasi, realitas kesenjangan ekonomi semakin tajam akibat hubungan yang eksploitatif, namun dalam pandangan dari kalangan *sahi* tidak demikian adanya, karena menjadi *punggaha* menurutnya adalah orang yang harus memiliki sifat melindungi dan kepekaan yang dialami oleh anggota kelompok dan menjadi jaminan sosial bagi mereka.

Eksistensi *kepunggahaan* pada masa lalu, sedikitnya memiliki dua dimensi kepentingan yang datangnya di kedua belah pihak yaitu; (1) kepentingan *punggaha* dalam menjaga integritas kelompok sebagai kelompok produksi dengan tampil tidak hanya sebagai pemilik (*the have*) dan pemimpin *working group*, tetapi juga sekaligus memperlihatkan “kepemimpinan moral” melalui bantuan-bantuan sosial yang diberikan, (2) dimensi kepentingan *sahi* yang merupakan manifestasi dari refleksi sikap “*savety first*” (dahulukan selamat) lahir dalam kondisi ekonomi yang rawan subsistensi. Asumsinya bahwa, sepanjang keamanan subsistensi tetap terjamin dan keterlibatan dalam proses produksi tetap berlanjut, ketimpangan bagi hasil bukan sesuatu yang harus dipersoalkan. Perlakuan tidak adil tidak dirasakan, meskipun ia dalam kondisi rawan subsistensi. Tidak tersedia alternatif status selevel atau lebih rendah yang bisa menampungnya bila ia meninggalkan hubungan tidak adil tersebut. Menurut Scot (1983) jika kedua-duanya tidak teralami, itu tidak dikatakan eksploitatif, karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dari keseluruhan uraian terangkum bahwa perubahan cara produksi dalam formasi sosial pertengahan tahun 1970-an, ditandai oleh penggunaan motorisasi dalam kekuatan produksi yang melahirkan cara produksi baru (*new mode of production*) sebagai cara produksi komersialis (*petty commodity production*)¹⁸. Sementara hubungan produksi yang

¹⁸ Cara produksi komersialis (*petty commodity production*) pada fase ini ditandai dengan penetrasi kapital yang masih sederhana (pemilik sekaligus sebagai pengelola) serta perkembangan organisasi produksi dari usaha individu dengan penggunaan kekuatan kerja domestik rumah tangga menjadi usaha kelompok yang terpisah dari rumah tangga

tertampilkan, masih didominasi oleh wujud lokal berupa semangat kolektivitas yang sangat tinggi melalui keterikatan dalam norma kebersamaan sebagai suatu kerabat (*family*) meskipun organisasi kerja mulai mengalami kompleksitas. Hal ini mempertegas konsep formasi sosial bahwa dalam proses peralihan cara produksi dalam masyarakat akan terjadi campuran dua atau lebih cara produksi melalui kombinasi dari unsur-unsur masing-masing cara produksi. Pada periode ini merupakan perbandingan unsur cara produksi subsisten melalui tampilan hubungan produksi sebelumnya dan cara produksi komersialis berkait pada tingkat perkembangan kekuatan produksi yang ada. Ini merupakan “*social overheads capital*” (modal dinamika sosial) yang menjadi syarat untuk dapatnya masyarakat memasuki tahap “*self propelling growth*” (menggerakkan dirinya sendiri) atau pendasaran “*the stage take-off*” atau tahap lepas landas (Parson 1960; Rostow, 1989).

Tabel-5: Formasi Sosial Masyarakat Nelayan Pulau Kambuno Periode Tahun 1970–1980

Komponen	Cara Produksi (<i>Mode of Production</i>)	
	Cara Lama	Cara Baru
Kekuatan Produksi		
1. Jenis Alat Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Perahu layar, lepa-lepa • Pancing (<i>Line Fishing</i>); meng • Bubu (<i>Trap</i>) • Jala Lempar (<i>cast net</i>) • <i>Ladung</i> (alat bantu penyelaman) • <i>Pukat jepang</i> (<i>muro-ami</i>), <i>ulambi</i>, 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan mesin sebagai tenaga penggerak perahu (<i>soppe motoro layara; out board engine</i>) dengan kekuatan 8-10 HP (<i>horse power</i>) • Penggunaan alat tangkap masih seperti sebelumnya (cara lama)

dengan pelibatan total kekuatan kerja *extended family*. Hubungan sosial antara pekerja bersifat egaliter tetapi kompetitif, dengan pengertian bahwa, pekerja memiliki hasil kerjanya untuk dipertukarkan sebagai komoditas yang terkontekskan dalam pembagian hasil produksi (*sharing production*) yang dengan sendirinya batas kepemilikan (*the have*) usaha produksi juga ikut diperjelas.

Komponen	Cara Produksi (<i>Mode of Production</i>)	
	Cara Lama	Cara Baru
	<ul style="list-style-type: none"> • Pukat pantai (<i>beach seine</i>); panambe 	
2. Sifat Alat Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> • Semi-Modern
3. Penggunaan Tenaga Kerja	Keluarga inti (<i>nuclear family</i>)	Buruh nelayan Semi bebas (<i>nuclear & extended family</i>)
Hubungan Produksi		
1. Ukuran kelompok kerja	Kelompok kecil (2-4) orang	Kelompok besar (10-20) orang
2. Struktur berdasarkan Produksi	Egaliter	Hierarkis sederhana
3. Sifat Hubungan	Non-eksploitatif	Semi eksploitatif
Karakteristik Cara Produksi	Cara Produksi Subsisten	Cara Produksi Komersialis

Sumber: Rangkuman Bab III (Periode 1970-1980).

Periode 1980–1990: Kesenjangan dalam Mode Produksi Nelayan

Cara Produksi Lama. Kekuatan Produksi (*force of production*) tahun 1980-an, ditandai dengan meningkatnya arus modernisasi khususnya penggunaan motorisasi pada perahu/kapal, kemudian diikuti adopsi dan inovasi alat tangkap baru. Realitasnya, usaha penangkapan tradisional mulai terpinggirkan. Keadaan ini menggejala secara umum di wilayah pesisir Sulawesi Selatan. Perbandingan data statistik mengenai persentase kenaikan jumlah alat tangkap dan jumlah perahu tangkap di Sulawesi Selatan dari tahun 1965, 1975 sampai tahun 1985 menunjukkan puncak dari perkembangan modernisasi penangkapan dalam kurung waktu sepuluh tahun pada periode 1980–1990 (Tabel-6).

Tabel-6. Jumlah Alat Tangkap dan Perahu Tangkap di Sulawesi Selatan pada Tahun 1965, 1975 dan 1985

Tahun	Alat Tangkap (bh)	Perahu Tangkap		
		Tidak Bermotor (bh)	Motor Tempel (bh)	Kapal Motor (bh)
1965	60.630	32.433	-	-
1975	97.600	40.950	653	16
1985	32.913	21.050	6.854	602

Sumber: Data Dinas Perikanan Propinsi Dati I Sulawesi Selatan, 1965, 1975 dan 1985.

Bila pada tahun 1965 dan 1975 perahu tak bermesin sangat dominan sedangkan perahu bermotor tempel dan kapal motor masih sangat kurang, tahun 1985 justru perahu tak bermotor berkurang sampai separuhnya sementara perahu bermotor tempel meningkat 12 kali dan kapal motor 100 kali. Pada tahun 1965 dan 1975 jumlah alat tangkap sangat banyak dan pada umumnya masih bersifat tradisional. Pada tahun 1985, jumlah alat tangkap menciut sampai sepertiganya, namun kapasitas tangkapnya jauh lebih besar karena jenisnya adalah peralatan modern. Sementara komposisi perbandingan jumlah alat tangkap dan perahu tangkap pada periode 1980-1990 di Kabupaten Sinjai (*mainland*) menunjukkan ciri yang sama. Pada tahun 1980 perbandingan perahu tak bermesin dengan perahu bermotor tempel serta kapal motor masih menunjukkan dominasi penggunaan kapal tidak bermotor. Tahun 1986, keberadaan perahu bermotor tempel dan kapal bermotor meningkat yang sangat signifikan, sementara perahu tidak bermotor penggunaannya fluktuatif. Penggunaannya menurun dari 1136 buah (1984) menjadi 991 buah tahun 1986. Meskipun pada tahun 1998 kembali meningkat sebanyak 45 buah, tetapi kembali menurun lagi pada tahun 1990 sebanyak 43 buah. Sementara untuk penggunaan perahu motor tempel dan kapal motor dari periode 1980-1990, penggunaannya dari tahun ke tahun memperlihatkan laju yang sangat signifikan dengan kecenderungan yang terus meningkat (Tabel-7).

Tabel-7: Jumlah Alat Tangkap dan Perahu Tangkap di Kabupaten Sinjai pada tahun 1980,1982, 1984, 1986, 1988 dan 1990

Tahun	Alat Tangkap (bh)	Perahu Tangkap		
		Tidak Bermotor (bh)	Motor Tempel (bh)	Kapal Motor (bh)
1980	860	573	198	5
1982	1597	1162	346	85
1984	1532	1136	325	117
1986	1383	991	316	122
1988	1370	1036	319	136
1990	1348	993	419	181

Sumber: Dinas Perikanan Propinsi Dati I Sulawesi Selatan Tahun 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990.

Penggunaan alat tangkap, penurunan dari segi jumlah terlihat dari tahun 1980-1990, ini disebabkan karena penggunaan alat-alat tangkap seperti *belle*, *sero*, *jala lompo* dan sebagainya mulai banyak ditinggalkan, sementara penggunaan alat tangkap *gae*, *rengge* dan lain-lain mulai meningkat. Meskipun alat tangkap mengalami penurunan dari segi jumlah, namun kapasitas tangkapnya jauh lebih besar karena jenisnya adalah peralatan modern (Tabel-8).

Tabel-8: Jumlah dan Jenis Alat Tangkap Kabupaten Sinjai

Jenis Alat Tangkap	Jumlah Unit (dalam tahun)					
	1980	1982	1984	1986	1988	1990
Payang (<i>jala lompo</i>)*	76	105	54	45	42	40
Dogol (<i>puka lopi</i> , <i>panambe</i>)*	-	29	32	39	20	17
Jaring insang hanyut (<i>panja</i>)*	195	347	278	270	270	280
Jaring insang klitik (<i>puka doang</i>)*	26	74	75	71	81	59
Jaring insang lingkaran (<i>rengge</i> , <i>ulambi</i>)*	-	15	24	26	32	32
Jaring insang tetap (<i>lanra</i>)*	-	41	31	31	79	79
Pukat cincing (<i>gae</i>)*	9	20	47	59	59	53
Bagan perahu (<i>bagang lopi</i>)*	248	326	328	346	299	285
Bagan tetap (<i>bagang tette/menteng</i>)*	55	57	59	65	66	101

Jenis Alat Tangkap	Jumlah Unit (dalam tahun)					
	1980	1982	1984	1986	1988	1990
Pancing tonda (<i>meng tonda</i>)*	81	102	101	80	69	81
Sero (<i>sero</i>)*	36	33	47	30	25	20
Buhu (<i>belle</i>)*	46	45	36	44	32	30
Moro-ami (<i>puka jepang</i>)*	1	3	1	1	1	1
Pancing jenis lain (<i>meng</i>)*	87	400	419	276	295	270
Total	860	1597	1532	1383	1370	1348

Sumber: Dinas Perikanan Propinsi Dati I Sulawesi Selatan.

Ket.: (...) *: bahasa lokal yang diistilahkan oleh nelayan di Pulau Kambuno.

Kondisi di Pulau Kambuno, meskipun tidak tersajikan data secara kuantitatif, keterangan yang diperoleh bahwa periode awal tahun 1980-an, juga menunjukkan komposisi antara perahu tidak bermotor (*soppe layara* dan *bise/lepa-lepa*) masih lebih dominan dibandingkan dengan perahu motor tempel (*out board engine*) maupun kapal motor (*in board engine*), namun perkembangan motorisasi serta penggunaan alat tangkap baru menggejala cukup signifikan. Marginalisasi alat-alat kerja tradisional secara perlahan-lahan juga tidak terhindarkan. Telah terjadi pengkonsentrasian wilayah tangkap oleh nelayan-nelayan luar pulau (Takalar, Bulukumba, Jennepono, Sinjai, Bone dan sebagainya) di perairan Teluk Bone. Penggunaan alat-alat kerja tradisional semakin terdesak daerah tangkapannya (*fishing ground*) oleh alat-alat kerja yang lebih modern. Marginalisasi kekuatan produksi, juga ada pengaruhnya dari aspek jarak fisik (orbitasi wilayah) dan jarak sosial. Orbitasi wilayah yang jauh dari daratan (*mainland*) menyebabkan nelayan di pulau ter subordinasi dari segala bentuk program pemerintah termasuk modernisasi perikanan, sehingga segala bentuk upaya transformasi cara produksi yang terjadi, justru mendukung tumbuh-kembangnya pola-pola kapitalisasi melalui kelembagaan perkreditan lokal dalam masyarakat. Menurut Sallatang (2007) bahwa hampir pada umumnya nelayan tradisional pada masa lalu yang terlibat dalam kegiatan produksi laut (menjadi nelayan) orang yang tidak memiliki kemampuan kapital, sehingga ketika ia ingin beradaptasi terhadap penggunaan kekuatan produksi modern, yang harus ditempuh

adalah ikut terseret atau melalui pola-pola kapitalisasi dari kelembagaan nonformal yang dapat menjembatani transformasi tersebut. Jarak sosial lebih kepada adanya faktor pembatas yang dialami nelayan tradisional dalam jaringan kerja (*network space*) seperti; penghasilan, informasi, kedekatan dengan elite lokal, untuk mengakses teknologi modern. Dari keterbatasan yang dimiliki maka adaptasinya dengan cara bertahan dengan pola lama atau menjadi tenaga upahan pada sistem yang baru. Namun saja kedua-duanya tidak ada yang menguntungkan, strategi bertahan lambat laun akan tersingkir sementara strategi menjadi tenaga upahan maka harus siap mengalami proses eksploitasi. Ini dapat dihubungkan dengan studi Mubyarto (1988) bahwa, akibat kemajuan teknologi perikanan dikalangan pemilik modal sangat mempengaruhi daya kemampuan nelayan tradisional menangkap ikan, sehingga dapat diperkirakan bahwa, hambatan pembangunan perikanan di Indonesia bersumber pada upaya peningkatan produksi dan modernisasi industri perikanan tanpa memperhatikan kemampuan dan kebutuhan masyarakat nelayan tradisional di pedesaan, khususnya yang berada di pulau-pulau kecil dengan keterbatasan-keterbatasan yang mereka miliki.

Catatan kritiknya pada fase ini adalah; (1) pada kurung masa tersebut, kekuatan produksi dari cara produksi lama melalui aspek alat-alat kerja seperti penggunaan perahu tidak bermotor (*soppe layara* dan *lepa-lepa*), pancing, bubu, jala dan lainnya, mulai mengalami keterpinggiran akibat penetrasi modernisasi yang lebih unggul “adu kekuatan” dalam upaya penangkapan, (2) kemampuan nelayan dalam mengakses modernisasi sangat ditentukan oleh pengadaan kapital melalui relasi hubungan sosial, (3) munculnya kelembagaan pengreditan lokal telah menjembatani terjadinya perubahan cara produksi dalam masyarakat, dengan itu pola-pola kapitalistik ikut terpresentasikan, (4) jika dihubungkan dengan perspektif Neo-Marxis, maka keterpinggiran cara produksi tradisional dalam formasi sosial masyarakat di pulau ini, akibat adanya dominasi dari penetrasi cara produksi modern.

Dengan meminjam istilah Anthoni Giddens, bahwa manusia berada dalam situasi yang tidak pasti (*uncertainty*), situasi yang selalu berubah

dan tidak dapat diprediksi tersebut membuat ketidakpastian menjadi sesuatu yang pasti. Bagi nelayan di pulau ini, dibalik keterpinggiran alat-alat kerja tradisional akibat “kalah bersaing” dengan alat-alat kerja yang sifatnya modern, pandangan hidup yang dinamis dan optimis sebagai sesuatu yang menyimpan harapan masih berkomentasi dengan spirit (etos kerja) dalam aktivitas kehidupan sehari-harinya. Arus modernisasi yang mereka tidak dapat memanfaatkan, keterdesakan *fishing ground* serta pola-pola hubungan sosial dalam sistem produksi yang mulai individualistis, bukan berarti mereka “harus mati”. Tetapi justru masalah-masalah yang mereka hadapi itu, di pandang sebagai sesuatu yang harus diadaptasi dari konsekuensi tidak adanya alternatif pilihan lain yang bisa mereka lakukan untuk bertahan hidup (*survive*). Sungguhpun memiliki risiko yang sangat tinggi, baik karena kondisi alam maupun kondisi persaingan antar nelayan serta pendapatan yang tidak pasti, namun menjadi nelayan tidaklah semata-mata sebagai mata pencaharian (*livelihood*) tetapi sudah merupakan satu-satunya jalan hidup (*way of life*). Goodwin (1990) menyebutnya sebagai kelompok masyarakat termiskin (*the poorest of the poor*) yang hanya bisa pasrah menghadapi keadaan. Karena itu, para nelayan tradisional tetap akan mewariskan tradisi menangkap ikan kepada generasi berikutnya meskipun mata pencaharian yang dilakoni tersebut tetap bersifat subsisten. Ada prinsip hidup mereka bahwa:

“...sepanjang daun-daun pohon didarat belum habis, begitu juga keadaan ikan dilaut. Ikan dilaut itu sudah diciptakan dalam keadaan yang melimpah oleh Allataala (Allah Swt.) sebagai rezeki yang harus dimanfaatkan, cuma kita manusia terlalu serakah mengambilnya sehingga harus saling mengganggu (konflik) dalam menangkapnya. Tidak usah ragu tidak mendapat bagian, karena Allataala (Allah Swt.) sudah menentukan rezeki masing-masing orang.”

Ini menunjukkan bahwa dibalik keterpinggirannya justru nelayan tradisional dengan *indigenous knowledge*-nya tetap eksis dengan semangat *survival of the fittest*. Tetap resistan terhadap munculnya cara produksi

baru dalam formasi sosial masyarakat. Gagasan bahwa isi laut melimpah dan diperuntukkan bagi semua, menjadi daya lecut etos kerja mereka untuk tetap bersemangat.

Hubungan produksi (*relation of production*). Hubungan produksi nelayan tradisional yang memakai alat tangkap pasif (pancing, bubu dan sero) masih merupakan hubungan kerja sama yang terbentuk secara alami dengan tetap mengandalkan unit produksi keluarga inti (*nuclear family*), otomatis tenaga kerja utama adalah anggota keluarga itu sendiri. Hubungan produksi inheren pada struktur keluarga inti. Demikian halnya kelompok-kelompok nelayan tradisional yang menggunakan alat-alat tangkap aktif (*panambe, ulambi dan pukat jepang*) sampai pada fase ini, juga membangun hubungan kerja sama yang terbentuk secara alami melalui kebutuhan dari masing-masing pihak (*social capital*) berupa keharusan menyatukan tenaga kerja seperti mendayung, menaikkan dan menurunkan layar, atau menarik jaring serta menggiring ikan masuk dalam jaring, sehingga penggunaan modal kapital dapat dikatakan relatif minim. Meskipun telah melibatkan anggota keluarga luar (*extended family*) dalam kelompok kerja, namun belum dapat dikategorikan sebagai cara produksi komersialis sebagai mana pembatasan dari Kahn (1974), karena struktur yang teramati bersifat “pseudo-hierarki. Struktur hubungan ini dilabeli “pseudo-hierarki” karena seolah-olah dalam usaha tersebut ada dua status yang berbeda yaitu pemilik sekaligus pengelola usaha sebagai majikan/atasan atau *punggaha* dan anggota kerabat sebagai buruh/bawahan atau *sahi*, padahal dalam realitasnya tidak ada yang berusaha menganggap dirinya majikan atau buruh. Dasar pertimbangan cara produksinya belum dapat dikategorikan sebagai usaha komersial, karena; (1) strukturisasi kerja dalam organisasi produksi belum terdefiniskan dengan jelas, (2) penggunaan tenaga kerja manusia masih sangat dominan sehingga penggabungan tenaga kerja menjadi kebutuhan masing-masing pihak yang mencirikan tipe hubungan bersifat egaliter, (3) penggunaan teknologi alat yang masih bersifat tradisional sehingga pengelolaan usaha dapat dikatakan subsisten¹⁹, (4) sistem bagi hasil yang diberlakukan masih

¹⁹ Pengertian subsisten menurut Cifton dan Wharton (1969) ada dua, yaitu sebagai tingkat

mencirikan hasil dari kerja sama kelompok sehingga tidak ada pembagian khusus untuk kepemilikan atau *kepunggahaan (the have)*.

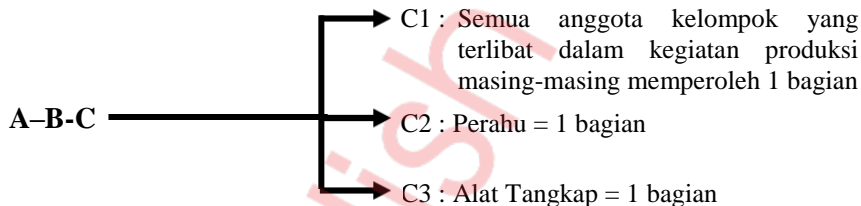
Pola-pola hubungan sosial antar anggota kelompok yang dilandasi ikatan kekerabatan yang sangat kuat, menjadikan sistem kepemilikan dalam struktur produksi menjadi kabur adanya. Terlihat dalam sebutan atau panggilan anggota kelompok kepada pemilik usaha dengan istilah *amure* (paman) jika anggota kelompok yang menjadi tenaga kerja adalah kemenakan dari pemilik usaha dan *daeng* (kakak) jika adik kandung, sepupu atau ipar yang menjadi tenaga kerja. Begitu pula sebaliknya, panggilan pemilik usaha kepada anggota kelompok yang terlibat dalam usaha produksi dengan istilah *anure'ku* (kemanakan saya), *sappo'ku* atau *annri'ku* (adik saya)²⁰. Dalam pendekatan etnografi, dikatakan bahwa kuatnya ikatan etnisitas dan kekerabatan menyebabkan kelompok yang tercipta merupakan kelompok persekutuan berdasarkan etnis atau kerabat yang terimplementasi dalam kegiatan produksi. Pekerjaan atau melibatkan pertimbangan etnis atau kerabat dalam kegiatan produksi merupakan sarana pengabdian sosial yang lebih inheren mempertahankan integritas etnis atau kerabat dalam masyarakat. Ini cara pandang egaliter, dengan tidak berusaha menempatkan salah seorang sebagai pemimpin dan yang lainnya sebagai pengikut. Struktur produksi cara produksi lama ini, gejala eksploitasi keuntungan oleh pemilik/pengelola usaha tidak terlalu signifikan. Karena peran masing-masing pihak dalam interaksinya lebih tertuju kepada bagaimana menampilkan keutuhan kekerabatan yang tercermin dalam kelompok kerja, ketimbang pertimbangan “untung-rugi” (*profit oriented*) yang mencirikan sikap individualistis. Artinya, beban kerja dan rezeki sedapat mungkin terbagi secara merata sehingga tidak ada satu pun anggota kerabat sampai mengalami “kelaparan”, ini juga ada hubungannya dengan fungsi *siri* sebagai nilai budaya lokal masyarakat

hidup dan sebagai suatu bentuk perekonomian. Pengertian pertama menggambarkan suatu kondisi ekonomi yang berfungsi sekadar untuk dapat bertahan hidup, sedangkan pengertian kedua merupakan sistem produksi yang hasilnya jika dipasarkan tidak dapat mencapai keuntungan yang komersial untuk mengakumulasi modal.

²⁰ Hasil wawancara dengan HJ (72 tahun) tokoh nelayan, dan UN (68 tahun) anggota kerabat HJ yang pernah ikut dalam usaha penangkapan.

Bugis-Makassar dalam mendinamisasi keseimbangan hubungan individu dan masyarakat untuk menjaga kekerabatan dan silsilah. Scott (1985) menyebutnya etika subsistensi komunitas lokal yang menyiratkan kesinambungan historis terhadap tradisi yang tetap dipertahankan. Namun dalam pandangan “ekonomi rasional petani” Popkin (1979) berbeda, karena itu teramati sebagai strategi sosial yang dikembangkan oleh komunitas lokal terhadap jawaban dari minimnya penggunaan modal dalam kegiatan produksi serta penggunaan teknologi yang masih mengandalkan penggabungan kekuatan fisik (tenaga manusia) sehingga isu-isu moral dianggap sangat efektif dalam penggabungan potensi yang dimiliki dalam pencapaian tujuan.

Hasil produksi yang diperoleh dalam kegiatan produksi pada fase ini diistilahkan sebagai “*bage reso*” (membagi hasil pekerjaan). Gambaran umum sistem *bage reso* (bagi hasil pekerjaan) kelompok kerja (*working group*) cara produksi tradisional dalam struktur “pseudo-hierarki” dapat dilihat pada skema berikut:



Ket:

A = produksi kotor

B = produksi bersih

C = pembagian bersih

C1,C2,C3 = bagian untuk..

Skema di atas, menunjukkan ada 3 (tiga) dasar pembagian hasil dalam sistem *bage reso* dalam kelompok kerja. 2 (dua) bagian di antaranya diperoleh oleh pemilik usaha dalam peranannya sebagai penyedia komponen fasilitas produksi (perahu dan alat tangkap). Sementara untuk 1

(satu) pembagian lainnya merupakan bagian hasil dari masing-masing orang yang terlibat dalam kegiatan pekerjaan termasuk pemilik sarana produksi itu sendiri sebagai bagian anggota kelompok. Konteks ini memperlihatkan sebuah Ideologi egalitarian melalui *bage reso* yang terdefiniskan melalui tidak adanya pembagian khusus untuk kepemilikan usaha (*the have*), melainkan masuk dalam bagian “semua orang yang terlibat dalam kegiatan produksi”. Personifikasi peran alat-alat produksi dengan bagian-bagian hasil yang tersendiri mengisyaratkan makna yang tersembunyi (*deep meaning*) untuk menghindari kesan monopoli bagian hasil yang hanya tertuju kepada satu individu.

Hanya saja pada fase 1980-1990 ini pula, lambat-laun keanggotaan dalam kelompok kerja yang dilabeli “pseudo-hierarki” mulai kehilangan “kepercayaan diri” untuk tetap dapat bertahan (integritas kelompok). Kondisi ini disebabkan oleh adanya arus modernisasi yang semakin kuat dan melahirkan cara produksi baru yang semakin dominan. Persoalan yang mulai muncul tidak lagi hanya karena ketidakmampuan mereka dalam mengakses teknologi tersebut, tetapi juga persoalan mengenai keterdesakan ruang sosial (*fishing ground*) yang “dikepung” oleh kekuatan produksi modern yang berdampak terhadap penurunan kualitas daya tangkap dan juga faktor psikologi anggota-anggota kelompok dalam kelompok kerja. Faktor psikologi dimaksudkan berupa melemahnya motivasi dan integritas anggota kelompok untuk tetap dapat bertahan dalam kelompok kerja. Melemahnya motivasi dan integritas anggota dalam kelompok kerja (*working group*). Ini terpahami dalam psikologi sosial bahwa tekanan-tekanan sosial memiliki korelasi terhadap kokoh-tidaknya kehidupan kelompok, solidaritas antara para anggota kelompok, serta *sense of belongingness* pada diri anggota kelompok masing-masing (Gerungan, 1991).

Penuturan pengalaman informan:

“...sekitar awal tahun 1980-an, mulai saya rasakan bagaimana susahnya mengajak kaneng’e (anggota kerabat) untuk ikut menangkap ikan. Perahu saya pada waktu itu masih pakai layar sementara lokasi yang dulunya sering saya datangi telah dipenuhi

oleh nelayan-nelayan lain dari luar pulau (nelayan Takalar, Jenneponto, Bulukumba, Bone). Mereka semuanya sudah memakai mesin dengan alat tangkap gae (purse seine) terpaksa saya harus pergi jauh untuk mencari lokasi lain. Ana-ana'e (anggota kelompok) pada umumnya mulai malas bekerja jika terlalu lama dilaut, tetapi tidak ada jalan lain kalau tidak mencari lokasi yang jauh, karena kalau kita kumpul dalam satu lokasi tidak ada hasil yang didapat, alat tangkap yang mereka gunakan lebih bagus dibanding yang saya miliki. Anggota kelompok saya pada waktu itu banyak yang pindah ke pa'gae khususnya ke punga-punga di daerah Lappa dan ada juga yang ikut menjadi pattaripang. Meskipun mereka pada umumnya keluarga tetapi saya tidak bisa memaksa untuk tetap ikut, karena saya pun rasakan hasil dari pekerjaan ini sudah menurun tidak seperti dulu lagi".

Kurung waktu periode ini, modernisasi perikanan sangat intensif, cara produksi baru (modern) semakin berkembang, penetrasi kapital semakin gencar. Namun bagi nelayan tradisional yang bertahan dengan cara produksi lama (tradisional), "modernisasi" malah menjadi sebuah persoalan baru yang mereka harus hadapi, termasuk dalam hubungan produksi berupa semakin sulitnya mendapatkan tenaga kerja, serta semakin terdesaknya wilayah *fishing groundnya* yang berdampak pada penurunan produktivitas dari usaha yang digeluti. Studi Nur Indar (2005) menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab marginalisasi nelayan tradisional akibat adanya pengkonsentrasian wilayah tangkap yang jelas akan menguntungkan nelayan modern. Timbulnya daya resistensi nelayan tradisional karena mereka tidak memiliki aksesibilitas terhadap modernisasi, misalnya mendapatkan kredit produksi, sehingga nelayan tradisional yang hanya mengandalkan wilayah eksploitasi beberapa ratus meter dekat pantai menjadi semakin terdesak dengan perkembangan modernisasi perikanan. Ini adalah *modernization without development* menurut Sajogyo, (1982), karena keberadaan modernisasi atau kapitalisasi ternyata keberpihakannya hanya bias kepada yang memiliki aksesibilitas terhadap modernisasi, sementara yang lain (yang tidak memiliki aksesibilitas) harus siap tersingkir atau bertahan sebagai bentuk pola adaptasi yang harus dilakoni.

Cara Produksi Baru. Cara produksi baru pada periode 1980–1990 di Pulau Kambuno, merupakan tahap di mana kelompok nelayan yang memiliki aksesibilitas terhadap modernisasi melakukan investasi tidak hanya dengan penggunaan motorisasi pada perahu, tetapi juga berkembang kepada investasi di bidang alat tangkap. Surplus mulai tercipta dan dengan itu pula kelas pedagang mulai bermunculan dalam masyarakat. Upaya meningkatkan surplus produksi, penetrasi kapital (investasi usaha) semakin diusahakan oleh nelayan yang memiliki akses terhadap modernisasi. Kebutuhan akan kapital telah menjadi diskursus utama dalam hubungan-hubungan sosial masyarakat. Pola-pola kapitalisasi semakin tumbuh subur dalam ruang sosial masyarakat melalui kredit produksi sebagai lembaga yang menjembatani transformasi yang dimaksud.

Kekuatan produksi (*force of production*). Kekuatan produksi yang mengawali penegasan cara produksi baru pada fase ini, adalah diadopsinya teknologi penangkapan *gae* dan teknologi tangki/tabung gas (*scuba diving*) serta alat kompresor bagi penyelam teripang (*pa'taripang*). Adopsi teknologi alat oleh nelayan, merupakan perkembangan modernisasi perikanan selanjutnya melalui kekuatan produksi yang diintrodusir. Gambaran riil diuraikan dalam dua tokoh kasus sebagai aktor perubahan modernisasi di pulau ini. Masing-masing; pengalaman *Patappe* dengan kelompok kerjanya sebagai inovator alat tangkap *gae* sebagai uraian kasus pertama dan uraian kasus kedua pengalaman *Pallawarukka* dengan kelompok kerjanya sebagai inovator penggunaan alat tangki/tabung gas (*scuba diving*).

Kasus Pertama. *Patappe* mengadopsi teknologi mesin perahu dan alat tangkap *gae* (*purse seine*) dengan membeli dari seorang *punggaha* yang tinggal di Paotere (*H. Makkita*) pada tahun 1982. Modal pembelian alat produksi melalui hasil penjualan alat tangkap yang selama ini dipergunakan (*pukat jepang*) dan penjualan perhiasan emas yang dimiliki istrinya. Informasi alat tangkap *gae* diperolehnya dari *H. Makkita* seiring dengan semakin favoritnya penggunaan alat tangkap *gae* dan *rengge* dikalangan nelayan Sulawesi Selatan, karena memiliki daya tangkap lebih besar dengan peralatan yang lebih kompleks. Pengenalan *Patappe* dengan

H. Makkita dilatari oleh ikatan kekerabatan yang lebih dipererat lagi karena keduanya mengelola usaha di bidang perikanan tangkap. *Patappe* bersama dengan *Suebu* (adik istrinya), berangkat ke Paotere untuk mempelajari penggunaan alat tangkap *gae* dengan cara ikut serta menjadi anggota dari salah satu kelompok kerja yang dimiliki oleh *H. Makkita*. Setelah menguasai cara penggunaannya, *Patappe* membeli *gae* seharga Rp1.750.000,00 yang dibayarkannya secara kontan. Penggunaan alat tangkap *gae* pada fase ini, merupakan babak baru dari perkembangan alat tangkap modern di Pulau Kambuno, karena merupakan alat tangkap *gae* yang pertama dimiliki oleh nelayan di pulau ini.

Apa yang dilakukan oleh *Patappe*, merupakan manifestasi dari ciri manusia modern jika dikaitkan dengan rumusan “*modern man*” (Inkeles dan Smit, 1974) tentang, adanya perilaku individu/masyarakat untuk melakukan inovasi atau adopsi teknologi dalam melepaskan diri dari ketergantungan alam sehingga dapat menguasai sumber daya alam untuk kesejahteraan. Weber (1978) menyebutnya sebagai tindakan *purposive rationality* dan Popkin (1979) melihat sebagai rasional ekonomi *peasant*, karena *Patappe* berupaya menciptakan struktur sosial baru yang lebih menguntungkan, agar akses mereka terhadap sumber-sumber ekonomi menjadi semakin besar. Penekanan Rogers (1962), Mosher (1966) dan Summer (1983) tentang penyebaran teknologi dalam masyarakat, maka *Patappe* dikatakan individu inovatif atau manusia pelopor yang turut menentukan perkembangan modernisasi perikanan di pulau ini.

Konstruksi serta cara pengoperasian alat tangkap *gae* yang merupakan perkembangan modernisasi perikanan di Pulau Kambuno pada fase ini, adalah sebagai berikut:

- *Gae* (pukat cincin). Digunakan untuk menangkap ikan dengan prinsip mengurung atau mengelilingi gerombolan ikan pada bagian air (*mid water*) sampai ke bagian permukaan air, dengan menggunakan jaring yang ukuran *mesh-size*-nya kecil untuk mencegah lolosnya ikan. Konstruksi pukat cincin mirip dengan pukat pantai. Pada bagian bawah tali pemberat, dilengkapi dengan rangkaian cincin terbuat dari logam yang diatur dengan jarak/interval tertentu. Pukat diangkat dengan cara menarik tali

kerut/tali kolor (*purse line*) yang dipasang sepanjang rangkaian cincin yang dilalui. Hal ini membuat bagian bawah pukut cincin menutup dan ikan yang terperangkap tidak dapat lolos. Pukat cincin dioperasikan dengan kapal yang ukurannya bervariasi mulai dari ukuran kecil sampai dengan ukuran besar. Oleh karena itu, cara pengoperasiannya pun bermacam-macam, sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman masing-masing nelayan. Akan tetapi dari cara yang berbeda tersebut, terdapat prinsip yang mempersamakannya, yaitu jaring dilingkarkan pada gerombolan ikan sehingga tidak dapat melarikan diri ke lapisan dasar laut. Setelah gerombolan ikan terdeteksi dan banyak berkumpul di bawah sinar lampu, maka nelayan *sahi* yang bertugas pada perahu kecil tempat memasang lampu memberi kode kepada *juragan lopi* yang ada pada perahu besar untuk mengelilingi perahu kecil sehingga ikan yang ada di bawah sinar lampu tadi tidak dapat meloloskan diri. Pada waktu *juragan lopi* menjalankan perahu mengelilingi perahu kecil, semua *sahi* bersiap-siap membantu *juragan lopi* membuang jaring yang ada di perahu besar. Dalam gerakan melingkar tersebut, arus dan angin harus mendapat perhatian agar supaya jaring tidak terlilit pada baling-baling perahu dan juga perlu diperhatikan agar perahu kecil segera keluar dari lingkaran jaring setelah dua ujung jaring telah bertemu. Pada pembuangan jaring, yang pertama dibuang adalah umbul di mana pada ujungnya dipasang bendera, setelah itu berturut-turut; kantong, badan jaring dan yang terakhir adalah sayap yang terikat pada salah satu tiang perahu. Setelah pukut terpasang, pelampung tanda diangkat lalu tali kolor (*purse line*) mulai ditarik sehingga bagian bawah pukut menjadi tertutup. Kemudian pukut ditarik sampai ikan terkonsentrasi di bagian akhir pukut. Setelah umbul dinaikkan, tali kolor tersebut dilepas dan ditarik secara bersama-sama ke atas dek perahu dan digulung. Ikan Target Penangkapan: Penggunaan pukut cincin hampir seluruhnya untuk menangkap ikan-ikan pelagis seperti tuna, makerel, dan lain-lain.

Kasus Kedua, pengalaman *Pallawarukka* dijadikan sebagai uraian kasus terhadap penggunaan tangki/tabung gas (*scuba diving*) dalam kegiatan penyelaman mencari teripang di pulau ini. Penggambarannya diawali dengan kepergiannya ke daerah Flores (Nusa Tenggara Timur) dalam melakukan penyelaman mencari mutiara dan teripang pada tahun 1981. Hasil interaksi dengan nelayan setempat maupun nelayan-nelayan pendatang lainnya, *Pallawarukka* mempelajari cara penggunaan tangki/tabung gas (*scuba diving*) dalam melakukan penyelaman. Menjelang akhir tahun 1981, *Pallawarukka* kembali ke Pulau Kambuno dan menceritakan pengalamannya kepada *H. Dg. Mallise*, seorang *punggaha bonto* di Pulau Kambuno. Hasil pembicaraan *Pallawarukka* dan *H. Dg. Mallise* disepakati mengenai kesanggupannya untuk mengajarkan cara penggunaan *scuba diving* kepada *sahi H. Dg. Mallise* dan sekaligus kesediaannya menjadi *punggaha kecil* atau *juragan lopi* usaha produksi *H. Dg. Mallise* nantinya. Kemudian, *H. Dg. Mallise* menghubungi *Holiang* (warga keturunan Cina) seorang “bos” yang bertempat tinggal di Makassar untuk bekerja sama membeli alat tangki/tabung gas yang akan dioperasikan di Pulau Kambuno dan sekitarnya (Teluk Bone). Selanjutnya, *H. Dg. Mallise* membawa peralatan menyelam satu set dengan enam tangki/tabung gas dari Makassar dengan harga Rp10.500.000,00. *Palawarukka* mulai mengajarkan cara menyelam dengan penggunaan tangki/tabung gas kepada *sahi H. Dg. Mallise*, yang pada umumnya telah memiliki keterampilan dasar menyelam berdasarkan *indigenous knowledge* dengan teknologi tradisional (*ladung*) yang mereka pergunakan selama ini. Ketika *sahi-sahi* yang diajar mulai mampu menggunakan tangki/tabung gas dalam melakukan penyelaman, maka *H. Dg. Mallise* mempercayakan satu unit perahu motor dengan peralatan selam kepada *Pallawarukka* untuk melakukan pencarian/penyelaman teripang (*sea cucumbers*) di Teluk Bone dan sekitarnya.

Sekitar pertengahan tahun 1984, komoditas (teripang) semakin diminati baik dari pasar lokal maupun pasar ekspor khususnya negara Singapura, Hongkong, Taiwan, RCC, Korea dan Jepang, sehingga mendorong beberapa pengusaha aras lokal maupun supra lokal, terutama

pengusaha warga keturunan Cina yang bertempat tinggal di Makassar, melakukan investasi di kawasan Pulau Sembilan dengan membawa langsung pelatih selam dan merekrut dua atau tiga orang pulau yang lebih dahulu terampil menggunakan perangkat alat selam modern tersebut menjadi *punggaha kecil* atau *juragan lopi* menjalankan usaha penyelaman mencari teripang yang dimodalinya. Seiring itu pula, perkembangan motorisasi pada perahu-perahu nelayan juga mengalami peningkatan. Mesin yang dulunya dipasang di luar bodi perahu (*out board engine*) berubah menjadi *inboard engine* (mesin dipasang dalam bodi perahu) dengan peningkatan kapasitas muat dan kekuatan mesin.

Pada fase ini (1984/1985)), merupakan awal puncak perkembangan kegiatan penyelaman mencari teripang di Pulau Kambuno karena tampil sebagai kegiatan produksi yang peredarannya lebih dominan dibanding kegiatan lain (penangkapan ikan) sehingga nelayan banyak yang beralih dan terserap dalam cara produksi tersebut. Menurut Khan (1975), tentang kehadiran lebih dari dua kegiatan berproduksi (mata pencaharian) pada satu masyarakat yang sama, bahwa cara produksi dikalangan *peasant* akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi lingkup sosial yang lebih besar, bervariasi mengikuti *a particular set of historical conditions*; maka bervariasi mengikuti interaksi dengan cara produksi lain yang peredarannya lebih dominan. Dikatakan *a particular set of historical conditions*, karena dalam kehidupan nelayan pulau-pulau kecil di kawasan Indonesia Timur termasuk nelayan Pulau Kambuno, fenomena penyelaman biota laut khususnya komoditas teripang lebih memiliki akar histori yang “lebih kuat” dibanding kegiatan usaha penangkapan ikan. Salah satu bukti fisik misalnya, *ladung* yang merupakan teknologi tradisional yang khusus diciptakan oleh masyarakat nelayan pulau-pulau kecil. Kegiatan penyelaman mencari teripang bagi masyarakat pulau-pulau kecil khususnya di Sulawesi Selatan, bisa dilacak ke beberapa dekade bahkan beberapa abad ke belakang (*backward in time*) yang tidak hanya terbatas pada aras lokal tetapi sampai supranasional khususnya jaringan perdagangan ke luar (*outward in space*) hingga melampaui batas-batas negara. Fenomena ini juga dipandang salah satu faktor maka masyarakat

pesisir dan pulau-pulau kecil dikatakan bersifat lebih terbuka, dinamis dan egaliter, serta biasa memanfaatkan pengaruh luar karena adanya interaksi niaga antar daerah maupun bangsa.

Komponen alat serta cara pengoperasian alat selam (*scuba diving*) yang merupakan perkembangan modernisasi perikanan dalam mencari teripang di Pulau Kambuno, adalah sebagai berikut: komponen alat terdiri atas: (1) tangki/tabung gas (*scuba diving*) sebagai tabung oksigen yang berfungsi membantu pernapasan dalam air saat melakukan penyelaman, (2) masker selam (kacamata selam), (3) *snorkel* (alat yang berfungsi untuk memasukkan dan mengeluarkan udara), (4) *fins* (sirip renang/kaki katak), untuk membantu pergerakan renang pada saat menyelam, (5) *bunre*, adalah alat yang terbuat dari bahan jala (jaring) yang ujungnya dibuat melingkar dan di lengkapi tali kerut/tali kolor (*pa'puru*) dan diikatkan pada pinggang penyelam yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara pada saat mendapatkan teripang atau biota laut lainnya. Pengoperasian: Penyelaman dilakukan baik di daerah terumbu karang pada kedalaman kurang dari 25 meter maupun di laut dalam. Setelah menetapkan lokasi penyelaman, maka *juragan lopi* mematikan mesin perahu dan menurunkan jangkar dan pelampung yang berbendera sebagai tanda posisi perahu bagi penyelam. Saat akan menyelam mereka terbagi atas dua kelompok, kelompok pertama *juragan lopi* bersama dengan beberapa orang *sahi* melakukan penyelaman terlebih dahulu, dan *sahi* lainnya tetap berada di atas perahu sambil melakukan aktivitas pemancingan. Lama penyelaman kurang lebih satu jam. Sistem bergiliran bagi *sahi* dalam melakukan penyelaman juga terpraktikkan dalam setiap kegiatan operasi penyelaman. Meskipun target utama penyelaman adalah teripang tetapi dalam praktiknya pengambilan biota laut yang memiliki nilai ekonomis penting juga dilakukan seperti kerang (mutiara, lola dan sebagainya). Musim teripang (*sea cucumbers*) yaitu saat *turona* dimulai pada awal bulan Mei sampai akhir bulan Agustus atau awal September.

Pertengahan tahun 1985 atau sekitar awal tahun 1986, terjadi perubahan kekuatan produksi khususnya peralatan selam (*scuba diving*) bagi nelayan *pa'taripang* dari yang awalnya menggunakan tangki/tabung

gas berubah ke alat kompresor yang perkembangannya sangat cepat diadopsi oleh hampir seluruh nelayan *pataripang* di pulau ini. Proses kemunculan alat kompresor bagi nelayan *pa'taripang* di Pulau Kambuno jika dihubungkan dengan individu inovatif tidak dapat terlacak dengan baik. Namun dari berbagai informasi yang disampaikan oleh masyarakat, dapat ditarik kesimpulan yang sama, bahwa awal mula penggunaan alat kompresor disebabkan oleh faktor imitasi²¹ dari hasil interaksi nelayan pulau ini dengan nelayan Madura yang melakukan kegiatan penyelaman di daerah Teluk Bone dan sekitarnya. Menurut Lampe (2003) tentang mobilitas nelayan di Indonesia, bahwa hal yang menarik perhatian adalah nelayan Madura (jumlahnya tidak kurang dari 10 kapal) juga sampai di Teluk Bone mencari jenis-jenis teripang yang tidak diambil oleh nelayan Bugis dan Bajo.

Penjelasan lain mengapa alat kompresor tampil menjadi favorit di kalangan penyelam teripang di Pulau Kambuno, karena; (1) faktor biaya operasional yang lebih murah jika menggunakan tangki/tabung gas, (2) menggunakan tangki/tabung gas dianggap bisa membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa nelayan²², (3) faktor kejiwaan khususnya masalah

²¹ Berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada berbagai faktor, antara lain, faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Faktor-faktor tersebut dapat bergerak sendiri-sendiri secara terpisah maupun dalam keadaan tergabung. Apabila masing-masing ditinjau secara mendalam maka faktor imitasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses interaksi sosial. Salah satu segi positifnya adalah bahwa imitasi dapat mendorong seseorang untuk meniru atau mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku (dalam hal ini penggunaan teknologi cara), namun demikian imitasi juga dapat mengakibatkan terjadinya hal-hal negatif di mana misalnya, yang ditiru adalah tindakan-tindakan yang menyimpang. Kecuali daripada itu imitasi juga dapat melemahkan atau bahkan mematikan pengembangan daya kreasi seseorang (Soekanto, 1989).

²² Meskipun sebenarnya penggunaan tangki menyelam lebih menjamin kesehatan (terhindar dari kelumpuhan) dibandingkan dengan penggunaan kompresor apabila dilakukan sesuai dengan prosedur, namun pada praktiknya nelayan-nelayan di pulau ini melakukan kegiatan penyelaman dengan menggunakan tangki/tabung gas tidak sesuai dengan prosedur standar keselamatan (khususnya jarak kedalaman) sehingga tidak sedikit dari mereka yang menggunakan alat ini mengalami kelumpuhan atau keluhan dekompresi (*decompression illness*) yaitu perubahan tekanan oleh lingkungan (air) yang dialami oleh tubuh sewaktu menyelam. Penyakit *caisson* atau *caisson disease* adalah penyakit atau kelainan yang disebabkan oleh pelepasan dan mengembangnya

safety yang merasa lebih terjamin jika pada saat menyelam menggunakan kompresor dibanding tangki/tabung gas, karena adanya tali slang maupun tali pengikat yang diikatkan pada pinggang dan dapat menjadi alat pengontrol bagi anggota kelompok yang berada di atas perahu. Perbedaan komponen alat serta cara pengoperasian dari perubahan pemakaian tangki/tabung gas ke kompresor, hanya terletak pada penggunaan kompresor udara yang dihubungkan dengan slang (200-500 meter) sebagai alat bantu mendapatkan oksigen dalam air saat melakukan penyelaman. Sementara penggunaan alat-alat kelengkapan selam lainnya sama saja dengan sebelumnya seperti; masker selam, *snorkel*, *fins* dan *bunre*. Saat akan menyelam juga terbagi atas dua kelompok, kelompok pertama yang turun melakukan penyelaman terlebih dahulu, dan yang lain menjaga selang *air compressor* agar tidak terlipat dan memperkirakan kapan waktunya untuk menarik rekan mereka yang turun lebih dahulu dengan tali yang telah diikatkan di pinggang penyelam. Saat merasa waktu penyelaman sudah cukup, maka kelompok yang kedua bertugas di atas perahu langsung menarik tali tersebut secepat mungkin. Sistem bergiliran dalam melakukan penyelaman juga terpraktikkan.

Konstruksi modernisasi perikanan terhadap formasi sosial yang melahirkan cara produksi baru pada fase ini sedikitnya teridentifikasi oleh tiga faktor pendorong (*push factor*) yaitu; (1) ada orang atau sekelompok orang yang bersedia melakukan dan menyebarkan perubahan tersebut (individu inovatif; manusia pelopor), (2) ada kelembagaan yang mampu menjembatani perubahan tersebut (kelembagaan perkreditan), (3) tersedianya alat teknologi yang berubah dan berkembang yang dapat diperakarkan dalam masyarakat (dalam konteks ini teknologi alat tangkap *jala*, *ulambi*, *panambe* berkembang menjadi *gae* serta teknologi *ladung* berkembang menjadi tangki/tabung gas dan kompresor), Artinya bahwa penggunaan alat-alat produksi baru yang diadopsi oleh nelayan di pulau ini

gelembung-gelembung gas dari fase larut dalam darah atau juga penurunan tekanan sekitarnya yang pada akhirnya akan menyebabkan kelumpuhan (jurnal kesehatan, 2002).

masih menjadi bagian dari pengembangan dari penggunaan alat-alat produksi sebelumnya.

Beberapa intisari yang dapat disarikan dari uraian keseluruhan adalah: (1) dalam perkembangan kegiatan usaha perikanan, ketersediaan modal (modal dan teknologi) telah menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat nelayan, sehingga keterlibatan lembaga pengreditan lokal yang menyediakan modal, telah menjadi kaidah-kaidah sosial yang bersumber dari kemodernan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru nelayan yang meningkat atau berkembang; (2) perkembangan teknologi alat telah mendorong perolehan surplus produksi yang menyebabkan kelembagaan kelompok kerja, kelembagaan permodalan baik dari aras lokal maupun supra lokal melakukan reinvestasi melalui peningkatan kapasitas, kuantitas dan kualitas alat-alat produksi, yang dengan itu penegasan kekuatan produksi modern semakin terdefiniskan dalam formasi sosial masyarakat.

Hubungan produksi (*relation of production*). Gambaran hubungan produksi pada periode ini, tetap mengacu kepada dua uraian kasus sebelumnya, melalui hubungan kerja sama atau pembagian kerja dalam proses produksi, struktur pengorganisasian sosial produksi dan hubungan antara pemilik modal/usaha dan pekerja, yang dilihat baik dalam dimensi ekonomi maupun dimensi sosial dalam masyarakat.

Kasus Pertama (Patappe). Ukuran organisasinya berkisar 7–10 orang. *punggaha* sebagai pemilik sekaligus sebagai pemimpin operasional penangkapan, dan lainnya berstatus sebagai *sahi*. Perekrutan *sahi*, masih memprioritaskan *extended family*, tetapi juga tidak lagi menutup peluang bagi orang lain yang akan ikut bergabung dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, khususnya pengalaman kerja. Keanggotaan dalam kelompok kerja mulai bersifat terbuka dan temporer²³ kecuali beberapa di

²³ Pada hakekatnya hubungan kerja antara *punggaha* dan *sahi*, dalam kelompok kerja (*working group*) sifatnya memang temporer, karena meskipun *sahi* terekrut dengan pertimbangan kerabat (*extended family*) tetapi keanggotaan mereka sebenarnya adalah orang bebas, yang hanya mengadu untung selama satu musim penangkapan. Namun dalam kenyataannya hubungan kerja tersebut cenderung menjadi permanen sifatnya, karena adanya berbagai faktor yang mendorong terjadinya keadaan itu, seperti adanya hubungan hutang-piutang, keinginan untuk membalas budi dan sebagainya.

antaranya yang telah menjadi anggota tetap sebagai orang kepercayaan. Pembatasan jumlah anggota kelompok telah diberlakukan dengan pertimbangan rasional kalkulatif (Popkin, 1979). Besarnya investasi usaha yang dikeluarkan dalam mengubah kekuatan produksinya menjadi modern, sedikit-banyaknya telah menggeser semangat kolektivitas berdasarkan kekerabatan yang tergantikan dengan pertimbangan kalkulasi untung-rugi dalam kegiatan produksi. Prinsip etika subsistensi komunitas lokal (Scot, 1981) mengalami pengikisan. Penggabungan dualisme tindakan berupa *value oriented rationality* dan *purposive rationality* (Weber, 1978) diberlakukan oleh Patappe. *Value oriented rationality* teramati melalui prioritas tenaga kerja yang masih berdasarkan *extended family*, sementara tindakan *purposive rationality* teramati melalui perekrutan tenaga kerja luar berdasarkan pengalaman kerja dan pembatasan anggota kelompok dengan kalkulasi untung-rugi. Penerapan faktor efisiensi dan efektifitas dalam wujud lokal melalui hubungan produksi terkontekskan. Popkin (1979) menyebutnya sebagai pergeseran dari hubungan berdasarkan moral ke hubungan berdasarkan rasionalitas.

Awal tahun 1983, ketika volume tangkapan mulai meningkat sehingga pemasaran memerlukan penanganan khusus, Patappe tidak melaut lagi dan berkonsentrasi terhadap kegiatan pemasaran di TPI Lappa. Kegiatan operasional penangkapan dipercayakan sepenuhnya kepada Suebu adik dari istrinya (ipar) yang dulu berperan sebagai juru mudi (*pallopi*). Pada fase inilah, awal munculnya istilah *punggaha kecil* atau *juragan lopi* secara struktural-fungsional dalam kelompok kerja. Kedudukan Suebu telah berubah menjadi *juragan lopi*, maka dengan sendirinya beban tanggung jawab kelompok kerja yang selama ini diperankan oleh *punggaha bonto* (Patappe) sedikit banyaknya telah dialihkan kepada Suebu yang tidak hanya mempertanggungjawabkan anggota kelompok yang ikut terlibat tetapi juga terhadap keselamatan perahu, mesin (motor) dan alat-alat produksi lainnya. Peranan Suebu dalam kelompok kerja juga meluas, sampai pada urusan di luar pekerjaan. Misalnya, salah seorang *sahi* membutuhkan tambahan biaya hidup, maka *sahi* tersebut lebih banyak membicarakan persoalan tersebut atau meminta bantuan kepadanya. Meskipun uang pinjaman yang diberikan kepada *sahi*,

bukan dari uangnya sendiri tetapi ia telah menjaminkan dirinya kepada *punggaha bonto* untuk dikabulkan permintaan pinjaman dari *sahi*.

Munculnya *Suebu* sebagai *punggaha kecil* atau *juragan lopi*, jika dihubungkan dengan hierarki dalam kelompok kerja (diferensiasi secara vertikal) telah memperlihatkan lahirnya satu lapisan baru yakni lapisan tengah dalam struktur kelompok kerja. Di mana lapisan atas diperankan oleh *punggaha bonto*, lapisan tengah diperankan oleh *punggaha kecil/juragan lopi* (sebagai lapisan baru) dan lapisan bawah diperankan oleh *sahi*. Kedudukan *Suebu* tidak lagi dipandang sebagai sesama anggota *sahi biasa* oleh *sahi* lainnya, tetapi ia telah diposisikan sebagai pemimpin di laut dengan gelaran *juragan lopi'e*. Dalam hubungan struktural fungsional, kedudukan *juragan lopi* dalam kelompok kerja ini diinterpretasi sebagai “kelas komprador”²⁴, karena dalam eksistensinya lebih banyak mengamankan kebijakan *punggaha bonto* khususnya dalam pembagian hasil. Oleh karena itu, lapisan tengah yang baru muncul dalam struktur organisasi produksi fase ini diasumsikan hanya sebagai “lapisan semu” dalam teori perubahan sosial, karena sangat dependen (terikat) oleh lapisan di atasnya (*punggaha bonto*). Ini terpahami karena *juragan lopi* juga berasal dari masyarakat nelayan yang sama sekali tidak memiliki akses ekonomi.

²⁴ Fenomena “kompradorisme” lahir dari teori ketergantungan, Marxis, dan Neo-Marxis dalam memahami fenomena kemiskinan. Kalangan ini menganggap bahwa kemiskinan terjadi bukan karena nilai-nilai budaya tradisional yang dianut oleh suatu masyarakat tetapi disebabkan oleh “tindakan eksploitatif” kaum pemilik modal dan faktor produksi terhadap sumber daya ekonomi yakni sumber daya alam (hutan, perikanan dan perkebunan) dan sumber daya manusia. Fenomena ini berhasil diungkapkan oleh penelitian Tindjabate (2001) yakni akibat intervensi kapitalisasi terhadap komunitas nelayan mengakibatkan terjadinya fragmentasi kegiatan nelayan yang semula homogen menjadi beragam. Keberagaman ini memunculkan formasi sosialbaru yaitu adanya buruh (*sahi*) nelayan, *punggaha kecil* atau *juragan lopi* dan pemodal (*bos*) serta perubahan sumber penghasilan nelayan yang semula diusahakan sendiri menjadi upah yang diberikan *punggaha bonto* memiliki faktor produksi. Golongan *compradore* juga diungkap oleh Sasono (1980) dalam “Tesis Ketergantungan dan Kasus Indonesia” bahwa golongan ini bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan pihak asing, pengusaha domestik dan elite yang berkuasa yang pada hakikatnya sama dengan kerja sama yang terjalin di antara pihak penjajah asing, pengusaha domestik dan kalangan menengah lainnya dan golongan feodal pada zaman penjajahan dulu.

Seiring dengan itu, perubahan kelembagaan kerja juga semakin terdefiniskan, sebagai penyesuaian diri (adaptasi) dengan meningkatnya teknologi penangkapan yang dipergunakan. *Sahi* sebagai anggota kelompok telah terdeferensiasi dalam proses strukturisasi kerja yang permanen, mereka tidak dapat lagi digeneralisasi dalam posisi yang sama sebagai *sahi* biasa. Pembagian spesialisasi dalam strukturisasi kerja terdeferensiasi dalam fungsi kerja yang meliputi; *sahi* yang menangani mesin (*sahi pa'bas*), *sahi* yang menangani penyelaman/lampu (*sahi pa'kaca*) serta *sahi* lain yang menangani pengoperasian jaring dan pemuatan dan pengesan ikan dalam bak penampungan. Gambaran Durkheim (1964) tentang perubahan ke arah spesialisasi pada fase ini signifikan. Ada juga *sahi* yang bertugas sebagai juru masak dan menimba air dari lambung perahu yang pada umumnya dikerjakan oleh *sahi-sahi* yang baru terekrut dan belum memiliki banyak pengalaman dibanding *sahi-sahi* yang lain. Ini menandakan bahwa hubungan produksi yang ada berkait pada tingkat perkembangan kekuatan produktif, meskipun dikatakan tidak mutlak atau permanen karena ketidaksesuaian ganda antaranya bisa saja terjadi (Fromm, 2004).

Kurung periode ini, penggunaan pengetahuan untuk menghindarkan atau melindungi diri dari gangguan-gangguan alam, dan untuk memperoleh hasil yang banyak, masih tetap mengandalkan pengetahuan asli (*indigenous knowledge*) yang dimilikinya, meskipun kompleksitas alat-alat kerja yang sudah modern telah dipergunakan. Menurut informan:

“...dunia adalah usaha, dua hal yang harus dimiliki dalam mencari rezeki Tuhan yang disebut sebagai syarat, yaitu kata atau kalimat yang dilafalkan (*mantra; baca*) dan perbuatan dalam bentuk aksi (*ritual; gaugang*), periksa napasmu jika ingin menaiki perahu, kalau napas kanan yang keras maka kaki kanan yang harus pertama kali diinjakkan di atas perahu, begitu pula sebaliknya. Jika didapati hal-hal yang aneh di lautan maka tahan napas, baru menyebut Allahu Akbar Allah maha kuasa A²⁵”.

²⁵ Penyebutan kata „A“ setiap akhir kalimat yang disampaikan dalam konteks *baca na gaugang* berdasarkan *indigenous knowledge* yang mereka miliki, bahwa huruf „A“

Sinkretisasi antara kepercayaan lama yang bersifat imanensi dengan kepercayaan dari agama Islam yang bersifat transendensi, masih dianggap sebagai nilai yang fundamental pada fase ini. Begitu halnya dengan ritual-ritual (*gaukang*) pada umumnya masih dilakukan *juragan lopi* terutama saat akan melaksanakan perjalanan penangkapan ikan.

“..ritual-ritual yang sering dilakukannya ketika masih memimpin kelompok kerja tetap di lestarikan oleh Suebu sebagai juragan lopi, misalnya duduk bersila di teras muka rumah sebelum pemberangkatan menangkap ikan dimulai, menghadap ke arah Kiblat (barat) yang di hadapannya terletak alat tangkap puka gae, kemudian bangkit lalu mengambil puka gae tersebut dan dinaikkan dibahu kemudian melangkah ke tangga, turun dan berjalan menuju ke pangkalan perahu. Dalam perjalanan menuju pangkalan perahu sedapat mungkin tidak menoleh ke kiri maupun ke kanan dan terus melakukan zikir melafalkan kalimat Allah-Muhammad melalui tarikan nafas “massu-muttamae” (menghirup udara melalui hidung dengan menyebut nama Allah dan mengeluarkan napas melalui hidung dengan menyebut nama Muhammad) sampai di atas perahu. Setelah berada di atas perahu alat tangkap diletakkan (puka gae), kemudian duduk di bagian depan perahu sambil menghirup udara dan mengucapkan kalimat: “...Nabi Khidr Nabinya air, Nabi Nuh Nabinya perahu, saya telan kamu, kamu tidak telan saya. Limpahkan rejekinya Allah Taalah. A²⁶..”.

dalam terminologi *baca na gaukang* bagi tokoh-tokoh nelayan di Pulau Kambuno merupakan *saddang tungke mammulangnge*” (suara tunggal pertama) yang tidak dibunuh oleh huruf lain seperti i, u maupun ba ataupun bi yang ganda, juga sekaligus berfungsi sebagai manifestasi sampainya permohonan/permintaan kepada Allah sebagai penentu segala-galanya. Selanjutnya dikatakan bahwa penyebutan Kata „A” juga sering dipergunakan sebagai *baca urane* (mantra laki-laki) agar orang atau makhluk ciptaan Allah yang lain (jin, setan, hantu dan sebagainya) segan atau takut berhadapan dengan kita (manusia).

²⁶ Hasil wawancara dengan Suebu menyatakan bahwa pengetahuan-pengetahuan tentang melaut yang dimiliki di samping dipelajari dari orang tuanya juga dipelajarinya dari Patappe, ketika dipercaya menjadi *juragan lopi*. Pengetahuan *baca na* “*gaukang*” yang ia miliki memberikan ketenangan dalam melakukan perjalanan penangkapan ikan dan cukup efektif dalam mengatasi gangguan-gangguan yang ada dilaut (Wawancara, 5 Agustus 2006).

Penggunaan *indigenous knowledge* yang dimilikinya, mempertegas sinkretisasi antara kepercayaan lama yang bersifat imanensi dengan kepercayaan dari agama Islam yang bersifat transendensi. Karena penyebutan nama kedua Nabi tersebut (Nabi Khidr dan Nabi Nuh) dapat disusuri jejaknya dalam ALQURAN²⁷. Menurut Sallatang (1987) bahwa di dunia sederhana (tradisional), manusia dan alam fisik berada di dalam satu sistem. Karenanya, hubungan antara manusia dengan alam fisik, menyerupai atau seolah-olah hubungan antar manusia. Oleh karena itu di dalam simbolisasi sebagai salah satu unsur budaya dari sistem budaya terdapat simbolisasi alam yang menjadi alat komunikasi antara manusia dengan alam. Alam metafisik sebagai lingkungan dari sistem kehidupan di dunia sederhana, dimanfaatkan atau diadaptasikan dalam rangka interaksinya. Karena itu di dunia sederhana banyak dijumpai pengetahuan yang berkaitan erat dengan mitos, kultus, ritus dan magis, yang mana dalam kehidupan sehari-hari berkenaan dengan interaksinya amat banyak dijumpai perilaku ritual dan magis, terutama kegiatan yang berkenaan dengan mata pencaharian.

Dalam pemberian imbalan kerja, mengacu pada sistem bagi-hasil (*sharing production*) setelah selesai satu kali musim penangkapan atau *turo'na*. *Patappe* sebagai *punggaha bonto* melakukan “pembagian-hasil” berdasarkan spesialisasi peranan masing-masing anggota kelompok. Pada fase ini, penyediaan *fixed capital* yang diperankan oleh *punggaha bonto* terdiri dua komponen, yaitu; mesin perahu dan alat tangkap baru (*gae*)

²⁷ Nabi Nuh dan Nabi Khidr keberadaannya nyata dalam ALQURAN “*Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya*” (QS, 11: 25). Selanjutnya, “*Musa berkata kepada Khidr, bolehka aku mengikutimu.*” (QS, 18: 66). Relevansinya, Nabi Nuh a.s. disebut sebagai *nabi perahu* oleh informan karena dilatari oleh kisah Nabi Nuh yang diperintahkan oleh ALLAH SWT untuk membuat perahu pada musim kemarau seperti yang termuat dalam ALQURAN “*Dan mulailah Nuh membuat perahu. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya.*” (QS, 11: 332). Sementara Nabi Khidr disebut sebagai *nabi air* atau *nabi ikan*, didasari oleh kisahnya saat dicari Nabi Musa di pertemuan dua buah lautan yang sebelumnya diperoleh petunjuk arah jalan oleh ikan (baca QS 18: 62–82). Nabi Khidr yang dicari dan memang benar ditemukan akhirnya oleh Nabi Musa pada pertemuan dua buah lautan ini untuk mendapatkan ilmu-ilmu kerahasiaan ALLAH.

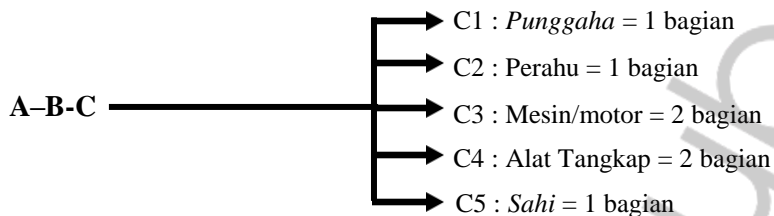
yang kepadanya masing-masing memperoleh bagian hasil. Penggarisannya yang di bagi dalam *sharing production* adalah “hasil bersih” (*netto*). Hasil bersih (*netto*) menurut Patappe adalah; “hasil kotor” (*bruto*) dikurangi dengan ongkos (*working capital*), jasa pemasaran sebanyak 10% dan biaya perbaikan dan pemeliharaan perahu yang jumlahnya relatif, tergantung dari kondisinya.

Mekanisme pola bagi hasilnya sebagai berikut; satu bagian untuk perahu, dua bagian untuk alat tangkap, dua bagian untuk motor, satu bagian untuk *kepungghaan* (*the have*), serta satu bagian untuk *sahi* yang dibagi dengan banyaknya anggota *sahi* yang ikut dalam kegiatan penangkapan. Pembagian semua komponen produksi dengan prinsip “alat yang diperorangkan” atau dipandang sebagai seolah-olah *sahi* (anggota kelompok) masih menjadi dasar pembagian hasil. Apabila penerapan bagi hasil tersebut dipersentasekan, maka pihak *punggaha bonto* mendapatkan hasil sebanyak 85,8% dan pihak *sahi* hanya mendapatkan hasil sebanyak 14,3% yang harus dibagi lagi berdasarkan banyaknya jumlah *sahi* yang ikut dalam kelompok kerja. Jika dimisalkan 8 anggota kelompok kerja maka 14,3% dibagi dengan 8 orang maka setiap *sahi* hanya mendapat porsi bagian sebanyak 1,8%.

Selanjutnya, bagi-hasil yang diperoleh Patappe sebagai *punggaha bonto* (85,8%) dikeluarkan sebagian untuk diberikan kepada *punggaha kecil* atau *juragan lopi* (Suebu) sebagai bonus sebanyak satu bagian hasil sesuai besarnya nilai yang diterima dari statusnya sebagai *sahi* 1,8% atau 1 x 1,8%. Selain itu Patappe juga memberikan bonus kepada *sahi pa'bas* (bagian mesin) dan *sahi pa'kaca* (bagian penyelam) masing-masing sebanyak setengah bagian hasil dari nilai yang diterima sebagai *sahi* 0,9% (setengah dari 1,8%). Untuk lebih jelasnya rincian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. *Punggaha bonto* $85,8\% - 3,6\% = 82,2\%$
2. *Juragan lopi* $1,8\% + 1,8\% = 3,6\%$
3. *Sahi pa'bas* dan *pa'kaca* $1,8\% + 0,9\% = 2,7\%$
4. *Sahi biasa* (4 orang) masing-masing = 1,8%

Skema bagi hasil dalam kelompok *punggaha-sahi Patappe* sebagai berikut:



Ket:

A = produksi kotor

B = produksi bersih

C = pembagian bersih

C1,C2,C3,C4 dan C5 = bagian untuk *punggaha* dan seterusnya

Skema di atas menunjukkan bahwa ada 7 (tujuh) bagian hasil dalam sistem bagi hasil kelompok. 6 (enam) bagian di antaranya diperoleh oleh *Patappe* dalam peranannya sebagai; pemilik usaha, penyedia modal (*fixed and working capital*) dan penyedia komponen fasilitas produksi (perahu, alat tangkap dan motor/mesin). Sementara untuk 1 (satu) sisa bagian lainnya merupakan bagian hasil dari *sahi* yang harus dibagi lagi berdasarkan banyaknya jumlah *sahi* yang ikut dalam kelompok kerja. Perubahan *sharing-production* kembali terdefinisikan, jika dulunya (periode 1970-1980) masing-masing *sahi* masih memperoleh satu bagian, telah berubah menjadi hanya satu bagian saja yang harus dibagi lagi berdasarkan banyaknya jumlah *sahi* yang ikut terlibat dalam kegiatan produksi.

Struktur produksi yang eksploitatif dan hanya menguntungkan bagi pemilik sarana produksi (*the have*) semakin dipertegas. Hanya saja, tambahan pendapatan bagian diberikan kepada *sahi* yang berposisi sebagai *juragan lopi*, *sahi pa'bas* (juru mesin), dan *sahi pa'kaca* (juru selam) yang jumlahnya satu dan setengah bagian dari bagian hasil sebagai *sahi* yang

istilahkan sebagai “bonus” atau remunerasi telah dipermanenkan oleh *punggaha bonto*, sedikit mengaburkan eksploitasi yang terjadi.

Jika mengacu pada produk hukum formal yaitu Undang-undang Bagi Hasil Perikanan (UUBHP) No. 16 Tahun 1964, sistem bagi hasil yang berlaku sangat bertentangan. Perbedaan itu dapat dilihat dalam pasal (3) UUBHP, bahwa untuk perikanan laut, nelayan akan mendapatkan porsi bagi hasil sebesar minimum 75% dari hasil bersih apabila menggunakan perahu layar. Sedang jika dipergunakan kapal motor, maka nelayan memperoleh minimum 40% dari hasil bersih. Selanjutnya dalam penjelasan bahwa: hasil bersih adalah penerimaan total setelah dikurangi dengan beban usaha perikanan. Dalam usaha penangkapan, beban usaha yang dimaksudkan dibagi menjadi dua, yaitu; *Pertama*, beban yang menjadi tanggungan bersama nelayan pemilik (*punggaha bonto*) dan nelayan penggarap (*sahi*), yang meliputi ongkos lelang, uang rokok/jajan, dan biaya perbekalan untuk nelayan penggarap (*sahi*) selama di laut, biaya untuk sedekah di laut, serta iuran-iuran yang disahkan oleh Pemerintah Daerah seperti untuk koperasi, dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan dan lain-lain. *Kedua*, beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik (*punggaha bonto*), yang meliputi ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan seperti pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya. jika berdasarkan penjelasan sebelumnya (hasil bersih versi *Patappe*) maka beban yang seharusnya menjadi tanggungan *punggaha bonto* menurut UUBHP No. 16 Tahun 1964, malah menjadi beban bersama yang juga harus ditanggung oleh *sahi* yang sangat berpengaruh terhadap jumlah (nominal) hasil bersih produksi yang harus dibagi dan menjadi penghasilan (upah) bagi para *sahi*.

Upaya pemerataan atau perimbangan pendapatan, dapat dilakukan melalui pemerataan atau perimbangan pendapatan. Kemungkinan terjadinya hal ini melalui dua jalan, yaitu; secara eksternal dan secara internal. Secara eksternal, dimaksudkan ialah bahwa upaya perubahan datang dari luar, misalnya intervensi pemerintah dalam menerapkan aturan hukum formal (UUBHP). Sedang secara internal, dimaksudkan sebagai

upaya perubahan datang dari dalam kelompok atau masyarakat nelayan yang bersangkutan itu sendiri..?

Kasus Kedua (Palawarukka). Ukuran kelompok kerjanya (*working group*) berkisar 10–11 orang. Pemilik sebagai *punggaha bonto* (*H. Dg. Mallise*) hanya berperan dalam menangani pemasaran, sementara pemimpin operasional penyelaman dipercayakan sepenuhnya kepadanya sebagai *punggaha kecil* atau *juragan lopi*. Dalam perekrutan *sahi*, *H. Dg. Mallise* juga memberikan kepercayaan kepadanya dengan pertimbangan bawah *sahi-sahi* yang ikut dalam kelompok kerja harus memiliki keterampilan khusus (menyelam). Dalam kelompok kerja penyelam teripang (*sea cucumbers*) keanggotaan (*sahi*) lebih bersifat semi-temporer atau permanen.

Batas sosial hubungan produksi yang tergambar pada kelompok kerja *pa'taripang* (penyelam teripang) memiliki struktur sosial tersendiri dalam proses kemunculannya pada fase ini. Ini teramati ketika pemilik usaha mempercayakan kepada pemimpin kelompok untuk menjalankan satu unit usaha yang dimilikinya, dengan itu menunjuk pada kehadiran tiga status sosial sekaligus dalam hierarki kelompok kerja, yaitu; pemilik atau *punggaha bonto*, manajer atau *juragan lopi* dan buruh atau *sahi*. Dalam struktur hierarki seperti ini, batas antara status *punggaha bonto* sebagai pemilik modal (*the have*) dan status buruh atau *sahi* sebagai pemilik tenaga (*have not*) mulai sangat tegas. Terlepas dari ada-tidaknya ikatan kekerabatan dalam hubungan produksi, satu hal yang jelas bahwa motif produksinya untuk pasar dan hubungan produksi berlangsung dalam basis egaliter-kompetitif, sehingga berpola patron-klien yang eksploitatif. Ini termaknai dari peranan *punggaha bonto* yang hanya menyediakan “modal sementara”²⁸ dan kemudian “membeli hasil produksi” sendiri dengan

²⁸ Penulisan “modal sementara” kegiatan kelompok *punggaha-sahi* dalam masyarakat nelayan dapat di asumsikan sebagai kondisi masyarakat pedagang yang memperdagangkan pemasaran, karena dengan teknologi dan kemampuan terhadap akses pasar yang dimiliki oleh *punggaha* menjadi sebuah “komoditas” yang diperdagangkan sehingga kepadanya mendapatkan keuntungan dalam bentuk surplus dan ketergantungan bagi *have not* (yang tidak memiliki modal dan akses pasar). Padahal jika ditelusuri lebih dalam bahwa segala bentuk modal usaha tersebut juga

perjanjian seperdua harga dari harga pasaran sehingga surplus produksi nyata diserap oleh *punggaha bonto* sebagai majikan (*the have*).

Upaya perubahan aturan dalam mengelola kelompok kerja yang bersumber dari dalam (internal), maka yang menjadi bagian dinamis untuk melakukan perubahan itu, adalah mereka yang menduduki “lapisan tengah” dalam hal ini golongan *punggaha kecil* atau *juragan lopi*, karena selain mereka tidak (belum) puas dengan keadaannya, juga relatif berdaya untuk memimpin dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik seperti yang terjadi pada “Revolusi Sosial” di Prancis dan “Revolusi Industri” di Inggris. Tetapi, jika lapisan ini dalam keadaan *dependen* (terikat) oleh lapisan atasnya maka justru cenderung dijadikan alat legitimasi (*compradore*) bagi lapisan atasnya yang telah puas dengan keadaannya dan enggan terhadap perubahan atau takut kehilangan hak istimewanya (*privelege*) (mempertahankan “status quo”). Harapan untuk lapisan bawah (*sahi* dan *common people*), tidak lebih banyak karena meskipun mau berubah biasanya tidak berdaya karena keadaannya yang sangat minim. Maka sulit membayangkan untuk tidak terjadi persoalan seperti disparitas bagi hasil (*sharing production*) antara pemilik dan pekerja serta monopoli pasar melalui pembelian hasil produksi yang murah oleh pemilik modal bagi nelayan *grassroot*.

Bentuk riil ketergantungan yang eksploitatif dilakukan oleh *punggaha bonto* ketika utang *sahi* semakin bertumpuk. Harga komoditas yang dihasilkan oleh kelompok kerja dihargai dengan harga yang sangat murah. Anggota kelompok tidak pernah bisa melakukan protes karena mereka terikat utang-piutang kepada pemilik alat produksi. Realitas ini memperlihatkan, pemilik modal mempraktikkan pola-pola kapitalistik dalam hubungan produksi dengan mereduksi uang sebagai sistem produksi, distribusi dan pertukaran yang dapat diakumulasi kembali di sektor lain untuk melipatgandakan keuntungan. Penjelasan adalah, bahwa dengan berutangnya *sahi* maka *punggaha bonto* dengan sendirinya telah mengakumulasi keuntungan berupa; (1) utang *sahi*, merupakan

menjadi tanggungan anggota kelompok yang ikut terlibat yang terbayarkan nantinya setelah kegiatan produksi berakhir.

investasi baginya karena merupakan pinjaman yang harus terbayarkan, (2) modal yang diberikan kepada *sahi* sebagai utang, sebenarnya sudah terkembalikan melalui keuntungan yang diperoleh dari harga hasil produksi yang dibeli dengan murah dan dipasarkan dengan harga yang mahal, (3) ketergantungan *sahi* kepadanya merupakan alat legitimasi dari pola-pola yang diterapkan.

Meskipun *punggaha bonto* (pemilik sarana produksi), tetap bertanggung jawab menyediakan modal kerja (*working capital*) seperti; bahan bakar, pengisian gas, beras, rokok, es, garam dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Hanya saja, segala bentuk *working capital* dicatat sebagai ongkos produksi yang menjadi tanggungan bersama anggota kelompok, serta biaya-biaya perbaikan alat produksi yang juga masih tetap menjadi tanggungan bersama yang pembiayaannya diambil dari hasil produksi kotor. Ini juga menjadi penjelaras dari apa yang dikatakan struktur produksi yang eksploitatif. Menurut Habermas (1988) bahwa salah satu bentuk kritik terhadap pola-pola kapitalisme adalah, adanya keserakahan mengakumulasi modal yang berakibat pada eksploitasi yang melampaui batas terhadap manusia dan alam yang pada gilirannya masing-masing menimbulkan krisis dehumanisasi dan ekologis.

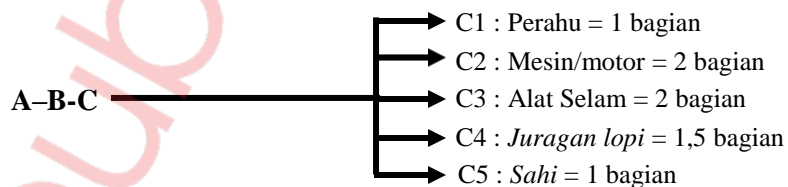
Menyangkut pengalaman-pengalaman dalam kegiatan produksi, khususnya yang berkaitan dengan pengetahuan asli (*indigenous knowledge*) juga tetap terpraktikkan. Fenomena penggabungan kepercayaan yang bersumber dari pengalaman-pengalaman yang telah diwarisi dari masa lalu serta kepercayaan yang bersumber dari agama Islam sebagai agama masyarakat, masih dijadikan sebagai nilai yang sangat fundamental dalam kehidupan komunitas yang belum tergeser sepenuhnya oleh kemampuan dan kemajuan teknologi modern yang dipergunakan. Misalnya, ketika menjumpai teripang yang keadaan berdiri, mereka memiliki kepercayaan untuk tidak mengambilnya atau kembali ke perahu untuk tafakur sementara.

Mekanisme pembagian hasil, dilakukan setiap kali musim teripang (*sea cucumbers*) berakhir, Personifikasi peran alat-alat produksi untuk mendapatkan bagian tetap menjadi aturan. Penggarisan, yang di bagi sama dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya serta biaya pemasaran 10%

yang diterima oleh *punggaha bonto*. Pembagian hasilnya sebagai berikut; satu bagian untuk perahu, dua bagian untuk tangki/tabung gas, dan dua bagian untuk mesin/motor. Sementara bagi hasil antara *juragan lopi* dengan anggota kelompok lainnya adalah: satu setengah bagian untuk *juragan lopi* dan satu bagian untuk *sahi* yang telah dikeluarkan untuk sisa tambahan penghasilan bagi *sahi* yang menangani bagian mesin (*sahi pa'bas*) dan selebihnya dibagi dengan banyaknya anggota *sahi* yang ikut dalam kegiatan penyelaman. Spesialisasi pekerjaan juga menjadi perhitungan tambahan hasil bagi *sahi*. *Sahi pa'bas* mendapatkan tambahan penghasilan setengah bagian dari bagiannya sebagai *sahi*, sementara *sahi pasellung* mendapatkan tambahan penghasilan yang diistilahkan sebagai “hasil boncengan” berupa biota laut yang didapatnya selain teripang yang memiliki nilai ekonomis dan dibeli oleh *punggaha bonto*.

Apabila penerapan bagi hasil tersebut dipersentasekan, maka pihak *punggaha bonto* mendapatkan hasil sebanyak 66,6%, *punggaha kecil/juragan lopi* 20% dan pihak *sahi* hanya mendapatkan hasil sebanyak 13,3% yang harus dibagi lagi berdasarkan banyaknya jumlah *sahi* yang ikut dalam kelompok kerja. Jika dimisalkan 10 anggota kelompok kerja maka 13,3% dibagi dengan 10 orang (1,3%) yang harus dikeluarkan lagi setengah bagian dari bagian *sahi pa'bas* sebagai tambahan penghasilan (0,6%), sehingga yang diterima bersih oleh masing-masing *sahi* adalah 1,27%.

Adapun skema bagi hasil dalam kelompok *pa'taripang* yang dipimpin oleh *Palawarukka* adalah sebagai berikut:



Ket:

A = produksi kotor
B = produksi bersih

C = pembagian bersih

C1,C2,C3,C4 dan C5 = bagian untuk perahu dan seterusnya.

Skema di atas menunjukkan bahwa ada 7,5 bagian hasil dalam sistem bagi hasil kelompok kerja. 5 (lima) bagian di antaranya diperoleh oleh *punggaha bonto* dalam peranannya sebagai; penyedia modal kerja dan komponen fasilitas produksi (perahu, alat selam dan motor/mesin), sementara bagian untuk *kepunggahan* sebagaimana kelompok kerja *pa'gae* tidak lagi diperolehnya, tetapi hanya pada jasa pemasaran sebanyak 10% dari hasil produksi kotor. Selanjutnya, *juraga lopi* memperoleh 1,5 bagian dalam peranannya memimpin operasi penyelaman, dan 1 (satu) sisa bagian lainnya merupakan bagian hasil dari *sahi* yang harus dibagi lagi berdasarkan banyaknya jumlah *sahi* yang ikut dalam kelompok kerja. Apa yang dilakukan oleh *punggaha bonto* dengan membeli sendiri hasil produksi kelompok kerja yang dimilikinya dengan ketentuan seperdua harga dari harga pasaran, telah memperjelas bahwa kapital bukan hanya dilihat sebagai suatu benda material melainkan suatu proses yang memakai benda-benda material sebagai tahap-tahap dalam eksistensi dinamikanya sehingga dikatakan kapital juga sebagai suatu proses sosial (Heilbroner, 1991).

Tabel-9. Jenis-Jenis Teripang yang Memiliki Nilai Ekonomis Penting di Kawasan Perairan Teluk Bone

No	Nama Teripang (Bahasa Lokal)	Harga Pasaran	Lokasi
1.	Koro	Mahal	Gugusan karang
2.	Koro Batu	Mahal	Gugusan karang
3.	Puteh	Sedang	Gugusan karang
4.	Pandang	Sedang	Gugusan karang
5.	Binti	Sedang	Perairan Pantai
6.	Gama Batu	Sedang	Gugusan karang
7.	Gama Cengkeh	Sedang	Gugusan karang
8.	Tippulu	Murah	Perairan Pantai
9.	Cera-cera	Murah	Perairan Pantai
10.	Tawasa	Sedang	Gugusan karang

No	Nama Teripang (Bahasa Lokal)	Harga Pasaran	Lokasi
11.	Lada-lada	Mahal	Gugusan karang
12.	Jeppong	Sedang	Perairan Pantai
13.	Dujung	Murah	Perairan Pantai
14.	Talengko	Murah	Gugusan karang
15.	Ridi	Sedang	Perairan Pantai
16.	Bebbe	Mahal	Gugusan karang
17.	Donga	Mahal	Gugusan karang
18.	Karidau Binti	Mahal	Gugusan karang

Sumber: Nelayan Pulau Kambuno yang Diolah oleh Peneliti, 2006.

Ket:

Mahal : Rp50.000 – Rp100.000. per kilo.

Sedang : Rp15.000 – Rp40.000. per kilo.

Murah : Rp1.500 – Rp10.000. per kilo.

Sekitar tahun 1988, ketika permintaan komoditas biota laut yang tidak hanya teripang sangat banyak diminati oleh pedagang di Makassar. *Punggaha bonto* yang juga berperan sebagai *middelman*, menawarkan dan pemberian pinjaman kredit dalam pengadaan fasilitas produksi kepada beberapa *juragan lopi* untuk menjadi pemilik usaha, dengan perjanjian hasil produksi harus dipasarkan kepadanya. Ibarat “air bersambut gayung” animo *punggaha kecil* atau *juragan lopi* yang dulunya hanya menjadi “kaki tangan” *punggaha bonto*, merasa terbuka peluangnya untuk menjadi *punggaha pemilik (the have)*, karena itu peminjaman pun dilakukan dengan sistem menyewa atau menyicil alat-alat produksi kepada *punggaha bonto*. Di sinilah awal mula *punggaha-punggaha bonto* membangun aliansi ekonomi secara terbuka dengan pihak-pihak lain, yaitu pengusaha besar terutama yang berkedudukan di Makassar yang diistilahkan sebagai “bos” (pemodal besar). Dalam perkembangannya, peranan “bos” dalam jaringan produksi dan pemasaran semakin dominan, menyebabkan pola-pola hubungan sosial berdasarkan ikatan tradisi semakin mengalami pengikisan dan tergantikan dengan hubungan-hubungan yang sifatnya kalkulatif melalui mekanisme utang-piutang. Implikasinya, bahwa perlakuan tidak adil seringkali dialami oleh *juragan lopi*, yang

menyebabkan sulitnya mereka (penyewa atau penyicil alat produksi) untuk betul-betul dapat mandiri dan terlepas dari jeratan utang dari *punggaha bonto*, bahkan bentuk pinjaman berupa perahu dan mesin seringkali ditarik kembali oleh *punggaha bonto* jika dianggap merugikan dan tidak mampu memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sebelumnya, seperti kurangnya hasil produksi yang diperoleh sehingga tidak mampu lagi membayar cicilan (kredit) alat-alat produksi yang dipinjamkan sebelumnya, atau kurang mampunya nelayan untuk memenuhi permintaan spesies-spesies tangkapan sesuai pesanan dari bos sebagai *buyer market*.

Pendasaran dalam struktur kelas masyarakat kapitalis (Erik Olin Wright, 1982) yang dikontekskan ke dalam formasi sosial masyarakat Pulau Kambuno fase ini, maka pembedaan apa yang dinamakan: (1) lokasi dasar kelas (*basic class location*) atau kedudukan-kedudukan dalam tatanan sosial produksi, khususnya dalam pemilikan modal, dominasi dan kontrol, serta (2) lokasi kontradiksi kelas (*contradictory class location*) yang berarti kedudukan-kedudukan dalam proses produksi yang mempunyai beberapa elemen dari dua lokasi yang berbeda juga dapat teramati dengan jelas. Posisi dalam lokasi dasar kelas, yakni borjuis, *petty* borjuis dan proletar. Borjuis dalam hubungan produksi (*relation production*) diperankan oleh pemilik modal (bos) dan *punggaha bonto*, yang menerima pendapatannya melalui pola “*money-commodity-money*” di mana uang bukan lagi alat tukar, tetapi sebagai komoditas itu sendiri dan menjadi tujuan pertukaran. Sedang *petty* borjuis, adalah nelayan tradisional yang unit produksinya adalah keluarga inti, dan tenaga kerja utama adalah anggota keluarga itu sendiri, sehingga tidak mengeksploitasi pekerja, dan tidak mendominasi apapun dalam hierarki kewenangan, yang dengan itu maka pendapatannya berasal dari usaha sendiri. Terakhir adalah kelas proletar (*sahi*) yang terdiri dari mereka yang tidak memiliki modal dan bekerja serta mendapatkan upah dari para kapitalis (*punggaha bonto*, “bos”) atau yang mempekerjakannya.

Sementara dalam lokasi kontradiksi kelas, diidentifikasi tiga kelas yaitu, manajer dan supervisor, majikan kecil, dan pekerja semi otonom. Manajer dan supervisor tidak memiliki modal tetapi memiliki jabatan

tertentu dalam hierarki produksi sehingga memiliki dominasi dan kontrol terhadap kaum proletar, ini diperankan oleh *punggaha kecil* atau *juragan lopi*. Majikan kecil mempunyai karakteristik borjuis dan *petty* borjuis sekaligus. Mereka adalah pemilik usaha sebagai penyewa atau penyicil alat produksi kepada *punggaha bonto* dan mempekerjakan sekurang-kurangnya satu pekerja sehingga sebagian pendapatan didapatkan dari eksploitasi pekerja. Namun kesempatan untuk mengakumulasi kapital relatif kecil. Sementara itu, pekerja semi-otonom adalah pekerja profesional yang menjual tenaga kerja mereka dan mendapatkan penghasilan dari gaji, posisi ini ditempati oleh *sahi-sahi* yang memiliki keterampilan-keterampilan khusus seperti *sahi* yang menangani bagian mesin (*sahi pa'bas*), bagian kemudi (*sahi pa'llopi*), bagian yang mengintip ikan (*sahi pa'kaca*) dan penyelam biota laut (*sahi pa'sellung*).

Sampai pada fase ini, jika dihubungkan dengan peran pemerintah melalui intervensi kebijakan dalam hal introduksi teknologi atau penyediaan infrastruktur atau memberi mereka sarana-sarana dasar bagi penentuan nasib sendiri (*self-determination*) dalam terwujudnya cara produksi baru, belum terlihat jelas. Sehingga penetrasi kapital dari hasil aliansi elite ekonomi lokal dengan pengusaha supra lokal yang diikuti oleh pengisapan surplus keluar dengan pola-pola kapitalis semakin “tumbuh subur” dalam masyarakat. Realitas ini juga diduga bersentuhan atau dapat dihubungkan dengan rana politik. Proposisi ini dibangun berdasarkan apa yang pernah dikaji oleh Bolong (2001) serta tulisan Salim (2000). Kesimpulan Bolong menyatakan bahwa tingkah laku politik, sikap pandangan, dan nilai-nilai politik *pongawa* secara keseluruhan diikuti oleh para *sawi* pengikutnya. Ini dapat dihubungkan, bahwa pemerintah sedapat mungkin tidak mengganggu eksistensi *kepunggahan* pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, bahkan jika perlu segala bentuk bantuan fasilitas dan sarana pendukung kegiatan produksi terlebih dahulu harus disalurkan kepada *punggaha*, karena *punggaha* memiliki basis pengikut yang riil dan senantiasa memberikan kepatuhan politik kepadanya. Sementara Salim mengatakan bahwa implementasi program dan pembangunan infrastruktur bagi peningkatan kesejahteraan

masyarakat hampir pada umumnya bias dan diterjemahkan dalam bingkai komunikasi politik, di mana program dari pembangunan tersebut memiliki konsensus-konsensus sebelumnya agar rakyat senantiasa memberikan dukungan kepada partai politik pendukung pemerintah yang menjadi agen pembangunan, konsep ini banyak terpraktikkan pada rezim Orde Baru.

Kesimpulan yang dapat terangkum hingga akhir periode ini, bahwa modernisasi yang terjadi ibaratnya “pedang bermata ganda”, ia menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru yang dulunya tidak terlihat, teknik-teknik produksi baru, politisasi dan wawasan yang lebih luas, namun dengan risiko runtuhnya komunitas tradisional melalui pergeseran dari produksi yang terikat pada keluarga menuju usaha-usaha produksi yang tergantung pada input-input kapitalisasi. Apa yang dilihat dari pulau ini, merupakan proses kerja yang sangat jelas dan secara historis benar-benar absah, penggabungan progresif kaum nelayan ke dalam struktur-struktur kompleks akibat modernisasi mengakibatkan nelayan yang berangkat dari bentuk perekonomian alami yang sifatnya otonom, berangsur-angsur ditarik ke dalam wilayah ketergantungan struktural terhadap hukum-hukum kapitalisme. Jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kahn (1974) di Padang Lawas, maka ada faktor-faktor serupa ditemukan di pulau ini, pengembangan usaha yang terjadi dikatakan mengalami paradoks. Karena di satu sisi usaha tersebut adalah aktivitas untuk meningkatkan produksi melalui perubahan cara produksi (modernisasi), tetapi di sisi lain teknologi yang dipakai dan organisasi produksi usaha yang dikembangkan justru merupakan akar penyebab potensi ketergantungan dan eksploitasi yang harus dijalani. Oleh karena itu pada periode ini dikatakan sebagai proses transisi formasi sosial cara produksi komersial ke cara produksi kapitalis.

Tabel-10: Formasi Sosial Masyarakat Nelayan Pulau Kambuno Periode Tahun 1980–1990.

Komponen	Cara Produksi (<i>Mode of Production</i>)	
	Cara Lama	Cara Baru
Kekuatan Produksi		
1. Jenis Alat Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Gae</i> (<i>purse seine</i>); • Tangki/tabung gas dan kompresor (penyelam teripang) • Perahu motor <i>jolloro</i> dengan penggunaan mesin dalam perahu (<i>in board engine</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pancing (<i>line fishing</i>); <i>meng</i> • Bubu (<i>trap</i>) • Jala lempar (<i>cast net</i>) • <i>Ladung</i> (alat bantu penyelaman) • Jaring lingkar (<i>encircling gill net</i>); <i>ulambi</i>, • Pukat pantai (<i>beach seine</i>); <i>panambe</i> • Perahu layar, lepa-lepa • Penggunaan mesin sebagai tenaga penggerak perahu (<i>soppe motoro layara</i>; <i>out board engine</i>) dengan kekuatan 8-10 HP (<i>horse power</i>)
2. Sifat Alat Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Modern 	<ul style="list-style-type: none"> • Tradisional • Semi Modern
3. Penggunaan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Buruh nelayan semi bebas dan permanen 	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga inti (<i>nuclear family</i>) • Buruh nelayan semi bebas (<i>nuclear & extended family</i>)
Hubungan Produksi		
1. Ukuran unit produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok besar (kurang lebih 10 orang) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok kecil (2-4) orang • Kelompok besar (10–20) orang
2. Struktur berdasarkan Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Hierarkis 	<ul style="list-style-type: none"> • Egaliter • Hierarkis sederhana

Komponen	Cara Produksi (<i>Mode of Production</i>)	
	Cara Lama	Cara Baru
3. Sifat Hubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Eksploitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Non-eksploitatif • Semi eksploitatif dan non eksploitatif
Karakteristik	<ul style="list-style-type: none"> • Transisi cara produksi komersialis ke cara produksi kapitalis 	<ul style="list-style-type: none"> • Cara produksi subsisten • Cara produksi komersialis

Sumber: Rangkuman Bab III (Periode 1980-1990)

Periode 1990–Sekarang: Penyimpangan Terselubung

Cara Produksi Lama dalam Dinamika Formasi Sosial. Kekuatan Produksi (*force of production*). Memasuki periode tahun 1990-an, ditandai dengan meningkatnya skala investasi usaha produksi, khususnya kegiatan penyelaman biota laut (teripang). Fenomena usaha produksi penyelam teripang periode pertengahan 1980-an semakin berkembang dan berlanjut sampai awal periode 1990-an, melalui mekanisme pemberian kredit/pinjaman oleh *punggaha bonto* bagi nelayan-nelayan pulau yang ingin memiliki usaha sendiri. Kondisi semakin maraknya kegiatan penyelaman biota laut, lambat laun berdampak pula pada merosotnya secara drastis populasi teripang (*sea cucumbers*) dari berbagai spesies dan biota laut lainnya seperti kerang (mutiara, lola) yang diambil dari kawasan *taka* Pulau Sembilan. Karena situasi pasar biota laut khususnya teripang yang semakin menjanjikan dari sisi ekonomi, sementara kondisi populasi sumber daya yang mulai mengalami kemunduran (terkurus) baik dari segi kualitas maupun kuantitas di Teluk Bone dan sekitarnya, mendorong kelompok-kelompok nelayan penyelam pulau ini, melakukan ekspansi area penangkapan (*fishing grounds*) ke tempat-tempat lain di berbagai provinsi lainnya terutama di kawasan Timur Indonesia, bahkan mengunjungi Australia di akhir tahun 1980-an hingga paruh pertama tahun 1990-an.

Pengembaraan bagi penyelam biota laut sampai ke Australia, menarik untuk diulas sedikit karena sebenarnya fakta ini bukan merupakan fenomena baru yang hanya didasari oleh tekanan sumber daya yang semakin berkurang tetapi lebih dari pada itu, fenomena ini secara

sosiologis memiliki akar *history* yang kuat (*backward in time*) dan dapat diistilahkan sebagai fenomena “napak tilas” pengembaraan akhir tahun 1980-an hingga paruh pertama tahun 1990-an dalam mengulang cerita sukses generasi-generasi tua mereka, yang pada masa lalu juga telah menjelajah sampai pada benua ini (Australia).

Dalam catatan sejarah di katakan bahwa saat Belanda mengalahkan Makassar di Buton tahun 1667, dan membuat batasan perdagangan bagi orang Makassar, banyak di antara mereka yang melarikan diri ke Teluk Carpentaria di Australia, dan mereka kembali dengan memuat teripang. Periode inilah yang kemudian menjadi perkiraan awal dimulainya industri teripang di Indonesia (McKnight, 1976). Bukti lain yang mendukung sejarah ini adalah catatan Flinder dan Pobasso di tahun 1803, yaitu tentang nelayan Makassar yang sudah sejak dua puluh tahun sebelumnya berlayar mencari teripang ke pulau-pulau sekitar Jawa sampai ke daerah kering yang terletak di selatan Pulau Rote dan Pantai Kimberly, Australia Barat (Clark, 2000; McKnight, 1976). Catatan McKnight (1976) juga menyatakan bahwa awal mula biota ini mulai dicari ketika kapal-kapal dagang Cina yang ramai berlabuh di Pelabuhan Kota Somba Opu (pusat kota Kerajaan Makassar yang jaya hingga abad ke XVII) mencari komoditas ekspor, termasuk hasil-hasil laut seperti teripang, agar-agar, sirip hiu, sarang burung walet, penyu, dan lain-lain, yang biasa ditukar langsung dengan barang-barang rongsokan seperti pakaian, tembikar, porselin, lilin dan lain-lain. Komoditas teripang juga bahkan dikatakan telah menjadi jembatan pertemuan dua budaya, Aborigin di Australia dan Makassar di Indonesia melalui bukti pelayaran orang Makassar ke pantai barat laut dan utara Australia yang banyak terdokumentasi dalam bentuk lukisan tradisional bangsa Aborigin di dinding-dinding goa. Selain itu, ditemukan juga dokumen peraturan pajak dan perizinan tahun 1882 untuk nelayan Makassar yang mengambil teripang di perairan Northern Territory. Suku Makassar bahkan diakui sebagai penemu Pulau Pasir (yang kemudian diberi nama Ashmore Reefs) yaitu sekitar tahun 1728, bukan Samuel Ashmore yang berlayar mencapai daerah tersebut pada tahun 1811 (Bannett, 2001; Clark, 2000). Bahkan Fox (2000) menyatakan bahwa

teripang, sirip ikan hiu dan penyu sudah menjadi produk perdagangan bagi suku Makassar, Bugis, Bajo dan Buton sejak lebih dari 500 tahun yang lalu.

Begitu kuatnya fenomena sejarah dari kegiatan penyelaman teripang khususnya nelayan pulau-pulau kecil di Sulawesi Selatan menyebabkan kegiatan dari cara produksi ini selalu tampil lebih diminati dibandingkan kegiatan lainnya (usaha penangkapan ikan) yang digeluti oleh nelayan pulau-pulau kecil termasuk nelayan di Pulau Kambuno. Salah satu contoh fenomena *gae* sebagai teknologi modern di bidang penangkapan ikan yang muncul pada periode 1980-1990, tidak dapat berkembang lebih baik, bahkan pada periode 1990-an tidak ditemukan lagi nelayan mengelola usaha *gae*, dengan alasan kurangnya minat tenaga kerja lokal untuk ikut dalam kegiatan tersebut dan lebih memilih untuk menjadi tenaga kerja pada kegiatan penyelaman teripang.

Catatan kritik dari perubahan formasi sosial kurung periode ini, bahwa kegiatan produksi atau cara berproduksi (*mode of production*) masyarakat mengikuti *a particular set of historical conditions* yang di dalamnya memuat tampilan budaya masyarakat (*community culture*), jati diri dan pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) yang senantiasa mendinamisasi dan terekspresikan dalam eksistensi masyarakat lokal dan *socio-culture diversity*. Bahwa modal yang dialokasikan dalam kegiatan produksi masyarakat bersumber dari jaringan kerja (*net-work*) yang mereka bangun sendiri, tanpa mengandalkan atau memanfaatkan lembaga keuangan formal yang berdampak terhadap semakin kuatnya eksistensi kelembagaan non-formal (pengreditan) baik dari aras lokal maupun supra lokal. Jika dihubungkan dengan kehadiran pengusaha supra lokal atau aras nasional yang diistilahkan sebagai “bos” pada paruh pertengahan periode 1980-1990 yang berlanjut terus sampai periode 1990-an, sangat terkait dengan perkembangan pasar supra lokal, nasional bahkan internasional (ekspor) untuk melipatgandakan keuntungan (menarik surplus keluar). Dalam analisis mobilitas sosial (*social mobility*) nelayan lapisan tengah (*middle class*) dari segi status (*social stratification*) memiliki peluang melakukan mobilitas vertikal ke atas (*upward mobility*) melalui bantuan

kredit produksi yang diberikan. Namun, dalam praktiknya pengisapan surplus produksi oleh *punggaha bonto* ataupun bos juga merupakan realitas yang terjadi. Dari tinjauan ekologi maka ketersediaan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang tidak terkelola menurut prinsip-prinsip ekologis dapat mengancam daya dukung sistem kehidupan pulau kecil yang menopang kehidupan manusia penghuninya.

Hubungan produksi (*relation of production*). Gejala perubahan struktural paling menyolok dan terasa dalam cara produksi masyarakat pada periode ini adalah ketika berlangsung adopsi teknologi penyelaman, mulai dari penggunaan tangki/tabung gas sampai pada penggunaan kompresor dan ikuti oleh tekanan pasar supra lokal, nasional bahkan internasional yang semakin diminati, mendorong pengusaha aras lokal merespons peluang tersebut dengan membangun jaringan sosial (*social net work*) dalam hal jaringan produksi dan pemasaran dengan pengusaha supra lokal sebagai pemodal dan *buyer market* yang kebanyakan diperankan oleh warga keturunan Cina. Dalam perubahan-perubahan struktur seperti ini, jika dihubungkan dengan *social stratification* dalam jaringan produksi maka, para pengusaha modal besar (bos) dapat diposisikan pada strata paling atas (*upper class*), selanjutnya *punggaha bonto* sebagai peminjam berposisi pada lapisan tengah (*middle class*) yang peranannya menyerupai makelar (broker), sementara *punggaha kecil/juragan lopi* sebagai penyewa atau penyicil alat-alat produksi menempati lapisan bawah (*lower class*) dalam hierarki jaringan produksi.

Rasionalitas ekonomi nelayan mulai mengalami reduksi dari cara produksi dan hubungan produksi yang sifatnya moralitas ke arah yang lebih rasional (kalkulatif), karena apa yang dilakukan oleh nelayan melalui jaringan produksi maupun pemasaran (*relation production*) tidak dapat lagi dijelaskan sebagai perwujudan strategi “ekonomi moral” (Scott, 1976) yang sudah ada sebelumnya dan terisolasi secara kultural. Melainkan hubungan yang terjalin tersebut lebih menunjukkan ciri strategi tindakan aktor berdasarkan perhitungan ekonomi rasional dan menggunakan bentuk-bentuk komoditas yang berhubungan dengan pasar (Popkin, 1976; Weber, 1978).

Kehadiran dan perkembangan cara produksi masyarakat nelayan khususnya kegiatan penyelaman teripang pada periode ini, walaupun tanpa menyajikan dukungan data kuantitatif, namun dapat dipastikan bahwa kondisi *relation production*-nya telah meningkatkan arus uang masuk dan keluar di Pulau Kambuno, baik itu kredit produksi dari pengusaha supra lokal untuk kepentingan permodalan maupun berupa surplus produksi yang diperoleh sebagai keuntungan penjualan produksi. Ini dapat dijelaskan dari dua sudut pandang, yaitu; (1) kebutuhan kredit untuk modal usaha produksi (arus uang masuk) bagi nelayan yang sekaligus menumbuhkembangkan usaha kapitalis berupa permintaan uang tunai yang dimaknai bukan lagi sebagai alat tukar tetapi sebagai komoditas itu sendiri dan menjadi tujuan pertukaran (M-C-M), (2) surplus dalam bentuk keuntungan tunai yang diterima oleh nelayan lebih banyak terserap oleh pemilik modal (elite lokal dan supra lokal) melalui ketentuan hasil produksi yang harus dijual kepadanya, kemudian banyak menentukan spesies-spesies tangkapan nelayan dan penentuan tingkat harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran (arus uang yang keluar kembali), sehingga fenomena eksploitasi dan ketergantungan nelayan lokal terhadap pemilik modal dalam reproduksi, mempertegas berlakunya teori ketergantungan klasik dari Santos, (1971) bahwa kemiskinan dan ketergantungan yang dialami oleh negara peri-peri/pinggiran disebabkan oleh pengisapan surplus oleh negara metropolis/inti melalui pengembalian bantuan kapital, teknologi dan SDM²⁹. Dalam penjelasan sederhana yang filosofis terhadap inti hubungan melalui pola-pola yang kapitalistik, bahwa kaum kapitalis berusaha sedemikian rupa membuat situasi di mana salah satu pihak (kaum

²⁹ Dalam kajian yang lebih luas menyangkut negara, fenomena “ketergantungan” juga pernah ditulis oleh Sasono (1980) mengenai modal luar negeri yang masuk ke Indonesia sejak pemerintahan pasca 1966 selama periode 1970-1978 yaitu; bahwa setiap US \$ 1 modal asing yang masuk untuk tujuan investasi langsung ternyata telah diikuti dengan US \$ 2,71 yang keluar berupa keuntungan yang diangkut dari Indonesia (dihitung dari laporan World Bank). Oleh karena itu penganut teori “dependesi” merekomendasikan bahwa akar kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi pada negara-negara ketiga adalah akibat eksploitasi yang dilakukan oleh negara inti (negara maju) terhadap negara pinggir (Dunia Ketiga) (Baran, 1957; Frank, 1967; Santos 1971).

yang tak mempunya) memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pihak lain (kaum pemodal). Karena tanpa ketergantungan, pemilik kapital tidak akan memiliki pengaruh apa-apa. Ketergantungan sosial kaum yang tak mempunya kepada pemilik kapital merupakan dasar dan roh dari kapitalisme (Heilbroner, 1991). Artinya bahwa kekuatan-kekuatan produksi dan hubungan-hubungan produksi tidak berkaitan dengan dua kategori hal yang terpisah tetapi merupakan dua aspek dari “realitas” yang sama. Di sini kita menemukan hubungan-hubungan produksi yang mengalokasikan para pelaku (agen) dan sarana-sarana produksi dalam hubungan antara yang mengeksploitasi dan yang dieksploitasi.

Cara Produksi Baru dalam Dinamika Formasi Sosial. Kekuatan Produksi (*force of production*). Memasuki akhir tahun 1991 sampai dengan awal 1992, ditandai dengan munculnya permintaan komoditas sumber daya perikanan baru sebagai komoditas perdagangan. Komoditas itu berupa lobster (udang karang) dan ikan hidup (kerapu, sunu dan napoleon) untuk konsumsi pasar ekspor (Hongkong dan Singapura) sebagai komoditas perdagangan baru bagi masyarakat nelayan di pulau ini, yang sekaligus mempengaruhi cara produksi masyarakat yang dikembangkan sebelumnya. Menurut Akimichi (1991) meningkatnya permintaan lobster dan ikan hidup di pasar ekspor disebabkan oleh faktor terjadinya perubahan pola makan kelas konsumen elite di negara-negara pengimpor, dari mengkonsumsi hasil laut dalam kondisi segar yang sudah dihidangkan di meja restoran *sea-food* ke model baru dengan terlebih dahulu memancing ikan atau lobster hidup dari kolam-kolam penampungan lalu diolah dan disajikan oleh para pelayan menurut selera pengunjung masing-masing. Pola makan baru di restoran-restoran Cina, Hongkong ataupun Singapura seperti ini, di samping terkait pada nilai kenikmatan santapan, juga berkaitan dengan strata dari status sosial ekonomi masyarakat yang dilihat dari gaya hidup (*life style*).

Kondisi ini justru kontradiktif yang terjadi pada masyarakat Pulau Kambuno pada fase-fase sebelumnya. Ikan-ikan karang tersebut terutama ikan *langkoe* (ikan napoleon) dianggap ikan non-ekonomis. Ada mitos yang berkembang bagi masyarakat pulau sebelumnya bahwa dengan

memakan ikan-ikan karang khususnya *langkoe* (ikan napoleon) akan menyebabkan kebiasaan malas, cepat lelah dan rasa mengantuk yang berlebihan, serta dianggap menjijikkan karena mengkonsumsi kotoran manusia. Kondisi inilah yang mendukung sehingga pada mulanya spesies-spesies ikan karang keadaannya melimpah di *taka-taka* Pulau Sembilan, yang menyebabkan sebagian besar nelayan penyelam teripang kembali lagi ke Pulau Sembilan (Teluk Bone) beralih ke usaha lobster dan ikan hidup melalui sistem keramba jaring apung (KJA). Pada periode ini, merupakan awal dimulainya sejarah budaya tentang lobster dan ikan hidup di Pulau Sembilan yang mana hanya memerlukan sekitar tujuh tahun saja populasi spesies-spesies tersebut merosot drastis karena eksploitasinya menggunakan cara-cara yang merusak melalui metode pembusian (potasium)³⁰.

Penggambaran fenomena awal mula munculnya cara produksi baru tersebut pada periode 1990-an di Pulau Kambuno, juga akan teruraikan dalam uraian kasus melalui teknik *life-history*. Uraian kasus yang dimaksud melalui kisah pengalaman yang diceritakan kembali oleh *Pattola* sebagai inovator usaha produksi ikan hidup di Pulau Kambuno.

Pada pertengahan tahun 1991, *Pattola* yang dulunya berprofesi sebagai pedagang teripang, berkenalan dengan *Siong* salah seorang pembeli teripang dan pemilik usaha hiburan malan di Makassar (X Club). Dari hasil kesepakatan *Pattola* dengan *Siong*, dimulailah babak baru usaha ikan hidup di Pulau Kambuno dengan metode penampungan melalui keramba jaring apung (KJA). Melalui bendera perusahaan CV Wahana Bahari Intim (WBI), *Siong* melakukan investasi usaha dengan menyiapkan

³⁰ Sekitar 75 % dipastikan terumbu karang di sekitar Pulau Sembilan, telah rusak akibat maraknya pengeboman dan pembusian ikan. Salah satu indikatornya adalah semakin sulitnya ditemukan ikan-ikan hidup di sekitar pulau tersebut. Selain itu, terjadi pengikisan abrasi pantai sepanjang 5 meter dari garis pantai. Dari catatan penelitian Lapeddam NU di empat desa Pulau Sembilan telah melakukan penelitian sebanyak dua kali yaitu tahun 1996 kerja sama dengan Yayasan Kehati, para nelayan sekitar pulau masih melakukan aktivitas penangkapan ikan di sekitar pulau, tetapi hasil penelitian Lapeddam kerja sama dengan JICA Jepang tahun 2000, menyimpulkan bahwa masyarakat nelayan sudah sulit menemukan ikan di sekitar pulau tersebut, mereka harus berlayar sejauh 20 mil dari garis pantai (Fajar Online, 2005).

perahu cepat (*speed boat*), komponen alat selam dan membuat keramba jaring apung yang dikoordinir oleh *Pattola* sebagai orang pulau.

Konstruksi awal keramba jaring apung terdiri dari 8 petak (delapan unit jaring pelampung) dengan ukuran 4 x 4 m, yang sekaligus merupakan keramba jaring apung pertama yang ada di pulau ini. Kemudian, *Siong* mendatangkan dua orang penyelam masing-masing dari Pulau Lae-lae dan daerah Polmas untuk melakukan kegiatan operasi penyelaman di sekitar Pulau Sembilan yang sekaligus mengajarkan teknik pembiusan kepada dua orang penyelam lainnya (orang lokal) yang direkrut oleh *Pattola*. Menurut *Pattola*, kedua penyelam tersebut telah memiliki pengalaman dan keterampilan khusus dalam hal teknik pembiusan ikan-ikan karang yang dipelajarinya ketika ikut pada kapal Hongkong sebelum dipekerjakan *Siong* dalam kegiatan yang serupa (menangkap ikan-ikan karang melalui teknik pembiusan)³¹.

Menjelang tahun 1993, kegiatan penangkapan ikan-ikan karang di Pulau Sembilan semakin marak. Perusahaan-perusahaan seperti Panca Sona dan Surya yang khusus datang melakukan penangkapan di kawasan Pulau Sembilan serta keberadaan kapal-kapal asing (Hongkong) yang berbendera Indonesia sebagai pembeli (*buyer market*) juga turut meramaikan kegiatan perdagangan ikan hidup pada periode tersebut. Akhir 1993 atau periode awal 1994, kegiatan penangkapan ikan dengan metode KJA mulai digeluti oleh pengusaha dan elite lokal yang selanjutnya menjadi kegiatan produksi dominan menjelang tahun 1995.

Tampilnya cara produksi baru (*new mode of production*) ini sebagai cara produksi dominan terhadap cara produksi lainnya pada tahun 1995 diawali dengan pembelian sejumlah unit-unit usaha oleh elite-elite lokal yang telah diinvestasikan sebelumnya oleh pengusaha supra lokal. Menurut *Pattola* menjelang akhir 1993 atau periode awal 1994, *Siong* menjual unit usahanya kepada *Paduppai*, salah seorang tokoh masyarakat

³¹ Menurut informasi dari penyelam-penyelam ikan karang di Pulau Kambuno bahwa kedua penyelam ini pulalah yang diakui sebagai inivator atau orang yang pertama kalinya mengajarkan dan menyebarkan luaskan teknik penangkapan ikan-ikan karang dengan menggunakan metode bus yang terpraktikkan sampai saat ini.

di Pulau Kambuno yang masih kerabat dekatnya. Perjanjiannya, bahwa hasil produksi tetap dipasarkan ke *Siong*. Pembelian unit usaha (KJA) oleh *Paduppai* kemudian diikuti pula oleh elite penguasa dan pengusaha aras lokal lainnya membuat keramba jaring apung. Kondisi ini berdampak terhadap semakin langgengnya jaringan kerjasama (*net-working*) pengusaha aras lokal dengan pengusaha supra lokal sebagai pemodal dan “pasar-pembeli” (*buyer market*). Ini menarik, karena tampilnya elite-elite lokal khususnya tokoh-tokoh masyarakat menjadi pengusaha juga sekaligus menjadi perpanjangan tangan (kelas komprador) dari pengusaha supra lokal. Munculnya elite-elite lokal sebagai pengusaha dalam kegiatan ini, telah melegitimasi cara produksi baru (*new mode of production*) untuk diterima dalam masyarakat yang pada mulanya banyak menimbulkan konflik dalam eksistensinya.

Menurut *Pattola*, salah satu alasan *Siong* menjual unit usaha kerambanya kepada *Paduppai* karena munculnya konflik-konflik horizontal antara penyelam ikan karang (buruh *Siong*) dengan nelayan pancing ikan-ikan karang, khususnya nelayan dari Pulau Liang-liang. Ketidaksenangan nelayan pancing tersebut karena cara kerja dari penyelam ikan karang dianggap mengurangi atau mempengaruhi hasil produksi mereka, ditambah lagi bahwa usaha tersebut dimiliki oleh orang Cina bukan orang pulau. Namun setelah unit-unit usaha tersebut dimiliki oleh orang-orang pulau (*Paduppai*) maka konflik-konflik yang sering terjadi lambat laun mulai meredah dengan alasan yang sederhana bahwa “*usaha tersebut dimiliki oleh orang-orang pulau sehingga tidak boleh saling mengganggu*”, meskipun teknologi cara yang dipergunakan tetap sama yaitu dengan metode bius. Ini dapat dihubungkan dengan pendasaran Fisher (2000) bahwa pada prinsipnya konflik dapat terjadi atau diredam melalui empat dimensi modal sosial (*social capital*), di mana dimensi pertama dan kedua berada pada tingkat horizontal, sedangkan dimensi ketiga dan keempat ditambah pasar (*market*) berada pada tingkat vertikal. Konflik horizontal yang terjadi teratasi melalui dimensi pertama dan kedua yaitu integrasi (*integration*) berupa adanya persamaan dalam ikatan kekerabatan, etnik dan agama yang merupakan kekuatan meredam

terjadinya konflik. Demikian halnya dengan pertalian (*lingkage*) sebagai dimensi kedua yang potensinya sama sebagai warga komunitas. Penyebutan “*usaha tersebut dimiliki oleh orang Cina dan bukan orang pulau*” memperkuat asumsi tersebut. Untuk dimensi ketiga dan keempat berupa integritas organisasional (*organizational integrity*) dan sinergi (*synergy*) antara pemimpin dan institusi pemerintahan dengan komunitas, meskipun penting tetapi belum efektif berlaku atau teramati pada saat itu. Keterlibatan *Paduppai* sebagai tokoh masyarakat dapat dihubungkan dengan studi Pontoh (1999) bahwa kapitalisme yang melahirkan borjuasi di Indonesia, tidak melalui tahapan revolusi demokratik (revolusi borjuis) yang berhasil menumbangkan feodalisme. Namun kapitalisme di Indonesia berkembang karena dicangkokkan oleh penjajahan, terutama penjajah Belanda, dalam konteks ini oleh pengusaha supra lokal (*bos*). Dengan demikian, formasi sosial lama (ekonomi lama), feodalisme, tetap bercokol karena tidak dihancurkan secara bersih, hubungan sosial dan budaya feodal tetap dikembangkan bahkan dalam perkembangannya diperalat oleh kaum kapitalis sebagai alat legitimasi untuk memperkuat eksistensinya dalam masyarakat, sehingga kemunculan atau perkembangan selanjutnya golongan pengusaha lokal di Indonesia pada umumnya datang dari golongan elite tradisional (Geertz, 1963) dan bukan lagi dari golongan sosial marginal (Waber 1958; Marx, 1965).

Alat-alat produksi sebagai komponen kekuatan produksi yang menandai cara produksi baru pada fase ini adalah sebagai berikut: Komponen alat. Karena komponen alat yang dipergunakan dalam kegiatan penyelaman ikan-ikan karang pada prinsipnya sama halnya dengan kegiatan penyelaman teripang maka komponen alat tersebut juga terdiri dari, (1) kompresor udara, (2) masker selam (kacamata selam), (3) *snorkel*, (4) *fins* (sirip renang/kaki katak), (5) senter di bawah air yang berfungsi untuk melihat keberadaan ikan pada *taka-taka* (6) alat semprot, (biasanya diambil dari botol pembersih lantai seperti Vixsal) yang diisi dengan campuran potasium, (7) *spoit* yang terbuat dari antena radio yang diameternya 0,5 inci dipergunakan untuk menyuntik ikan setelah terkena semprotan potasium untuk dapat kembali sadar, dan (8) *bunre*.

Pengoperasian: Saat akan menyelam mereka terbagi atas dua kelompok, kelompok pertama yang turun melakukan penyelaman terlebih dahulu mencari ikan-ikan karang, dan yang lain menjaga selang *air compressor* agar tidak terlipat dan menunggu instruksi dari penyelam untuk ditarik ke atas dengan tali yang telah diikatkan sebelumnya di pinggang penyelam. Dalam melakukan penangkapan ikan-ikan karang, penyelam menyprotkan potasium pada bagian-bagian karang yang dianggap sebagai tempat persembunyian ikan yang telah diperiksa sebelumnya. Tidak jarang pula penyelam mempergunakan martil untuk membongkar bagian-bagian karang jika dianggap semprotan potasium tidak sampai mengenai atau dapat mempengaruhi ikan-ikan yang bersembunyi dalam karang tersebut. Dengan menunggu sejenak, maka ikan-ikan karang yang terkena semprotan potasium akan keluar dari persembunyiannya dengan keadaan yang lemas. Selanjutnya, dengan keadaan yang masih lemas (ikan-ikan karang) lalu dikumpulkan oleh penyelam dan memberi kode bagi *sahi* yang bertugas di atas perahu untuk menarik tali pengikat secepat mungkin. Setelah sampai di atas perahu, ikan-ikan yang masih lemas akibat pengaruh potasium lalu disuntik pada bagian sirip renang (tiga sisik dari sirip renang) untuk mengeluarkan oksigen yang tertampung dalam rongga pernapasan untuk menjadikannya normal kembali (segar). Penyuntikan dilakukan oleh anggota kelompok yang berpengalaman, karena tidak jarang ikan-ikan karang mengalami kematian apabila salah dalam melakukan teknik penyuntikan (injeksi). Sistem bergiliran dalam melakukan penyelaman juga terpraktikkan dalam setiap kegiatan operasi penyelaman. Ikan target penyelaman: target utama adalah ikan-ikan karang seperti sunu merah, kerapu, lobster dan sebagainya. Pengambilan biota laut yang memiliki nilai ekonomis penting juga sering dilakukan seperti teripang, kerang (mutiara, lola dan sebagainya). Kegiatan penyelaman dilakukan setiap hari kecuali hari jumat setiap minggunya.

Ikan-ikan karang hasil tangkapan yang diperoleh kelompok kerja ditampung sementara pada keramba jaring apung yang telah dipersiapkan sebelumnya. Gambaran konstruksinya secara umum sebagai berikut: *Rakit*.

Pada umumnya berbentuk bujur sangkar atau 4 persegi panjang, yang merupakan wadah berupa kantong jaring yang dipasangkan atau digantungkan pada rangka yang terbuat dari kayu ulin atau kayu kelas 3 dengan ukuran 4 x 4 m. Pelampung terbuat dari bahan *styrofoam* yang bentuknya menyerupai drum dengan tinggi 100 cm dan diameter 50 cm. *Styrofoam* ini mampu/dapat menahan beban 100 kg yang dibungkus dengan terpal agar tidak mudah rusak oleh teritip atau tiram Pelampung dipasang pada setiap sudut rakit atau tempat persilangan kayu, tujuannya agar mampu mengapungkan rakit serta kokoh dari terpaan ombak dan gelombang sehingga rakit tidak mudah patah. Pelampung diikat di rangka dengan menggunakan tali nilon. *Jangkar*. Tujuan pemasangan jangkar adalah untuk menahan rakit agar tidak terbawa arus atau terhanyut. *Jaring*. Jaring yang digunakan adalah jaring *polyethylene* dengan ukuran mata jaring (*mesh size*) yang bervariasi tergantung dari berat atau ukuran ikan, biasanya dipergunakan ukuran mata jaring 1–1,5 inci. Jaring keramba diset pada rakit dengan posisi 50 cm mencuat ke permukaan, sehingga setiap keramba mempunyai volume 8 m³. Khusus pada bagian tepi bawah jaring keramba, tali dipanjangkan kurang lebih 7 cm dengan tujuan sebagai pengikat pemberat yang terbuat dari beton. Kemudian jaring tersebut diaplikasikan dengan jaring dalam yang halus berupa waring-waring dengan ukuran mata jaring 0,2 cm, tujuan pemasangan waring ini untuk memudahkan mengangkat ikan kembali ke permukaan pada saat akan dipasarkan/dijual. Pada bagian atas dari kantong jaring diberi jaring penutup untuk menghalangi sampah-sampah yang berukuran besar masuk ke dalam kantong jaring serta mencegah melompatnya ikan keluar dari kantong jaring.

Intisari yang dapat disarikan dalam uraian di atas bahwa produksi kapitalis dengan teknologi yang dikembangkan periode ini sepenuhnya berorientasi komersial (pasar) dengan itu didominasi oleh penggunaan padat modal (*intensive capital*) bukan teknologi yang bersifat padat karya. Alat produksi utama pada cara produksi baru ini dilabeli sebagai produksi kapitalis karena modal uang menjadi kekuatan utama dalam kegiatan produksi, dengan itu batasan yang tegas antara pemilik kapital dan pekerja

terkontekskan dengan jelas tanpa dicampur-adukkan dengan pertimbangan-pertimbangan lain.

Hubungan produksi (*relation of production*). Sebagai suatu unit perusahaan (CV. WBI), maka dengan sendirinya menunjuk pada kehadiran tiga status sosial sekaligus, *Siong* sebagai pemilik, *Pattola* sebagai manajer lokal dan tujuh orang sebagai karyawan/buruh (4 orang sebagai penyelam, 1 orang sebagai juru mudi dan 2 orang lainnya sebagai penarik slang/tali). Dengan struktur produksi yang jelas tersebut maka hubungan produksi yang terjadi antara pemilik, manajer dan buruh pun didasarkan pada sistem upah (gaji bulanan) yang berbeda dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya dengan mekanisme sistem bagi hasil (*sharing production*).

Sistem upah (gaji bulanan) yang diterapkan *Siong* sebagai pemilik usaha, adalah; manajer digaji sebesar Rp1.500.000,00 per bulan, penyelam empat orang, masing-masing Rp500.000,00, juru mudi sebesar Rp250.000,00 dan buruh slang dua orang, masing-masing Rp100.000,00. Tugas *Pattola* sebagai manajer tidak hanya bertanggung jawab atas segala kegiatan operasional di lapangan tetapi juga terhadap pengawasan/pemeliharaan ikan-ikan hasil tangkapan di keramba.

Segala macam bentuk biaya produksi ditanggung oleh *Siong* sebagai pemilik usaha melalui perantara *Pattola* sebagai manajer. Kegiatan operasional dilakukan setiap hari dalam satu minggunya kecuali hari minggu dengan jam kerja rata-rata mulai jam 06.00 pagi sampai dengan jam 17.00 WITA. Hasil tangkapan ikan-ikan karang yang disimpan di keramba jaring apung diangkut oleh *Siong* berdasarkan informasi dari *Pattola* terhadap banyak-tidaknya ikan-ikan yang sudah diperoleh/ditangkap oleh penyelam ikan-ikan karang. Ikan-ikan hidup hasil tangkapan nelayan pancing juga di beli oleh *Pattola* yang harganya tergantung dari kesepakatan dengan nelayan berdasarkan besar-kecil ukurannya serta kondisi fisik ikan-ikan tersebut (per ekor). Menurut *Pattola*, *Siong* juga memberikan bonus kepadanya sebagai tambahan penghasilan yang jumlahnya relatif tergantung dari keikhlasannya saja. Namun untuk penyelam, mereka mendapatkan bonus sebesar Rp2.500,00

per ekor dari hasil tangkapan mereka yang dicatat oleh *Pattola* dan diberikan pada saat pemberian gaji bulanan.

Penjelasan dari hubungan produksi seperti ini mengisyaratkan, adanya kekhasan hubungan produksi jika dibandingkan cara produksi sebelumnya. Dari segi proses, memperlihatkan ciri kapitalisme di mana hukum tawar-menawar di pasar menjadi hukum yang mutlak adanya, tanpa harus dibatasi atau bebas dari berbagai pembatasan, baik dari *culture*, penguasa, pembatasan produksi, tenaga kerja yang tidak terikat pada desa atau tempat kerjanya, persoalan ekologi dan sebagainya, yang kesemuanya hanya ditentukan oleh semata-mata bagaimana memperoleh keuntungan yang lebih besar (akumulasi). Bahwa komoditas produksi dari hasil tangkapan karyawan *Siong* adalah barang yang harus dipertukarkan kembali untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, segala bentuk biaya produksi maupun upah karyawan harus ditekan serendah mungkin untuk mencapai tujuan dalam mengakumulasi kapital sebagai uang yang bertambah. Realitas ini dapat diterangkan bahwa segenap laba dari pemilik modal merupakan pencurian atau penindasan hasil kerja dari buruh dan kaum tak bermodal. Keterkaitan itu dilihat dari: (1) harga komoditas (ikan tangkapan karyawan/buruh atau penjualan yang dilakukan oleh nelayan pancing) yang diberlakukan oleh *Siong* tidak berdasarkan oleh nilai tukar komoditas yang berlaku di pasaran. Ikan-ikan hidup tersebut dijual di pasaran dengan sistem per kilo dan dibelinya dari nelayan dengan sistem ekor (per ekor), misalnya ikan *lankoe* (napoleon) harga di pasaran Rp100.000,00 dengan berat (0,1–0,5 kg), dan untuk berat 0,6–1 kg dihargai Rp250.000,00. Sementara *Siong* membeli melalui “kaki tangannya” dari nelayan dengan sistem ekor (per ekor) dengan kisaran harga hanya sekitar Rp10.000–Rp30.000 berdasarkan besar-kecilnya ikan yang ditawarkan oleh nelayan pancing. Fakta ini telah menggambarkan keserakahan pemilik usaha dalam mengakumulasi kapital (eksploitasi) yang menyebabkan terjadinya dehumanisasi, (2) nilai tenaga kerja, dengan melihat upah karyawan yang hanya sekitar Rp100.000–Rp500.000 per bulan (hampir setara dengan 0–6–1 kg ikan *langkoe/napoleon*). Padahal pemilik usaha seharusnya menggaji karyawannya berdasarkan

pertimbangan nilai komoditas yang dihasilkan dan harga yang berlaku di pasaran sebagaimana kesimpulan teori nilai tenaga kerja dari Marx bahwa buruh harus mendapat upah yang “wajar” yang mencukupi buruh untuk dapat memulihkan tenaganya serta membesarkan anak-anaknya yang akan menggantikannya apabila tenaga kerjanya sendiri sudah habis. Dengan kata lain bahwa nilai tenaga kerja buruh adalah jumlah nilai makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan anak-anaknya dan semua kebutuhan hidup lain si buruh dan keluarganya sesuai dengan tingkat sosial dan kultural masyarakat yang bersangkutan. Di sinilah pengisapan surplus produksi yang dilakukan oleh pemilik usaha terdefiniskan (3) waktu kerja yang dilakukan oleh karyawan (dari jam 06.00–17.00 WITA setiap harinya) merupakan nilai lebih yang diperoleh oleh pemilik usaha karena tidak sebanding dengan curahan kerja yang dilakukan oleh karyawan dengan upah atau imbalan kerja yang diperolehnya.

Menurut Marx bahwa nilai lebih itulah merupakan salah satu sumber laba yang di “keruk” oleh sang kapitalis terhadap buruh yang menyebabkan kemiskinan, kesenjangan dan ketergantungan yang “tak berujung” dialami oleh pekerja (buruh) (Suseno, 2000). Mekanisme hubungan produksi setelah *Siong* menjual usahanya kepada *Paduppai* (sekitar tahun 1993/1994) pada awalnya dapat dikatakan sama saja, di mana *Pattola* tetap menjadi manajer dari *Paduppai*, demikian pula dengan peranan penyelam, juru mudi dan *sahi* slang.

Sistem upah bulanan juga dipraktikkan. Artinya, transformasi pola-pola kapitalistik yang datangnya dari luar komunitas berjalan “mulus” dan terpraktikkan oleh kapitalis tingkat lokal. Menjelang tahun 1996, karena persaingan semakin kuat yang ditandai oleh semakin banyaknya usaha sejenis yang dikembangkan oleh elite lokal (tokoh masyarakat dan pengusaha), permintaan pasar juga semakin gencar, sementara populasi ikan-ikan karang yang sudah mengalami penurunan, maka dengan sendirinya hubungan-hubungan produksi dari cara produksi (*mode of production*) ini pun juga mengalami perubahan, khususnya antara pemilik (*punggaha*) dengan buruh (*sahi*). Mekanisme sistem upah bulanan tidak lagi diberlakukan dan diganti dengan pemberian bantuan sarana produksi

kepada nelayan untuk menjadi pemilik (*the have*) dengan ketentuan di mana modal diperoleh disitu hasil produksi dipasarkan. Mekanisme ini mengikuti pola-pola hubungan produksi cara produksi *pa'taripang* akhir periode 1980-1990. Hubungan produksi seperti ini dilakukan dengan tujuan agar nelayan-nelayan penyelam lebih bergairah lagi dalam upaya mencari ikan-ikan karang tidak hanya di sekitar Pulau Sembilan yang populasinya sudah menurun, tetapi juga di wilayah lain yang populasi ikan-ikan karangnya masih banyak untuk dieksploitasi. Perubahan hubungan produksi ke cara sebelumnya, dapat diterangkan bahwa faktor kebiasaan atau pola-pola lama yang sudah melembaga membutuhkan proses yang panjang untuk mengubahnya, perubahan pola-pola baru yang diterapkan dalam komunitas cenderung untuk tidak dapat bertahan dan kembali lagi kepada pola-pola lama (Gerungan, 1991).

Mekanisme hubungan produksi yang dikembangkan pada fase ini adalah sebagai berikut; *punggaha* (pemilik usaha keramba) memberikan bantuan modal untuk sarana produksi kepada nelayan (*juragan lopi*) kurang lebih ± Rp20.000.000,00 dengan perincian komponen alat produksi terdiri dari, perahu *jolloro* (Rp10.000.000), mesin perahu 24 pk (Rp3.500.000), komponen alat selam termasuk kompresor (Rp5.000.000–Rp7.000.000). Kemudian, sistem pengembalian modal usaha tidak mengikuti mekanisme pengembalian pinjaman (kredit) dengan jumlah nominal tertentu seperti yang berlaku pada lembaga-lembaga keuangan formal (bank) pada umumnya, melainkan berdasarkan banyak-tidaknya hasil produksi (ikan yang ditangkap) oleh kelompok kerja (*working group*) *juragan lopi* yang dibeli oleh *punggaha bonto*. Harga ikan hasil tangkapan kelompok *juragan lopi* dibeli oleh *punggaha bonto* dengan seperdua (1/2) harga dari harga pasaran yang sumber informasi harga pasarnya diketahui oleh *juragan lopi* dari *punggaha bonto* itu sendiri.

Dalam perkembangan usaha *pa'karamba*, diperoleh keterangan setiap *punggaha bonto* sedikitnya memiliki 4-7 kelompok pengutang alat-alat produksi penyelaman ikan-ikan karang. Mekanisme perhitungan pembelian ikan hidup hasil tangkapan nelayan (kelompok kerja) adalah sebagai berikut; karena kegiatan produksi dilakukan setiap hari (kecuali

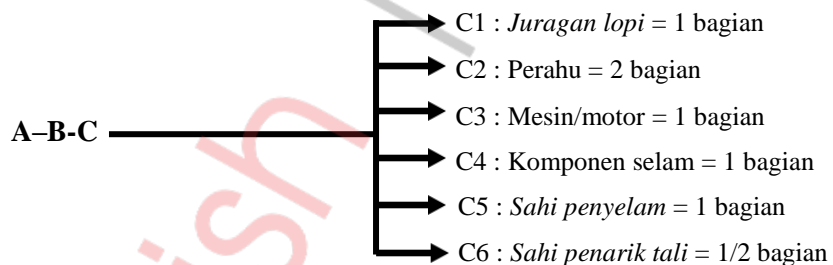
hari jumat) maka setiap ikan-ikan tangkapan nelayan penyelam yang akan ditampung di keramba harus ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui berat dan jenisnya. Kemudian hasil catatan baik berat maupun jenis ikan dipegang masing-masing kedua belah pihak (*juragan lopi* dan orang kepercayaan *punggaha bonto* yang diistilahkan sebagai “*pajjaga karamba*”). Perhitungan jumlah hasil produksi (penerimaan hasil penjualan) dilakukan di rumah *punggaha bonto* pada hari jumat dengan mencocokkan catatan yang dimiliki oleh *panjjaga karamba* dengan catatan *juragan lopi*. Sistem pembelian ikan-ikan hasil tangkapan nelayan penyelam dilakukan dua cara yaitu, sistem kiloan (per kilo) dan sistem ekoran (per ekor). Sistem kiloan (per kilo) diberlakukan apabila berat ikan hasil tangkapan kurang dari 1 kg, sementara sistem ekoran (per ekor) diberlakukan apabila berat ikan lebih dari 1 kg.

Catatan kritik yang diberikan adalah: (1) karena tidak ada standar harga ikan hasil tangkapan yang pasti, ditambah lagi dengan prinsip “*di mana modal diperoleh disitu produksi dipasarkan*” mencirikan bentuk pasar yang monopoli. Harga ikan dapat dipermainkan oleh *punggaha bonto*. (2) Karena pekerjaan yang dilakoni oleh nelayan sifatnya “berburu” maka hasil produksinya pun *uncertainty*, sehingga terkadang hasil yang diperoleh tidak mencukupi biaya produksi. Kondisi inilah yang menyebabkan *juragan lopi* harus meminjam lagi kepada *punggaha bonto* untuk mencukupi biaya hidup dan kegiatan produksi selanjutnya. Ketergantungan *juragan lopi* dan kelompok kerjanya kepada *punggaha bonto* sangat tinggi. (3) Karena *punggaha* pada umumnya mampu melipatgandakan laba, maka utang yang banyak dari *juragan lopi* dan kelompoknya diseimbangkan dengan pembelian hasil produksi dengan harga yang murah, sehingga keuntungan tetap dapat “diraup” oleh *punggaha bonto* dengan menjualnya kembali (hasil produksi) di pasaran dengan harga yang mahal.

Penjelasan lain mengenai kelompok kerja (*working group*) penyelam ikan-ikan karang hubungannya dengan struktur produksi adalah sebagai berikut; dalam satu kelompok kerja terdiri dari empat orang anggota kelompok yang terdiri dari, satu orang *juragan lopi* (pemimpin

kelompok dan pemilik atau seolah-olah pemilik usaha)³², dua orang penyelam dan satu orang penarik tali. Segala biaya produksi ditanggung oleh *juragan lopi* yang modal produksinya diperoleh dari hasil pinjaman kepada *punggaha bonto*. Mekanisme pembagian hasil produksi (*sharing production*) berdasarkan seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya bahwa hasil bersih yang dibagi merupakan perkurangan dari hasil produksi (hasil kotor) dengan biaya produksi serta biaya perbaikan sarana produksi yang jumlahnya sepuluh persen dari hasil produksi.

Mekanisme pola bagi hasil yang diterapkan adalah, dua bagian untuk perahu; satu bagian untuk mesin, satu bagian untuk komponen alat selam, satu bagian untuk *juragan lopi*, satu bagian untuk masing-masing *sahi penyelam* dan setengah bagian untuk *sahi* penarik tali. Skema bagi hasil dalam kelompok kerja nelayan penyelam ikan-ikan karang, sebagai berikut:



Ket:

A = produksi kotor

B = produksi bersih

³² Pengistilahan seolah-olah pemilik usaha didasarkan kepada kondisi empiris yang terjadi, bahwa cita-cita yang tulus oleh *juragan lopi* untuk memiliki sarana produksi yang permanen hanya ada pada tataran angan-angan belaka karena adanya persoalan utang yang tidak dapat terbayarkan bahkan dari waktu-ke waktu semakin bertambah. Jika dihubungkan dengan pendasaran teori Marx maka apa yang dilakoni oleh kelompok kerja nelayan tersebut ibaratnya sebuah “keterasingan dalam pekerjaan” karena dengan pola-pola yang kapitalistik dan eksploitatif maka hubungan antara manusia mesti bersifat saingan di mana keuntungan yang satu merupakan kerugian yang lain (Clammer, 2003).

C = pembagian bersih

C1,C2,C3,C4 dan C5 = bagian untuk *juragan lopi* dan seterusnya

Skema di atas menunjukkan bahwa ada 7,5 bagian hasil dalam sistem bagi hasil kelompok di atas. 5 (lima) bagian di antaranya diperoleh oleh *juragan lopi* dalam peranannya sebagai; pemimpin kelompok, penyedia modal (*fixed and working capital*) dan penyedia komponen fasilitas produksi (perahu, komponen selam dan motor/mesin). Sementara untuk 2,5 sisa bagian lainnya merupakan dua bagian hasil dari *sahi pasellung* (penyelam) yang terdiri dari dua orang (masing-masing satu bagian) dan 0,5 (setengah bagian) untuk *sahi paggetteng* (penarik).

Eksplotasi secara struktural dalam hubungan produksi terdefiniskan dalam fase ini. Secara hierarki memperlihatkan rangkaian pengisapan surplus yang berantai mulai dari bos ke *punggaha bonto* kemudian berlanjut dari *punggaha bonto* ke *juragan lopi* dan berakhir pada *juragan lopi* ke *sahi*. Ini memperlihatkan bahwa ketika uang mereduksi setiap entitas menjadi abstraksinya, maka dalam perkembangannya, uang mereduksi dirinya menjadi entitas kuantitatif. Kelebihan dan ketidakwajaran menjadi standar kebenarannya. Ini ditunjukkan secara subjektif dengan fakta bahwa ekspansi produksi dan kebutuhan menjadi sebuah ketundukan yang cerdas dan selalu memperhitungkan nafsu yang tidak manusiawi (dehumanisasi), tidak alamiah dan imajiner.

Jenis-jenis ikan karang yang memiliki nilai ekonomis penting baik-baik Pada pasar lokal maupun ekspor yang di kenal dikalangan *pa'sellung bale* di Pulau Kambuno dapat dilihat pada Tabel-11.

Tabel-11: Jenis-Jenis Ikan Karang yang Memiliki Nilai Ekonomis Penting di Kawasan Perairan Teluk Bone.

No	Istilah Nama Ikan (Istilah Lokal)	Jenis Ikan	Harga Pasaran
1.	MC	Sunu Merah	Mahal
2.	BC	Bone Kuning (Sunu kuning)	Mahal
3.	CP	Cappang (Kerapu)	Sedang

No	Istilah Nama Ikan (Istilah Lokal)	Jenis Ikan	Harga Pasaran
4.	Tiger	Kerapu Macan	Mahal
5.	CPK	Kerapu Merah	Mahal
6.	TKS	Kerapu Tikus	Mahal
7.	Mosso	Kerapu Lumpur	Sedang
8.	Pappa	Sunu	Sedang
9.	Bebi	Campuran jenis ikan (0,3–0,5 kg)	Murah
10.	Langkoe	Napoleon	Mahal

Sumber: Nelayan Penyelam Pulau Kambuno yang Diolah oleh Peneiti, 2006.

Ket:

Bebi	:	0,3–0,5 kg.	(Rp100.000–Rp150.000)
Super	:	0,6–1 kg.	(Rp200.000–Rp300.000)
Ekoran Kecil	:	1 – 3 kg.	(Rp400.000–Rp500.000)
Ekoran Besar	:	3 – 5 kg.	(Rp750.000–Rp800.000)

Fenomena transformasi dari pasar lokal ke pasar nasional dan internasional teramati cukup kuat dalam pasar perdagangan komoditas ikan-ikan hidup kurung periode ini, sehingga jika dikontekskan dengan pendapat Polany (1957) dan Evers (1998) bahwa perkembangan pasar merupakan faktor utama dalam transformasi ekonomi suatu masyarakat menuju ke arah yang lebih baik (sejahtera). Namun tidak demikian halnya dengan nelayan *grassroot* yang hidup di pulau-pulau kecil. Karena persoalan orbitasi wilayah yang jauh dari daratan serta faktor jarak sosial dalam jaringan kerja (produksi dan pemasaran) dan tidak tersedianya kelembagaan formal yang menangani masalah ini, menyebabkan nelayan banyak di perlakukan tidak adil oleh pelaku-pelaku ekonomi baik dari dalam (pengusaha aras lokal) maupun di luar pulau (pengusaha supra lokal), sehingga transformasi ekonomi yang signifikan dikatakan oleh Polany (1957) dan Evers (1998) akibat pengaruh pasar yang positif faktanya justru sebaliknya, yaitu hanya dinikmati segelintir orang yaitu elite-elite lokal saja, dan pelaku-pelaku ekonomi di luar pulau yang menguasai kapital, pasar dan informasi. Struktur sosial yang eksploitatif dalam komunitas masyarakat nelayan pulau-pulau kecil, tergambar dengan jelas melalui fenomena ketergantungan, kemiskinan dan

marginalisasi (keterpinggiran). Ironisnya, dari kekayaan potensi sumber daya alam yang mereka miliki, seharusnya mereka tidak miskin, tidak “tergantungan” dan tidak terpinggirkan di ruang sosial mereka sendiri. Di sinilah pentingnya penyediaan infrastruktur yang mendukung usaha perikanan rakyat khususnya kelembagaan formal yang menampung dan mendistribusikan hasil produksi nelayan, sehingga hasil produksi yang diperolehnya akan signifikan dengan penerimaan pendapatan sebagai nilai keuntungan yang diperoleh (surplus). Pada fase ini tampilan kaum kapitalis memegang peranan penting dalam menguasai faktor produksi dan pemasaran dengan menumbuhkembangkan dan menyesuaikan pemakaian teknologi dalam proses produksi serta menerapkan bentuk pasar yang sifatnya monopoli dengan penguasaan sumber permodalan yang dapat mereka akumulasi, sehingga apa yang dikatakan Sallatang (2007) bahwa siapa yang menguasai pemasaran maka ia akan meraup keuntungan yang berlipat ganda dibanding pelaku kegiatan produksi itu sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa persoalan modal (modal dan teknologi) dalam pola-pola kapitalisasi jika diamati melalui pendekatan psikoanalisis, antropologis dan sosiologis, maka modal sebagai suatu hubungan sosial menyingkapkan inti hubungan yaitu dominasi. Hubungan dominasi memiliki dua kutub penjabaran. Pertama, ketergantungan sosial kaum yang tak mempunyai kepada pemilik modal di mana tanpa ketergantungan itu modal tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Kedua, dorongan tanpa henti dan tanpa puas untuk mengakumulasi modal bagi pemilik modal (kaum akumulator) menjadi keuntungan yang berlipat ganda. Oleh karena itu Lenner (1988) menyatakan bahwa kapitalisme adalah sebuah sistem yang didesain untuk mendorong ekspansi komersial melewati batas-batas lokal menuju skala nasional bahkan internasional. Para pengusaha kapitalis mempelajari pola-pola perdagangan di mana pasar berada dan bagaimana memanipulasi pasar komoditas maupun tenaga kerja untuk meraup keuntungan. Bahkan hubungan-hubungan produksi melalui ikatan patronasi yang dianggap nilai-nilai tradisi yang harus tetap dipertahankan juga dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi supra lokal (pengusaha kapitalis) dalam melegitimasi eksistensinya dalam ruang sosial masyarakat lokal.

Pengalaman dalam memproduksi khususnya penggunaan pengetahuan asli (*indigeneous knowledge*) pada fase ini, mulai tidak terpakai/terpraktikkan, khususnya bagi *pasellung bale* (penyelam ikan-ikan karang). Generasi *pasellung bale* (penyelam ikan-ikan karang) merupakan kelompok generasi muda sebagai kelompok penerus dari *pasellung taripang* (penyelam teripang) bahkan banyak di antaranya telah mengenyam pendidikan formal sampai tingkat SMP maupun SMA. Interaksi intensif yang dilakukan dengan dunia luar komunitasnya oleh kelompok penerus (generasi muda nelayan penyelam), serta penggunaan teknologi alat (*hardware*) yang lebih efektif dan efisien yang diintrodusir dari luar meskipun sifatnya merusak, serta pola hidup yang semakin meningkat telah mengubah cara pandang mereka dalam memperlakukan alam fisik, dari cara pandang yang dulunya partisipatif dikembangkan oleh kelompok perintis dan pengikut, telah berubah ke cara pandang objektifatif yang mengarahkan perilaku mereka ke perilaku eksploitatif cenderung merusak terhadap keseimbangan ekosistem alam fisik.

Kelompok penerus generasi penyelam (*pasellung bale*) merupakan kelompok generasi yang tidak lagi berpaling bahkan melestarikan tradisi-tradisi lokal berdasarkan *indigeneous knowledge* yang diturunkan dari generasi ke generasi. Pola pikir bagi generasi penerus penyelam, lebih bersifat moderat yang sarat dengan asumsi dasar pandangan kapitalistik yang menolak keras nilai-nilai altruisme, mistisisme dan konservatisme, sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya *destructive fishing* seperti pembiusan, pemboman dan sebagainya adaptif mereka lakukan. Ini berimplikasi terhadap (menimbulkan) krisis ekologis berupa ketidakseimbangan ekologis dan juga ketidakseimbangan antropologis berupa gangguan sistem personaliti³³. Jika dikaitkan dengan CCRF (*Code*

³³ Ketidakseimbangan antropologis berupa gangguan sistem personalitas dimaksudkan oleh adanya perbedaan pandangan (nilai) yang dianut oleh masing-masing individu yang dapat menjadi pemicu konflik horizontal nelayan. Para penganut nilai konservatif menganggap bahwa alam fisik bagian dari dirinya sehingga alam harus dijaga dari hal-hal yang merusak keseimbangannya. Sementara penganut paham eksploitatif menganggap alam fisik harus dieksploitatif dengan cara-cara yang mudah mendapatkan hasil sehingga cenderung destruktif (Sallatang, 1994). Cara pandang yang berbeda

Of Conduct for Responsible Fisheries) (Fao, 1995), seharusnya pemerintah menjamin pemberlakuan suatu kebijakan dan kerangka kelembagaan yang tepat guna mencapai pemanfaatan secara terpadu dan lestari dengan memperhatikan kerawanan ekosistem dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga seharusnya memfasilitasi pemberlakuan praktik-praktik perikanan yang dapat menghindari konflik antar pengguna sumber daya perikanan, misalnya memfasilitasi tumbuh-kembangnya aturan-aturan lokal yang sarat dengan nilai keseimbangan dan perlindungan. Ini menjadi penting artinya karena tindakan manusia akan berubah pada konsep keseimbangan (adaptasi ekologi) menjadi tindakan eksploitasi yang kecenderungannya *destructive* (adaptasi ekonomi) ketika terjadi tekanan atau intervensi ekonomi khususnya yang datang dari luar komunitas. Realitas ini sarat tergambarkan di Pulau Kambuno, di mana praktik proses produksi yang terjadi saat ini adalah pemboman dan pembiusan. Kondisi ini merupakan persoalan serius akan keberlanjutan sumber daya perikanan bahkan telah menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal antarkelompok-kelompok nelayan.

Dalam tataran aturan hukum formal, meskipun bentuk pengawasan dan perlindungan melalui pelarangan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, biologis atau bahan peledak, secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 31 tahun 2004, di mana pada pasal (8) ayat 1, 2, dan 3 dengan substansi yang sama untuk tidak menggunakan cara-cara penangkapan dengan menggunakan bahan kimia, biologis atau bahan peledak. Selanjutnya dikatakan dalam pasal (84) ayat 1, 2 dan 3 mengenai ketentuan pidana bagi barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap apa yang disebutkan oleh pasal (8) akan dikenai hukuman penjara paling lama 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun penjara dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Namun yang menjadi kelemahan, ada pada sisi implementasi, karena telah menjadi fakta sosial bahwa produk hukum tersebut malah

inilah yang merusak keseimbangan personalitas dalam ruang sosialmasyarakat yang dapat berujung terhadap terjadinya konflik sosial dalam komunitas masyarakat dalam mengadaptasi sumber daya alam (Habermas, 1988).

dijadikan alat untuk mencari keuntungan bagi oknum yang memiliki *moral hazard*, melindungi kepentingan pengusaha kapitalis dalam kegiatan ilegalnya dan menjadikan dirinya sebagai kelas *comprador*. Keterangan yang diperoleh menyebutkan bahwa ada uang setoran yang *punggaha bonto* harus disiapkan kepada oknum petugas setiap bulannya sebesar Rp500.000. Dengan uang setoran semacam ini, maka pelanggar hukum dalam kegiatan *destructive fishing* merasa aman untuk melakukan penyelewengan karena terselubung dan terlindungi oleh upeti yang diberikan. Ini menunjukkan bagaimana kekuasaan dan produk hukum itu dapat diperjualbelikan oleh oknum demi memperkaya diri-sendiri.

Apa yang terjadi pada tingkat mikro di pulau ini, bukan sesuatu yang mengagetkan, karena realitas sosial yang demikian merupakan turunan gambaran makro dalam aras nasional khususnya pada masa pemerintahan Orde Baru yang diduga berlanjut sampai saat ini, bahwa terdapat aliansi yang begitu kuat antara penguasa (termasuk militer) dan pengusaha dalam menumbuh-kembangkan pola-pola kapitalisme, sehingga lahirlah berbagai macam istilah dari hasil aliansi tersebut seperti kapitalis klien, kapitalis rente, katebelece, surat sakti, uang setoran, *backing*, dan sebagainya. Jika dihubungkan pendasaran dari kaum Neo-Marxis bahwa penguasa atau negara (termasuk militer) sebagai pelindung kaum kapitalis relevan untuk eksistensi cara produksi modern pada fase ini dalam skala mikro.

Dari seluruh uraian, terangkum bahwa yang dibutuhkan sebenarnya dalam memperbaiki tatanan yang ada, dengan memberi sebuah kepastian atau jaminan dalam bentuk aturan dan pengawasan baik skala makro maupun mikro yang menciptakan kesetimbangan. Aturan-aturan kepastian itu seperti; aturan antara pemilik, pemberi jasa modal (kapitalis) dan nelayan *sahi*, nelayan penyewa/penyicil, nelayan mandiri, yang diaktualisasikan dalam bagi hasil, pengreditan, wilayah tangkap dan sebagainya. Proposisi ini terbangun karena, kepastian melalui pengaturan (regulasi) dan pengawasan baik secara parsial maupun integral dalam tataran implementasinya selama ini hanya tampil sebagai “kepastian semu di tengah ketidakpastian” sehingga modernisasi perikanan yang

berlangsung, keuntungan dan kepentingannya hanya bias kepada sekelompok orang “kaum akumulator” (kapitalis) yang justru terlindungi/terfasilitasi oleh elite lokal dan pemerintah sebagai kelas komprador. Gambaran ini memperlihatkan bahwa formasi sosial baru yang muncul sebagai hasil konstruksi modernisasi perikanan untuk peningkatan kesejahteraan, dalam perkembangannya justru menampilkan fenomena kemiskinan, kesenjangan dan ketergantungan sebagai krisis sosial yang berkepanjangan.

Tabel-12: Formasi Sosial Masyarakat Nelayan Pulau Kambuno Periode Tahun 1990–Sekarang.

Komponen	Cara Produksi (<i>Mode of Production</i>)			
	Cara Lama	Cara Baru		
Kekuatan Produksi		←-----		
1. Jenis Alat	<ul style="list-style-type: none"> • Keramba jaring apung (media penampungan ikan-ikan hidup) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Gae</i> (<i>purse seine</i>); • Tangki/ tabung gas dan kompresor (penyelam teripang) • Perahu <i>jolloro</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Jaring lingkaran (<i>encircling gill net</i>); <i>ulambi</i>, • Pukat pantai (<i>beach seine</i>); <i>panambe</i> • Perahu motor 	<ul style="list-style-type: none"> • Pancing (<i>line fishing</i>); <i>meng</i> • Bubu (<i>trap</i>) • Jala lempar (<i>cast net</i>) • Lepa-lepa, sampan. Perahu layar
2. Sifat Alat Produksi	Modern	Modern	Semi Modern	Tradisional
3. Sifat Tenaga Kerja	Buruh & nelayan semi bebas dan permanen	Semi permanen temporal	Permanen dan semi bebas	Keluarga inti (<i>nuclear family</i>)
Hubungan Produksi				
1. Ukuran unit produksi	Kelompok kecil (5 orang)	Kelompok besar (kurang lebih 10 orang)	Kelompok besar (10-20 orang)	Kelompok kecil (2-4 orang)
2. Struktur berdasarkan Produksi	Hierarkis	Hierarkis	Hierarkis sederhana	Egaliter

Komponen	Cara Produksi (<i>Mode of Production</i>)			
	Cara Lama	Cara Baru		
3. Sifat Hubungan	Eksplotatif	Eksplotatif & semi eksplotatif	Semi eksplotatif dan non eksplotatif	Non-eksplotatif
Karakteristik	Cara produksi kapitalis	Transisi cara produksi komersil ke kapitalis	Cara produksi komersialis	Cara produksi subsisten

Sumber: Rangkuman Bab III (Periode 1990-Sekarang).

BAB IV

ARTIKULASI MODERNISASI DALAM FORMASI SOSIAL MASYARAKAT

Kombinasi *modes of production* dalam suatu *social formation* menentukan karakteristik masyarakat pada tempat dan waktunya. Pendekatan didasari oleh teori artikulasi dari Meillassoux dan Rey dalam Salman (2002) bahwa modernisasi di negara berkembang ditentukan oleh terbentuknya formasi sosial berdasarkan koeksistensi (keberadaan bersama) antara cara produksi kapitalisme yang datang dari luar dengan cara produksi tradisional (non-kapitalis) yang bersifat asli dalam masyarakat. Dengan demikian, artikulasi antara ciri kontekstual pada tingkat lokal dengan ciri yang di bawah oleh kapitalisme menjadi kekhasan perkembangan cara produksi baru dalam komunitas masyarakat. Studi Budiman (1996) menjelaskan pengertian artikulasi dengan membandingkan formasi sosial yang ada di Amerika dengan Jepang. Formasi sosial kapitalis muncul sebagai cara produksi yang sama-sama dominan, namun penjelmaan kapitalisme di kedua negara tersebut sangat berbeda karena porsi campuran unsur-unsurnya juga berlainan.

Modernisasi sebagai suatu *new mode of production* dan sebagai sistem nilai, dalam pandangan Marx merupakan unsur perubahan yang mungkin paling dominan menentukan corak, isi, serta perkembangan dari struktur sosial masyarakat. Pengintegrasian diri ke dalam sistem kapital, atau penetrasi kapitalisme ke dalam suatu kebudayaan masyarakat,

dipandang mampu merombak berbagai unsur kebudayaan dari nilai, norma, cara memproduksi, hingga pola-pola hubungan sosial. Ini didasari oleh adanya kehidupan sosial ekonomi (*man social being*) yang ditempatkan sebagai perangkat mendasari setiap kiprah kesadaran manusia (*man social consciousness*). Faktor materi selalu diposisikan menjadi penentu, sedang kesadaran mengikut terhadap kondisi material yang tercipta (Ramly, 2004). Namun dalam perkembangannya, pandangan ini banyak mendapat bantahan bahwa tidak serta-merta unsur luar langsung begitu saja dengan mudah mempengaruhi unsur yang ada di dalam, karena ada brikade struktur sosial yang terlebih dahulu harus ditembus (ekonomi dualistis) (Meillassoux; Rey; Taylor, 1979 dan Salman, 2002). Proses penetrasi cara produksi baru (*new mode of production*) melalui modernisasi, dipastikan melahirkan suatu artikulasi, yakni manifestasi suatu eksistensi bersama yang bersifat hierarkis (*hierarchial coexistence*) antara unsur baru yang datangnya dari luar dengan unsur lokal yang bersumber dari dalam. Artinya, masuknya unsur- unsur baru tidak berarti serta-merta harus menggeser unsur-unsur lama yang telah ada (lokal), tetapi keduanya dapat saja hidup berdampingan (dan mungkin saling memperkuat, atau tidak saling mempengaruhi, atau bahkan terjadi dialektika), sehingga menghasilkan kebudayaan khas berdasarkan karakteristiknya. Walaupun dalam eksistensinya, unsur kebudayaan baru terhadap unsur kebudayaan lokal senantiasa lebih dominan (Kahn, 1974).

Dari pendekatan konsep tersebut, maka artikulasi modernisasi yang terjadi di Pulau Kambuno dilihat dalam periodisasi mengikuti konsep dari dinamika formasi sosial sebagai entitasnya. Artikulasi cara produksi modern (kapitalis) dalam koeksistensi antar cara produksi, akan berbeda campuran unsur-unsurnya dari periode ke periode dalam formasi sosial rentang masa tersebut.

Periode 1970–1980: Geliat Kapitalisme terhadap Tradisi Lama

Dalam kurun periode ini, koeksistensi antar cara produksi dengan menggunakan perahu motor (*out board engine*) sebagai kekuatan produksi (*production force*) lahir sebagai *modern mode of production* (cara produksi

modern). Perahu motor yang di adopsi sebagai cara produksi baru belum menimbulkan pertentangan (konflik) dengan perahu layar dengan teknologi penangkapannya (*traditional mode of production*). Ini disebabkan karena, ruang sosial cara produksi tradisional masih tidak terbatas atau terhalangi oleh cara produksi yang baru muncul. Cara produksi yang dikembangkan oleh kelompok kerja yang telah menggunakan motorisasi masih terikat atau terintegrasi dengan sejumlah nilai, struktur, kepercayaan dan pengetahuan yang berasal dari kebudayaan lokal sebagai satu ikatan komunal. Artinya, meskipun sudah mulai menggunakan alat modern (seperti motor tempel) tetapi skala usaha, organisasi kerja dan budaya kerja masih identik dengan apa yang dilakukan sebelumnya (cara produksi tradisional). Integrasi sosial yang terikat dalam satu ikatan komunal masih terjaga dengan baik. Perahu *bise* atau pun perahu layar masih memiliki wilayah tangkap (*fishing ground*) yang luas untuk melakukan eksploitasi berdasarkan kekuatan produksi yang mereka miliki.

Jika dilihat dari perkembangan investasi usaha produksi kurun periode ini, meskipun telah menunjukkan karakteristik yang bersifat dualitas, di mana sudah ada sekelompok kecil nelayan telah mampu melakukan investasi melalui penggunaan motorisasi pada perahu tangkap, dan sekelompok besar nelayan lainnya masih hidup dalam rana yang subsistensi, fenomenanya masih memperlihatkan bahwa, artikulasi modernisasi kaitannya dengan koeksistensi antar cara produksi masih dikuasai atau berada dalam “konteks tradisi” terutama menyangkut terhadap kewajiban-kewajiban moral, sosial, etika dan keagamaan yang tersajikan tidak hanya dilihat dari kelanjutan tradisi masa lalu tetapi juga merupakan cara yang khas untuk mendeskripsikan hubungan-hubungan produksi yang terjadi dalam sistem sosial masyarakat³⁴.

³⁴ Sistem sosial adalah suatu sistem atau mekanisme hubungan antara masyarakat, yang sedikitnya dapat dilihat dalam tiga aspek, yaitu; (1) hubungan masyarakat dengan sang pencipta, (2) hubungan antara masyarakat itu sendiri, dan (3) hubungan masyarakat dengan sumber dayanya. Ketiganya ini yang mewarnai perjalanan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir dan lautan pada kebanyakan daerah (Nur Indar, 2005). Sementara Parson (1951) menyebutkan bahwa sistem sosial merupakan

Kuatnya fenomena “tradisi” dari koeksistensi (keberadaan bersama) antar cara produksi (tradisional dan modern) teramat pada pengaruh nilai-nilai cara produksi tradisional masyarakat nelayan di pulau ini sebagai suatu watak universal yang alami, yang telah ada sebelum mengenal hubungan kapitalis (cara produksi modern). Orientasi ekonomi mereka adalah berkecukupan atau berproduksi bukan untuk dominan pasar, tetapi untuk memenuhi keperluan sendiri. Uang bukan merupakan instrumen yang paling penting dalam ekonomi (ekonomi substantif), karena kegiatan ekonomi yang dilakukan didasarkan atau disesuaikan dengan kebutuhan yang dirasakan. Moralitas ekonomi yang ada, melahirkan perilaku ekonomi yang tidak terlalu berorientasi pada *profit oriented* dan berekonomi hanya untuk sekedar mempertahankan hidup dan menjaga integritas sosial (Polanyi, 2003). Kondisi ini, juga dengan sendirinya mempengaruhi bentuk-bentuk relasi sosial dalam masyarakat. Dengan bahasa Marx dikatakan bahwa cara produksi ekonomi akan mempengaruhi pola-pola hubungan sosial yang ada dalam masyarakat.

Secara sederhana dapat diilustrasikan, misalnya; jika seorang nelayan melaut dan mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah, maka secara moral dia harus membagikan sebagian hasil tangkapannya kepada tetangganya yang mungkin tidak mendapatkan hasil waktu melaut. Begitu pula sebaliknya. Resiprositas ini terjadi karena diyakini bahwa sumber daya tersebut adalah titipan sang pencipta dan harus dibagi merata keberadaannya. Jika diamati lebih dalam, perilaku ini merupakan investasi sosial di antara mereka dari sebuah strategi keamanan subsistensi (perlindungan sosial) dalam kerangka legitimasi sistem proteksi anggota sesama etnis atau kerabat dalam wujud pertukaran modal sosial (*social capital*). Ini dapat dihubungkan dengan studi Nur Indar (2005) dalam melihat eksistensi kelembagaan tradisional dalam pengelolaan pesisir dan laut, bahwa fenomena ikatan kekerabatan dan penerapan sistem

tindakan sosial yang diatur dan cenderung mempertahankan keseimbangan sistem tersebut. Keterkaitan atau keseimbangan masyarakat menuju pada suatu keadaan di mana individu-individu mampu mengadaptasi perilaku organismenya terhadap kepribadian pencapaian tujuan menurut pola-pola tingkah laku yang terintegrasi.

kepercayaan masih mewarnai dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam pada masyarakat pesisir seperti *sasi* di Maluku, *pongawa-sawi* di Sulawesi Selatan sebagai perwujudan resiliensi etnisitas mereka.

Kuatnya hubungan moral ekonomi³⁵ nelayan pada fase ini (sesuatu yang di asumsikan dari dalam) telah tampil menjadi barikade yang dipasang oleh struktur sosial untuk tetap resisten terhadap munculnya hubungan produksi dengan pola-pola baru (kapitalis) yang didasari oleh kekuatan produksi modern sebagai cara produksi baru dalam formasi sosial masyarakat. Unsur dominasi dari cara produksi baru tersebut dengan pola-pola kapitalisasinya, meskipun mulai terdefiniskan tetapi belum terpresentasikan dengan jelas dan terlembagakan dalam masyarakat pada fase ini. Penjelasan lain mengenai koeksistensi antar cara produksi dalam kurun periode ini, juga tidak terlepas dari masih terjaganya keseimbangan ekosistem dari penggunaan peralatan kerja modern yang sifatnya tidak merusak, sehingga nelayan yang tidak mampu mengikuti transformasi teknologi belum merasa dirugikan karena keamanan subsistensinya masih terjaga.

Artikulasi modernisasi dalam formasi sosial kurang periode ini, dapat dihubungkan dengan teori dual ekonomi Boeke (1953) yang memahami adanya dua sektor ekonomi berbeda, yaitu sektor ekonomi kapitalis-Barat dan sektor ekonomi Timur, bahwa dalam dinamika perkembangannya, tidak ada satu bentuk yang dominan (homogen) tetapi masing-masing sistem memiliki pengaruh dalam masyarakat, sehingga terjadi pluralis (campuran) dalam cara berproduksi, khususnya masyarakat kapitalis awal (*early capitalism*). Pada fase ini diasumsikan bahwa tatanan lokal masih lebih artikulatif dibanding sistem yang “*di-impor*” dari luar masyarakat.

Pandangan historis model ekonomi moral (Scott, 1985) berkaitan dengan konsep “tradisi yang tetap bertahan”, dipakai sebagai pendasaran bahwa penggunaan motorisasi sebagai cara produksi baru, belum

³⁵ Moral ekonomi dipandang sebagai kesatuan ukuran atau norma-norma yang mengatur pola berpikir dan bertindak dari para pelaku ekonomi berdasarkan ideologi tertentu, yang dianut oleh masyarakat berdasarkan karakteristik budayanya (Scott, 1976).

sepenuhnya mempertegas perubahan jarak sosial terhadap basis-basis material antara orang kaya (pemilik modal) dan orang miskin (nelayan *sahi* dan nelayan tradisional), sehingga kesenjangan dan ketergantungan belum nampak sebagai fakta sosial. Ikatan moral-tradisional belum bergeser dan masih tetap dipertahankan karena referensi sosial belum meluas hingga ke supra lokal. Meskipun demikian, penggunaan teknologi modern sedikit-banyaknya telah memunculkan struktur produksi yang nampak eksploitatif (bagi hasil). Karena basis-basis tradisi masih tetap dominan, maka pola baru itu masih dianggap bagian corak dari dinamika hubungan interaksional dalam komunitas.

Dari perubahan teknologi cara penangkapan (tradisional ke modern), tidak serta-merta telah mengubah cara berpikir (*participating way of thinking*) sebagai promotor tindakan masyarakat nelayan pada fase ini. Campur tangan manusia terhadap alam masih berkiblat kepada aturan adat, yaitu adat perikanan yang berlaku berupa berbagai macam *pa'mali* (pantangan) yang berdampak terhadap perlindungan terhadap alam fisik dan kelestarian sumber daya alam. Misalnya, nelayan di pulau ini terutama di masa lampau, sangat mempercayai jika melepaskan kembali ikan-ikan yang ditangkap diketahui dalam keadaan bertelur, maka akan digantikan oleh penguasa laut atau yang didelegasikan menjaga laut oleh Sang Pencipta (*ultimate reality*) hasil tangkapan yang melimpah pada kegiatan penangkapan berikutnya. Fakta sosial ini, kembali mempertegas studi yang pernah dilakukan oleh Sallatang (1987) tentang *Perubahan Perilaku dan Cara Berpikir*, bahwa cara berpikir dan berperilaku masyarakat sederhana, senantiasa dihubungkan dengan keseluruhan alam tersebut. Jadi manusia (nelayan) dihubungkan dengan kebutuhannya di laut, kebutuhannya makan, kebutuhannya untuk menghasilkan keuntungan dan sebagainya. Sehingga menjadi sebuah keyakinan yang melembaga bahwa akan tersedia berlimpah ikan di laut sepanjang manusia bertingkah laku baik, oleh karena itu, pekerjaan ditempatkan tidak hanya untuk kepentingan ekonomi semata tetapi senantiasa ditundukkan dan dicampur dengan berbagai macam motif, motif sosial, agama, etis dalam pencapaian derajat manusia yang bertingkah laku baik. Hal ini, juga mendukung pengembangan teori

perubahan yang mengatakan bahwa *superstructure* tidak bisa dirombak, tanpa lebih dulu merombak *substructure*. Nilainya tidak bisa diubah kalau masih ada dukungan konkret dari sendi-sendi masyarakatnya (Budiman, 1983).

Pada fase ini, masih dapat disimpulkan sebuah kehidupan komunitas homogen, yang seluruh masyarakatnya berada dalam kesamaan pandangan, dan berpegang teguh pada basis-basis moral ekonomi. Gambaran dari sebuah prototipe pulau tradisional yang sangat damai dan sarat dengan kuatnya ikatan kekerabatan, kebersamaan serta cara pandang yang harmonis antara mikro kosmos dengan makro kosmos sebagai satu kesatuan (hubungan internal).

Ciri dan Perkembangan Cara Produksi Baru dalam Formasi Sosial. Salah satu aspek yang dapat dianalisis dari artikulasi modernisasi dalam formasi sosial, adalah adanya ciri perkembangan cara produksi baru (*new mode of production*) yang diwarnai oleh unsur-unsur lokal (Taylor, 1979). Pendekatan analisis pengaruh unsur-unsur lokal yang menyertai perkembangan cara produksi (*mode of production*), dilakukan dengan memperlihatkan kembali uraian kasus dari cara produksi modern (periode 1970-1980-an).

Meskipun dari kekuatan produksi sudah memperlihatkan ciri yang dibangun oleh basis ekonomi rasional melalui penetrasi kapital (Popkin, 1979; Weber, 1978), sehingga diferensiasi sosial dengan rasionalisasi tindakan juga mulai nampak, namun warna subsistensinya masih tetap ada khususnya dalam hubungan-hubungan produksi yang terjadi. Ini teramati ketika organisasi produksinya di kembangkan dari usaha individu yang terikat pada rumah tangga (subsisten), ke usaha kelompok yang terpisah dari rumah tangga. Mesin perahu sebagai kekuatan produksi diadakan. Modernisasi di tingkat sistem terdefiniskan (sektor ekonomi kapital). Namun, pencapaian tujuan melalui hubungan produksi (*relation of production*) masih tetap diintegrasikan dengan pola-pola hubungan yang bersifat *indigenous*. Misalnya, penggunaan tenaga kerja berdasarkan nilai kekerabatan serta penggunaan teknologi cara yang tetap dibarengi dengan sistem kepercayaan (*indigenous knowledge*) berupa “*baca na gaukang*”.

Ini dapat disimpulkan bahwa ciri perkembangan cara produksi baru dalam formasi sosial kurun periode ini, sebagai bentuk usaha transisional di mana bentuk kongruen yang dicapai oleh kompromi antara aktor dan sistem masih tunduk oleh kekuatan-kekuatan lokal yang berbasis tradisi. Ini mendukung studi Salman (2002) bahwa awal mula perkembangan industri dengan diferensiasi sosial dan rasionalisasi tindakan sebagai penciri, senantiasa masih disertai oleh proses balik pada masing-masingnya yakni dideferensiasi, dan derasionalisasi.

Uraian kasusnya sebagai berikut; ketika *Patoppoi* membeli mesin/motor sebagai kekuatan produksi (basis sistem ekonomi kapital terdefiniskan). Namun, ketika ingin merekrut tenaga kerja, maka pertimbangan pertama yang dilakukan adalah tenaga kerja yang bersumber dari ikatan kekerabatan dengan prinsip "*igatona pale' situlung ko tennia pada idi maddikkaneng*" (siapa lagi yang bisa saling membantu kalau bukan sesama anggota keluarga/kerabat). Ruang normatif *indigeneous* tercirikan melalui moral ekonomi (Scott, 1985), dan artikulasi modernisasi terkontekskan dalam ciri dari cara produksi baru yang terbentuk (Meillassoux; Rey; Taylor, 1979 dan Salman, 2002). Dialektika modernisasi yang telah memberikan warna unsur-unsur lokal dari ciri cara produksi baru, terlihat pada pola-pola hubungan produksi lama yang tetap dipertahankan dan merupakan antitesis dari pola-pola kapitalistik yang diasumsikan datangnya dari luar. Tesis dari hubungan pola-pola modern (kapitalistik) adalah menempatkan pertimbangan kekuatan produksi yang efektif dan efisien, harus sejalan dengan tindakan aktor yang rasional dan jauh dari pertimbangan nilai-nilai sosial dan mistisme. Weber (1978) menyebutnya sebagai kerangka tipe ideal (*ideal type*) tentang tindakan "rasionalitas instrumental". Di sinilah artikulasi dikatakan terjadi pada tataran sistem, karena di satu sisi kekuatan produksinya telah mengadopsi pola modern tetapi hubungan produksi masih diwarnai unsur lokal melalui tindakan aktor.

Patoppoi sebagai pemilik usaha, tidak melakukan pembatasan jumlah tenaga kerja yang penting masih ada kaitan kerabat, tidak hanya *nuclear family* tetapi juga *extended family* dalam jumlah yang tidak

terbatas. Ini dimaksudkan sebagai sarana pengabdian sosial tanpa harus mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi usaha produksi yang dimilikinya. Hal ini, bertentangan pula dengan prinsip ekonomi modern (kapitalis) yang konsennya kepada kesesuaian antara tujuan yang ingin dicapai dengan sarana untuk mencapai tujuan. Penjelasan artikulasi modernisasi melalui cara produksi terdefiniskan pada manajemen usaha yang dilakukan oleh aktor.

Dalam cakupan yang lebih luas, hubungan produksi juga termanifestasikan pada lingkungan sosialnya melalui tindakan *sentiment group* yang dilakukan oleh aktor dengan memberi berbagai bantuan (misalnya; biaya pernikahan, kebutuhan hidup dan biaya pesta) sebagai wujud kepedulian kepada anggota kelompok (*sahinya*). “Etika subsistensi komunitas lokal” yang mengikat kedua belah pihak yang sarat dengan makna paternalistik dan sifat melindungi tetap terperagakan. Dalam pola-pola kapitalisasi eksistensi individu tidak terbangun dalam kelompok, tetapi lebih kepada kompetisi.

Kurung periode ini, kompleksitas struktur produksi mulai nampak. Penggunaan kekuatan produksi modern menuju ke spesialisasi pekerjaan. Namun diferensiasi fungsi secara horizontal, tidak signifikan terhadap peningkatan bagian hasil yang diterima oleh klien (*sahi*). Pembagian hasil tangkapan tidak berdasarkan porsi perannya. Penerimaan bagian digeneralisasi sama oleh patron (*punggaha*) dan terpahami oleh klien (*sahi*) sebagai bentuk perlindungan sosial. Penggunaan kekuatan produksi modern telah menampakkan ciri eksploitasi, penyerapan surplus terjadi pada patron (*punggaha*), melalui penambahan bagian hasil yang diperoleh. Artikulasi modernisasi dari ciri perkembangan cara produksi baru melalui campuran unsur-unsur tatanan lokal, memperlihatkan di satu sisi bercorak tata produksi modern (kekuatan produksi) tetapi di sisi lain tetap mempertahankan corak tata produksi tradisional (hubungan produksi) dengan “mentalitas tradisi”, “semangat tradisi”, dan “kekuatan tradisi” sehingga warna yang subsistensi-komersial menjadi kekhasan.

Rangkuman dari keseluruhan penjelasan adalah, artikulasi modernisasi terciirikan baik di tingkat aktor maupun sistem, dengan tetap

memperlihatkan konfigurasi nilai-nilai *indigenous* yang secara eksplisif mempertahankan suatu pola “saling-kait” (*interrelation*) yang dilakukan oleh tatanan lokal (tradisional) terhadap tatanan baru (kapitalisasi) yang terbentuk. Ini dapat dihubungkan dengan kritikan Johnson (1986) terhadap pikiran Weber mengenai rasionalitas tindakan, bahwa keberadaan tindakan rasionalitas dalam masyarakat tidak hanya dapat dipandang secara parsial tetapi juga dapat terjadi integral yang secara bersama-sama menjadi acuan perilaku (tindakan) masyarakat. Artinya bahwa pada tingkat aktor, dibalik tindakan instrumental (*rationality istrumental*) yang dilakukannya, juga dapat dibarengi oleh tindakan yang berdasarkan motif nilai (*value oriented rationality*), tindakan tradisional (*traditional rationality*) maupun hubungan emosional yang sangat mendalam (*affective rationality*) yang pada kasus ini mewarnai baik dalam kekuatan produksi maupun hubungan-hubungan produksi dalam formasi sosial baru masyarakat.

Dalam dimensi pembangunan (kurun periode 1970-1980), artikulasi modernisasi yang terjadi secara makro terhadap proses transformasi cara produksi tradisional ke cara produksi modern, telah memperlihatkan bahwa keberadaan kelembagaan lokal yang menjembatani proses perubahan tersebut (modernisasi perikanan) peranannya sangat sentral. Fakta sosial ini mempertegas pentingnya kehadiran kelembagaan perkreditan semisal koperasi atau cabang dari koperasi pulau induk (KUD-Mina) dan sebagainya, yang berfungsi melayani penyaluran bantuan mesin perahu dan alat tangkap modern, kebutuhan operasional dan pemasaran hasil, sehingga ketidaksetimbangan ekonomi melalui praktik-praktik yang kapitalis dalam kegiatan produksi masyarakat sedapat-mungkin dapat diminimalisasi sedemikian rupa. Oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Mosher (1966) dan Budiman (1983) tepatlah adanya bahwa strategi pembangunan tidak hanya menjadikan titik sentralnya kepada manusia yang seakan-akan persoalan akan teratasi jika meningkatkan kapasitas manusia (perubahan perilaku dan cara berpikirnya), tetapi juga manusia harus diletakkan dan terfasilitasi dalam situasi sistem sosialnya melalui ekspansi ekonomi yang terarah ke sana (regulasi dan infrastruktur).

Periode 1980-1990: Garis Batas dalam Formasi Sosial

Koeksistensi Antar Cara Produksi. Kurun periode ini, dorongan sebagian nelayan untuk menjadi bagian dari masyarakat modern (*modern man*) (Inkeles dan Smith, 1974) mulai semakin kuat akibat penetrasi kapital yang semakin intensif dari pengusaha kapitalis (aras lokal dan supra lokal), yang mencoba menembus barikade struktur lokal terhadap abstraksi-abstraksi apapun yang dulu pernah menjadi simbol orientasi prototipe masyarakat pulau yang sederhana dan homogen. Kecenderungan-kecenderungan baru yang lebih bernuansa mekanis dan rasional dengan sedikit tampilan ekonomi tradisional, telah merekonstruksi kembali kerangka dasar dan corak kehidupan melalui cara produksi baru (*new mode of production*) yang dikembangkan oleh masyarakat nelayan Pulau Kambuno.

Introduksi teknologi sebagai kekuatan produksi, sudah tidak hanya kepada mesin sebagai tenaga penggerak perahu, tetapi juga telah meningkat pada penggunaan alat-alat tangkap yang lebih efektif dan efisien (*gae*, tabung dan kompresor). Namun, perubahan dan pergeseran atau munculnya cara produksi (*mode of production*) baru masyarakat di pulau ini, juga tidak bisa disederhanakan hanya dengan mempertentangkan dua aspek ekonomi moral (Scott, 1985) dan rasional (Popkin, 1979) saja. Tetapi ada aspek-aspek lain, kekuatan-kekuatan tertentu yang tidak secara langsung muncul ke permukaan dan memberikan andil besar bagi perubahan dan pergeseran itu. Tidak bisa dengan sederhana dikatakan bahwa masuknya berbagai teknologi modern di pulau ini semata-mata hanya karena pertimbangan rasional para nelayan kaya setempat. Sudah barang tentu, pertimbangan semacam itu pasti ada, tetapi peranan individu inovatif, pedagang perantara, kurangnya keterlibatan pemerintah dan aliansi elite ekonomi lokal dan pengusaha modal dari supra lokal (bos) tidak bisa dikesampingkan begitu saja, yang tidak hanya memperkenalkan kekuatan produksi baru tetapi juga pola-pola hubungan produksi baru dalam cara berproduksi.

Gambaran kurun periode ini, Pulau Kambuno bukan lagi berfungsi sebagai ruang sosial yang tertutup, mutlak menjadi “rumah” bagi orang-

orang dalam, dan hanya mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat setempat. Parameter-parameter, nilai-nilai, dan pilihan-pilihan, mulai tidak hanya ditentukan lagi oleh kekuatan-kekuatan aras lokal sebagai komunitas yang integratif, tetapi juga mulai terkonteskan oleh pertimbangan-pertimbangan kekuatan ekonomi kapitalis supra lokal. Batasan terhadap cara produksi tradisional dan cara produksi modern yang dulunya begitu tipis, pada periode ini batasan tersebut mulai nampak semakin tegas dan lugas. Perbedaan batasan tersebut terlihat dalam hal orientasi yang dulunya banyak dimotivasi oleh pertimbangan modal sosial dan moral ekonomi, mulai tererosi dan memperlihatkan warna orientasi ekonomi rasional dengan mengacu pada surplus, pasar, dan uang yang terpresentasikan dengan baik. Kurun periode ini diasumsikan pergeseran dari cara produksi subsistensi-komersialis ke cara produksi komersialis-kapitalis sebagaimana pendasaran Kahn (1974).

Implikasi dari fenomena cara berproduksi (*mode of production*) yang berkembang pada periode ini, telah menyebabkan koeksistensi (keberadaan bersama) antar cara produksi dalam masyarakat telah memunculkan wujud ciri dominasi dari salah satu cara produksi terhadap cara produksi lain. Tekanan cara produksi modern melalui dominasi telah mempengaruhi besaran pengikut dan *fishing ground* cara produksi tradisional. Indikasinya terlihat berupa adanya kesenjangan penggunaan teknologi antara nelayan yang telah mengadopsi teknologi modern dan nelayan dengan teknologi tradisionalnya sehingga mereka “adu kekuatan” dalam pemanfaatan sumber daya laut. Penyerapan tenaga kerja domestik yang dulunya banyak terserap dalam kegiatan cara produksi lama perlahan mulai ditinggalkan, di mana sebagian kecil nelayan melakukan transformasi (adaptasi) dan sebagian besar lainnya terserap menjadi tenaga buruh (*sahi*) dari cara produksi modern. Koeksistensi antar cara produksi yang menunjukkan dominasi, berkaitan dengan keberadaan mode nelayan yang lain, yaitu cara produksi dengan teknologi penangkapan dengan menggunakan alat tangkap *gae* (pukat cincin) dan *pattaripang* (penyelam teripang) dengan teknologi tabung dan kompresor.

Penggunaan teknologi modern yang meningkat, seiring pula tumbuh suburnya lembaga kredit produksi non-formal. Terjadi pendefinisian ulang formasi sosial berdasarkan koeksistensi (keberadaan bersama) antara cara produksi baru dengan cara produksi lama. Meskipun kekuatan alat produksi baru tersebut (*gae*, tabung dan kompresor) tidak serta-merta “mematikan” kekuatan produksi lama yang telah ada (*pancing*, *jala*, *ulambi*, *panambe* dan *puka muro ami*), tetapi keduanya telah saling mempengaruhi melalui tampilan “dominasi” di satu pihak dan resistensi di pihak lain. Fakta sosial ini membantah tesis Samir Amin (1976) yang mengatakan bahwa sifat kapitalisme di negara-negara berkembang merupakan “kapitalisme pinggiran” yang tunduk pada sifat sistem prakapitalis yang ada sebelumnya sehingga tampilannya berbeda dengan sistem kapitalis di negara-negara maju. Bantahan teori tersebut didasari oleh realitas yang ada bahwa kegagalan atau tidak mulusnya kapitalisme di negara-negara pinggiran bukan didasari oleh persoalan perbedaan sifat kapitalisme, tetapi faktanya ada pada beragamnya cara produksi (tradisional, post-tradisional dan modern) yang saling menghambat, sehingga kombinasi unsur-unsurnya tidak efisien. Di sinilah artikulasi modernisasi terdefiniskan dalam menjelaskan koeksistensi antar cara produksi yang asimetris dan menyebabkan keterpinggiran yang “tetap bertahan” kekuatan produksi lama terhadap kekuatan produksi baru.

Interpretasi artikulasi modernisasi melalui koeksistensi cara produksi dalam formasi sosial kurun periode ini, merupakan hubungan dua bagian yang berlainan dengan pertalian yang khusus, namun tidak permanen; artinya hubungan itu bisa saja dilepas bilamana tidak diperlukan lagi. Parameter-parameter, nilai-nilai, dan pilihan-pilihan, tidak lagi mutlak harus tunduk oleh kekuatan-kekuatan aras lokal tetapi justru mulai didominasi oleh pertimbangan kekuatan yang ada di luar yang malah lebih menjadi orientasi cara pandang sebagian nelayan yang didukung oleh kekuatan ekonomi supra lokal dengan mengacu pada surplus, pasar, dan uang. Keberadaan bersama (koeksistensi) antar cara produksi dalam masyarakat tampilannya adalah “persaingan, adu kekuatan dan keterpinggiran” Prototipe masyarakat yang dulunya harmonis menjadi

terserabut dari identitas lokal mereka yang sudah berakar dalam, akibat pengaruh pola-pola kapitalisasi yang diasumsikan datangnya dari luar³⁶.

Oleh karena itu, artikulasi modernisasi yang terkontekskan dalam formasi sosial baru yang muncul kurun periode ini, tidak dapat disimpulkan sebagai wujud keberhasilan modernisasi yang mengubah setiap usaha cara produksi tradisional menjadi cara produksi modern atau nelayan tradisional, sehingga mengalami “mobilitas vertikal ke atas” (*upward mobility*), tetapi faktanya melalui pemaknaan yang mendalam (*deep meaning*) justru memperlihatkan sebuah proses “pertukaran yang tidak seimbang dan eksploitatif” antar kekuatan yang ada dari dalam (sumber daya) dan kekuatan dari luar komunitas (kapital). Ada sejumlah pertanyaan yang masih membutuhkan segudang jawaban; bagaimana keadaan mereka (nelayan tradisional) setelah modernisasi? Apakah benar mereka bertransformasi atau diperbudak oleh keadaan? Di sinilah pentingnya peran pemerintah dalam menyeimbangkan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat baik yang bersumber dari dalam maupun di luar komunitas. Seperti kekuatan-kekuatan dominan dari kaum kapitalis yang mengeksploitasi keberadaan masyarakat marginal.

Ciri dan Perkembangan Cara Produksi Baru dalam Masyarakat. Proses kapitalisasi (penguatan arus modal dan teknologi) yang berlangsung dalam formasi sosial masyarakat, memperkuat keanekaragaman cara produksi (*mode of production*) yang telah ada, dan karena “modernisasilah” keanekaragaman baru tersebut itu ada. Proses pemanfaatan tadi (kapitalisasi) pada akhirnya menimbulkan perbenturan antara kebudayaan-kebudayaan yang berbeda dalam posisi yang dulunya jauh terpisah. Proses-proses pendefinisian situasi cara produksi (kekuatan

³⁶ Pada umumnya, proses kelangsungan modernisasi melibatkan pihak eksternal yang berperan dalam penetrasi kapital. Bagi kalangan dependensia, adanya penetrasi kapital oleh pihak eksternal dalam kegiatan ekonomi di negara berkembang dapat menciptakan struktur ketergantungan yang merugikan masyarakat lokal itu sendiri. Dalam sistem kapitalisme yang demikian, terdapat hubungan ketergantungan antar kelas yang sangat kuat, yakni antara elite masyarakat lokal (satelit) dan pihak metropolis eksternal yang menarik surplus ekonomi satelit untuk membiayai kemajuan ekonominya. Dengan demikian satelit tereksploitasi dan tidak berdaya memajukan ekonomi, serta selalu tergantung pada kekuatan metropolis (Sritua Arif dan Adi Sasono, 1984).

maupun hubungan produksi) telah mewarnai keragaman persepsi dan kepentingan, yang menjadi ciri dari artikulasi modernisasi.

Artikulasi modernisasi dalam konteks ciri dan perkembangan cara produksi baru (*new mode of production*) pada fase ini, merupakan bentuk hubungan sambungan (koneksi) yang membuat dua elemen berbeda menjadi satu-kesatuan (konteks lokal dan kekuatan dari luar) pada kondisi-kondisi tertentu. Hubungan mereka tidak mutlak diperlukan, tidak ditentukan dan tidak mendasar sepanjang masa. Artinya, ada suatu kondisi yang memungkinkan hubungan itu ditempa atau dibuat ulang. Oleh karena itu dalam perjalanannya, setiap kesatuan dari suatu ciri dan perkembangan tiada lain adalah hasil artikulasi elemen-elemen yang berbeda; dia bisa direartikulasikan (diartikulasikan kembali) dengan cara yang berbeda, tergantung dari situasi dan kondisinya.

Tampilan ciri dan perkembangan kapitalisasi yang diwarnai oleh kontesktual lokal pada fase ini telah menampilkan pola-pola kapitalisasi yang artikulatif dibandingkan tatanan-tatanan lokal sebagai unsur asli dalam masyarakat. Jika dihubungkan dengan tipe tindakan, kurun periode ini sudah bergeser dari ciri preskriptif yakni tindakan yang terikat secara *rigid* pada ruang normatif yang kaku, menjadi tindakan elektif, yakni tindakan yang bebas memilih di tengah ruang normatif yang fleksibel. Menurut Germani (1981) bahwa dalam modernisasi, perubahan tindakan beriringan dengan pergeseran dari kelembagaan terpusat menjadi kelembagaan yang terspesialisasi dan pergeseran dari kelembagaan atas tradisi menjadi pelebagaan atas perubahan. Penjelasan yang sederhana dengan contoh-contoh yang konkret dalam melihat artikulasi cara produksi baru (modern) kurun periode ini analisisnya tetap menghubungkan kembali uraian-uraian kasus sebelumnya dalam dinamika formasi sosial pada periode 1980-1990.

Keberadaan kekuatan produksi baru (*gae*, tabung dan kompresor) melalui investasi, teknologi, dan manajemen, telah mendorong pengkompleksan komunitas, sehingga hubungan produksi yang lebih kompleks berimplikasi terhadap pergeseran nilai (baca: corak produksi) dan pemunculan strata sosial baru yang terbuka dalam masyarakat.

Perubahan-perubahan struktur produksi yang terbuka seperti ini, menempatkan para pengusaha modal besar di Makassar (bos) diposisikan pada strata paling atas (*upper class*), *punggaha pulau* sebagai peminjam pada posisi tengah atau *middle class* (peranannya menyerupai makelar), sementara para *punggaha lopi* dan *sahi* serta nelayan mandiri sebagai penyewa atau penyicil alat-alat produksi pada lapisan bawah (*lower class*). Artikulasi modernisasi terhadap ciri cara produksi baru terdefiniskan melalui kegiatan produksi yang dijalankan menurut tindakan rasionalitas logika kapitalis, dengan tujuan perolehan keuntungan sebesar-besarnya, dengan sedikit meninggalkan warna ekonomi moral tradisional.

Penjelasan tindakan rasionalitas logika kapitalis sebagai ciri dan perkembangan cara produksi baru tersebut dilihat melalui perubahan kebudayaan dalam wujud fisik yang menyebabkan terjadinya dinamika di tingkat sistem melalui perubahan formasi sosial yang terbangun sehingga surplus tercipta dan penstrukturasian kerja yang mulai kompleks. Indikasinya terlihat melalui munculnya diferensiasi fungsi baru dalam struktur produksi. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya (formasi sosial periode 1980-1990) bahwa *sahi* sebagai kelas pekerja (*the labor*) sudah tidak dapat lagi digeneralisasi secara sama, sehingga spesialisasi fungsi tersebut berimplikasi dalam sistem pembagian hasil bagi kelas pekerja (*sahi*) melalui pemberian tambahan-tambahan bagian hasil sesuai dengan keahlian atau spesialisasinya. Fungsi baru yang juga muncul dalam konteks manajemen produksi adalah munculnya lapisan baru (*juragan lopi*) dalam struktur produksi sehingga dikatakan tindakan aktor memperlihatkan ciri rasionalitas logika kapitalis. Ketidakterlibatan *punggaha bonto* (*the have*) dalam kegiatan produksi, akibat surplus yang semakin tercipta melalui injeksi penambahan modal (modal dan teknologi) menyebabkannya berkonsentrasi menangani pemasaran dari hasil produksi dan dengan itu kepadanya mendapat lagi sepuluh persen (10%) tambahan hasil dari peranan baru yang dijalankan.

Perkembangan tindakan rasionalitas logika kapitalis, semakin dipertegas pada kegiatan *pa'taripang*. Diawali dengan memperkenalkan teknologi tabung menyelam lalu kemudian teknologi kompresor sampai

kepada hubungan produksi dengan mekanisme penyewaan/penyicilan alat-alat produksi bagi sebagian nelayan untuk dapat menjadi *the have* (pemilik usaha produksi). Konteks ketergantungan sebagai pola dasar cara produksi kapitalis mulai terdefiniskan dengan baik antara pemilik modal dan penyewa alat-alat produksi melalui mekanisme hubungan produksi yang menyingkapkan inti hubungan dominasi melalui; mekanisme pengembalian modal pinjaman, penentuan komoditas hasil tangkapan, “ketidakbebasan” dalam menjual hasil produksi, penarikan surplus yang “berlebih” oleh *the have* (*punggaha* sebagai makelar) maupun *the creditor* (“bos” sebagai penyandang dana dan *buyer market*). Kondisi ini mempertegas fenomena ketergantungan kaum yang tidak “berpunya” kepada pemilik kapital sebagai nilai dasar pola-pola kapitalistik (Heilbroner, 1991) yang banyak diperankan oleh pelaku ekonomi elite lokal dan supra lokal

Penjelasan dari ciri cara produksi baru yang tetap menyisakan sedikit warna ekonomi moral tradisional, memperkuat asumsi teori artikulasi. Ini teramati melalui hubungan produksi yang masih berlandaskan hubungan-hubungan kekerabatan, ketetanggaaan, dan patronasi meskipun tidak sepenuhnya tunduk oleh kekuatan-kekuatan tersebut. Derasionalisasi sebagai proses balik dari rasionalisasi juga nampak terkontekstkan melalui tampilan tindakan aktor yang masih signifikan terhadap kepercayaan atas magik, mistik dan mitos dalam kegiatan produksi.

Beberapa cuplikan tindakan aktor sebagai bentuk kompromi terhadap diferensiasi fungsi dan rasionalisasi ekonomi pada ciri cara produksi baru (modern) periode 1980-1990 yang mendukung penjelasan mengenai rasionalitas logika kapitalis yang masih ada warna ekonomi moral tradisi;

Pada cara produksi pa'gae, Pattola sebagai nelayan tradisional melakukan transformasi cara produksi (tradisional ke modern) dengan menginvestasikan modalnya ke alat tangkap gae yang didukung oleh pengusaha supra lokal. Pertimbangan pertama dalam merekrut tenaga kerja adalah kerabat (extended family) dan bersamaan itu juga membuka kesempatan bagi orang lain (di luar

kerabat) dengan pertimbangan pengalaman kerja (keahlian). Pembatasan jumlah anggota kelompok mulai diberlakukan dengan pertimbangan kalkulasi untung-rugi. Tambahan alat-alat produksi yang dipergunakan mendapatkan bagian tersendiri dalam sistem bagi hasil (sharing production), Ketika volume produksi meningkat, ia tidak melaut lagi dan lebih berkonsentrasi menangani pemasaran hasil produksi. Pengetahuan lokal (baca na gaukang) yang bersumber dari kepercayaan dalam mendukung kegiatan produksi tetap diwariskan kepada Suebu sebagai punggaha lopi. Ia juga telah memberikan tambahan penghasilan yang sifatnya permanen kepada sahi-sahi yang mempunyai keahlian khusus, sehingga strukturisasi kerja terkontekskan. Bentuk patronasi tetap dipertahankan dalam kerangka legitimasi “kesadaran palsu” melalui remunerasi dan manipulasi normatif yang ia jalankan sebagai patron terhadap sahinnya, sehingga tampilan sistem usaha yang dijalankan mencirikan sifat lokalitas.

Rangkuman yang dapat disarikan bahwa ketika paham kapitalisme mulai menjadi ragam produksi dunia dan merambah hingga sudut pedesaan dan pulau-pulau kecil, kegiatan ekonomi nelayan belum sepenuhnya terkapitaliskan. Nelayan menjalankan kegiatan produksi menurut rasionalitas logika kapitalis, lewat perolehan pinjaman modal dan peralatan kerja dengan tujuan pencapaian keuntungan yang sebesar-besarnya, juga tetap dipadukan sisa-sisa hubungan ekonomi moral tradisional yang berlandaskan nilai-nilai tradisi. Dari proses artikulasi inilah, ideologi memiliki kedudukan yang berbeda-beda di masyarakat berdasarkan dengan ruang waktu yang berbeda sehingga artikulasi modernisasi yang terkontekskan kurun periode ini sebagai proses pemahaman realitas aras lokal dan juga kekuatan ekonomi supra lokal yang bercampur-baur dan menjadi ciri perkembangan cara produksi baru tersebut. Artinya, ciri cara produksi baru yang tertampilkan di satu sisi bercorak tata produksi kapitalisme (rasionalitas logika kapitalis) tetapi di sisi lain masih tersisa corak tata kelembagaan produksi tradisional yang merupakan bentuk kompromi yang terjadi antara aktor dan sistem di tengah diferensiasi sosial dengan rasionalisasi tindakan yang terus berproses beserta dengan proses sebaliknya dalam rangka peralihan (transisi)

bentuk cara produksi subsisten-komersial ke bentuk cara produksi komersial-kapitalis.

Salah satu Interpretasinya adalah pemahaman aktor dalam kegiatan produksi yang masih mengaitkan fenomena alam dengan pandangan nilai budaya dan kepercayaan tertentu bahwa laut memiliki kekuatan gaib yang misterius sehingga laut mesti diperlakukan secara bijak sehingga *baca na gaukang* sebagai bagian tata cara produksi dari masa lalu masih terakomodir dengan baik kurun periode ini. Artikulasi modernisasi dalam hal penggunaan teknologi alat termaknai dari ciri dan perkembangan cara produksi baru yang diasumsikan datangnya dari luar yang dipengaruhi oleh kontekstual lokal.

Sampai kurun periode ini, artikulasi modernisasi dalam dimensi pembangunan perikanan, kembali lagi memperlihatkan bahwa salah satu syarat lain dalam pembangunan perikanan (modernisasi perikanan) yang sangat esensial dan dibutuhkan oleh masyarakat lokal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya (artikulasi modernisasi periode 1970-1980) adalah jaminan pasar produksi baik dalam bentuk aturan (regulasi) maupun lembaga (institusi) yang keberpihakannya kepada nelayan dalam mengatasi bentuk pasar *output* yang monopoli sebagai ciri pola-pola kapitalis dalam kegiatan produksi.

Periode 1990–Sekarang: Peleburan Nelayan dalam Pola Kapitalisme

Penetrasi kapital dari supra lokal yang terus berlangsung dalam kurun periode ini menyebabkan munculnya cara produksi baru yang berbeda dengan cara produksi sebelumnya dengan skala yang lebih diperluas. Diferensiasi sosial dengan rasionalisasi tindakan yang terus berproses terciirkan di tengah koeksistensi antara cara produksi subsisten, komersial dan kapitalis sebagai unsur yang dominan dalam formasi sosial masyarakat.

Munculnya usaha *pa'karamba* sebagai cara produksi baru pada pertengahan tahun 1991, menyebabkan koeksistensi antar cara produksi yang asimetris dan berujung pada konflik horizontal antar kelompok-

kelompok nelayan dalam memperebutkan daerah *fishing ground* khususnya nelayan pancing dengan nelayan penyelam.

Kesaksian informan:

“... waktu mula muncul penyelam ikan keadaannya tidak saling mengganggu (konflik), tetapi dalam perkembangannya ikan sudah berkurang karena diracun (bius), penyelam ikan mulai curang. Selalu dia curangi kita. Kalau kita memancing di atas dia menyelam di bawah. Tidak ada hasil yang diperoleh pemancing. Waktu itu pernah terjadi perkelahian antara pemancing dan penyelam sampai diancam untuk dibakar kerambanya”

Fenomena konflik yang terjadi di tingkat aktor dan sistem, antara cara produksi kapitalis (*pa'karamba*) dengan cara produksi subsisten-komersial (*pa'meng*), dapat diterangkan dengan dua pendekatan faktor, yaitu faktor teknologi dan orientasi dalam mengadaptasi sumber daya alam fisik. Faktor teknologi dimaksudkan sebagai implikasi dari ruang sosial yang semakin terbuka dalam mengeksploitasi sumber daya (*open access*), menyebabkan nelayan atau kelompok-kelompok nelayan dengan teknologi penangkapan yang dimilikinya harus bersaing secara bebas dan kompetitif untuk mendapatkan hasil tangkapan. Dalam persaingan bebas yang tidak seimbang ini, antara tradisonal, semi-tradisional dan modern, telah berlaku hukum besi “siapa yang kuat, dialah yang menang”. Nelayan pancing (*pa'meng*) dengan kekuatan alat yang sifatnya pasif, tentu saja tersingkirkan oleh penggunaan alat menyelam dengan bantuan zat kimia untuk melumpuhkan ikan. Fakta persaingan yang ketat atas perebutan daerah penangkapan yang potensial menjadi pemicu timbulnya konflik horizontal yang manifes. Sementara faktor orientasi dimaksudkan, melalui peragaan *indigenous knowledge* oleh nelayan-nelayan pancing tradisional yang justru dimanfaatkan oleh penyelam ikan-ikan karang dengan jalan mengikuti keberadaan nelayan pancing tradisional yang dianggap efektif menentukan lokasi penangkapan. Pengkonsentrasi wilayah tangkap yang terjadi dengan tampilan dua prototipe yang berbeda yaitu nelayan tradisional yang masih terikat nilai-nilai konservasi dengan nelayan yang berorientasi pasar yang eksploitatif melalui penggunaan alat tangkap yang

merusak (bias) berujung kepada perbedaan cara pandang (orientasi) dalam memperlakukan alam fisik dan perbedaan upaya tangkap (*effort*).

Dapat disimpulkan bahwa artikulasi modernisasi terdefiniskan melalui koeksistensi cara produksi kapitalis dengan cara produksi lainnya yang saling berbenturan dalam masyarakat. Cara produksi baru dengan kekuatan teknologi yang lebih modern (meskipun sifatnya *destructive*) tampil dominan menyingkapkan inti sebuah “kесerakahan sosial” dengan berusaha melenyapkan/menyingkirkan nelayan tradisional yang terlebih dahulu menguasai wilayah perairan tersebut dengan penggunaan teknologi yang sederhana dalam posisi yang bertahan. Fenomena ini, memperkuat asumsi sebelumnya bahwa kapitalisasi yang tidak tampil utuh di negara-negara pinggiran akibat beragamnya cara produksi yang saling menghambat dalam eksistensinya.

Ciri dan Perkembangan Cara Produksi Baru dalam Masyarakat. Meskipun dalam penjelasan sebelumnya fenomena konflik telah terjadi dalam perjalanan cara produksi baru (kapitalis) pada fase ini, namun keterlibatan elite lokal dalam mengambil peran pelaku ekonomi supra lokal sebagai pemilik, tampil sangat efektif dalam meredam konflik-konflik tersebut, sehingga cara produksi baru ini (*pa'karamba*) masih tetap eksis dan dominan terhadap cara produksi lainnya di tengah ketidakseimbangan ekonomi dan ekologi yang terjadi. Demikian halnya keterlibatan pelaku ekonomi supra lokal (bos) terhadap eksistensi cara produksi baru ini semakin dominan dalam bentuk pinjaman modal usaha dan *buyer market*. Pengisapan surplus oleh kekuatan ekonomi supra lokal terus berlangsung di tengah kemiskinan, kesenjangan dan ketergantungan masyarakat nelayan *grassroot* yang terseret dalam pola-pola kapitalisasi.

Artikulasi modernisasi melalui campuran unsur-unsur lokal dari ciri dan perkembangan cara produksi baru ini (*pa'karamba*) dalam formasi sosial masyarakat, terkontekskan melalui perubahan hubungan produksi yang mulanya mengisyaratkan sebuah hubungan buruh dan majikan sebagai pola dasar kapitalisasi, kembali direartikulasikan dalam konteks hubungan *punggaha*, *juragan lopi* dan *sahi* dalam kerangka legitimasi patronasi dengan tampilan-tampilan yang mengalami penyesuaian-

penyesuaian berdasarkan kondisi logika rasionalitas kapitalis atau sintesis dari pendekatan tesis ekonomi moral (Scott, 1985) dan ekonomi rasional (Popkin, 1979).

Penggambaran yang konkret, diuraikan berdasarkan uraian kasus sebelumnya (cara produksi baru periode 1990-sekarang) dengan mengambil beberapa bagian sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Uraian yang dimaksud adalah sebagai berikut;

Ketika *Siong* sebagai pelaku ekonomi supra lokal menjalankan usahanya, lazimnya menunjuk pada unit produksi berupa perusahaan dengan mempekerjakan orang lokal sebagai manajer dan tenaga kerja yang terlibat sebagai buruh upahan. Konsep cara produksi kapitalis terdefiniskan melalui peranan modal yang relatif kuat, tenaga kerja yang berasal di luar keluarga/kerabat, organisasi produksi relatif kompleks dan pengisapan surplus dari pemilik usaha terhadap tenaga kerja dan nelayan lokal sebagai produsen terpresentasikan. Cara produksi yang demikian ini (kekuatan dan hubungan produksi) merupakan sesuatu yang baru dipahami oleh masyarakat lokal. Mekanisme cara produksi yang diintrodusir oleh aktor supra lokal, khususnya hubungan produksi merupakan salah satu unsur pengembangan cara produksi kapitalis di tingkat komunitas lokal, setelah sebelumnya mekanisme peminjaman/pengreditan tampil lebih dulu. Kepemilikan langsung oleh pelaku ekonomi supra lokal tidak lama berlangsung, akibat adanya pola-pola praktik cara produksi yang dianggap merugikan sehingga menimbulkan perlawanan komunitas lokal akibat tekanan struktural. Komoditassasi dan monopolisme yang dilakukan oleh pelaku ekonomi supra lokal mengarah kepada terancamnya keamanan subsistensi nelayan lokal.

Dalam perkembangannya, akselerasi pola-pola kapitalistik dengan daya adaptasi dan transformasi kapitalisme yang sangat tinggi, menjadikan elite lokal untuk tampil sebagai pemilik usaha di tingkat komunitas yang sekaligus dijadikan sebagai kelas komprador untuk kepentingan ekonomi supra lokal. Peran elite ekonomi lokal sebagai tokoh masyarakat dimanfaatkan sebagai kapitalis tradisional “perpanjangan tangan” kegiatan usaha yang dilakoni oleh pelaku ekonomi supra lokal.

Kepatuhan nelayan lokal terhadap tokoh masyarakatnya, dapat dihubungkan dengan pendekatan ekonomi moral (Scott, 1985) bahwa tokoh masyarakat adalah orang lokal yang dianggap mampu memberi jaminan sosial bagi anggota komunitasnya yang dilandasi oleh jagat moral, yakni hasrat untuk selalu berbuat baik yang tertanam dalam pandangan hidup mereka. Yang menjadi alat kontrol atas tingkah laku seseorang di dalam komunitas adalah ukuran baik dan buruk berdasarkan sistem nilai (budaya) yang dianut. Ukuran baik dan buruk tersebut mengacu pada kaidah yang mengatur tentang “siapa mendapatkan apa” melalui perolehan jaminan pemenuhan kebutuhan subsisten minimum melalui mekanisme kedermawanan dan bantuan dari warga yang kaya (siapa memberi apa) di dalam masyarakat. Pelarangan kegiatan penyelaman setiap hari jumat yang diterapkan oleh elite lokal sebagai pemilik usaha keramba juga dapat menjadi salah satu penjelas yang dipahami oleh masyarakat lokal sebagai tindakan orang-orang beriman, yang tindakan-tindakannya selalu dibimbing oleh ide tentang benar dan salah yang diterapkan dalam kehidupan melalui proses pembudayaan secara terus-menerus dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun dibalik apa yang dilakukan oleh elite lokal sebagai pemilik usaha mengenai pelarangan penangkapan setiap hari jumat sebagai manifestasi tindakan panutan (moral), dapat diinterpretasikan lain yaitu, sebagai upaya “pengaburan dosa” yang dilakukannya, karena teknologi cara yang dipergunakan melalui metode pembiusan, sangat merusak keseimbangan ekosistem dan kelestarian sumber daya perikanan dan kelautan.

Dalam hal kepercayaan, orientasi terhadap perolehan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara apapun, menyebabkan peragaan *baca na gaukan* sebagai *local knowledge*, tidak lagi terakomodir dengan baik sebagai tindakan aktor (*pasellung bale*) dalam mengadaptasi sumber daya alamnya. Fakta ini terpahami, karena secara ekonomi nilai pasar menjadi dominan menggantikan nilai moral, dan secara sosial kesenjangan antar generasi di masyarakat nelayan membuat mereka kehilangan warisan nilai dan norma-norma di laut sehingga posisi warisan pengetahuan lokal (*local knowledge*) atas dominasi sains terhadap pengetahuan tradisional menyebabkan nilai dan pengetahuan lokal ikut terabaikan.

Hubungan produksi dalam struktur produksi yang awalnya sistem buruh upahan kembali direartikulasi menjadi mekanisme peminjaman/kredit usaha kepada nelayan untuk menjadi pemilik alat produksi dengan prinsip “*di mana diperoleh modal di situ produksi dipasarkan*”. Hanya saja, hubungan produksi yang demikian ini tidak berada dalam kerangka di mana nelayan didorong untuk memaksimalkan pencapaian hasil (keuntungan) untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, tetapi hanya diarahkan sebatas memenuhi kebutuhan subsisten saja dalam kerangka legitimasi patronasi yang telah mengalami modifikasi. Keuntungan produksi maksimal masih tetap dinikmati oleh pemilik usaha (aras lokal) sebagai penyanggah dana yang sekaligus *buyer market*. Terminologi Marxis menyebutnya sebagai pengisapan surplus (eksploitasi) di tengah masyarakat yang terkapitalisasikan melalui kekuatan dan hubungan-hubungan produksi yang terjadi. Sehingga cara produksi kapitalis ditandai oleh tiga hal, yaitu berkembangnya kelas kapitalis (aras dan supra lokal) yang dengan kekayaan uangnya bisa membeli tenaga kerja dan alat produksi untuk memproduksi barang dagangan di pasar. Kedua, kelas ini menguasai semua alat produksi penting dalam perekonomian masyarakat dan membatasi akses bebas pekerja terhadap alat-alat produksi sehingga pekerja harus menjual tenaganya atau menyewa/menyicil pada kapitalis. Ketiga, maksimalisasi surplus yang dikuasai oleh kapitalis

Intisari yang dapat disarikan adalah pola-pola kapitalisasi melalui kekuatan dan hubungan produksi dari hasil aliansi pelaku elite ekonomi aras lokal dan supra lokal, telah mereduksi laut dengan potensinya hanya bagian dari sistem ekonomi saja, dan telah mengabaikannya sebagai sistem sosial dan ekologi, sehingga hubungan produksi menjadi pemandangan ahistori dari masa lalu. Keterlibatan elite lokal sebagai kapitalis tradisional (lokal) telah menjalankan dua fungsi, yaitu selain sebagai kelas komprador juga sebagai tokoh panutan masyarakat dalam menjaga integrasi melalui komunikasi yang lancar serta pembatasan atau penyesuaian pertentangan-pertentangan yang muncul. Kepatuhan (*compliance*) masyarakat kepada elite lokal sebagai tokoh masyarakat maupun sebagai patron (*the have*)

termaknai sebagai kepatuhan normatif dan kepatuhan utilitarian berdasarkan kekuasaan yang dimilikinya yaitu norma (*normatif power*) dan imbalan (*remunerative power*) yang menjadi landasan orientasi keterlibatan melalui moral (*moral involvement*) dan kalkulatif (*calculative involvement*). Artikulasi di tingkat aktor dan sistem terdefiniskan.

Oleh karena itu, konteks formasi sosial dengan mengusung pola-pola kapitalistik diasumsikan tidak akan pernah tuntas dalam masyarakat lokal, karena adanya tatanan tradisi yang senantiasa mewarnai ciri dan perkembangan cara produksi baru tersebut meskipun dalam dinamikanya (perjalanannya) telah mengalami penyesuaian-penyesuaian (erosi, modifikasi atau lebih artikulatif) sehingga ciri dan perkembangan cara produksi baru pada fase ini masih tetap dipengaruhi oleh unsur lokal.

Dalam tataran artikulasi modernisasi pembangunan perikanan kurun periode ini dengan mengadopsi pemikiran Mosher (1966), telah memperlihatkan bahwa tanpa dukungan dan integrasi dari sarat mutlak atau esensial yang dibutuhkan dalam pembangunan atau pelancar pembangunan perikanan seperti kredit produksi, pasar, infrastruktur pendukung kegiatan produksi, insentif produksi bagi nelayan, regulasi, maka modernisasi yang masuk dalam irama kehidupan masyarakat nelayan hanya memperlihatkan sebuah tampilan yang dehumanisasi dan deekonologis sebagai akibat dari penerapan pola-pola kapitalistik yang berupaya dengan serakah (keserakahan sosial) mengakumulasi keuntungan sebesar-besarnya dengan wujud ketimpangan dari aspek keseimbangan.

BAB V

KONTEKS NILAI, ETOS LOKAL DAN FORMASI SOSIAL BARU

Transformasi modernitas pada komunitas nelayan di Pulau Kambuno, diasumsikan berkomentasi dengan semangat usaha orang Bugis-Makassar yang tergeneralisasi dalam nilai-nilai budaya lokal yang melecet etos kerja di tingkat aktor. Proposisi ini dibangun berdasarkan studi Hefner (1998) bahwa kapitalisme di Asia telah berkembang di tengah keragaman struktur sosial dan tradisi moral yang diartikulasikan oleh unsur lokal. Penelusuran nilai-nilai budaya bahari menjadi bagian yang dilihat, untuk mengetahui sejauh mana nilai budaya tersebut berfungsi untuk mendorong atau justru menghambat pembentukan formasi sosial baru yang berbasis modernitas. Demikian halnya dengan etos kerja yang lahir sebagai bagian dari konkretisasi nilai budaya bahari, kuat atau lemahkah melecet terbentuknya formasi sosial baru, serta bagaimana eksistensinya dalam formasi sosial baru yang terbentuk.

Pengaruh nilai budaya bahari sebagai budaya lokal dianalisis pada tingkat sistem, sedangkan pembahasan etos kerja yang bersumber dari nilai budaya, dianalisis pada tingkat aktor. Diasumsikan bahwa hubungan antara aktor dan sistem, berperan terhadap formasi sosial cara produksi kapitalis yang terbentuk. Bagaimana unsur budaya bahari dimaknai oleh tindakan aktor dalam melakukan dan menerima modernisasi, dan bagaimana etos kerja menjadi pelecut bagi prestasi kerja dan usaha mereka, dapat

dihubungkan dengan studi McClelland (1987) bahwa sebuah kebudayaan berfungsi mendorong perkembangan ekonomi bila dalam kebudayaan tersebut tertanam motif berprestasi yang tinggi, dan begitu juga sebaliknya kebudayaan yang memiliki *nAch* rendah, mungkin lebih banyak mencurahkan perhatian pada pelestarian tradisi mereka, terutama dalam lingkungan keagamaan.

Pemaknaan nilai budaya bahari dan etos kerja, melalui penelusuran kasus dari aktor untuk melihat keterhubungan unsur budaya bahari menginternalisasi ke dalam diri aktor, bagaimana objektivasi yang terjadi ketika aktor berhadapan dengan dunia sosial, dan bagaimana aktor bereksternalisasi dalam bentuk tindakan yang dimotivasi oleh nilai budaya tersebut. Pendekatan internalisasi, objektivasi dan eksternalisasi ini didasarkan pada studi Berger dan Luckman (1991) tentang dialektika aktor dan sistem dalam mengkonstruksi realitas sosial bahwa; Masyarakat adalah produk manusia, dan sebaliknya manusia juga adalah produk masyarakat. Terdapat tiga hal hubungan, yaitu; (1) tahap eksternalisasi, yakni tahap ketika manusia mewujudkan dirinya dengan cara membangun dunia sosialnya, tahap di mana masyarakat dibentuk oleh manusia, (2) tahap objektivasi, yakni tahap di mana realitas masyarakat dilihat sebagai realitas objektif yang terpisah dari manusia dan berhadapan dengan manusia sebagai individu, (3) tahap internalisasi, tahap di mana masyarakat dengan pranatanya yang melembaga, mempengaruhi bahkan membentuk perilaku manusia melalui pembelajaran atau pembudayaan, tahap di mana manusia dibentuk oleh masyarakat.

Naluri Meniru pada Makna Lama

Nilai merupakan sesuatu yang abstrak sehingga sulit untuk dirumuskan ke dalam suatu pengertian yang memuaskan. Beberapa ahli merumuskan pengertian nilai dari beberapa perspektif yakni perspektif antropologis, filsafat psikologis dan sosiologis. Secara antropologis Kluckhohn (1962) mengemukakan nilai merupakan suatu konsepsi yang secara eksplisit dapat membedakan individu atau kelompok, karena memberi ciri khas baik individu maupun kelompok. Secara filosofis,

Spranger (1928) dalam Wirawan (2004) menyamakan nilai dengan perhatian hidup yang erat kaitannya dengan kebudayaan karena kebudayaan dipandang sebagai sistem nilai, kebudayaan merupakan kumpulan nilai yang tersusun menurut struktur tertentu. Nilai hidup adalah salah satu penentu kepribadian, karena merupakan sesuatu yang menjadi tujuan atau cita-cita yang berusaha diwujudkan, dihayati, dan didukung individu. Menurut Spranger, corak sikap hidup seseorang ditentukan oleh nilai hidup yang dominan, yaitu nilai hidup yang dianggap individu sebagai nilai tertinggi atau nilai hidup yang paling bernilai. Orang akan memandang segala sesuatu dengan kaca mata nilai hidup yang dihargainya paling tinggi atau dominan, sehingga nilai hidup yang lain yang berasal dari pengertian kebudayaan secara luas akan diwarnai juga oleh nilai hidup yang dominan itu. Pengertian nilai dari perspektif psikologis dikemukakan Munn (1962) bahwa nilai merupakan aspek kepribadian, sesuatu yang dipandang baik, berguna atau penting dan diberi bobot tertinggi oleh seseorang. Dari uraian di atas maka nilai dapat diartikan sebagai sesuatu yang dianggap baik, berguna atau penting, dan diberi bobot tertinggi oleh individu atau kelompok dan menjadi referensi dalam bersikap serta berperilaku dalam hidupnya.

Dalam perspektif sosiologis, Sallatang (1984) menuliskan bahwa penetrasi nilai ke dalam sistem sosial mendasari peranan, pelaksanaan peranan (tingkah laku atau tindakan seseorang terhadap atau dalam kaitannya dengan orang lain) dalam rangka interaksi-interaksinya. Berkenaan dengan operasinya di dalam sistem sosial, yaitu di dalam kelompok-kelompok dan masyarakat pada umumnya, ia disebut sebagai nilai-nilai sosial (*social value*). Nilai-nilai ini, tidak hanya menyatakan baik dan buruk atau tinggi dan rendah atau pun tingkatan-tingkatan secara gradual di antara keduanya sehingga melahirkan hierarki nilai-nilai sosial, tetapi juga mendasari (memberikan dasar pandangan) dan sekaligus menjadi pedoman atau ukuran terhadap tingkah laku atau tindakan sosial.

Dengan mengambil *setting* nilai-nilai kebudayaan masyarakat Bugis di masa lalu yang tergeneralisasi dalam budaya lokal, maka ada enam pilar utama sebagai nilai-nilai sosial yang terpahami dalam masyarakat bahari

sebagai nilai-nilai keutamaan yaitu; kejujuran (*alempureng*), kecendikiaan (*amaccang*), kepatuhan (*asitinajang*), keteguhan (*agetengeng*), keusahaan (*reso*) dan *siri'* (*malu dan harga diri*) (Rahim, 1992). Ini menjadi pedoman atau ukuran tingkah laku (tindakan sosial) dalam melakukan usaha (pekerjaan) maupun dalam interaksi kesehariannya, yang memungkinkan individu-individu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik serta kedudukan terhormat (status sosial) dalam masyarakat. Pada masa lalu, nilai-nilai keutamaan ini tersadari oleh individu dan tersadari pula untuk berusaha mencapainya, melalui generalisasi pencapaian nilai-nilai sosial yang diwujudkan dalam bentuk usaha (*reso*) dalam pencapaian derajat sosial pada pelapisan yang tercipta, seperti; (1) *apanritang* yang berarti keilmuan. Karena ilmu pengetahuan yang dimiliki, mendudukkannya pada martabat ilmuwan atau ulama sehingga kepadanya diberi gelaran sebagai *Topanrita*, (2) *asugireng* yang berarti kekayaan harta sehingga menggenggam martabat hartawan atau diberi gelaran sebagai *Tosugi*, (3) *awaraningeng* yang berarti keberanian, keperwiraan, yang menyandang martabat pemberani atau pahlawan sehingga kepadanya diberi gelaran sebagai *Towarani*, dan (3) *asulesanang* yang berarti kreativitas dan keterampilan, yang memperoleh martabat pengambil inisiatif dan pencipta gagasan-gagasan baru sehingga kepadanya diberi gelaran sebagai *Tosulesana* (Rahim, 1981). Pada masyarakat komunal, gelaran-gelaran ini sangat penting artinya untuk mendapatkan kedudukan-kedudukan sosial yang terhormat berkaitan dengan sistem pelapisan atau stratifikasi (*social stratification*) yang di ciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Gambaran itu masih sering dijumpai dalam konteks kekinian, misalnya; gelaran kebangsawanan (*Andi, Petta, Puang, Karaeng, Opu* dan sebagainya; *closed social stratification*), gelaran ketokohan atau tokoh masyarakat yang dilatari sejarah masa lalunya, gelaran kepandaian yang dikonotasikan sebagai pegawai pemerintahan dan gelar akademik serta gelaran kekayaan yang diidentikkan dengan kepemilikan alat-alat produksi.

Sistem pelapisan sosial desa pantai di Sulawesi Selatan, dasar pelapisan pada pokoknya dihargai pada faktor pemilikan pendidikan formal. Sementara faktor-faktor lainnya yang diutamakan dalam

masyarakat berturut-turut mulai dari yang terbesar ke bawah adalah pengalaman hidup, kekayaan dan keturunan atau kebangsawanan. Namun, pada perkembangannya, penghargaan sosial terhadap pemilikan harta kekayaan (kepemilikan ekonomi; *tosugi*) semakin mendapat apresiasi yang tinggi dalam struktur sosial masyarakat termasuk masyarakat di Pulau Kambuno. Asumsinya bahwa dengan kekayaan akan mudah sekali mendapatkan atau mengakumulasi penghargaan sosial lainnya seperti ketokohan maupun kepandaian.

Kaitan dengan studi ini, dapat diasumsikan bahwa nilai-nilai budaya bahari yang melahirkan etos kerja masyarakat nelayan di Pulau Kambuno, pada masa lalu cukup berpengaruh terhadap transformasi modernitas atau terbentuknya cara produksi baru (cara produksi tradisional ke cara produksi modern). Ini dilatari oleh adanya motivasi pengejaran status sosial (*open social stratification*) berlandaskan pilar-pilar nilai-nilai sosial yang melecut etos kerja dalam melakukan usaha (pekerjaan; *reso*). Proposisi terbangun berdasarkan filosofi-filosofi kerja leluhur orang Bugis pada masa lalu seperti;

“reso temmangninggi malomo naletei pammase Dewata”.

Artinya “hanya dengan kerja keras yang memungkinkan turunnya berkah Tuhan”,

“..naiya tau malempue’ manguru mana’i tau sugie”.

Artinya, orang yang jujur sewarisan dengan orang kaya atau pemaknaan yang lebih dalam bahwa orang jujur tidak sulit untuk memperoleh kepercayaan karena kejujurannya.

Beberapa interpretasi dapat diajukan untuk mendukung asumsi yang disampaikan, bahwa golongan nelayan di Pulau Kambuno di masa lalu yang menjadi atau pernah menjadi *punggaha bonto* dan justru beberapa di antaranya sebagai individu inovatif, teridentifikasi berasal dari golongan status sosial orang biasa yang turun-temurun bekerja sebagai nelayan kemudian bangkit menjadi *punggaha*. Fakta sosialnya, mereka yang dijumpai tak satu pun memakai gelar kebangsawanan dalam namanya atau panggilan gelar kebangsawanan (*closed social stratification*) yang melekat

pada dirinya, semisal; *Andi, Puang* atau *Karaeng*. Ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian status sosial melalui *open social stratification*, termaknai sebagai hal yang tersadari dapat tercapai oleh aktor, etos kerja terlecut tinggi untuk dapat berhasil dan tampil sejajar atau sebagai “kelas satu” melalui usaha yang dilakukan. Ini dengan sendirinya, berkomentasi terhadap munculnya cara produksi baru dalam formasi sosial masyarakat di pulau ini³⁷.

Berikut kesaksian informan:

“...saat itu saya bekerja keras, sabar, saya kumpulkan rejeki Allah sedikit demi sedikit, Tiba saatnya menjadi *punggaha*, saya beli juga *gae* (*pukat cincing*). Saat itu, baru orang memperhitungkan saya. Sudah banyak juga minta pekerjaan menjadi *sahi*”.

Perubahan cara produksi yang dilakukan oleh aktor dilatari motivasi yang besar “*untuk bisa diperhitungkan orang*”. Ini, wujud pengejaran status sosial, berkaitan dengan pelapisan sosial yang tercipta dalam masyarakat. Kondisi ini tersadari oleh aktor, dan tersadari pula untuk berusaha mencapainya. Interpretasi nilai-nilai sosial budaya lokal yang melecut etos kerja aktor yang dijadikan sebagai pedoman tingkah lakunya, termaknai dalam hal kepatuhan (*asitinajang*), keteguhan (*agetengeng*), keusahaan (*reso*) serta *siri*” (malu dan harga diri). Pengejaran status sosial dilakukan melalui perubahan cara produksinya dan surplus tercipta, sehingga kepadanya di beri gelar *punggaha*. Keadaan ini, tersadari oleh aktor sebagai proses kerja keras yang menstimulus etos kerjanya untuk dapat melakukan perubahan status, baik dalam struktur berdasarkan

³⁷ Menurut Soekanto (1996) bahwa sistem lapisan dalam suatu masyarakat dapat bersifat tertutup (*closed social stratification*) dan terbuka (*open social stratification*). Lapisan yang sifatnya tertutup (*closed social stratification*), membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, satu-satunya jalan untuk memasuki lapisan tersebut adalah melalui kelahiran, dalam konteks ini lapisan yang dimaksud adalah strata kebangsawanan (*Arung*). Sebaliknya di dalam sistem lapisan yang sifatnya terbuka (*open social stratification*), setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berusaha melalui kecakapannya untuk mencapainya dan naik lapisan sebagaimana pelapisan yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri, seperti dalam konteks ini menjadi orang kaya (*tosugi*), orang pintar (*topanrita*), tokoh masyarakat (*tobarani*) dan sebagainya.

produksi (menjadi *punggaha*) maupun dalam struktur sosial masyarakat “untuk dapat diperhitungkan orang” (*tosugi*).

Penuturan lain:

“..awalnya saya hanya sahi biasa, hanya ikut sama punggaha saja. Tetapi saya tidak pernah lupa pesan orang tua, bahwa; jujur, rajin, bersungguh-sungguh, dan menjaga siri (malu dan harga diri,) sebagai syarat mencari rezeki Allah. Itu yang saya ambil sebagai pegangan untuk bersungguh-sungguh dalam bekerja. Allhamdulillah akhirnya saya dipercaya oleh punggaha untuk menjadi juru mudi sampai akhirnya saya juga dapat menjadi punggaha”

Apa yang dilakukan oleh aktor, merupakan falsafah nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang senantiasa terpahami, terpraktikkan serta terjaga eksistensinya sehingga kepadanya melekat nilai-nilai sebagai pedoman bertingkah laku dalam diri aktor untuk selalu berbuat jujur (*lempu*), pintar (*macca*), patuh (*sitinaja*), teguh (*getteng*), berusaha/rajin (*reso/tinulu*) dan *ma“siri”* (*malu dan harga diri*) yang diyakini akan membawanya pada keberhasilan. Mencontoh atau meniru yang umum dalam kehidupan sosial merupakan sumber terjadinya kebiasaan. Meniru bukanlah hasil didikan, tetapi ia menjadi hasrat naluri. Tetapi kebudayaan dapat mengubah atau membentuknya melalui kehidupan sosial. Kebudayaan, adat dan kebiasaan, bertahan dan dilanjutkan melalui peniruan oleh suatu generasi dari generasi sebelumnya.

Fakta lain yang dapat juga dijadikan penjas adalah fakta pengembaraan yang dilakukan oleh nelayan-nelayan penyelam teripang di pulau ini. Pengaruh pengejaran status sosial yang terimplementasi dalam etos kerja menyebabkan mereka melakukan kegiatan penyelaman teripang lintas wilayah bahkan sampai ke Australia. Dari hasil pengembaraan yang dilakukan, maka teradopsilah teknologi cara dalam kekuatan produksi, yang salah satu di antaranya adalah tabung sebagai alat bantu menyelam yang berbeda dengan penggunaan teknologi cara sebelumnya (*ladung*). Pengejaran prestise sosial termaknai melalui usaha (*reso*) yang dilakukan untuk menjadi *tosugi* (orang kaya) dan *tobarani* (orang berani) sehingga

kepadanya diberikan kedudukan yang terhormat dalam strata sosial masyarakat.

Motivasi masyarakat nelayan di pulau ini, khususnya nelayan penyelam teripang dalam melakukan ekspansi kegiatan produksi lintas daerah bahkan lintas benua, sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip hidup yang telah menjadi filosofi hidup orang-orang Bugis-Makassar pada masa lampau sebagai pelecut etos kerja melalui doktrin-doktrin berupa pesan (*paseng*) dan keyakinan (*toddo*) yang senantiasa menjadi prinsip hidup dalam masyarakat seperti:

“*..iyapa muita deceng narekko musalaiwi wanuanmu*” (..nanti baru mendapatkan keberhasilan kalau meninggalkan kampung halamanmu)

“*..de'nalabu matanna essoe ri tenggana bitarae*” (..matahari tidak akan pernah tenggelam di tengah langit, ajal sudah ditentukan oleh Tuhan)

“*..lebbini mate maddareae namate tennamanre*” (..lebih baik-baik mati berdarah daripada mati kelaparan)

“*..pura tangkisi gulikku, pura babbara' sompe'ku, ulebbirenggi telleng natowalie*” (..kemudi telah kupasang, layar telah kukembangkan, kupilih tenggelam dari pada surut langkah)

“*..mali siparappe, rebba sipatokkong, malilu sikainge*” (..saling mendamparkan jika hanyut, saling mengangkat jika jatuh, saling mengingatkan jika keliru)

“*..narekko sompe'ku ri wanuanna tauwe, aja'mumaelo,mancaji ana'guru, ancaji ponggawako, namani ponggawa parampo'mua*” (..jika engkau berlayar di negeri orang, jangan menjadi anak buah, jadilah pemimpin, walaupun itu pemimpin perampok)

Apa yang diperlihatkan dalam tulisan di atas, terpahami sebagai falsafah, prinsip dan semboyan masyarakat Bugis-Makassar pada masa lalu yang tentunya mempunyai kelebihan dan kelemahan, tetapi fakta historisnya, orang-orang Bugis-Makassar memang telah membuktikannya dalam kenyataan melalui beberapa catatan sejarah yang menjelaskan

tentang ini³⁸. Menurut Umar (2005) bahwa masyarakat Bugis-Makassar pada masa lalu telah diakui oleh dunia internasional sebagai raja laut, karena hamparan lautan bebas bukan masalah bagi mereka, meskipun seringkali juga dipelintir menjadi “bajak laut”. Orang-orang Bugis-Makassar menjelajah sampai ke perairan Afrika seperti Madagaskar dan perairan Canada seperti Vancouver. Bukti lain disebutkan bahwa sejumlah pelabuhan besar di Indonesia peranan orang-orang Bugis-Makassar cukup dominan, misalnya; di Selat Malaka keturunan masyarakat Bugis-Makassar pernah memegang tampuk kepemimpinan di Malaysia. Dalam spektrum mikro (Pulau Kambuno) konteks fenomena pengembaraan ini, sangat mendapatkan apresiasi yang tinggi dalam masyarakat kaitannya dengan status sosial. Penuturan informan sebagai berikut:

“..keberanian penyelam Kambuno sampai ke Australia, menjadi cerita sejarah di pulau ini. Bahkan yang memunculkan dan mengajarkan cara menyelam pakai tabung di sini. Di pulau ini mereka itu kita hargai sebagai pangulu kampung (tokoh masyarakat), karena apa yang pernah dia lakukan sesuatu yang tidak mudah dan hanya orang-orang berani saja yang mampu melakukannya”

Kesimpulannya bahwa pemaknaan nilai budaya bahari lebih jauh dapat dielaborasi menjadi pola sikap kerja keras, terbuka, suka tantangan, egaliter, berani mengambil risiko, sehingga menjadi basis yang kuat bagi etos kewirausahaan, wujud dari pengejaran status sosial.

Dibalik pengajaran status sosial yang melecut etos kerja masyarakat, kesalehan beragama pun melalui pemaknaan ajaran Islam khususnya ibadah haji, juga berkolaborasi dengan baik dan memacu motivasi aktor

³⁸ Dalam catatan sejarah dunia internasional, Daeng Ruru yang bergelar Loius Dauphi de Macassart” pernah diangkat menjadi Kapten Angkatan Laut Perancis tahun 1692, kemudian adiknya Daeng Tulolo de macassart” diangkat menjadi Letnan Angkatan Laut Perancis dalam tahun 1712. Sementara itu Denys Lombard menggambarkan bahwa pada abad ke-17 tidak ada orang yang dapat disejajarkan dengan prestasi intelektual Karaeng Pattingalloang dari wacana teologis sampai pada filsafat dan sains modern. Tokoh yang selevel dengan Karaeng Pattingalloang hanya ada di Cina yaitu pengarang naskah Poxieji, suatu karya agung yang terbit dalam tahun 1639 (Umar, 2005).

untuk berusaha mencapainya³⁹. Bahkan dalam penuturan aktor di katakan bahwa “*hanya dengan kekayaan dan gelar haji, orang akan menghitung kita*”. Diasumsikan bahwa tidak sempurnalah status sosial aktor dalam masyarakat sebagai *tosugi* (orang kaya) kalau belum menunaikan ibadah haji atau bergelar haji (dalam perspektif *etic*), sehingga cita-cita menunaikan ibadah haji juga merupakan stimulus yang melecet etos kerja aktor untuk dapat berusaha semaksimal mungkin dalam pencapaian tujuan tersebut. Fenomena haji dalam perspektif kebudayaan tetap menjadi motivasi dan pelecut etos kerja masyarakat di pulau ini (*emik*). Ada dua kegiatan di pulau ini yang banyak menyedot perhatian warga untuk ikut berpartisipasi dan turut larut dalam kegembiraan melaksanakannya yaitu; upacara perkawinan dan upacara mengantar dan menjemput orang yang akan dan telah melaksanakan ibadah haji dengan istilah *ma'penre* (mengantar) dan *ma'palisu* (menjemput) *pa'mekka* (orang yang akan dan telah melaksanakan ibadah haji). Suasana meriah ini ditandai dengan adanya hiasan dari perahu-perahu pengantar atau penjemput, ibaratnya sebuah karnaval di tengah lautan yang disertai dengan kegiatan syukuran berupa acara *barasanji* sesampainya di pulau. Oleh karena itu, pemaknaan ibadah haji dan gelar haji, tidak hanya dipandang sebagai penyempurnaan rukun ibadah (Rukun Islam), tetapi juga bermakna intrinsik sebagai sumber kebahagiaan pada setiap ritusnya, dan bermakna instrumental secara sosiologis. Ia memberi kebanggaan sebagai wujud keberhasilan dalam menekuni pekerjaan.

Sementara untuk pemaknaan *siri* sebagai salah satu pilar utama nilai-nilai sosial dalam masyarakat, termaknai oleh aktor akan muncul ketika seseorang diperlakukan tidak patut. Berarti pula, pencapaian status sosial sebagai; *topanrita*, *tobarani*, *tosugi*, *tosulesana*, untuk diwujudkan adalah bagian dari penegakan kepatutan yang dengan itu *siri* ditegakkan.

³⁹ Dalam pandangan ajaran Islam diriwayatkan bahwa “*nasib suatu kaum tidak akan berubah jika bukan kaum itu sendiri mengubahnya*”. Artinya bahwa suatu keharusan yang mewajibkan umat Islam untuk senantiasa bekerja keras dan berusaha yang dijustifikasi dalam konteks keseimbangan bahwa “*kejarlah duniamu seakan-akan engkau tidak akan mati, dan kerjarlah akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok*”

Ini dapat dihubungkan dengan terminologi *siri* yang memiliki banyak dimensi, ditulis oleh Andi Zainal Abidin dalam Umar (2005) bahwa terminologi menjadi *ma'siri*, muncul manakala seseorang atau kelompok merasa malu atau terhina karena hidup sengsara, miskin, bodoh, kurang berhasil dalam kehidupan, tidak bisa bersaing dengan orang lain. Artinya, rasa malu dan terhina bukan bersumber dari orang lain melainkan dari dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, motivasi ini senantiasa menjadi pelecut aktor untuk selalu tampil berusaha dan bekerja keras. Terminologi *ri'pakasiri*, muncul ketika harkat dan martabat sebagai manusia Bugis-Makassar dilanggar oleh orang lain dengan cara penghinaan seperti ditempeleng, dimarahi di depan orang banyak, istri atau anggota perempuannya dibawa lari atau dilecehkan yang penyelesaiannya senantiasa dilakukan dengan konflik fisik yang terkadang merenggut korban nyawa dengan menggunakan senjata tajam berupa *kawali*, *tappi* atau *bangkung* yang diistilahkan oleh masyarakat sebagai *si'gajang* atau *si'bangkungi*. Sementara itu, tidak ada *siri*-nya muncul ketika aktor memiliki kepribadian yang malas, tidak jujur, tidak suka berusaha atau hanya mengandalkan bantuan orang lain dan sebagainya.

Rangkuman dari keseluruhan penjelasan adalah hubungan nilai budaya bahari dan etos kerja terhadap terbentuknya formasi sosial baru di Pulau Kambuno, secara substansial mendukung studi Salman (2002) bahwa tahap transisi dalam transformasi industrial pada komunitas maritim di Sulawesi Selatan, nilai *siri'* dengan berkomplementasi motif status sosial dan motif kesalehan beragama telah berfungsi mendorong terciptanya koeksistensi ciri produksi prakapitalisme dengan ciri produksi kapitalisme yang dalamnya diferensiasi sosial dan rasionalitas tindakan berlangsung. Etos kerja yang melecut transformasi industrial tersebut menempatkan prestasi kerja sebagai bagian dari perwujudan nilai *siri'*, pengejaran status sosial dan pencapaian kesalehan beragama secara sekaligus. Motif pengejaran status sosial oleh aktor dengan itu cara produksi baru tercipta dalam formasi sosial masyarakat, membantah tesis Kyong Dong (1995) yang melihat keberhasilan industrialisasi dan perkembangan kapitalisme tidak harus dilihat hubungannya dengan spirit

agama ataupun tradisi. Bantahan itu didasari karena segala pengejaran status sosial yang dilakukan oleh aktor justru dilandasi oleh nilai-nilai tradisi dan agama, etos kerja terlecut untuk berusaha mencapainya melalui transformasi cara produksi agar surplus tercipta dan dengan itu pengejaran status sosial diyakini dapat tercapai. Kerja keras dan hidup berhemat untuk mencapai status sosial lebih tinggi, menunjukkan adanya motif berprestasi. Ini relevan dengan studi Mclelland (1987) bahwa individu dengan motif berprestasi tinggilah yang menggerakkan kemajuan ekonomi masyarakat. Sedangkan pemaknaan ajaran dan ibadah haji, yang kemudian mempengaruhi perilaku kerja dan usaha aktor, mendukung studi Weber (1979) dan Bellah (1957) tentang hubungan etika agama dengan semangat usaha. Sementara pemaknaan nilai *siri* sebagai bagian dari penegakan kepatutan dengan itu *siri* ditegakkan yang perwujudannya ada dalam status sosial tetap relevan dengan temuan Mattulada (1975), Errington (1977), Rahim (1991) dan Salman (2002) bahwa nilai *siri* adalah sumber motivasi tindakan individu Bugis-Makassar, termasuk dalam hal pengejaran status sosial.

Dengan demikian, terbentuknya cara produksi baru (*new mode of production*) periode 1970-1980 yang berlanjut terus sampai pada pertengahan periode 1980-1990 dalam kegiatan produksi, nilai-nilai budaya bahari sebagai unsur lokal cukup efektif dalam mendorong pembentukan formasi sosial baru melalui lecutan etos kerja yang tinggi dari aktor. Tahap ini diasumsikan sebagai tahap internalisasi di mana masyarakat dengan pranatanya yang melembaga mempengaruhi bahkan membentuk perilaku manusia melalui pembelajaran atau pembudayaan dalam mencapai tujuan (Berger dan Luckman, 1991).

Pasrah dan Menurut pada Perubahan

Perkembangan cara produksi baru dalam formasi sosial di Pulau Kambuno ditandai dengan semakin gencarnya pelaku ekonomi supra lokal melakukan penetrasi kapital dengan mekanisme peminjaman/pengreditan modal usaha dan alat-alat produksi melalui perantara *punggaha-punggaha pulau*. Ini berlangsung akhir periode 1980-1990 dan terus berlanjut pada

periode 1990 sampai sekarang. Pola-pola kapitalisasi yang diasumsikan datangnya dari luar, semakin terpresentasikan dalam masyarakat. Hubungan produksi yang berlanjut luas ke hubungan sosial, terbangun hanya kepada pertimbangan nilai pasar. Nilai-nilai kebersamaan (komunal) sebagai basis tradisi masyarakat mulai luntur. Laju modernisasi perikanan yang berlangsung, telah menciptakan dominasi sains atas pengetahuan tradisional. Dengan itu, masyarakat nelayan di pulau ini, mulai terserabut dari akar tradisinya. Nilai dan pengetahuan lokal mulai terabaikan oleh pelaku cara produksi baru. Hubungan-hubungan bisnis antara elite ekonomi lokal dan pengusaha supra lokal telah mereduksi laut hanya untuk kepentingan ekonomi saja yang penuh dengan kompetisi dalam mencari keuntungan. Laut tidak lagi dipandang sebagai bagian dari sistem sosial dan ekologi masyarakat.

Fase ini, ekonomi lokal bersifat eksploitasi di bawah kekuasaan pengendali sarana produksi dan permodalan. Dampak modernitas yang terjadi dengan tendensi yang mengandalkan rasio manusia, tidak memberikan landasan etis yang memadai untuk tanggung jawab terhadap nilai-nilai sosial sehingga nilai-nilai tradisi tidak lagi terakomodir dalam hubungan produksi maupun hubungan-hubungan sosial sebagai warisan dari masa lalu. Budaya teknokratis yang telah tampil dominan dalam cara berproduksi masyarakat, telah mengabaikan aspek kemanusiaan dalam aplikasinya. Akibatnya, bukan hanya penggunaan teknologi mengancam keadilan dan kebebasan manusia, tetapi juga merusak lingkungan. Dehumanisasi dan deekologis telah menjadi ancaman dalam komunitas. Pada fase ini, terpahami sebagai sebuah proses konstruksi sosial baru dalam masyarakat.

Tampilan elite ekonomi lokal dengan gaya hidup modern serta penggunaan simbol-simbol kepemilikan, semakin mengukuhkan status sosial baru mereka melalui kepemilikan harta benda, seperti; rumah yang bagus, peralatan elektronik, *handphone* dan sebagainya. Kesenjangan semakin tajam antara yang miskin dan yang kaya. Pulau ini, yang dulunya mempunyai kearifan lokal yang kuat, komunalisme dan kebersamaan yang kuat, relasi sosial yang lebih setara, kerukunan dan ketenteraman, tradisi

penghormatan terhadap norma-norma sosial yang tercermin dalam nilai-nilai harmoni masyarakat, tererosi sedemikian rupa oleh pola-pola kapitalisasi yang melahirkan struktur sosial baru yang berangsur-angsur menjadi krisis sosial yang terbiarkan begitu saja. Indikasi dari krisis sosial tersebut, adalah; kearifan lokal yang sudah menjadi tidak penting sehingga membuat mereka kehilangan warisan nilai dan norma-norma di laut dan warisan pengetahuan lokal (*local knowledge*); perusakan ekosistem bukan sesuatu hal yang harus dipersoalkan, sehingga kerukunan mulai sering terganggu dengan pecahnya konflik fisik maupun kebiasaan “perang dingin” antar warga dalam perebutan wilayah tangkap. Ini menjadi pemandangan yang ahistoris; Nilai *siri*, mulai tidak termaknai lagi sebagai kontrol sosial yang ketat, untuk tidak berbuat yang tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat seperti penggunaan cara-cara yang ilegal (merusak; bom dan bius) dalam kegiatan produksi, mengeksploitasi yang lemah atau miskin dan sebagainya.

Bagaimana keterkaitan unsur-unsur nilai budaya bahari dan etos kerja terhadap fenomena di atas sebagai perkembangan formasi sosial baru, diuraikan melalui penjelasan yang general dengan argumen-argumen yang teoretis dan tetap menghubungkan penjelasan-penjelasan sebelumnya.

Seperti uraian sebelumnya (periode awal modernisasi) bahwa unsur nilai budaya bahari sangat efektif melecet etos kerja aktor dalam terbentuknya formasi sosial baru, dan dengan itu pengejaran status sosial dapat tercapai. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dorongan dan lecutan nilai-nilai budaya bahari tersebut terhadap aktor setelah modernisasi semakin berkembang (akhir periode 1980-1990 sampai sekarang)? Jika penjelasan sebelumnya mengenai dorongan unsur nilai budaya bahari dan motivasi pengejaran status sosial, telah melecet aktor dalam melakukan transformasi cara produksi (*mode of production*) ke cara produksi modern hingga terbentuk formasi sosial baru dalam masyarakat. Sejatinya memungkinkan pula kelas *grassroot* kurung periode ini, untuk melakukan pengejaran status sosial yang sama sehingga tampil pada puncak piramida sosial seperti yang pernah terjadi pada masa lalu.

Namun, faktanya tidaklah demikian bagi nelayan tradisional, laju modernisasi telah menyebabkan terjadinya pengkonsentrasian wilayah tangkap antara kekuatan alat produksi tradisional dan modern yang berimplikasi tersingkirnya nelayan tradisional (kalah “adu teknologi”). “Mereka” dalam realitasnya sulit untuk mampu mereakumulasi modal dari hasil produksi yang diperolehnya, padahal akumulasi modal adalah faktor yang sangat menentukan dalam perkembangan satu usaha produksi. Nilai-nilai tradisi yang bertujuan menjaga integrasi komunal seperti pesan-pesan budaya masyarakat Bugis dari masa lampau, berupa; “...*mali siparappe, rebba sipatokkong, malilu sikainge*” (...saling mendamparkan jika hanyut, saling mengangkat jika jatuh, saling mengingatkan jika keliru) dipandang tidak lagi efektif mendinamisasi keseimbangan dalam menjaga integritas masyarakat, sehingga wujud yang muncul dalam perkembangannya yang dimotori oleh pengusaha supra lokal adalah “kompetisi” berbagai kekuatan produksi untuk mengakumulasi keuntungan sebesar-besarnya. Ini dapat dihubungkan dengan teori artikulasi bahwa kegagalan kapitalisme di negara-negara pinggiran bukan karena yang berkembang di sana adalah kapitalisme berbeda, tetapi karena koeksistensi cara produksi kapitalisme dengan cara produksi lainnya bersifat saling menghambat. Kalau kapitalisme bisa dibiarkan berkembang secara murni, dia pasti akan berhasil, tak peduli dia berkembang di negara-negara pusat ataupun pinggiran (Budiman, 1995).

Bagi nelayan *sahi* yang hanya mengandalkan tenaga fisik kepada pemilik alat produksi, pengisapan surplus (eksploitasi) oleh pelaku ekonomi elite lokal maupun dari supra lokal juga semakin kuat “mencengkeram” terhadap kelas yang tidak “berpunya”. Kondisi *sahi* yang dikategorikan sebagai kelas proletar dalam pandangan Marx, meskipun memiliki etos kerja yang tinggi, tetapi posisinya sangat sulit, karena menjadi “lahan subur” untuk di eksploitasi oleh kelas borjuis (elite ekonomi lokal dan supra lokal). Misalnya; dalam aturan sistem bagi hasil, peminjaman modal usaha dan sebagainya. Sementara untuk *sahi* yang mencoba melakukan loncatan status menjadi *punggaha lopi*, melalui sistem penyewaan/pengreditan alat-alat produksi pada pemilik modal, juga

mengalami kondisi yang sama. Pola-pola kapitalisasi telah menjadi diskursus utama dalam membangun hubungan-hubungan produksi yang berlanjut ke hubungan sosial dalam masyarakat, sehingga penggambarannya adalah “wujud ketergantungan”.

Dengan demikian, unsur-unsur nilai budaya bahari sebagai motivasi pengejaran status sosial dalam wujud etos kerja, hanya berada dalam kondisi yang tersadari, namun tersadari pula dalam diri aktor untuk sulit mencapainya. Ini didasari oleh adanya keterbatasan-keterbatasan yang mereka dimiliki serta hambatan-hambatan struktural yang tidak dapat mereka ditembus. Diskursus utama dalam interaksi sosial masyarakat telah berada pada loncatan pencapaian status sosial kepemilikan harta benda (*to'sugi*), tanpa harus lagi berpikir atau mempertanggungjawabkan dalam masyarakat bagaimana proses itu berlangsung dalam memperoleh status sosial yang dimaksud. Artinya pada kurun periode ini, nilai jujur (*lempu*), kerja keras (*reso*), cerdas (*amaccang*), patuh (*asitanjang*), *siri* (malu dan harga diri) bukan lagi sebagai isu-isu konstan dan benar-benar menjadi sasaran perhatian bagaimana aktor mengarahkan dan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi sebagaimana pendasaran nilai-nilai budaya lokal. Tetapi jalan pintas untuk mencapai status sosial yang dimaksud melalui kredit produksi, pemboman, ataupun pembiusan dalam kegiatan produksi, justru menjadi isu-isu penting dalam hal produksi, distribusi, akumulasi dan pemakaian aset ekonomi.

Berikut penuturan informan, tokoh masyarakat:

“..sekarang ini yang paling bernilai dianggap masyarakat adalah menjadi to'sugi (orang kaya), yang dilihat melalui rumah bagus, perabotan, berapa perahu yang dimiliki, atau berapa banyak unit usaha yang dijalankan. Tidak dipedulikan lagi bagaimana cara memperolehnya, apa dia merusak atau tidak. Sudah tidak lagi dikatakan ma'siri (malu) untuk berkata atau berlaku tidak jujur, merusak laut atau memeras nelayan yang tidak punya modal. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana caranya memperoleh hasil banyak dengan mudah untuk mengumpulkan uang. Sekarang sudah hilang pesan-pesan dari orang tua kita dulu untuk selalu jujur,

matanre'siri (menjaga harga diri) atau sipatokkong (saling membantu untuk berhasil)."

Hal ini diinterpretasikan akibat keterikatan (*embeddedness*) peran yang saling mendukung antara kapitalis tradisional (elite ekonomi lokal) dan kapitalis supra lokal (pengusaha modal) melalui pola-pola kapitalisasi yang dijalankan. Hasil aliansi telah mempengaruhi konfigurasi kelembagaan lokal sehingga tumbuh menjadi kebudayaan baru yang mendukung terciptanya perubahan konstruksi sosial ke cara pandang kapitalisme (individualistis). Nilai-nilai lokal sebagai warisan tradisi yang dulunya mampu mendinamisasi sebagai kekuatan integratif dalam masyarakat komunal, kini realitasnya hanya tinggal sebagai romantisme masa lalu, yang tidak lagi menjadi nilai sosial dominan yang dihargai dalam pandangan masyarakat nelayan Pulau Kambuno kurun periode ini. Kondisi ini dapat dihubungkan dengan studi Szanton (1985) ketika meneliti "*Moralitas Kontingen*" masyarakat nelayan Estancia di Filipina, bahwa orang Cina sebagai "orang luar" dapat dengan leluasa memodali nelayan setempat dengan imbalan membeli seluruh hasil penangkapan dengan 10-20 persen di bawah harga pasar. Nelayan lokal membenarkan perilaku mereka karena adanya ketergantungan yang tercipta dan mereka (orang Cina) dibebaskan dari keterikatan dengan berbagai kewajiban moral, kehidupan sosial yang umum karena keberadaan mereka dipandang hanya mencari uang sehingga pola-pola yang di impor ini menjadi pola umum yang berkembang mendegradasi nilai-nilai lokal yang telah ada sebelumnya.

Perubahan melalui agen pembangunan (pemerintah) berupa segala bentuk aturan (regulasi), bantuan modal dan sarana produksi, penyediaan infrastruktur pulau untuk kegiatan nelayan baik dari pra-produksi sampai pada pasca produksi, dapat dikatakan tidak tersedia (terfasilitasi) atau terpedulikan, sehingga nelayan *grassroot* tidak memiliki pilihan lain untuk dapat bertahan (*survive*) atau tumbuh dan berkembang (*develop*), selain harus merelakan dirinya untuk terseret oleh pola-pola kapitalisasi. Ironisnya, aturan-aturan hukum formal yang sudah ada selama ini yang semestinya dalam tataran implementasi menciptakan keseimbangan dan

keteraturan dalam masyarakat (*common people*) justru tampil sebaliknya. Pemihakannya kepada sekelompok orang (pengusaha kapitalis), diduga karena telah terjadi aliansi yang kuat melalui kolusi antara penguasa, elite ekonomi lokal dan pengusaha supra lokal.

Dalam perkembangannya, penerapan nilai-nilai budaya bahari oleh aktor yang memotivasi etos kerjanya, hanya pada konteks kepatuhan saja sebagai klien yang memiliki ketergantungan penuh kepada patron dalam hubungan-hubungan produksi yang terjadi. Tidak ada lagi “cita-cita besar” mengenai “pengajaran status sosial” dalam kondisi tersadari dan tersadari pula untuk mencapainya. Situasi ini, dimanfaatkan dengan baik oleh pemilik modal (elite ekonomi lokal dan supra lokal; patron) dalam melegitimasi pola kapitalis melalui bentuk patronase. Sehingga pola hubungan produksi dalam wujud “ketergantungan” terpahami oleh klien sebagai nilai-nilai tradisi yang masih tetap dipertahankan. Makna *siri* sebagai penegakan kepatutan, mengalami degradasi dalam implementasinya. Rasionalisasi, tindakan instrumental yang berorientasi kepada pengakumulasian keuntungan tidak lagi memperdulikan efek yang ditimbulkan (dehumanisasi dan deekologis).

Catatan kritiknya, adalah: dalam perkembangan modernisasi, telah terjadi pendegradasian nilai-nilai tradisi, terjadi ketergantungan pada sains modern, pengetahuan asli tergusur, dominannya nilai-nilai kapitalis sementara nilai asli mengalami erosi, keterkungkungan psikologis masyarakat yang marginal melalui inferioritas dalam menghadapi pola-pola kapitalis dan disorganisasi kepribadian akibat konflik akut nilai tradisional dengan nilai modern (kapitalis). Lecutan etos kerja aktor (nelayan *grassroot*) yang bersumber dari nilai-nilai budaya tidak mampu lagi menjadi stimulus akibat halangan yang sifatnya struktural baik dari kurangnya perhatian pemerintah maupun hasil aliansi yang semakin kuat antara pemilik modal supra lokal dan elite ekonomi aras lokal. Hanya elite ekonomi lokal saja yang mampu mengalami *contest mobility* karena kemampuannya dalam persaingan dan perannya sebagai kelas komprador yang sekaligus juga sebagai pengusaha.

Pemikiran pembangunan pulau-pulau kecil yang relevan dalam menstimulasi investasi, teknologi dan manajemen harus bersifat lokalitas yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal melalui pendekatan partisipatoris (menjadikan masyarakat sebagai aktor pembangunan), mengakomodir kebutuhan *common people (local need)* melalui *mangement by culture* dan pengembangan potensi sumber daya local (*local resource*) melalui *management by objective* yang kesemuanya “dikawal” dengan aturan yang mengakomodir kepentingan dan keberpihakan kepada nelayan *grassroot* sehingga tercipta konsep kesetimbangan dalam masyarakat.

Modernisasi dalam rangka pengembangan cara produksi nelayan pulau-pulau kecil, harus relevan dengan atau merujuk pada konteks formasi sosial lokal, dan bukan merupakan deduksi atau derivasi kebijaksanaan pembangunan nasional sehingga dapat menumbuhkan-kembangkan (memfasilitasi) kelompok-kelompok kecil nelayan tradisional dalam kegiatan produksi yang berkomplementasi terhadap peningkatan semangat masyarakat (*community spirit*), hubungan harmoni masyarakat (*comunity harmony relationship*) serta kesejahteraan masyarakat (*social well-being*).

BAB VI

REDEFINISI KAPITALISME DALAM KOMUNITAS

Narasi Kecil Membongkar Dominasi Kapitalisme dalam Perspektif Schumpeterian

Salah satu topik hangat sosiologi untuk masyarakat *late modernity* saat ini, maupun sosiologi untuk masyarakat sedang berkembang adalah isu ketimpangan penguasaan modal, kesenjangan kaya dan miskin, penguasaan dan monopoli alat-alat produksi serta pasar masih tetap menjadi diskursus yang hangat. Nampak bahwa kedigdayaan kapitalisme semakin sulit terbantahkan. Ia seakan tak pernah menunjukkan tanda-tandanya menuju keruntuhan. Kondisi ini seolah-olah menolak berbagai prognosis beberapa ilmuwan bahwa lambat laun kapitalisme bakal mengubur dirinya sendiri (seperti; Karl Marx dan Frederich Engels yang optimis bahwa kapitalisme akan menuju kehancuran dikarenakan kontradiksi internalnya). Meskipun demikian, kajian-kajian tentang kapitalis yang terus “berganti tubuh dan wajah” terus dilakukan dan dikembangkan dengan berbagai varian perspektif. Beberapa kalangan Marxis masih ada yang konsisten mempertahankan analisis ortodoksi-Marxian dan ada pula yang telah menempuh jalur revisionisme.

Oleh karena itu, diskursus sekarang, dalam menganalisis cara menghentikan kapitalisme yang kini mendominasi dunia melalui perebutan kekuasaan modal dapat dilihat dalam dua pendekatan. *Pertama*, kelompok

ortodoksi-Marxian, kalangan ini melihat bahwa perebutan kekuasaan modal akan dilakukan dengan jalan merobohkan penguasa modal/kapitalisme oleh kaum pekerja, pengambil-alihan surplus-*value* (baca: uang dan profit) yang selama ini berakumulasi di kantong para kapitalis akan dirampas oleh kaum proletar secara supresif untuk disamaratakan dengan proses revolusioner, *violence* dan berdarah-darah. Cara ini sudah tidak banyak lagi didiskusikan karena dianggap cara yang primitif dan klasik. *Kedua*, kelompok yang belakangan ini mengembangkan sebuah analisis yang lebih kontekstual, sambil tetap berpijak pada premis umum Marxisme. Beberapa pemikir intelektual Marxis yang masih gigih menganalisis perkembangan kapitalisme mutakhir di antaranya, Karl Koch, Edward Benstein, George Lukacs, Gramsci, Louis Althusser, Doug Lorimer, Ernest Mandel, proponen pemikir Mazhab Frankfurt, hingga belakangan diteruskan oleh Henry Levebre dan David Harvey. Mereka mengajukan analisis yang amat kaya dalam pengembangan Marxisme. Dari mereka, kita memperoleh beragam analisis dan pengetahuan seputar kritik kapitalisme yang sangat luar biasa. Terakhir, salah satu tokoh yang tak bisa dinafikan kontribusinya terhadap pengembangan ide Marxisme dewasa ini ialah Joseph A. Schumpeter. Salah satu karyanya yang kini menjadikan rujukan bagi kalangan intelektual Marxis kontemporer adalah *Capitalism, Socialism and Democracy* yang terbit pada tahun 1942.

Schumpeter mengawali karya *Capitalism, Socialism and Democracy* dengan sebuah pertanyaan yang menggelitik: dapatkah kapitalisme bertahan? Hampir semua isi dalam karya tersebut hendak menjawab pertanyaan dimaksud. Meski berpendapat bahwa kapitalisme tidak akan dapat bertahan, bagi Schumpeter, pertanyaan “dapatkah kapitalisme bertahan?” sebetulnya kurang menarik. Baginya, yang terpenting dari setiap upaya prognosis sosial adalah bukan jawaban “ya” dan “tidak” yang meringkas fakta-fakta dan argumentasi yang menuntunnya, melainkan menyodorkan fakta-fakta yang mendukung argumentasi itu sendiri.

Melalui inovasi, kapitalisme lama akan ditumbangkan oleh kapitalisme baru melalui struktur dari dalam. Seturut tesis *creative-destruction*, Prof. Schumpeter mengatakan bahwa kapitalisme hanya

berganti-ganti tubuh dan wajah. Esensinya tetap sama. Kapitalisme adalah penguasaan kejayaan modal di segelintir orang. Ia tetap hidup hanya kini berpindah tubuh. Masih ingat kejayaan kapitalisme perkebunan jaman VOC di Indonesia? Bentuknya adalah perkebunan besar dengan tanah sebagai fokusnya. Sejak tumbanganya VOC dan badan sejenis lainnya, Eropa beralih dari penguasaan tanah. Mereka kemudian berjaya dengan kapitalisme keuangan dan kapitalisme berbasis industri manufaktur (dimulai oleh industri transportasi/mobil, kapal, pesawat, alat berat dst) masuk ke era 2010-an, kini kapitalisme berada di tangan bisnis berbasis *e-commerce*, *e-learning*, *e-media*, *e-trading*, yang kesemuanya terarah dan berbasis digital/komputer/teknologi-informasi. Penguasaan tetap di segelintir orang.

Salah satu cara pandang yang progresif, bahwa *innovativeness* dan kekuatan pikiran adalah senjata utama untuk mengubah struktur perekonomian. Dalam satu perspektif Schumpeter melihat bahwa ada faktor eksternal yang dapat turut menghancurkan sistem kapitalisme tersebut, yakni hadirnya kaum intelektual. Schumpeter masih mengharapkan hadirnya kelompok-kelompok intelektual yang melakukan dan mengatur “kebencian” terhadap kapitalisme, merawat sikap keperpihakannya, dan turut menyuarakan hak-hak kaum tertindas (marginal/proletar). Dia harus tampil dalam garda terdepan untuk memimpin massa rakyat dalam upaya menghancurkan sistem kapitalisme atas dasar gerakan kolektif (meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat lokal). Bagi Schumpeter, massa rakyat tidak pernah mengembangkan ide-ide dan inisiatifnya sendiri untuk melawan dan juga tidak memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan serta mengubahnya menjadi tindakan konsisten. Oleh karenanya, sebuah keharusan bagi kaum intelektual untuk menawarkan dirinya sebagai pemimpin massa rakyat yang selama ini terus hidup di bawah kungkungan kelas borjuasi. Karena melihat pentingnya kehendak dan tekad revolusioner itu ada dalam hati sanubari proletariat, untuk menumbangkan kekuasaan kaum borjuasi yang telah merasuk dalam semua dimensi kehidupan masyarakat. Karena itu, diperlukan kelompok intelektual revolusioner yang mengerjakannya.

Peran intelektual juga diurai lebih lanjut oleh Gramsci, salah satu filsuf dari Italia. Antonio Gramsci memosisikan intelektual dalam pengertian Schumpeterian. Antonio Gramsci melihat amat penting sekali bahwa keberadaan kaum intelektual bukanlah di menara gading, melainkan harus menyatu dan berada di sisi kaum marginal (buruh, kaum miskin kota). Demikian juga partai politik, tidak semata bertugas menyuntik ke dalam diri kelas kaum marginal suatu kesadaran yang benar, melainkan juga harus membuat mereka sadar akan implikasi kesadaran yang sudah dibangun dan mereka miliki. Semua ini terkait dengan upaya kaum marginal untuk menancapkan hegemoni kultural dan ideologis sebelum memulai perebutan kekuasaan politik. Dalam pandangan Gramsci, perubahan sosial bukan semata-mata upaya menyangkut masalah kekuatan ekonomi dan fisik, juga melibatkan perebutan wilayah kebudayaan dan ideologi. Ini sebagai suatu upaya masyarakat bawah untuk membebaskan diri mereka dari budaya kaum borjuis dan untuk membangun nilai budaya sendiri bersama-sama dengan kaum tertindas dan lapisan intelektual yang berpihak. Dalam konteks inilah bisa dikatakan bahwa supremasi intelektual merupakan prakondisi tercapainya kekuasaan politik.

Schumpeter memakai istilah “intelektual” dalam arti luas yang secara praktis ekuivalen dengan “intelegensia” atau semua kelas terdidik. Pada umumnya setiap kelas utama memproduksi lapisan intelektualnya sendiri yang bertugas mempertahankan kesinambungan kelas masyarakatnya dan menyatukan mereka berdasarkan solidaritas tertentu. Bagi Schumpeter, intelektual tidak sekadar menjelaskan kehidupan sosial dari luar berdasarkan kaidah-kaidah saintifik, tapi juga mengekspresikan perasaan dan pengalaman nyata yang tidak bisa diekspresikan oleh masyarakat. Intelektual bagi Schumpeter adalah mereka yang mampu merasakan emosi, semangat dan apa yang dirasakan massa rakyat, memihak kepada mereka dan mengungkapkan apa yang dialami dan kecenderungan-kecenderungan objektif masyarakat. Singkatnya, Schumpeter menyerukan sanjungan dan sikap tunduk yang seringkali dipertontonkan oleh kaum intelektual harus ditanggalkan serta mengambil sikap dan tindakan perlawanan untuk memerangnya. Kewajiban bagi

kaum intelektual untuk mewakili umat manusia yang menderita, dan selama kaum intelektual tidak memainkan perannya dalam turut memperjuangkan kepentingan kaum massa rakyat, maka penghisapan selamanya akan abadi, dan kaum intelektual tidak lebih dari penonton orkestra yang turut menyaksikannya.

Mendorong Reaksi Baru Nelayan Lokal terhadap Kapitalisme

Realitas nelayan berhadapan dengan sistem kapitalisme yang mengharuskan mereka terlibat di dalamnya, sejatinya mampu didorong dalam memanfaatkan celah-celah kapitalisme untuk tetap mempertahankan subsistensinya. Kesadaran dan upaya baru dalam menciptakan sendiri sistem yang dapat dipakai sebagai jaring pengaman subsistensinya dengan jalan mengandalkan pola perikanan yang dianggap sederhana serta sifat kegotong-royongan yang melekat pada masyarakat pesisir dan pulau kecil tetap harus dioptimalkan secara kontekstual. Nelayan lokal harus memiliki sikap yang tegas terhadap kehadiran sistem kapitalis yang melanda kehidupan komunitas nelayan. Kemampuan untuk menentukan sikap dalam memanfaatkan sistem tersebut **harus** dimiliki baik secara individu maupun kolektif, misalnya mengadopsi teknik-teknik perikanan tangkap yang dapat menguntungkan dan juga tidak ragu-ragu untuk tidak menggunakan apabila sistem tersebut dianggap merugikan subsistensinya.

Kehadiran instrumen kapitalisme yang tidak mengubah fungsi *punggaha* yang dijadikan acuan bagi nelayan untuk melakukan fungsi-fungsi produksi walaupun dalam pelaksanaannya sering terjadi konflik antara instrumen kapitalisme dengan institusi lokal, tetap harus menjadi kekuatan lokal (terlepas dari kekurangan dan kelebihan) dalam menjalankan usaha perikananannya. Seperti yang telah teruraikan dalam penjelasan bab sebelumnya bahwa, konstruksi teoretis moda produksi terdiri dari dua bentuk, yaitu: *pertama*, moda produksi pra-kapitalis (*pre-capitalist mode of production*) merupakan bentuk dari ekonomi suatu masyarakat yang secara historis mendahului kemunculan kapitalis, dalam beberapa masyarakat muncul secara terus menerus bersama moda produksi kapitalis yang dicirikan komunisme primitif, kuno, asiatic, dan feodal.

Selain itu, moda produksi pra-kapitalis juga terkonteskan dalam hal kekuatan politik yang digunakan untuk mengekstrak surplus ekonomi, tidak merdeka, dan tidak didasarkan pada pekerja upah bebas; dan *kedua*, moda produksi kapitalis (*capitalist mode of production*) merupakan bentuk ekonomi yang dicirikan oleh modal (kapital) dimiliki dan diawasi sendiri, serta pekerja dibeli dengan pembayaran upah oleh kapitalis. Konstruksi moda produksi kapitalis adalah menciptakan keuntungan dari penjualan komoditas dalam pasar bebas yang kompetitif, bersifat dinamis dan menjadi dasar pada kompetisi akumulasi modal (Jary and Jary 2000; Agusta 2000).

Oleh karena itu, dalam realitasnya kehadiran moda produksi kelas (kapitalis) tidak dapat dihalangi dan semakin kuat, dan juga keberadaan moda produksi nonkapitalis masih tetap diperlukan untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal (nelayan). Dalam eksistensi moda produksi yang berbeda ini dapat menghubungkan kelas sosial berbeda yang sama-sama berada dalam suatu populasi yang dalam perkembangannya dapat simetris, asimetris, atau konflik (Ray, 2002). Fenomena konflik nelayan pulau kecil, hasil penelitian Arief, *at all* (2020) menemukan bahwa isu-isu konflik terkait dengan pemanfaatan ruang wilayah perairan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain karena adanya kesenjangan teknologi penangkapan ikan; Perbedaan teknik penangkapan ikan; Faktor sosial ekonomi masyarakat; Pelanggaran jalur penangkapan; Penggunaan alat/bahan yang tidak ramah lingkungan; Minimnya hasil tangkapan (*over exploited*) bagi nelayan lokal; dugaan menurunnya ketersediaan sumber daya perikanan; Pelanggaran jalur tangkapan bagi nelayan pendatang; Masalah atau dianggap masalah untuk nelayan *halle* (nelayan pendatang) bagi nelayan lokal; Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum, serta belum optimalnya sosialisasi dari berbagai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan laut dan sumber dayanya. Beberapa hal inilah yang di duga kuat sebagai pemicu konflik yang terjadi selama ini bagi nelayan lokal (nelayan di Kepulauan Selayar) *versus* nelayan pendatang (nelayan

dari berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan, seperti; Bulukumba, Sinjai, Bone, Takalar dan Sebagainya).

Dengan demikian, nelayan lokal dalam tingkat tertentu harus dapat mengimbangi kekuatan-kekuatan kapitalisme dalam kehidupan mereka, bagaimana nelayan lokal berperilaku dalam mengantisipasi perkembangan yang tidak menguntungkan usaha perikananannya seperti selektivitas yang begitu tinggi terhadap pemakaian teknologi moderen, akses permodalan dan mengakses pasar agar kepentingan mereka tidak dirugikan oleh kapitalis yang selalu mencari keuntungan dari usaha perikanan yang mereka jalankan. Gejala penggunaan kekuatan dan hubungan produksi dikalangan nelayan lokal yang selalu berhadapan dengan kekuatan kapitalisme baik dalam penggunaan teknologi penangkapan yang moderen maupun dengan kekuatan akses terhadap modal dan pasar yang tidak menguntungkan pihak nelayan telah menjadi realitas ideologi kapitalis terhadap aktivitas produksi komunitas nelayan melalui eksploitasi dan alienasi. Gambaran itu melalui terciptanya ketergantungan yang tinggi terhadap modal dan teknologi penangkapan, penentuan harga komoditas ikan yang ditentukan sepihak oleh pemilik modal, serta upah tenaga kerja yang tidak adil. Demikian juga dengan paham kaum pemodal yang menganggap bahwa nelayan tidak lebih dari sekadar barang komoditas di pasar. Dalam banyak kasus contoh dari alienasi adalah cara pemodal memperlakukan nelayan secara semena-mena, tindakan penarikan alat-alat produksi secara semena-mena jika nelayan tidak mampu membayar atau mendapatkan hasil produksi yang ditargetkan oleh pemodal. Tidak adanya bantuan pelayanan kesehatan (akibat risiko pekerjaan) yang diberikan serta perlakuan buruk lainnya yang dilakukan oleh pihak pemodal (borjuis) membuat nelayan lokal mengalami banyak kesulitan dalam kehidupannya.

Kondisi ini harus menjadi tesis untuk meredefinisi kembali reaksi baru nelayan lokal terhadap sistem kapitalis yang terjadi dalam komunitas bahwa dengan kemampuan dan kemandirian nelayan lokal tidak harus menjadi tergantung, dieksploitasi dan teralienasi oleh keberadaan sistem kapitalisme tersebut. Model statisme-organik harus ditumbuhkan sebagai ideologi yang bukan kapitalis dan sosialis. Konteks ini bisa kita pandang

sebagai munculnya rasionalisasi ideologis bagi kelompok nelayan lokal dalam menghadapi lingkungan sosial dan ekonomi mereka. Rasionalisasi ini merupakan suatu keharusan bagi kelompok-kelompok nelayan lokal untuk mempertahankan diri dan juga untuk mengejar kepentingan ekonomi mereka. Komunitas nelayan lokal harus ditingkatkan kapasitasnya dalam menemukan strategi ataupun kiat dalam menghadapi kekuatan-kekuatan eksternal yang tidak memihak atau tidak menguntungkan padanya. Sehingga kekhawatiran bahwa kehadiran sistem kapitalisme yang akan membuat ketergantungan (*dependent*) yang begitu besar pada komunitas nelayan tidak lagi memiliki landasan yang begitu kuat. Nelayan lokal harus terfasilitasi dalam memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan segala potensi lingkungan yang ada di sekitarnya. Penetrasi capital (modal dan teknologi) yang bersumber dari luar (eksternal) harus diimbangi oleh kekuatan dari dalam (internal) melalui peningkatan penyadaran sosial. Penyadaran sosial dimaksudkan sebagai proses di mana masyarakat miskin/tidak berdaya difasilitasi untuk mencapai kesadaran kritis tentang situasi masalah/hambatan pemenuhan kebutuhan yang mereka hadapi dengan struktur sosial di mana mereka berada. Pada komunitas nelayan lokal, proses ini sangat penting dalam kondisi kemiskinan dan ketakberdayaan yang terjadi sebagai efek dari kapabilitas pengelolaan sumber daya yang rendah dan konstruksi sosial yang eksploitatif. Tindak lanjut dari penyadaran sosial yang terjadi, akan mengantarkan mereka pada tekad peningkatan kapabilitas dan kapasitas yang menjadi modal dalam mengorganisasikan diri dalam kelembagaan, untuk saling konsultasi dan bertukar pengalaman serta mencari pemecahan-pemecahan masalah secara bersama-sama. Selama ini, kecenderungan mereka untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan lebih banyak secara individual, walaupun terorganisasi (*punggaha-sahi*) orientasinya lebih menguntungkan pihak patron.

Kapasitas dan kapabilitas nelayan lokal yang tumbuh dalam konteks kesadaran sosial dan kemampuan dalam mengorganisasikan diri akan memudahkan berbagai program yang sifatnya menghantarkan tambahan sumber daya ke dalam masyarakat, seperti alokasi kredit, asistensi teknis,

ataupun pemberian sarana produksi dapat berjalan efektif. Konkretisasi dari konteks tersebut, dapat diujicobakan dalam pemberian bantuan fasilitas produksi dalam kelompok nelayan (*working group*). Konsep pengintegrasian tanggungjawab masing-masing anggota kelompok dalam kelompok kerja dapat diwujudkan dalam menyeimbangkan peranan dari masing-masing anggota kelompok kerja sehingga keberdayaan dalam kerangka kemandirian berdasarkan proses pengalaman yang dijalani (*experience based learning process*) dapat dirasakan secara merata dalam kelompok kerja berdasarkan nilai-nilai yang dianut. Misal; ada anggota kelompok yang bertanggungjawab dalam mengelola bantuan mesin, bantuan peralatan tangkap, bantuan kapal dan bantuan modal produksi. Kondisi ini menjadi penting dalam mendistribusikan tanggungjawab sehingga masing-masing anggota kelompok merasa menjadi bagian dari bantuan yang diberikan berdasarkan peranan yang diemban. Masing-masing anggota kelompok dapat memainkan peranan berdasarkan tanggung jawabnya dan memiliki hak untuk mengontrol dari keseluruhan bantuan yang diberikan, sehingga daya dalam kelompok kerja akan terbangun baik secara individu maupun secara kolektif. Demikian juga peleburan komunitas nelayan (kelompok-kelompok nelayan) dalam penggunaan teknologi informasi berbasis digital (*e-commerce, e-trading* dan sebagainya) sudah menjadi keharusan baik dari aspek produksi maupun distribusi.

Kondisi ini akan tercapai jika: (1) penciptaan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*); (2) penguatan potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*); dan (3) perlindungan (*protecting*) terhadap pihak yang lemah agar jangan bertambah lemah serta mencegah terjadi persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Menurut Ohama (2001) bahwa kemampuan masyarakat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya dapat dikonseptualisasi sebagai kemampuan mengolah unsur-unsur pemberdayaan yang disebut sebagai kemampuan pengorganisasian diri (*self organizing capability*). *Self organizing capability* adalah kemampuan suatu masyarakat melakukan penyesuaian

hubungan di antara ketiga unsur keberdayaan, yaitu; *Recources* (sumber daya/R) sebagai unsur yang dikelola seperti, perahu, alat tangkap, nelayan, laut dan sumber daya alamnya, teknologi informasi; *Organization* (organisasi/O) unsur yang mengelola sumber daya (R), seperti ikatan *punggaha-sahi*, kelompok nelayan, pelepas uang (*pappalele*), koperasi, pedagang ikan, LSM dan; *Norm* (norma/N) aturan yang dipakai dalam organisasi (O) dalam mengelola sumber daya (R), seperti aturan pemerintah, aturan lokal, aturan bagi hasil dan sebagainya. Ketika perubahan eksternal dan internal berlangsung sedemikian rupa maka masyarakat (komunitas nelayan lokal) tersebut dapat bertahan *survive* dalam kondisi perubahan dimaksud atau bahkan tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan berdasarkan spirit zaman, termasuk pengembangan potensi pertumbuhan ekonomi baru di pulau-pulau kecil seperti yang terjadi di Negara Karibia, mampu memberikan kontribusi 12 persen bagi PDB dan dikunjungi 100 juta turis setiap tahunnya. Sehingga masyarakat pulau kecil tidak lagi ada pada situasi “*menjadi nelayan adalah satu-satunya jalan hidupnya*” (Arief *et al.*, 2021) karena pulau-pulau kecil juga sangat potensial sebagai komponen budidaya perikanan, ladang peternakan dan perkebunan seperti di pulau kecil Texel Belanda dan Newfoundland di Kanada. Pulau-pulau kecil tersebut tidak hanya mampu menyuplai kebutuhan pangan dan energi sendiri, tetapi juga mampu mendistribusikan kebutuhan pangan baik dalam bentuk *raw material* maupun bentuk olahan industri ke pulau induknya (*mainland*) dengan nilai ekonomi yang tinggi (Brookfield, H.C. 1990).

Dengan demikian, ketika suatu masyarakat, komunitas, kelompok, individu dapat tampil sebagai pelaku utama dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya maka akan melahirkan efek keseimbangan tiga kekuatan dalam masyarakat yang bisa saling menguatkan dan menguntungkan satu sama lain, yaitu; pemerintah (sebagai agen perubahan), masyarakat sipil (nelayan lokal yang berdaya) dan pengusaha (pemodal) dengan itu reaksi baru terhadap sistem kapitalisme (sebagai sebuah keniscayaan) akan terdefiniskan ulang (simetris) dalam komunitas.

EPILOG

Konstruksi modernitas melalui penetrasi kapital terhadap cara produksi masyarakat nelayan pulau kecil, menyebabkan terbentuknya formasi sosial baru yang ditandai oleh pergeseran formasi sosial cara produksi subsisten ke cara produksi komersial pada periode 1970-an sampai periode 1980-an yang berlanjut ke cara produksi kapitalis sebagai cara produksi yang dominan pada periode 1990-an. Dalam eksistensinya, keterlibatan nelayan pulau kecil terhadap kelembagaan perkreditan nonformal dalam mengakses faktor produksi sebagai salah satu bentuk adaptasi yang dilakukan dalam mentransformasikan cara produksinya (modernisasi cara produksi) mengharuskan mereka (nelayan lokal) melebur dalam pola-pola kapitalisasi. Posisi ketergantungan nelayan *grassroot* terhadap pemilik modal sangat terpresentasikan (tereksploitasi) karena nelayan membayar mahal dari seharusnya untuk faktor input (produksi) dan menerima harga/upah yang lebih rendah dari yang seharusnya dari output (hasil produksi) yang dihasilkan.

Konteks nilai budaya lokal yang melahirkan etos kerja pada awalnya cukup efektif berkomplementasi terhadap transformasi cara produksi. Namun, seiring dengan perkembangan telah mengalami inferioritas karena dominannya nilai-nilai kapitalis yang superior sehingga terjadi disorganisasi kepribadian antara nilai berbasis tradisi dengan nilai modern yang berbasis kapitalisme.

Membongkar dominasi kapitalisme dalam penguasaan faktor-faktor produksi dan pasar, *innovativeness* dan kekuatan pikiran (kapasitas dan kapabilitas) harus dimunculkan sebagai senjata utama untuk mengubah struktur perekonomian tersebut. Dalam satu perspektif Schumpeter melihat bahwa ada faktor eksternal yang dapat turut menghancurkan sistem kapitalisme, yakni hadirnya kaum intelektual. Kehadiran kelompok-

kelompok intelektual diharapkan terus melakukan dan mengatur “kebencian” terhadap kapitalisme, merawat sikap keperpihakannya, dan terus turut menyuarakan hak-hak kaum tertindas (marginal/proletar). Dia harus tampil dalam garda terdepan untuk memimpin massa rakyat dalam upaya menghancurkan sistem kapitalisme atas dasar gerakan kolektif (meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat lokal). Kondisi ini harus menjadi tesis untuk meredefinisi kembali reaksi baru nelayan lokal terhadap sistem kapitalis yang terjadi dalam komunitas bahwa dengan kemampuan dan kemandirian nelayan lokal tidak harus menjadi tergantung, dieksploitasi dan teralienasi oleh keberadaan sistem kapitalisme tersebut.

Kapasitas dan kapabilitas nelayan lokal harus ditumbuhkan dalam konteks kesadaran sosial dan kemampuan dalam mengorganisasikan diri, melalui penyesuaian hubungan antara; *Recources* yang dimiliki sebagai unsur yang dikelola, *Organization* yang terbentuk sebagai unsur yang mengelola sumber daya serta *Norm* aturan yang dipakai dalam organisasi mengelola sumber daya, sehingga akan efektif dari berbagai program yang sifatnya menghantarkan tambahan sumber daya ke dalam masyarakat.

Dengan demikian, memfasilitasi dan mendorong pertumbuhan serta perkembangan cara produksi masyarakat (nelayan) pulau kecil, harus relevan dengan atau merujuk pada konteks formasi sosial secara kontekstual dan bukan merupakan deduksi atau derivasi kebijaksanaan pembangunan nasional secara general. Konteks ini dapat menumbuhkembangkan (memfasilitasi) kelompok-kelompok kecil nelayan tradisional dalam kegiatan produksi yang berkomplementasi terhadap peningkatan semangat masyarakat (*community spirit*), hubungan harmoni masyarakat (*community harmony relationship*) serta kesejahteraan masyarakat (*social well-being*). Dengan itu, pulau kecil dapat menjadi pertumbuhan ekonomi baru dengan segala potensinya (pariwisata, budidaya, peternakan, perkebunan, industri dan sebagainya) sehingga masyarakat pulau kecil tidak lagi ada pada situasi “*menjadi nelayan adalah satu-satunya jalan hidupnya*”, tetapi masyarakat pulau kecil ada pada situasi yang mampu menyuplai kebutuhan pangan dan energinya sendiri, bahkan mampu

mendistribusikan kebutuhan pangan baik dalam bentuk *raw material* maupun bentuk olahan industri ke pulau induknya (*mainland*) dengan nilai ekonomi yang tinggi sehingga reaksi terhadap kapitalisme akan terdefiniskan ulang.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik (Ed). 1993. *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*. LP3ES. Jakarta.
- Abu Hamid. 1986. *Pertumbuhan Pemukiman Masyarakat di Lingkungan Perairan Daerah Sulawesi Selatan*. Departemen P & K, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Abu Hamid. 2003. *Pelestarian Budaya Kebaharian Masyarakat Sulawesi Selatan (Suatu Tinjauan Antropologi)*. Makassar.
- Agusanty, Harnita. 2004. *Prakarsa dan Partisipasi Masyarakat Nelayan dalam Eksploitasi dan Konservasi Sumber daya Hayati Perairan di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Desa Tamasaju, Kec. Galesong Utara)* (Tesis). PPS-UNHAS. Makassar
- Akimichi, Tomoya. 1991. *Coastal Foragers i Transition*. Senri Ethnological Studies No. 42, National Museum of Ethnology.
- Amir, Baso dan J. Sugiharsono. 1996. *Industri Perikanan Berjaya, Jika Bisa Impor Kapal*. Swasembada. Jakarta.
- Anonim. 1965; 1975; 1985. *Statistik Perikanan Tahun 1965; Tahun 1975; Tahun 1985*. Dinas Perikanan TK I. Sulawesi Selatan. Ujung Pandang.
- Anonim. 1980; 1982; 1984; 1986; 1988; 1990. *Statistik Perikanan Tahun 1980; Tahun 1982; Tahun 1984; Tahun 1986; Tahun 1988; Tahun 1990*. Dinas Perikanan TK II. Kabupaten Sinjai. Sulawesi Selatan.
- Anonim. 1999. *Statistik Perikanan 1999*. Ditjen Perikanan. Jakarta.
- Anonim. Anonim. 2000. *Potensi Sumber daya Perikanan Pulau Sembilan*. PSTK Unhas. Makassar.

- Arief, A. Adri. 2002. *Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Maros (Studi Kasus Desa Pajukukang, Kec. Maros Utara)*. (Tesis) PPS-UNHAS. Makassar.
- Arief, A. Adri. 2009. Menemukan Strategi untuk Mendukung Implementasi Pengelolaan Sumber daya Pulau-Pulau Kecil Secara Terpadu dan Berkelanjutan di Sulawesi-Selatan. (DIPA DP2M DIKTI. STRANAS BACTH II). Makassar
- Arief, A. Adri., Fachry, M. E., Agustina, H., & Mustafa, M. D. 2015. Identification and Analysis of Social Capitalin Flying Fish Fishermen Group for Coastal Community Development in Takalar Regency (Case Study Bontomarannu Village, South Galesong District). *Journal of Fisheries International*, 10(1), 1–5.
<http://medwelljournals.com/abstract/?doi=jfish.2015.1.5>
- Arief, A. Adri., & Haeruddin, H. 2017. Pengaruh Modal Sosial Terhadap Kinerja Kelompok Usaha Perikanan Tangkap Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara). *Jurnal IPTEKS Pemanfaatan Sumber daya Perikanan*, 2(4).
- Arief. A. Adri., Mustafa D., Agusanty. Harnita. 2019. Study Of Social Aspect In Marine Protect Area Liukang Tangaya District, South Sulawesi, Indonesia. *Journal Bioscience Research*, March, 1828050.
- Arief, A. Adri, Agusanty, H., & Mustafa, M. D. 2020. Fishermen Conflict and the Resolution for Using Fisheries Resources Utilization at Selayar Islands, South Sulawesi. *ECISOFiM (Economic and Social of Fisheries and Marine Journal)*, 7(2), 228–238.
- Arief, A. Adri., Benny, A.J., Mustafa M. D 2020. Model Pengembangan dan Desain Pengelolaan Sosial Ekonomi Taman Wisata Perairan sebagai Tabungan Ikan Masyarakat Kepulauan di Kabupaten Pangkep. (BOPTN-UNHAS). Makassar.
- Arief, A. Adri, Agusanty, H., & Mustafa, M. D. 2021. Kepercayaan dan Pamali Nelayan Pulau Kambuno di Sulawesi Selatan. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 5(1), 56–68.

- Arief, Sritua dan Sasono, Adi. 1984. *Ketergantungan dan Keterbelakangan*. Sinar Harapan. Jakarta.
- Arif, Sritua. 1990. *Dari Prestasi Pembangunan sampai Ekonomi Politik*. UI Press. Jakarta.
- Astanty, W. F., & Arief, A. Adri. 2014. Analisis Peran Kapasitas Perempuan Pesisir dalam Aktivitas Budidaya Rumput Laut (*Eucheuma cottonii*) Di Kabupaten Takalar (Studi Kasus di Desa Punaga Kec. Mangarabombang). *Jurnal Galung Tropika*, 3(3), 149–158.
- Awang, San Afri. 2003. *Model Formasi Sosial dalam Kebijakan Pengelolaan Sumber daya Hutan di Indonesia*. Makalah disampaikan pada Seminar Dies natalis ke-39 Fakultas Kehutanan UGM di Gedung Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- Bakrie, Zakaria. 2000. *Pemberdayaan Kelembagaan Nelayan*. Opini. Harian Fajar. (22 April 2000). Makassar.
- Bannett, J. 2001. *Present Day Identity in a Historical Context, an Observation on the Historical and Cultural Context of Eastern Indonesian Fishermen*. Paper in Workshop on Indonesian Fishing in North Australian Waters: Questions of Access and Utilization. 4pp.
- Bell, W; P. d'Ayala and P. Hein, ed. 1990. *Sustainable Development and Environmental Management of Small Island*. Man and the Biosphere Series, Volume 5. Unesco and the Parthenon Publishing Group.
- Bellah, R.N. 1975. *Tokugawa Religion*. Beacon Press. Boston
- Bendix, 1985. "Apa itu Modernisasi?" di dalam "Modernisasi: Masalah Model Pembangunan. Rajawali Pers. Jakarta.
- Berger, P.L. dan T. Luckman. 1991. *Tafsir Sosial atas Realitas* (Terjemahan). LP3S. Jakarta.
- Blau, Peter M. dan Joan W. Moore. 1972. "Sociology" dalam Bert F. Hoselitz, ed., *A Reader's Guide to the Social Science*. The Free Press. New York.

- Boeke, J.H 1983. *Prakapitalisme di Asia*. Sinar Harapan. Jakarta. Boeke, J.H. 1946. *Osterse Economic*. N.Service. Den Haag.
- Bolong, Zainuddin. 2001. *Studi Partisipasi Politik Masyarakat di Kawasan Pantai (Kasus Pangkajene dan Galesong Utara)*. (Disertasi). PPS-Unhas. Makassar.
- Braverman, Hary. 1974. *Labour and Monopoly Capital*. Monthly Review Press. New York.
- Brookfield, H. C. 1990. An Approach to Islands. In Bell, W., P. d'Ayala and P. Hein(Eds). *Sustainable Development and Environmental Management of Small Islands*. UNESCO, Paris. P. 23-33.
- Budiman. Arief. 1995. *Teori-Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Gramedia. Jakarta.
- Clammer, John. 2003. *Neo-Marxisme Antropologi: Studi Ekonomi Politik dan Pembangunan*. (Terjemahan). Sadasiva. Yogyakarta.
- Clark, John R., 1996. *Coastal Zone Management; Handbook*; Lewis Publishers, NewYork.
- Clark, P. 2000. *Ashmore Reef, A Preliminary Survey for Archeological Sites*. MAGNT. Research Report No.8: 13 pp.
- Clifton, R. Dan Wharton, JR. 1969. *Subsistence Agriculture and Economic Development*. Aldine Publishing Company. Chicago.
- Collier, William, Kabul Santoso, Soentoro, Rudi Wibowo. 1996. *Pendekatan Baru dalam Pembangunan Pedesaan di Jawa: Kajian Pedesaan Selama Dua Puluh Lima Tahun*. Yayasan Obor. Jakarta.
- Creswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. Sage Publication, Inc. California.
- Dahuri, Rohmin. 1998. *Pendekatan Ekonomi-Ekologis Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Berkelanjutan dalam Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*. Kerja sama Departemen Dalam Negeri, Direktorat Pengelolaan Sumber daya Lahan dan Kawasan-TPSA-BPPT-Coastal Resources Management Project (CRMP) USAID.
- Dahuri, Rohmin. 2001. *Prospek Investasi dan Bisnis di Sektor kelautan dan Perikanan*. Makalah. Jakarta.

- DKP. 2019. *Statistik Perikanan 2019*. Dinas Perikanan TK I, Sulawesi Selatan. Makassar.
- Damanhuri, Didin S. 1996. *Deregulasi Perikanan dan Revolusi Biru*. Republika, 15 Juli 1996. Jakarta.
- _____. 1997. *Tinjauan Kritis atas Aliran-Aliran Pemikiran Ekonomi Dunia dan Implikasinya bagi Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Indonesia: dalam Tinjauan Kritis Ideologi Liberalisme dan Sosialisme*. Badan Diklat Depdagri. Jakarta.
- _____. 1998. *Lingkungan Makro Struktural dari Proses Pembangunan Pertanian di Indonesia. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Agribisnis dan Agroindustri sebagai Sektor Unggulan dalam Rangka Solusi Kritis*. 23 April 1998. Jakarta.
- Darwis, Muhammad. 1988. *Mistik bagi Kaum Nelayan di Desa Siddo*, dalam Muchlis Paeni (ed.) *Dimensi Sosial Kawasan Pantai. Proyek Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat Pantai (P3MP)*. Unhas. Makassar.
- Dhouadi, Mahmoud. 1994. *Capitalism, Global Humane Development and the Other Underdevelopment*, dalam L. Sklair (Ed), *Capitalisme and Development*. Routledge. New York.
- Ditjen Perikanan Tangkap, 2002. *Bahan Dialog Dirjen Perikanan Tangkap dengan Sub Komisi Kelautan dan Perikanan DPR-RI*. DKP, Jakarta.
- Errington, Shelly. 1977. "Sirik, Darah dan Kekuasaan Politik dalam Kerajaan Luwu Zaman Dulu". Bingkisan Kebudayaan Sulawesi Selatan, Tahun I No. 2. Ujung Pandang.
- Evers, Hans-Dieter. 1998. "Globalisasi dan Kebudayaan Ekonomi Pasar", Prisma, No. 5. LP3ES. Jakarta.
- Fahrudin, A. 1996. *Studi Perbandingan Sistem Bagi Hasil Perikanan Lokal dengan Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan di Kecamatan Labuah, Jawa Barat*. Buletin Ekonomi Perikanan Nomor 2 Tahun ke-2. Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan IPB. Bogor.

- Fink, Hans. 1990. *Filsafat Sosial: Dari Feodalisme Hingga Pasar Bebas*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Firth, Raymond. 1975. *Malay Fisherman: The Peasant Economic*. W.W. Norton and Company. New York.
- Fisher, S et al. 2000. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. The British Council. Jakarta.
- Fox, J.J. 2000. *Maritime Communities in The Timor and Arafura region: Some Historical and Anthropological Perspectives*. Mod. Quarternary Re. SE. Asia. 16: 337-356. Balkema, Rotterdam.
- Geertz, Clifford 1978. *The Interpretation of Culture: Selected Essays*. Basic Books Inc. Publishers. New York.
- _____. 1963. *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. University of California Press. California.
- Gerungan, W.A. 1991. *Psikologi Sosial*. PT. Eresco Bandung. Bandung.
- Goodwing, James R. 1990. *Crisis in the World's Fisheries: Peopel Problem and Policies*. Standford University Press. California.
- Habermas, J., 1988. *Letigation Crisis*. Polity Press. Cambridge Oxford.
- Hayami, Yujiro dan Masao Kikuchi. 1987. *Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi terhadap Perubahan Kelembagaan di Pedesaan*. Yayasan Obor. Jakarta.
- Heeren, H.J. 1972. *Pelayaran dan Pengaruh Kebudayaan Makassar Bugis di Pantai Utara Australia*. Bhratara Aksara. Jakarta.
- Hefner, R.W.(Ed). 1998. *Market Cultures: Society and Morality in the New Asia Capitalism*. Westview Press. Boulder.
- Heilbroner, R.L. 1991. *Hakikat dan Logika Kapitalisme*, (Terjemahan). LP3ES. Jakarta.
- Husken, Frans. 1998. *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980*. Grasindor. Jakarta.
- Inkeles, Alex dan Smith, David H. 1974. *Bocoming Modern*. Harvard University Press. Cambridge.
- Iver, Robert dan Chfarles H. Page. 1957. *Society: An Introductory Analysis*. Rinerhart and Company, Inc. New York.

- Johannes, R. E. 1981. *Word of Lagoon; Fishing and Marine Lore the Palau District of Micronesia*. University of California. London.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Robert MZ Lawang). Gramedia. Jakarta.
- Kahn, Joel S. 1974. *Economic Integration and "the Peasant Economic: The Minangkabau (Indonesia)*. University of London. London.
- _____. 1975. *Marxist Anthropology and Peasant Economics: A study of the Social Structures of Underdevelopment* (dalam Clanmer. 2003).
- Karim, Muhammad. 2003. *Problem Ekonomi-Politik kemiskinan Nelayan*. Opini Harian Umum Sore Sinar Harapan. Edisi 20 Agustus 2003. Jakarta.
- Kluckhohn, C. 1962. *Values and Value Orientations in The Theory of Action*. Harpen & Row Publisher. New York.
- Kluckhon dan Stodbeck. 1961. *Variation in Value Orientation*. Row, Peterson & Co. Illinois.
- Koentjaraningrat, 1994. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia. Jakarta.
- _____. 1985 (ed). *Rintangan-Rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*. Sajogyo & Sajogyo, Pudjiwati. Sosiologi Pedesaan. Jilid. 1. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- _____. 1988. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. LP3ES. Jakarta.
- Kusnadi. 2002. *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*. LKIS. Yogyakarta.
- Kusnadi. 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*. LKIS. Yogyakarta.
- Kusumaatmadja. Sarwono. 2003. *Visi Maritim Indonesia: Apa Masalahnya?* (<http://www.sarwono.net>). 03 Agustus 2005.
- Kusumastanto, Tridoyo. 2004. "Menggugat" *Revolusi Biru*. Opini. Sinar Harapan (23 November 2004). Jakarta.
- Kyong-Dong, Kim. 1994. *Confucianism and Capitalist Development in East Asia*, dalam L.Skalir (Ed), *Capitalism and Development*. Routledge. New York.

- Lampe, Mungsi dan Darmawan, Salman. 1996. *Laporan Studi Analisis Sosial Ekonomi untuk Program Perencanaan Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang di Sulawesi Selatan*, LIPI-Unhas. Ujung Pandang.
- Lampe, Mungsi. 2003. *Budaya Bahari dalam Konteks Global dan Modern (Kasus komunitas-komunitas Nelayan di Indonesia)*. Makalah disampaikan pada Kongres Kebudayaan, Bukittinggi. Sumatra Barat 20-23 Oktober 2003.
- Lapian. AB. 1987. *Orang Laut, Bajak laut, dan Raja Laut*. (Disertasi) PPS-UGM. Yogyakarta.
- Lerner, R.E. 1988. *Western Civilization*, Volume 2, W.W. Norton & Company. New York-London.
- Lewangka, Osman. *Kemungkinan Peningkatan Teknologi Sarana Angkutan Bagi Nelayan Lepas Pantai di Desa Pantai Sulawesi Selatan*. Hasil Penelitian Lembaga Kajian Pedesaan Unhas Bekerjasama DEPDAGRI RI. Ujung Pandang.
- Lincoln, Y.S, dan Guba. E.G. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Sage Publication. Beverly Hills.
- Lubis, Rusdian. 1992. "Factor Influencing the Success of Fisherman's Cooperative in South Sulawesi" dalam Prosiding Lokakarya Pengkajian Peluang dan Tantangan Perikanan KTI. Litbang Perikanan dan USAID/FRDB. Jakarta.
- Marx, Karl. 1965. *Capital*. Vol. I and II. J.M. Dent and Sons Ltd. London.
- Matsuda, Yoshiaki. 1998. *Study on Capital Formation in Coastal Fishing Villages of Java, Indonesia*. A Socio-Economic Study on Indonesia Fisheries Development, Bogor Agriculture University. Bogor.
- Mattulada, 1983. *Kebudayaan Bugis-Makassar*. Penerbit Djambatan. Jakarta
- Mattulada. 1975. *Latoa: Satu Lukisan terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. (Disertasi). Universitas Indonesia. Jakarta.
- McClelland, D.C. 1987. *Memacu Masyarakat Berprestasi*. Intermedia. Jakarta.

- McKnight, C.C. 1976. *The Voyage to Marege': Macassan Trepangers on Northern Australia. 7. When did The Industry Begin?*. Melbourne Univ. Press. 93-99.
- Morril, W.T. 1980. *Ethnoithology of The Cha-Cha*, dalam Alexander Spohr (ed.), *Maritime Adaptation*. University of Pittsburgh Press. London
- Mosher, T. Arthur. 1966. *Getting Agriculture Moving*. Frederick A. Praeger, Inc., Publishers. New York.
- Mubyarto, 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*. BFFE. Yogyakarta.
- Mubyarto, Loekman Sutrisno, dan Dove. 1984. *Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi-Antropologi di Dua Desa Pantai*. Penerbit Rajawali. Jakarta.
- Muhaimin, Yahya A. 1990. *Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950–1980*. LP3S. Jakarta.
- Munn, N. L. 1962. *Introduction To Psychology*. Houghton, Mifflin Co. Boston.
- Nataatmadja, Hidayat. 1982. *Krisis Global Ilmu Pengetahuan dan Penyembuhannya*. Penerbit Iqra. Bandung.
- Nishimura, Asahitaro (Eds). 1973. *A Preliminari Report on Current Trend in Marine Anthropology*. Waseda University. Tokyo.
- Nontji. Anugrah. 1993. *Laut Nusantara*. Penerbit Djambatan. Jakarta.
- Nur Indar, Yusran, 2003. *Penyelarasan Kewenangan Pengelolaan Wilayah Laut Sulsel*. (Opini). Haria Fajar, 29 Maret 2003. Makassar.
- Nur Indar, Yusran. 2005. *Illegal Fishing di Sulawesi Selatan (Suatu Kajian Sosial Ekonomi)*. Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Perikanan dan Kelautan 8 perguruan Tinggi. Makassar: 26-28 Agustus 2005.
- _____. 2005. *Sistem Sosial dan Kelembagaan Masyarakat Tradisional dalam Pengelolaan Pesisir dan Laut*. Makalah disajikan pada *Training on Integrated Coastal Zone Management (ICZM)*, 10-19 Agustus 2005. Gorontalo.
- Nurland, Farida. 1987. “Peranan Wanita Nelayan dalam Keluarga dan Rumah Tangga du Masyarakat Pantai Lappa, Sinjai Utara”,

- dalam Mukhlis ed., *Dimensi Sosial Kawasan Pantai*. P3MP Unhas. Ujung Pandang.
- Nybakken, W. James. 1988. *Biologi Laut Suatu Pendekatan Ekologis*. Gramedia. Jakarta.
- Parson, Talcott. 1951. *The Social System*. Ameriand Publishing. New Delhi.
- Peterse, J.N. 1995. *Globalization as Hybridization* dalam M. Featherstone, S. Lash, dan R. Robertson (Eds). *Global Modernities*. Sage. London.
- Polanyi, Karl. 1957. *The Great Transformation: the Political and Economic Origins of Our Time*. Beacon Paperback. New York.
- Pollnack. Richard B. 1988. *Karakteristik Sosial dan Budaya dalam Pengembangan Perikanan Berskala Kecil* dalam Cernea, Michael, *Mengutamakan Manusia dalam Pembangunan: Variabel-Variabel Sosiologi dalam Pembangunan Pedesaan*. UI Pers. Jakarta.
- Ponsioen, J.A. 1969. *The Analysis of Social Change Reconsidered*. The Haque. Mouton.
- Pontoh. 1999. *Masyarakat Marginal*. Narasi. Yogyakarta.
- Popkin, Samuel. 1979. *The Rational Peasant: The Political Economic of Rural Society in Vietnam*. California University Pres. California.
- Portes, Alejandro. 1976. *On the Sociology of National Development: Theories and Issues*. American Journal of Sociology 82.
- Purwati, Pradina. 2005. *Teripang Indonesia: Komposisi Jenis dan Sejarah Perikanan*. Oceana. Volume XXX. Nomor 2. LIPI. Jakarta.
- Rahim, Rahman. 1992. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Lephass. Ujung Pandang.
- Ramly, A, Muawiyah. 2004. *Peta Pemikiran Karl Marx (Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis)*. Lkis Pelangi Aksara. Yogyakarta.
- Rand, A. 1970. *Capitalism: The Unknown Ideal*. A Signet Book. New York.
- Rasyid. Abd. 2001. *Analisis Kondisi Oceanografi untuk Pengembangan Potensi Perikanan di Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai*. Lembaga Penelitian Unhas. Makassar.

- Robertson, Roland. 1995. *Globalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeny*, dalam M. Featherstone, S. Lash, dan R. Robertson (Eds). *Global Modernities*. Sage. London.
- Rogers M, Everett. 1996. *Modernization among Peasant*. Halt Rinehard and Winston. New York.
- _____. 1962. *Diffusion on Innovation*. Free Press. New York. Rostow.
- W.W. 1989. *The Take off Into self Sustained Growth in Etzioni Amitai and Eva Etzioni-Halevly. Social Change*. Mc. Graw Publishing. London.
- Russel, James W. 1989. *Mode of Production in World History*. London and New York: Routledge.
- Saefullah, A. Djadja. 1992. *The Impact of Population Mobility on Two Village Communities of West Java, Indonesia*. Ph.D. Thesis, The Flinders University of South Australia.
- Saefullah, A. Djadja. 1995. *Mobilitas Penduduk Desa-Kota: Jembatan Modernisasi Pedesaan*. Prisma, No.10. LP3ES. Jakarta.
- Saith, M. 1986. *Location, Lingkage and Leage: Malaysian Rural Industialization Strategies in National and International Perspective*. The Hagues: ISSAS.
- Sajogyo, Pudjiwati. 1985. *Sosiologi Pembangunan*. Fakultas Pascasarjana IKIP Jakarta dan BKKBN. Jakarta.
- Sallatang, M. Arifin. 1982. *Pinggawa-Sawi; Suatu Studi Sosiologi Kelompok Kecil*. Jakarta: Depdikbud.
- _____. 1976. *Desa Pantai di Sulawesi Selatan dan Strategi Pengembangannya*. Team Studi Pedesaan Unhas. Ujung Pandang.
- _____. 1981. *Hubungan antar Ponggawa dengan Sawi: Suatu Studi Kasus pada Sebuah Kelompok Ponggawa-Sawi di Desa Pabbiringa, Kec. Binamu, Jeneponto Sulawesi Selatan*. Proyek Penelitian Universitas Hasanuddin. Ujung Pandang.
- _____. 1983. *Pinggawa-Sawi; Suatu Studi Sosiologi Kelompok Kecil*. (Disertasi). Unhas. Ujung Pandang.
- _____. 1984. *Inventarisasi Nilai, Norma, Kepercayaan, Sistem Pengetahuan, Teknologi dan Simbolisasi*. Proyek Penelitian Universitas Hasanuddin. Ujung Pandang.

- _____. 2000. *Rona Sosio Budaya dalam Pokok-Pokok Pikiran Pembangunan Kelautan Indonesia*. Makalah. Makassar.
- _____. 1994. *Ekologi Manusia (Human Ecology)*. Makalah di Sajikan dalam Kursus Dasar-Dasar Analisis Dampak Lingkungan Tipe A, 25 Januari 1999. Universitas Halueleo. Kendari.
- _____. 1987. *Perubahan Perilaku dan Cara Berpikir*. Pidato Pengukuha Guru Besar Tetap dalam Ilmu Sosiologi Pedesaan Universitas Hasanuddin. LEPHAS. Ujung Pandang.
- Sallatang, M. Arifin; Amien, M; Nessa, N; Noor, A. 1999. *Kerangka Kebijakan Pengembangan Pola Ilmiah Pokok Universitas Hasanuddin*. Makassar.
- Salim, Agus. 2002. *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*. Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta.
- Salman, Darmawan. 1997. *Peningkatan Produksi dan Penajaman Ketergantungan (Kasus Modernisasi Perikanan di Sulawesi Selatan)* Majalah Pusat Dinamika Pembangunan UNPAD. Bandung.
- _____. 1993. *Perkembangan Organisasi Produksi dan Mobilitas Okupasi pada Masyarakat Industri Perahu di Sulawesi Selatan*. (Tesis) PPS-IPB. Bogor.
- _____. 2002. *Tahap Transisi dalam Transformasi Industrial pada Komunitas Maritim di Sulawesi Selatan: Studi tentang Pergeseran Hubungan Industrial pada komunitas Industri Pembuatan Perahu, Wisata Pantai dan Penangkapan Ikan*. (Disertasi) PPS-UNPAD. Bandung.
- _____. 2006. *Jagad Maritim: Dialektika Modernitas dan Artikulasi Kapitalisme pada Komunitas Konjo Pesisir di Sulawesi Selatan*. Innawa. Makassar.
- Sanday, Peggy R. 1974. “*Female Stasis in the Public Domain*” dalam Michelle Zimbalist Rosaldo ed., *Women. Culture and Society*. Stanford University Press. Stanford.
- Sanderson, Stephen. 1993. *Sosiologi Makro*. Radjawali Press. Jakarta.

- Sasono, Adi. 1980. *Tesis Ketergantungan dan Kasus Indonesia*. Prisma. 12 Desember 1980. Jakarta.
- Satria, Arif. 2000. *Modernisasi Perikanan dan Mobilitas Sosial Nelayan: Studi Kasus Kelurahan Krapyak Lor, Kodya Pekalongan Jawa Tengah*. (Tesis). PPS-IPB. Bogor.
- _____. 2001. *Dinamika Modernisasi Perikanan: Formasi Sosial dan Mobilitas Nelayan*. Humaniora Utama Press. Bandung.
- Schoorl, J.W. 1993. *Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*. Gramedia. Jakarta.
- Schumpeter, Joseph. 1934. *The Theory of Economic Development*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Schumpeter, Joseph A. 1942. *Capitalism, Socialism, and Democracy*. 1 ed. New York: Harper and Brothers Publishers.
- Scott. 1981. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. LP3ES. Jakarta.
- _____. 1985. *Moral Ekonomi Petani* (Terjemahan). LP3ES. Jakarta.
- _____. 1972a. "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia" *The American Political Science Review* 66 (1).
- Sherif, Muzaffer. 1956. *An Outline of Social Psychology*. Harper and Brother. New York.
- Sitorus, Marlyn Tua. 1999. *Pembentukan Golongan Pengusaha Tenun dalam Masyarakat Batak Toba*. (Disertasi). PPS-IPB. Bogor.
- Smith, I.R. 1979. *A Research Framework for Traditional Fisheries*. ICLARM. Manila.
- Soekanto, Sarjono. 1989. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Gramedia. Jakarta.
- Soekanto, Sarjono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soewardi, Herman. 1996. *Transformasi Agraris-Industrial di Indonesia: Suatu Pendekatan Sosiologis dalam H.Soewardi, Nalar, Kontemplasi dan Realita*. PPS-Unpad. Bandung.
- Soewarsono dan Alvin Y. So. 1991. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. LP3ES. Jakarta.

- Soewito; Soesono, Slamet; Budiono, Rustam. 2000. *Sejarah Perikanan Indonesia*. Yasamina. Jakarta.
- Strauss, C.L. 1971. "The Family", dalam H.L. Shapiro (Ed), *Man, Culture and Society*. Oxford University Press. New York.
- Sudharto, P.H. 1982. *Motorisasi dan Perubahan Sosial*. Laporan Penelitian PLPIIS. Unhas. Ujung Pandang.
- Sudirman dan Mallawa, A. 2004. *Teknik Penangkapan Ikan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sujatmiko, Iwan Gardono. 1996. "Stratifikasi dan Mobilitas Sosial" dalam *Jurnal Sosiologi Indonesia*, No. 1 Juli 1996.
- Sularso, Aji. 2002. *Konflik Nelayan di Indonesia*. Makalah Filsafat Sains. PPS-IPB. Bogor.
- Sultan. 2005. *Menelusuri Jejak Manusia Bajo*. Makalah. Makassar.
- Summer, G.F. 1983. *Technology and Social Change in Rural Areas*. Westview Press. Boulder.
- Suseno, Frans Magnis. 2000. *Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Gramedia. Jakarta.
- Suyanto, Bagong. 1993. *Dampak Motorisasi dan Komersialisasi Perikanan terhadap Perubahan Tingkat Pendapatan, Pola Bagi Hasil dan Munculnya Polarisasi Sosial Ekonomi di Kalangan Nelayan Modern*. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial dan The Toyota Foundation. Jakarta.
- Svalastoga, Kaare. 1989. *Diferensiasi Sosial*. Bina Aksara. Jakarta.
- Swasono, Meuteia Farida Hatta. 1997. *Masyarakat Bahari di Indoensia: Masa Lalu, Masa Kini, dan Tantangan Masa Depan*, Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Membangun Kembali Peradaban Bahari Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia. 24 April 1997. Depot.
- Tahir, A.R. 1987. *Studi tentang Sistem Sosial Masyarakat Bajo, di Sulawesi Selatan dan Tenggara*. Proyek Penelitian Unhas. Ujung Pandang.
- Taryoto, Andin H. 1993. *Analisis Kelembagaan Bagi Hasil di Perikanan Laut*. Pusat Penelitian Sosial-Ekonomi Pertanian Balitbang Deptan. Bogor.

- Taylor, John G. 1979. *From Modernization to Mode of Production: A Critique of the Sociologies of Development and Underdevelopment*. The Macmillan Press. London and Basingstoke.
- Tjondronegoro, 1990. *Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial*. Prisma, Nomor 2 tahun 1990. Jakarta.
- Umar, Nasaruddin. 2005. *Potensi Genetik dan Kearifan Budaya Sulsel dalam Membangun Bangsa yang Multikultural*. Pointer dari Makalah yang disajikan dalam Pertemuan VII Saudagar Bugis-Makassar. 11 November 2005. Makassar.
- Wallace, Ruth dan A. Wolf. 1980. *Contemporary Sociological Theory: Continuing the Classical Tradition*. Prentice Hall Inc. New Jersey.
- Weber, Max. 1978. *Max Weber: Selection in Translation* (Ed: W.G. Runciman). Cambridge University Press. Cambridge.
- _____. 1985. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (Edisi Counterpoint). Cambridge University Press. Cambridge.
- Wirawan, Gandi. 2004. *Perbedaan Orientasi Nilai dan Perilaku Prosocial antara Suku Bangsa Melayu dan Suku Bangsa Tionghoa*. (<http://www.depsos.go.id/Balatbang/Puslitbang/2004>).
- Worsley, Peter. 1988. *The Three Worlds: Culture and World Development*. Weidenfeld and Nicholson. London.
- Wright, Erik Olin. 1982. *Batas-Batas Kelas dan Lokasi Kelas yang Kontradiktif* dalam Giddens, Anthony, dan David Held, *Perdebatan klasik dan Kontemporer mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Komplik*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Wuthnow, Robert. 1992. *Cultural Change and Sociological Theory*, dalam H. Haferkamp and N.J. Smelser (Eds). *Social Change and Modernity*. University of California Press. California.
- Yin, Rober K. 1996. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Yoshihara, Kunio. 1990. *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*. LP3S. Jakarta.
- Zanden, Vander James W. 1990. *Sociology: The Core*. Mc Graw Hill Publishing. London.

Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indeks

- A**
- Aborigin, 106
 Adopsi, 41, 42, 43, 67, 78, 79, 108, 133
 Agettengeng, 159, 161
 Akimichi, 110, 188
 Aktor, 10, 55, 57, 78, 108, 138, 139, 140, 146, 147, 149, 150, 152, 153, 155, 156, 157, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 169, 171, 173, 174
 Akumulasi, 16, 32, 34, 118, 170, 171, 180
 Amaccang, 10, 159, 171
 Amerika, 131
 Anakarung, 25
 Anang, 21
 Andi, v, vii, 22, 25, 159, 161, 166, 214, 216
 Apanritang, 159
 Aras lokal, 81, 82, 86, 107, 108, 113, 124, 141, 142, 143, 148, 154, 173
 Artikulasi, v, vi, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 155, 170, 199
 Asialang
 Marola, 25
 Asitinajang, 10, 159, 161
 Asugireng, 159
 Asulesanang, 159
 Ata, 11, 25, 33, 38
 Australia, 18, 105, 106, 162, 164, 193, 196, 198
 Awaraningeng, 159
- B**
- Bagang, 69
 Bage reso, 75
 Bagi hasil, 61, 62, 63, 65, 73, 75, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 117, 122, 123, 128, 136, 148, 170, 184, 192, 201, 203
 Barasanji, 23, 26, 165
 Belanda, 22, 106, 114, 184
 Bellah, 167, 190
 Bendix, 1, 190
 Bilateral, 24, 55

- Bise*, 19, 70, 133
Bius, 16, 17, 112, 113, 150, 151, 169
Boeke, 9, 135, 191
Bom, 16, 17, 169
Bone, 14, 15, 18, 43, 46, 70, 77, 81, 84, 99, 105, 111, 123, 181, 214, 215, 216
Bos, 31, 32, 43, 81, 88, 100, 101, 107, 108, 114, 123, 141, 146, 147, 151
Bubu, 40, 47, 48, 66, 71, 73, 104, 129
Budaya, vi, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 24, 28, 74, 88, 91, 106, 107, 111, 114, 133, 149, 153, 156, 157, 158, 160, 161, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 185, 188, 189, 195, 197, 199, 202, 214, 215, 216
Budaya bahari, 156, 157, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195
Budaya lokal, 6, 8, 74, 156, 158, 161, 171, 185
Budaya maritim, 214
Bugis, 2, 4, 10, 21, 22, 24, 28, 30, 33, 75, 84, 107, 156, 158, 160, 163, 166, 167, 170, 193, 195, 197, 202
- C**
- Cara produksi*, vi, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 38, 45, 47, 51, 52, 54, 55, 58,
- 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 85, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 118, 119, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 160, 161, 166, 167, 169, 170, 174, 185, 186
Caraketeng, 46
Cina, 31, 81, 82, 106, 108, 110, 113, 164, 172
Cliff, 14
Common people, vi, 23, 96, 173, 174
Creswell, 191
- D**
- Damanhuri*, 192
Desa Pulau
Bihung Pitue, 14, 18
Harapan, 14, 19, 26, 65, 72, 96, 190, 191, 194
Padaelo, 14, 18
Destructive fishing, 126, 128
Diferensiasi
Fungsional, 32, 51, 87, 88
Sosial, 137, 149, 193, 201

E

Egaliter, 2, 41, 50, 51, 66, 67, 73, 74, 83, 95, 104, 129, 164
 Ekonomi moral, 108, 135, 141, 146, 147, 148, 152, 153
 Ekowisata, 15
 Eksogami, 25
 Eksploitasi, 8, 51, 63, 71, 74, 77, 94, 97, 102, 103, 109, 118, 123, 127, 133, 139, 154, 168, 170, 181, 183, 188
 Elite lokal, 71, 109, 112, 113, 119, 124, 129, 147, 151, 152, 153, 154, 155, 170
 Empirik, 28
 Endogami, 25
 Etnis, 74, 134
 Etos kerja, vi, 8, 9, 10, 72, 73, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 169, 170, 171, 173, 185, 188
Extended family, 55, 66, 67, 73, 86, 87, 104, 139, 148

F

Fenomena, 4, 5, 24, 82, 88, 97, 105, 107, 109, 111, 124, 129, 134, 135, 142, 147, 149, 150, 151, 164, 165, 169, 180
 Feodal, 8, 88, 114, 179
 Filipina, 21, 172
 Filosofi, 7, 160, 163

Formasi sosial, v, vi, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 38, 45, 47, 51, 52, 65, 66, 71, 73, 85, 86, 88, 101, 103, 104, 105, 107, 110, 114, 129, 131, 132, 135, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 149, 151, 155, 156, 161, 166, 167, 169, 174, 185, 186, 190, 200

G

Gae, 29, 43, 69, 77, 78, 79, 85, 90, 91, 99, 104, 107, 129, 141, 143, 145, 147, 161
 Geertz, 114, 193
Grassroot, vi, 4, 19, 96, 124, 151, 169, 172, 173, 174, 185
 Guru Baca, 26

H

Hardware, 30, 38, 49, 126
 Hayami, 1, 193
 Hipotesis, 20
 Holistik, 11
 Hongkong, 20, 81, 110, 112
 Hubungan produksi, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 31, 45, 50, 51, 54, 55, 56, 65, 67, 73, 77, 86, 87, 89, 95, 96, 101, 104, 108, 110, 117, 118, 119, 120, 123, 125, 129, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 142, 145, 146, 147, 151, 152, 154, 168, 171, 173, 181

Huller, 56

I

Illegal Fishing, 196

Imanensi, 27, 39, 90, 91

Induktif, 11

Industrialisasi, 166

Infrastruktur, 9, 42, 45, 102, 125,
141, 155, 172

Inovasi, v, 41, 52, 67, 79, 176

Integral, 128, 140

Intisari, 86, 116, 154

Invention, 41

J

Jala, 40, 47, 48, 66, 69, 71, 83, 85,
104, 129, 143

Jarangka, 41, 47

Jepang, 20, 40, 52, 66, 70, 73, 78,
81, 111, 131

Jolloro, 19, 104, 120, 129

Jonson, 20

Juragan, 11, 26, 30, 32, 33, 34, 56,
58, 63, 80, 81, 82, 83, 87, 88,
90, 92, 93, 95, 96, 98, 100, 102,
108, 120, 121, 122, 123, 146,
152

Juragan lopi, 11, 26, 30, 33, 34, 56,
58, 63, 80, 81, 82, 83, 87, 88,
90, 92, 93, 95, 96, 98, 100, 102,
108, 120, 121, 122, 123, 146,
152

Juru

Arus, 15, 18, 46, 48, 67, 72, 76,
80, 109, 116, 144, 174

Masak, 59, 89

Mesin, 32, 42, 43, 52, 56, 59,
60, 61, 62, 63, 66, 77, 78, 82,
83, 87, 89, 91, 92, 93, 98, 99,
101, 102, 104, 120, 122, 123,
137, 138, 140, 141, 183

Mudi, 59, 63, 87, 117, 119, 162

K

Kabupaten Sinjai, 14, 43, 44, 68,
69, 188, 189, 197, 215

Kahn, 51, 73, 103, 132, 142, 194

Kapitalisasi, 7, 8, 70, 77, 78, 88,
103, 125, 139, 140, 144, 145,
151, 152, 154, 168, 169, 171,
172, 185

Kapitalisme, v, vi, 3, 5, 6, 9, 12, 62,
97, 103, 110, 114, 118, 125,
128, 131, 132, 143, 144, 148,
149, 152, 156, 166, 170, 172,
175, 176, 177, 179, 181, 184,
185, 187, 193, 199, 202

Katinting, 19

Kekuatan produksi, 3, 7, 41, 45, 47,
52, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 76,
78, 83, 86, 87, 104, 105, 110,
114, 129, 132, 135, 137, 138,
139, 140, 141, 143, 145, 162,
170

- Koeksistensi, vi, 3, 6, 9, 11, 131, 132, 133, 134, 135, 141, 142, 143, 149, 150, 151, 166, 170
- Kolusi, 173
- Komersial, 2, 73, 74, 103, 116, 125, 139, 149, 150, 185
- Kompetitif, 66, 95, 150, 180
- Komprador, 88, 113, 129, 152, 154, 173
- Kompresor, 78, 84, 85, 104, 108, 114, 120, 129, 141, 143, 145, 147
- Konflik, 6, 16, 22, 56, 72, 113, 126, 127, 133, 150, 151, 166, 169, 173, 179, 180, 193, 194, 201, 214
- Korea, 81
- Kualitatif, 10
- Kuantitatif, 70, 109, 123
- L**
- Ladung*, 40, 47, 49, 66, 81, 82, 85, 104, 162
- Lambere*, 29
- Lambo*, 44
- Lampe, 5, 14, 17, 84, 195
- Langkoe, 16, 110, 118, 124
- Lappa, 20, 43, 44, 45, 56, 77, 87, 189, 196
- Lepa-lepa*, 41, 47, 66, 70, 71, 104, 129
- Life history*, 11, 55
- Local knowledge*, 9, 16, 27, 38, 39, 45, 49, 58, 153, 169, 215
- Luwu, 192, 215
- M**
- Main problem*, 6
- Makassar, vii, 2, 4, 10, 20, 21, 28, 31, 33, 40, 43, 75, 81, 82, 100, 106, 111, 146, 156, 163, 166, 167, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 199, 201, 202, 214, 215
- Mammaulid*, 23
- Mandar, 2, 4, 28
- Marginalisasi, 70, 77, 125
- Mariculture*, 15
- Marx, 8, 64, 114, 119, 122, 131, 134, 170, 175, 195, 197, 201
- Marxis, 6, 36, 45, 71, 88, 128, 154, 175, 176
- Massunna*, 23
- Masyarakat bahari, 158, 201
- Matrilineal, 25
- Mattulada, 24, 33, 167, 195
- Meillassoux, 9, 131, 132, 138
- Minangkabau, 194
- Miskin, 4, 125, 136, 166, 168, 175, 178, 182
- Mistik, 147, 192
- Mitos, 26, 28, 91, 110, 147
- Modal sosial, 113, 134, 142, 189, 215

Modernisasi, v, vi, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 34, 38, 39, 42, 43, 47, 52, 65, 67, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 83, 85, 103, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 151, 155, 156, 168, 169, 170, 173, 174, 185, 190, 198, 199, 200

Modernisasi perikanan, vi, 2, 4, 5, 6, 8, 38, 39, 42, 43, 52, 70, 77, 78, 79, 83, 85, 128, 140, 149, 168, 199, 200

Monopoli, 76, 96, 121, 125, 149, 175

Moral ekonomi, 135, 137, 138, 142

Motorisasi, v, 11, 42, 43, 44, 45, 50, 52, 54, 59, 60, 63, 65, 67, 70, 78, 82, 133, 136

Muro ami, 52, 143

N

Nelayan tradisional, vi, 5, 8, 70, 72, 73, 77, 101, 136, 144, 147, 151, 170, 174, 186

Neo-Marxis, 6, 45, 71, 88, 128, 191

Nilai-nilai sosial, 39, 138, 158, 160, 161, 162, 165, 168

Nontji, 196

Nuclear family, 24, 47, 51, 55, 67, 73, 104, 129, 139

Nur Indar, 77, 134, 196

Nurland, 196

O

Opu, 25, 106, 159

Orde Baru, 103, 128

Otonomi Daerah, 203

P

Pallopi, 59, 60, 63, 87

Panambe, 40, 41, 52, 53, 66, 69, 73, 85, 104, 129, 143

Pancing, 16, 35, 40, 47, 66, 70, 71, 73, 104, 113, 117, 118, 129, 143, 150

Panja, 69

Pataripang, 84

Paternalistik, 8, 139

Patrilineal, 25

Patronase, 5, 173

Patron-klien, 9, 95

Penetrasi kapital, vi, 54, 65, 77, 78, 102, 131, 137, 141, 144, 149, 167, 185

Petty commodity, 65

Phinisi, 44

Polarisasi Sosial, 201

Popkin, 75, 79, 87, 108, 137, 141, 152, 197

Produksi

Kapitalis, vi, 2, 6, 7, 8, 12, 42, 64, 101, 102, 103, 105, 109, 114, 116, 119, 125, 128, 130, 131, 132, 134, 135, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147,

- 148, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 156, 172, 173, 175, 176,
179, 180, 181, 185, 186
- Komersialis, 42, 65, 67, 73, 105,
130, 142, 201
- Modern, 1, 5, 6, 7, 8, 27, 28, 38,
39, 41, 43, 45, 54, 63, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 76, 77, 79, 82,
86, 87, 89, 97, 104, 107, 128,
129, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 145, 147, 150, 151,
160, 164, 168, 169, 170, 173,
185, 193, 194, 195, 201
- Subsisten, 2, 41, 42, 51, 66, 67,
72, 73, 105, 130, 137, 149,
150, 153, 154, 185
- Tradisional, vi, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 26, 30, 39, 45, 47, 55, 67,
68, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 81,
82, 88, 91, 101, 103, 104,
106, 114, 129, 131, 133, 134,
136, 137, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 146, 147, 148, 150,
151, 153, 154, 160, 168, 170,
172, 173, 174, 186, 196
- Proletar, 101, 102, 170, 176, 177,
186
- Proteksis, 134
- Pseudo-hierarki, 73, 75, 76
- Pulau
Batanglampe, 14
- Kambuno, 11, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 22, 28, 34, 35, 36,
39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49,
51, 52, 66, 70, 78, 79, 81, 82,
83, 84, 90, 100, 101, 104,
107, 109, 110, 111, 112, 113,
123, 124, 127, 129, 132, 141,
142, 156, 160, 164, 166, 167,
172, 189, 215
- Kanalo I, 14
- Kanalo II, 14
- Kodingareng, 14
- Liang-liang, 14, 15, 16, 113
- Pulau Sembilan, 4, 11, 14, 15, 16,
17, 20, 22, 43, 44, 82, 105, 111,
112, 120, 188, 197
- Pulau-pulau kecil, v, 2, 3, 4, 5, 6, 9,
10, 11, 13, 17, 21, 22, 36, 44,
71, 82, 102, 107, 124, 148, 174,
180, 184, 189, 191, 203, 216
- Punggaha, 2, 11, 25, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 50, 56, 57, 58, 61, 62,
64, 65, 81, 87, 88, 91, 92, 94,
95, 96, 98, 99, 100, 101, 102,
108, 120, 121, 123, 139, 146,
160, 162, 167
- Bonto, 11, 30, 31, 33, 34, 40,
81, 87, 88, 91, 92, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102,
105, 108, 120, 121, 122, 123,
128, 146, 160
- Kecil, v, vi, vii, 2, 3, 4, 5, 6, 9,
10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21,

- 22, 24, 30, 33, 34, 35, 36, 40, 44, 47, 48, 53, 56, 58, 67, 71, 79, 81, 82, 87, 88, 92, 95, 96, 98, 100, 102, 104, 107, 108, 117, 124, 129, 133, 142, 148, 174, 175, 179, 180, 184, 185, 186, 189, 191, 197, 198, 203, 214, 216
- Laut, vi, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 47, 48, 49, 53, 54, 59, 70, 73, 80, 82, 83, 88, 94, 98, 100, 102, 105, 106, 110, 115, 135, 136, 142, 149, 154, 164, 168, 169, 171, 180, 184, 190, 195, 196, 197, 201
- Punggaha-sahi*, 28, 29, 30, 32, 50, 93, 95, 182, 184
- Punggawa*, 2, 5, 28
- R**
- Rasional, 33, 57, 75, 79, 87, 108, 137, 138, 141, 142, 152
- Realitas sosial, 128, 157
- Reduksi, 11, 108
- Regulasi, 128, 141, 149, 155, 172
- Relasi sosial, 134, 168
- Relevansi, 1, 10
- Rengge*, 69, 78
- Reproduksi, 51, 109
- Reputasional, 34
- Resistensi, 77, 143
- Reso*, 10, 75, 76, 159, 160, 161, 162, 171, 189, 191, 215
- Revolusi biru, 1, 4, 192, 194
- Revolusi Hijau, 202
- Rey, 9, 131, 132, 138
- Rogers, 41, 79, 198
- Rostow, 1, 7, 66, 198
- Russel, 7, 198
- S**
- Sahi*, 2, 4, 8, 11, 19, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 73, 80, 81, 83, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 115, 119, 122, 123, 128, 136, 139, 142, 146, 148, 152, 161, 162, 170, 182, 184
- Sajogyo, 77, 194, 198
- Salinitas air, 15
- Sallatang, 2, 26, 27, 28, 29, 70, 91, 125, 126, 136, 158, 198, 199
- Salman, 1, 4, 5, 9, 42, 64, 131, 132, 138, 166, 195, 199
- Sanderson, 1, 199
- Savety first*, 65
- Sawi*, 2, 5, 25, 28, 102, 135, 198
- Scott, 57, 75, 108, 135, 138, 141, 152, 153, 200
- Semi-hierarki*, 56, 60, 63
- Sero, 40, 47, 48, 49, 69, 70, 73
- Siri, 10, 74, 159, 161, 162, 165, 166, 169, 171, 173

- Social Change, 197, 198, 201, 202
Soppe layara, 41, 52, 70, 71
 Spermonde, 4, 40
 Stratifikasi sosial, 34
 Struktur sosial, 1, 2, 5, 6, 21, 22, 34, 58, 61, 79, 95, 124, 131, 135, 156, 160, 162, 169, 182
 Substantif, 134
- T**
- Tabung gas, 78, 81, 83, 84, 85, 98, 104, 108, 129
Tahlilan, 23
 Taka Bonerate, 4
Takka, 16
 Tata produksi, 2, 5, 9, 139, 148
 Taylor, 3, 9, 132, 137, 138, 202
 Teknologi tradisional, 5, 9, 39, 81, 82, 142
 Teluk Bone, 14, 15, 18, 46, 70, 81, 84, 99, 105, 111, 123
 Tengkulak, 5, 43
 Teripang, 31, 40, 49, 78, 81, 82, 83, 84, 95, 97, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 114, 115, 126, 129, 143, 162, 163, 197
 Tindakan sosial, 57, 134, 158, 159
 Transformasi, 7, 8, 32, 63, 70, 78, 119, 124, 135, 140, 142, 147, 152, 160, 166, 169, 185, 199, 200
 Triangulasi, 11
Tu''pabiring, 21
- Turona*, 46, 83
- U**
- Ulambi*, 40, 52, 66, 69, 73, 85, 104, 129, 143
 Unsur lokal, 9, 11, 132, 137, 138, 151, 155, 156, 167
 Upah, 64, 88, 94, 101, 117, 118, 119, 180, 181, 185
Upper class, 108, 146
Upward mobility, 107, 144
- V**
- Value oriented rationality*, 57, 87, 140
 Vietnam, 21, 197
 VOC, 177
- W**
- Wanita, 18, 36, 50, 196
 Weber, 55, 58, 79, 87, 108, 137, 138, 140, 167, 202
Wettu bare, 18, 46
Wettu timo, 18, 46
Wija, 24
 Wright, 8, 101, 202
 Wuthnow, 202
- Y**
- Yandong, 52
 Yanmar, 52
 Yin, 202

Z

Zaman, 33, 88, 184, 192, 193

Zanden, 34, 202

Biodata Penulis



Andi Adri Arief, Sosiolog Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil Universitas Hasanuddin, Lulusan Universitas Hasanuddin, Makassar. Dilahirkan di Bone, Sulawesi Selatan. Namanya dikenal luas oleh berbagai kalangan sebagai sosiolog maritim, pendidik, peneliti, penulis, pembicara seminar, konsultan riset dan pemberdayaan masyarakat. Dosen tetap Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas, Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan.

Pengajar mata kuliah Sosiologi Masyarakat Pesisir dan Kepulauan; Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perikanan; Antropologi Perikanan dan Kelautan; Wawasan Sosial Budaya Maritim; Kelembagaan Perikanan; Ekonomi Wisata Bahari; Penyuluhan Perikanan; Koperasi Perikanan; serta Pengelolaan Sumber Daya Perairan Berbasis Masyarakat. Selain itu, ia aktif terlibat sebagai anggota IMFISEREN (Indonesian Marine and Fisheries Socio Economic Research Networks) dan Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI).

Bidang perhatian akademiknya tertuju pada isu-isu tentang masyarakat pesisir dan pulau kecil, kemiskinan nelayan, konflik nelayan, kearifan lokal, perubahan sosial, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, konservasi SDP serta pengelolaan sumber daya perairan berbasis masyarakat. Dalam pergulatannya yang intens dengan isu-isu masyarakat pesisir dan pulau kecil, ia telah menerbitkan dua buku referensi akademik, yaitu *Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait di Kabupaten Selayar* (LIPI dan COREMAP-CTI, 2015); *Data Dasar Aspek*

Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait di Lokasi Coremap-CTI Kabupaten Buton Selatan (LIPI dan COREMAP-CTI, 2016). Berbagai tulisan ilmiahnya juga telah diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terindeks/bereputasi, di antaranya “Jaringan Sosial komunitas nelayan di Kabupaten Takalar” (*Buletin Penelitian Seri: Sosial Budaya dan Humaniora*, 2008); “Studi Mengenai Pengetahuan Lokal Nelayan Pattorani di Sulawesi Selatan” (*Journal Of Forest And Society Journal Of Forest And Society*, 2008); “Kajian Pola Hubungan Kerja dan Distribusi Pendapatan Pada Industri Perahu Pinisi di Sulawesi Selatan” (Ponggawa, *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan & Kelautan*, 2009); “Pengaruh Modal Sosial Terhadap Kinerja Kelompok Usaha Perikanan Tangkap di Kabupaten Sinjai” (*Jurnal Ipteks Pemanfaatan Sumber daya Perikanan*, 2015); “Identification and Analysis of Social Capitalin Flying Fish Fishermen Group for Coastal Community Development in Takalar Regency” (*Journal of Fisheries International*, 2015); “Effect of Fuel Price Hike on Small Fisherman Poverty Levels in Southern Sulawesi” (*Journal: Sci. Int. Lahore*, 2017); “Social study of cantrang (Danish trawl) Fisheries post Moratorium at Makassar Straits and Bone Gulf, South Sulawesi Province, Indonesia” (*Journal AACL Bioflux*, 2017); “Sustainable Fisheries Resource Management Based on Local Knowledge of Pole and Line Fishers” (*Case Study, Murante Villages, Luwu Regency, South Sulawesi*), “Indonesia” (*Journal Ecology, Environment and Conservation*, 2018); “Study Of Social Aspect In Marine Protect Area Liukang Tangaya District, South Sulawesi, Indonesia” (*Journal Bioscience Research*, 2019); “Fishermen Conflict and the Resolution for Using Fisheries Resources Utilization at Selayar Islands, South Sulawesi” (*Economic and Social of Fisheries and Marine Journal*, 2020); “Kepercayaan dan Pamali Nelayan Pulau Kambuno di Sulawesi Selatan” (*Jurnal SATWIKA: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 2021).

Sebagai konsultan riset, ia sering kali terlibat sebagai tenaga ahli di berbagai proyek-proyek pemerintah dan swasta, di antaranya: Studi Penyusunan Analisis Data/Informasi Ekosistem Terumbu Karang di Kota Makassar, 2012; Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui

Pengembangan Mata Pencarian Alternatif di Kabupaten Pinrang, 2013; Studi Kelayakan Revitalisasi Tanjung Benoa Provinsi Bali dari Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya (PT. Tirta Wahana Bali Internasional), 2013; Evaluasi Permasalahan dan Rumusan Kebijakan Perdagangan Perbatasan di Kota Tarakan, 2014; *Project Preparation Grant for COREMAP-CTI* (World Bank, KKP), 2013; Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Bone (CV. Meuthia Multi Konsultan), 2014; Tindak Lanjut Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Sulawesi Barat, 2015; *Review Masterplan Pengembangan PPI Lonrae Di Kabupaten Bone*, 2016; Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kalimantan Utara, 2017; Studi Kelayakan Kawasan Industri Perikanan Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, 2017; Kajian Aspek Sosial Ekonomi pada Rencana Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan di Kecamatan Liukang Tanngaya Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan (BPSPL Makassar), 2018; Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Utara, 2018; Penyusunan Kerjasama Antar Daerah (BAPPEDA Kab. Pangkep), 2019; Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Zonasi (RPZ) Kawasan Konservasi Taman Pesisir Tanjung Cantik-Sinelak di Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, 2020. Alamat Kontak Personal, *e-mail*: andi_adriunhas@yahoo.com. HP/WA: 081340851028.